

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan



SEJARAH DAERAH SUMATERA SELATAN

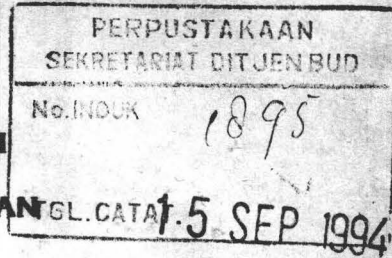


816

J

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BAGIAN PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
PROPINSI SUMATERA SELATAN

1991/1992



**SEJARAH DAERAH
SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh :

Tim Peneliti

Ketua : Drs. Ma'moen Abdullah
Anggota : 1. Drs. Bandiman
2. Drs. Djumiran
3. Dra. Ny. Wenny Ma'moen
4. Drs. Ping Harifin
5. Moh. Alimansyur. B.A.

EDITOR

Drs. Eddy Ramlan
Drs. Noor Indones

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BAGIAN PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
PROPINSI SUMATERA SELATAN
1991/1992**

RESEARCH REPORT

NO. 100

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

KATA SAMBUTAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SUMATERA SELATAN

Kita telah memaklumi, bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia sangat banyak corak dan ragamnya. Keaneka ragam-an itu merupakan satu kesatuan yang utuh dalam wadah kebudayaan Nasional, sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yang menjelma dalam nilai-nilai luhur Pancasila (Bhineka Tunggal Ika).

Untuk melestarikan warisan nilai-nilai budaya luhur bangsa kita, maka perlu adanya usaha pemeliharaan kemurnian budaya bangsa dan jangan sampai terbawa hanyut oleh arus kebudayaan asing.

Usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional melalui Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB), dengan cara melakukan penelitian dan pencetakan naskah hasil penelitian kebudayaan daerah, merupakan langkah yang tepat dalam rangka menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia.

Saya menyambut dengan gembira dan bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan kepada Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Selatan, dalam tahun anggaran 1991/1992 untuk melakukan pencetakan naskah hasil penelitian dari daerah Sumatera Selatan, yaitu :

1. Sejarah Daerah Sumatera Selatan (hasil penelitian tahun 1977/1978);
2. Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera Selatan (hasil penelitian tahun 1984/1985);
3. Dampak sosial Budaya Akibat Menyempitnya Lahan Pertanian Desa Sribandung Propinsi Sumatera Selatan (hasil penelitian tahun 1986/1987).

Melalui penerbitan naskah hasil penelitian kebudayaan seperti ini, maka kekayaan budaya dan tradisi masyarakat

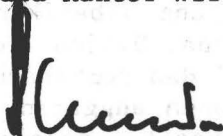
Sumatera Selatan akan ikut membentuk dan memperkaya khasanah budaya nusantara. Oleh sebab itu upaya tersebut perlu terus dikembangkan, karena penyebarluasan hasil penerbitan ini diharapkan akan menambah penghayatan yang mendalam terhadap nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang diberbagai suku bangsa indonesia, sehingga akan mempertebal kepribadian bangsa demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Naskah ini merupakan suatu langkah awal dan masih dalam tarap pencatatan, yang mungkin perlu disempurnakan pada waktu yang akan datang. Namun demikian saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini akan dapat memberikan sumbangan yang berarti sebagai dasar penelitian lebih lanjut dan untuk melengkapi kepustakaan bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian kegiatan ini.

Palembang, 5 November 1991

Kepala Kantor Wilayah,



Drs. S. WELLI SOETANTO
NIP 130161983

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian **Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya**, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

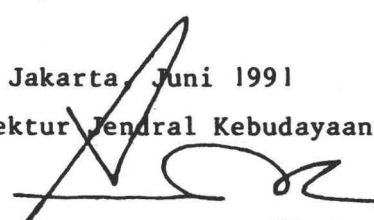
Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Juni 1991

Direktur Jendral Kebudayaan


Drs. GBPH Poeger

NIP. 130 204 562

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN KANWIL DEPDIKBUD SUM-SEL	i
KATA SAMBUTAN DIRJEND DEPDIKBUD	iii
DAFTAR ISI	iv
1. PENDAHULUAN	1
2. PRA SEJARAH	3
2.1. Asal Usul Penghuni yang Pertama	3
2.2. Penyelenggaraan Hidup	5
2.3. Organisasi Masyarakat	11
2.4. Kehidupan Seni Budaya	13
2.5. Alam Pikiran dan Kepercayaan	14
3. ZAMAN KUNA (<u>+</u> I - 1500 M)	16
3.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan	16
3.2. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	46
3.3. Kehidupan Seni Budaya	51
3.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan	54
3.5. Hubungan Keluar	55
4. ZAMAN BARU (<u>+</u> 1500 - 1800 M)	59
4.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan	59
4.2. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	87
4.3. Kehidupan Seni Budaya	98
4.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan	104
4.5. Hubungan Keluar	110
5. ABAD KE 19 (<u>+</u> 1800 - 1900)	113
5.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan	113
5.2. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	122
5.3. Kehidupan Seni Budaya	126
5.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan	128
5.5. Hubungan dengan Luar	130
6. ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL (<u>+</u> 1900 - 1942)	136
6.1. Keadaan Pemerintahan	136
6.2. Kaum Pergerakan di Daerah	139

6.3. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	142
6.4. Kehidupan Seni Budaya	147
6.5. Alam Pikiran dan Kepercayaan	149
6.6. Hubungan Keluar	151
7. ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 - 1945)	153
7.1. Keadaan Pemerintahan	153
7.2. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	158
7.3. Kehidupan Seni Budaya	160
7.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan	162
7.5. Hubungan dengan Dunia Luar	164
8. ZAMAN KEMERDEKAAN (1945 - 1975)	166
8.1. Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan	166
8.2. Penyelenggaraan Hidup	182
8.3. Kehidupan Pendidikan dan Seni Budaya	184
8.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan	191
8.5. Hubungan Keluar	193
CATATAN	196

-----\$\$\$\$\$-----

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penelitian :

Dalam rangka penyempurnaan buku standar sejarah Nasional Indonesia yang terbagi atas 6 jilid dan disusun oleh bangsa Indonesia sendiri dengan interpretasi Indonesia, maka data-data sejarah daerah Sumatera Selatan perlu diadakan penelitian kembali, karena dalam kitab standar tersebut masih banyak kekurangan-kekurangannya khusus mengenai sejarah daerah ini. Dengan melakukan penggalian/pencarian sumber-sumber sejarah di daerah ini, kita akan dapat mengetahui seluk beluk prikehidupan nenek moyang kita di zaman silam, dan dapat dipergunakan dalam berbagai kepentingan, terutama untuk kepentingan pemerintah pusat dalam masa pembangunan sekarang.

1.2. Masaalah :

Masaalah-masaalah yang berhubungan dengan penelitian/pengumpulan data mengenai sejarah di daerah ini yang merupakan daerah yang potensi besar di dalam bidang kepurbakalaan pada khususnya dan sejarah pada umumnya.

Berdasarkan hasil laporan-laporan dari penduduk setempat, data-data yang sudah dibukukan secara ilmiah dan lain-lain, maka lebih lanjut dapat diketahui bahwa daerah Su-

matera Selatan sebagai wilayah yang kaya akan peninggalan seperti tersebut di atas, tentunya daerah ini kaya akan peninggalan warisan budaya nasional.

1.3. Ruang Lingkup :

Titik berat penelitian/pengumpulan data di daerah ini, hanya meliputi 8 daerah Kabupaten (Musi Rawas, Lahat, Lematang Ilir Ogan Tengah, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Bangka, Belitung) dan dua daerah Kotamadya (Palembang dan Pangkalpinang) yang dikenal sekarang sebagai daerah Propinsi Sumatera Selatan. Tetapi bagaimana pun juga kaitan sejarahnya tidak mungkin terlepas dari hubungan daerah-daerah sekitarnya. Karena itu tak dapat dipisahkan secara historis sejak zaman purba sampai kepada zaman revolusi fisik.

1.4. Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Penelitian :

Metode penelitian yang digunakan sebagai landasan kegiatan pelaksanaan penelitian untuk mendapatkan data-data sejarah, adalah metode deskriptif komparatif. Suatu cara yang lazim digunakan, seperti mengadakan observasi di daerah-daerah, mengadakan perekaman dari informan-informan setempat, wawancara, pencatatan dan mengadakan pengecekan terhadap data-data yang telah terkumpul. Sedangkan metode literatur, hanyalah sebagai pelengkap dari landasan kegiatan pelaksanaan penelitian tersebut.

Perlu kiranya diketahui, bahwa tim-pengumpul data pada Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (aspek Sejarah Daerah) terdiri atas :

Drs.Ma'moen Abdullah; Drs.Bandiman; Drs.Djumiran; Dra.Ny. Wenny Ma'moen; Drs.Ping Harifin; Moh.Alimansyur, BA.

2. PRA - SEJARAH

2.1. Asal Usul Penghuni yang Pertama.

Apabila daerah ini mulai dihuni oleh manusia dan dari mana asalnya bukanlah merupakan pertanyaan yang mudah dijawab. Hingga sekarang baik sebagai hasil ekskavasi maupun sebagai temuan permukaan atau pun sebagai akibat erosi dan sebagainya, belumlah pernah didapat sisa-sisa tulang belulang manusia purba ini. Akan tetapi untuk mencari kapan daerah ini telah dihuni maka berdasarkan peralatan yang ditemukan dapatlah dipastikan sudah sejak masa lama sekali yaitu palaeolithicum.

Secara teritorial, Sumatera Selatan bukan saja seperti yang ada sekarang, melainkan lebih luas lagi termasuk daerah Jambi, Lampung dan Bengkulu bersatu di dalamnya. Dengan demikian maka peninggalan yang terdapat di daerah ini pun sebagai satu jalinan untuk mengetahui asal mula penghuni daerah ini. "Di Bengkulu, di lembah sungai Mengerub, 52 mil sebelah Utara kota Bengkulu terdapat alat-alat palaelithicum ¹⁾

Di daerah Sumatera Selatan sendiri benda-benda palaeolithicum ini pun ditemukan pula.

"..... di desa Bungamas, kira-kira 20 km sebelah Barat Laut Lahat, telah diketemukan sebuah alat serpih yang terserak di Krakalan jalan kereta api di sebelah Selatan desa tersebut. Penemuan ini mendorong dilakukannya pencaharian yang lebih teliti di sekitar tempat itu, yang berhasil mengumpulkan sejumlah alat-alat "palaeolithicum" di dasar sungai Saling, salah satu cabang sungai Kikim dan di dasar sungai Kikim mungkin berasal dari Saling, karena diketemukan di tempat yang berbatasan dengan sungai Saling. Juga beberapa alat telah berhasil dikumpulkan di jalan-jalan desa di dekat sungai-sungai itu" ²;

Sampai berapa jauh jangkauan penyebaran palaeolithi-cum ini terbukti pula dengan didapatkannya alat-alat ini pada beberapa Daerah lainnya yang mulanya merupakan galian dari Sumatera Selatan ini. "Pada tahun 1954 Th. Verstappen menemukan alat "palaeolitik" di Kalianda. Tempat penemuan terletak di daerah penemuan Erdbrink di Kedaton, dekat Tanjung Karang" ³.

Sebagai cikal bakal pendukung kebudayaan palaeolitik secara pasti tentunya menghadapi banyak rintangan. Sekedar patokan dalam berbagai bentuk kemungkinan itu salah satu Ras telah menampilkan diri. "P dan F Sarasin sependapat bahwa pendukung palaeolithicum adalah orang-orang yang berbadan kecil dan berkulit hitam dan mereka ini termasuk Ras Wedda" ⁴.

Orang-orang Kubu dan Toale termasuk kedalam Ras Wedda, Suku Kubu hingga kini masih terdapat di Sumatera Selatan dengan sebutan Suku Anak Dalam atau Suku Terasing. Ras Wedda sebagai pendukung kebudayaan palaeolitik yang didukung oleh orang Kubu, tidaklah dapat dikatakan sebagai penghuni pertama Sumatera Selatan sebelum adanya penelitian serta pembuktian yang lebih jauh lagi. Sekiranya alat-alat palaeolitik Sumatera Selatan termasuk jenis yang cukup tua maka penghuni pertama telah ada pada bilangan tahun yang ribuan pula jumlahnya.

Sekedar gambaran bila alat-alat palaeolitik ini mulai berperan dalam kehidupan manusia, kiranya dapat dipahami jika "pada 700.000 tahun Homo Erectus di antaranya Meganthropus palaeojavanicus di Jawa dengan bentuk tengkorak dan isi

otak 580 - 700 cm³ telah mengenal alat-alat dari batu kasar dan mengenal api"⁵.

Namun demikian sepanjang pembuktian berupa fosil-fosil belum terdapat, sedangkan suku Anak Dalam yang diwakili oleh Kubu masih ada maka untuk sementara suku ini dapatlah dikatakan sebagai penghuni yang "pertama" bagi daerah ini.

2.2. Penyelenggaraan Hidup.

2.2.1. Pemenuhan Keperluan Hidup Primer.

Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan peralatan yang sangat erat hubungannya dengan kemajuan cara berpikir serta usaha menggunakan alat itu.

"Kalau kita layangkan pandangan sejenak ke sejarah perkembangan teknologi, maka terlihatlah bahwa pada masa-masa sejarah yang terakhir perkembangan itu mengalami percepatan yang luar biasa. Jaman kebudayaan batu tua (palaeolitik bawah, tengah, atas) misalnya, telah berlangsung sejak masa hidup Homo (*pathecanthropus*) Erectus, yaitu manusia Jawa dan manusia Peking, kira-kira 400.000 tahun yang lalu. Palaeolitik berganti dengan Neolitik (Jaman kebudayaan batu baru) kira-kira 9.000 tahun yang lalu. Selama waktu yang lama itu tidak banyak terjadi perubahan dalam cara hidup manusia. Manusia hidup dari berburu atau memetik saja dari alam, belum mengenal permukiman, membuat alat-alat dari batu yang belum diperhalus. Puncak kebudayaan palaeolitik terjadi di jaman manusia Cro-Magnon, 30.000 - 15.000 tahun yang lalu. Mereka sudah membuat pula alat-alat dari kayu dan tulang, hidup di gua-gua, menjahit pakaian dari kulit binatang dan mengenal kesenian. Di jaman neolitik mulailah revolusi besar dalam cara hidup manusia. Manusia mulai mengenai pertanian, mengetahui kehidupan bermukim, membangun rumah, mengawetkan makanan, memulai irigasi, mulai beternak hewan"⁶.

Cara pemenuhan kebutuhan seperti ini hingga sekarang masih dapat kita saksikan pada suku terasing di pedalaman Sumatera Selatan. Dengan demikian pola hidup penduduk tidak banyak berbeda dengan daerah lainnya.

"Tingkat kebudayaan mereka masih sangat terbelakang belum mempunyai alat pertanian, yang agak sempurna menurut cara di tempat ini, belum mengenal anyam-menganyam dan mereka hanya menggunakan tombak sebagai alat pembela diri dan alat pula buat menangkap binatang-binatang. Mereka belum hidup yang menetap dan menggunakan pondok tertentu, tetapi

masih berpindah-pindah untuk mencari daerah-daerah yang memberikan sumber-sumber makanan. Makanannya terdiri dari buah-buahan hutan, babi, rusa, kijang, ular, ikan dan ubi kayu" ⁷.

Untuk mendapatkan segala kebutuhan ini bukanlah merupakan hal yang sulit, oleh karena di daerah ini cukup banyak tersedia bermacam jenis tumbuhan dan hewan, apalagi di daerah pegunungan seperti daerah Pasemah dan sepanjang bukit barisan. Begitu pula ikan-ikan dari kesembilan batang hari serta anak-anaknya yang mengalir di setiap celah daerah ini. Di sekitar Danau Ranau yang merupakan daerah yang subur hingga kini masih didapatkan sisa - sisa candi di desa Jepara Banding Agung, begitu pula daerah Musi Ulu Rawas, Ogan dan Komering Ulu serta Ilir; sepanjang sungai Musi yang merupakan daerah persawahan, kesemuanya sangat memungkinkan untuk dapat dihuni pada taraf permulaan. Alam daerah ini cukup banyak menyediakan kebutuhan hidup, dengan demikian akan menarik sekali bagi para penghuni.

"Karena itu tempat-tempat yang menarik untuk dihuni pada waktu itu ialah yang cukup mengandung bahan-bahan makanan dan air, terutama yang sering dikunjungi atau dilalui binatang. Tempat-tempat semacam ini berupa padang-padang rumput dengan semak belukar dan hutan kecil yang terletak berdekatan dengan sungai atau danau; di sinilah binatang-binatang leluasa mencari makanan atau mengejar mangsa serta melepaskan dahaga. Di sekitar sini manusia membuat pangkalan yang cukup dilindungi dengan tedeng dahan-dahan dan daun-daun. Hewan yang berkeliaran di tempat-tempat tersebut dan menjadi buruan manusia Yang sangat mungkin memainkan peranan dalam perburuan adalah hal-hal yang tidak mungkin ditemukan kembali karena telah musnah, misalnya saja dari kayu atau tulang, tombak kayu yang ujungnya diperkeras melalui pembakaran dan jebakan-jebakan kayu. Cara lain ialah dengan membuat lobang-lobang jebakan atau menggiring hewan kearah jurang yang terjal. Perburuan dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil dan hasilnya dibagi bersama" ⁸.

Di Sumatera Selatan dikenal cara "bakarang" dalam menangkap ikan. Di samping itu cara yang tua juga dengan "tuba". Bakarang biasanya dilakukan di lubuk sungai, atau lebung-lebung (danau yang kecil yang pada musim hujan airnya bersatu dengan sungai) yang diperkirakan banyak ikannya. Dalam kelompok sepuluh sampai lima belas orang atau lebih, mereka menuju ke lubuk sungai atau lebung yang

dipilih, lalu mereka terjun ke dalam air. Dengan menggunakan dahan-dahan kayu yang cukup besar mereka memukul-mukul air sungai sehingga menjadi keruh bercampur lumpur. Ikan-ikan kemudian akan mabuk atau lemas, lalu dengan dahan-dahan yang sudah dianyam dipeganglah ujung pangkalnya oleh beberapa orang dan ditarik ke pinggir sungai sehingga ikan-ikan terdesak ke darat dan dipungut. Ada juga yang dapat ditangkap begitu saja dengan tangan. Hasil-hasilnya dibagi rata di antara para peserta, juga anggota yang tidak ikut mendapatkan pula berupa hadiah.

Ada juga dengan menggunakan "tuba" yaitu sejenis akar kulit kayu yang dapat memabukkan ikan. Kulit kayu mula-mula ditumbuh lalu dicampur dengan air untuk kemudian dituangkan ke sungai atau tempat yang dimaksudkan. Untuk itu sungai yang akan dituba di bendung di bagian hilirnya dalam jarak yang cukup, umpamanya dua puluh atau tiga puluh meter. Tidak lama setelah tuba dimasukkan ikan-ikan yang ada dalam ruang lingkup tadi akan mabuk dan mengam-bang di atas permukaan air sehingga dengan mudah dapat dipungut. Untuk menuba ini tidak banyak diperlukan orang, cukup dengan dua atau bertiga saja.

Dalam berburu, selain menggunakan tombak dan panah juga dikenal cara "pelubang" yaitu membuat lubang pada tanah yang sering dilalui binatang terutama ke tempat sumber air minum. Sesudah lubang digali lalu di atasnya ditutupi dengan dahan, ranting dan daun-daun yang sudah usang. Bagian-bagian tertentu ke arah lubang itu diberi "pepah" (batang-batang pohon serta dahan dan ranting sebagai pagar) agar binatang buruan hanya akan lewat di atas lubang yang telah tersedia. Dengan demikian binatang buruan akan terperosok kedalamnya. Dengan cara demikian, binatang buruan tak mungkin dapat lari.

Ada lagi cara yang disebut "repas" yang digunakan terutama untuk menangkap binatang buruan yang kecil-kecil seperti kancil, napuh dan burung-burung yang sering berjalan di tanah. Sepotong kayu yang elastis yang cukup besar berdiameter sekitar satu sentimeter, pada bagian ujungnya diberi tali dari kulit kayu yang kuat. Kemudian dilengkungkan sedemikian rupa sehingga apabila binatang buruan melintas di atas repas akan terjerat kakinya.

Gerobeng juga telah digunakan yaitu sejenis pagar dari kayu yang bertutup dan dijalin dengan rotan atau kulit kayu dengan pintu yang dapat menjebak mangsanya jika binatang buruan masuk kedalamnya. Di dalamnya diletakkan umpan yang biasanya bangkai binatang kalau yang akan ditangkap binatang buas seperti harimau. Banyak cara yang digunakan dalam berburu ini. Akan tetapi pada prinsipnya kegunaannya hanyalah untuk mencari makan untuk menyelamatkan diri dari gangguan binatang buas.

Usaha berladang dan bercocok tanam telah dimulai dalam tarap permulaan dalam bentuk masih sangat sederhana. Sebagian besar dari usaha mendapatkan bahan keperluan ini hanyalah mengumpulkan hasil hutan saja. Untuk mendapatkan bahan makanan selanjutnya telah dirintis usaha mengusahakan sendiri walaupun dalam tarap yang masih sederhana sekali. Hal ini tidak banyak berbeda dengan cara yang telah ditempuh oleh manusia pra sejarah di Nusantara ini pada umumnya karena mereka bermula dari Ras yang bersamaan.

"Setelah cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan dilalui maka manusia menginjak satu masa kehidupan yang disebut masa bercocok tanam. Masa ini amat penting dalam sejarah perkembangan masyarakat dan peradaban, karena pada masa ini beberapa penemuan baru berupa penguasaan sumber-sumber alam bertambah cepat. Berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan hewan mulai dipelihara dan dijinakkan. Cara untuk memanfaatkan hutan belukar dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan belukar mulai dikembangkan, sehingga karenanya terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil-hasil pertanian meskipun sifatnya masih sederhana".

Hutan-hutan yang tersebar luas di Sumatera Selatan mulai dari daerah pegunungan yang subur hingga ke daerah dataran rendah yang kini telah menjadi padang alang-alang tentunya telah sering digunakan untuk berladang dalam bentuk yang sederhana. Tanah-tanah yang subur itu setelah beberapa kali dipergunakan tempat berladang dalam jangka waktu tertentu, lalu ditinggalkan untuk selanjutnya menggarap hutan-hutan yang subur lainnya. Hal ini sangat beralasan jika dihubungkan dengan banyaknya padang alang-alang seperti yang dikemukakan di atas. Padang alang-alang ini tidak hanya terdapat di daerah dataran rendah

seperti dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Sebagian Lematang Ilir Ogan Tengah, malahan sampai di kaki-kaki gunung dalam Kabupaten Lahat pada jarak beberapa kilometer saja dari gunung Dempo.

2.2.2. Perlindungan Terhadap Alam.

Dalam menentukan tempat permukiman pada mulanya mereka menggunakan apa yang tersedia dari alam saja. Tempat-tempat yang aman terutama dari serangan binatang buas seperti di dalam gua-gua di lereng bukit-bukit, gunung-gunung dan pantai-pantai merupakan sasaran utama. Begitu pula pohon-pohon digunakan juga sebagai tempat tinggal. "Gua-gua telah menarik manusia untuk tinggal di dalamnya. Tinggal menetap ini mempengaruhi cara hidup manusia kala Pos Plestosin" 10). Pada Suku Anak Dalam "Kubu" yang masih termasuk asli, selain dari hidup di pohon yang diberi beratap, juga ada yang membuat pondok yang tinggi-tinggi. Pondok ini didirikan beberapa buah bersama dengan yang lainnya, jadi merupakan sebuah perdukuhan. Untuk naik ke-pondok-pondok ini digunakan sebatang kayu yang ditarah (sibagai trap) ataupun kayu yang mempunyai cabang-cabang yang dapat dipergunakan sebagai anak tangga. Pondok-pondok seperti ini hingga kini masih dipergunakan juga oleh masyarakat terasing.

Peralatan yang dipergunakan masih sangat sederhana terbatas pada alat-alat dari batu dan kayu. "Alat-alat serpih bilah merupakan jenis alat utama di samping alat-alat yang dibuat dari kayu, tulang dan kulit kerang." 12. Dengan peralatan yang sederhana ini kehidupan manusia pra sejarah Sumatera Selatan berkembang terus hingga abad-abad kemudian. Peralatan batu yang sederhana belumlah banyak ditemukan, akan tetapi alat-alat Mesolitikum dan Neolithikum cukup banyak terdapat. Bahkan bengkel "neolitik" di Sumatera Selatan ditemukan di daerah Bungamas Kabupaten Lahat, yang ditemukan oleh penduduk baik ketika mengerjakan tanah ataupun sewaktu menggali sumur, membuat pondasi bangunan dan sebagainya. Di sebelah Utara Danau Ranau dan di daerah Pasemah Kabupaten Lahat pernah juga ditemukan jenis kapak genggam. Selain dari peralatan

batu dan kayu ditemukan pula keranjang-keranjang dari akar ataupun rotan yang masih sangat sederhana. Alat-alat ini terutama dipergunakan untuk tempat barang makanan, sayur mayur yang dikumpulkan dari hutan. Untuk mengambil air digunakan kulit-kulit kayu atau bambu di daerah pedalaman, sedangkan di daerah pantai digunakan kulit loka ataupun kerang. Kesemuanya ini merupakan alat yang digunakan untuk mempertahankan diri terhadap alam demi kelangsungan hidupnya.

2.2.3. Perpindahan.

Secara umum perpindahan merupakan cara untuk mempercepat penyebaran manusia pra sejarah walaupun dengan berbagai motif; salah satu di antaranya ialah karena faktor alam seperti letusan gunung, kegersangan tanah, habisnya persediaan makanan yang mudah didapat dari hutan, bahaya banjir dan wabah penyakit yang banyak menimbulkan kematian. Bertambahnya anggota kelompok sehingga sulit untuk memperoleh keperluan hidup mengakibatkan terjadinya perpindahan. Kemungkinan perpindahan sebagai akibat timbulnya persengketaan di dalam kelompok beralasan pula dan kalau demikian maka tentulah mereka akan mengambil tempat yang berjauhan, dan dengan demikian daerah yang dihuni akan bertambah luas. Faktor kematian sangat berperanan pula dan dalam hal ini masih terlihat kebiasaan pada Suku Anak Dalam, jika terjadi kematian maka mereka menganggap daerah itu "sial" pembawa malapetaka. Oleh karena itulah mereka pindah ke tempat yang baru. Kematian seorang "ketua" kelompok lebih kuat lagi mendorong mereka untuk segera meninggalkan tempat permukimannya.

Di daerah sepanjang sungai, perpindahan ini dilakukan dengan menggunakan perahu-perahu, rakit-rakit dari kayu atau bambu dan menghilir ke muara sungai atau dapat pula sebaliknya. Untuk daerah pedalaman yang berbukit-bukit mereka cukup dengan berjalan kaki pindah dari satu lembah ke lembah yang lain. Perpindahan seperti pernah terjadi umpamanya dari lembah Dempo ke daerah Rejang di bukit Barisan dan dari sekitar danau Ranau ke Selatan ke daerah Lampung Utara sekarang. Kemahiran dalam membuat perahu memungkinkan sekali terjadinya perpindahan

ke pulau yang lain apalagi mengingat cukup banyaknya pulau-pulau di pantai timur Sumatera Selatan yang baik untuk dihuni. Berbagai type perahu-perahu ini dalam bentuk yang cukup "tua" akan dapat kita lihat jika kita menyelusuri "Batang Hari Sembilan".

2.3. Organisasi Masyarakat.

2.3.1. Pengaturan Masyarakat.

Dalam mengatur masyarakatnya manusia pra sejarah sesuai dengan nalurinya, berhubungan dengan kelanjutan hidup baik secara individu mau pun kelompok.

"Tiap-tiap masyarakat manusia sepintas lalu kelihatannya menjadi bersatu karena kepentingan bersama dari pada individunya, dan bercerak berai karena kepentingan-kepentingan perseorangan dan kepentingan-kepentingan golongan tampil ke muka. apakah yang sebenarnya menjadi daya pengatur kelakuan umum atau tingkah laku manusia dalam masyarakat " 12.

Kehidupan mereka sangat tergantung pada keadaan alam yang menyediakan kebutuhan hidupnya. Sesuai dengan cara hidup yang hanya mengambil, atau mengumpulkan apa-apa saja yang terdapat di sekelilingnya seperti buah-buahan hutan dan sayur-sayuran maka untuk tugas ini dibebankan kepada kaum wanita dan anak-anak. Untuk mencari binatang buruan, menangkap ikan di laut, di sungai, di danau, adalah pekerjaan-pekerjaan berat yang menjadi tugas kaum lelaki.

"Kelompok berburu tersusun dari keluarga kecil di mana yang laki-laki melakukan perburuan dan yang perempuan mengumpulkan makanan (tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil) yang tidak memerlukan pengeluaran tenaga terlalu besar. Di samping itu perempuan mengurus anak-anak. Peranan perempuan penting sekali dalam memilih (seleksi) tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan dan membimbing anak-anak dalam meramu" 13.

Berpangkal tolak kepada kepentingan untuk hidup inilah secara evolusi terjelmanya pengaturan masyarakat dari bentuk yang sangat primitif hingga modern. Makin kompleksnya kebutuhan hidup, maka secara alamiah akan terjelma pengaturan di dalam masyarakat itu. Pengaturan masyarakat

yang terkecil berupa rumah tangga belumlah begitu jelas, karena dalam hidup berkelompok mereka masih mengerjakan secara bersama atau lebih dekat sebagai hidup "komunal". Hal yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana sekiranya aturan yang telah mereka tetapkan itu pada suatu ketika terjadi pelanggaran oleh anggota mereka ?. Untuk sekedar sebagai perbandingan maka kita akan melihat peristiwa seperti itu pada suku Anak Dalam di Sumatera Selatan, seorang pelanggar aturan itu disingkirkan secara kekerasan. Si pelanggar dapat dibunuh atau lebih ringan sedikit diusir dari kelompoknya. Pada kelompok yang baru, sekiranya ia dapat diterima ia akan berada dalam kedudukan sebagai "budak" kecuali jika kemudian ia menunjukkan hal-hal yang menonjol baik kekuatan fisik atau magis.

2.3.2. Kepemimpinan.

Dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya peranan pimpinan sangat menentukan. Siapa yang dapat menjadi pemimpin, sebagai masyarakat yang masih sederhana adalah "Primus Inter Pares" yaitu orang kuat yang jago berkelahi, orang yang tak ada tandingannya di dalam kelompoknya, yang punya kemampuan sihir dan lain-lain sehingga secara keseluruhan dapat memberikan rasa ketenteraman kepada anggota kelompok itu. Apabila seseorang telah dapat menempatkan dirinya sebagai pemimpin, maka jabatan ini kelak akan dapat diwariskannya. Keadaan seperti itu hanyalah merupakan analogi saja, karena kelompok itu sendiri telah terbiasa untuk mematuhi apa-apa yang telah digariskan. Kini hanya charisma pemimpin itu saja yang telah melekat di hati kelompoknya. Perubahan dapat terjadi apabila adanya bahaya yang besar seperti letusan gunung yang berakibat timbulnya malapetaka, berarti kekuatan pemimpin seolah-olah telah sirna. Dengan demikian maka akan timbul lagi orang kuat yang baru yang dapat memberikan rasa tenteram kepada anggota kelompok. Hidup matinya kelompok sangat ditentukan oleh pemimpin; dialah yang mengatur dan menentukan waktu-waktu untuk berburu, mencari makanan, tempat-tempat yang akan didiami ataupun berperang dengan kelompok lain. Dialah pula yang memimpin upacara dalam berhubungan dengan roh-roh serta kekuatan-kekuatan gaib lainnya.

2.4. Kehidupan Seni Budaya

2.4.1. Pendidikan

Pendidikan hanyalah merupakan pewarisan kebiasaan yang ada di dalam kelompok saja, yang dikerjakan atau dibiasakan pula terhadap anak-anak secara langsung. Sejak kecil anak-anak sudah diajak untuk mengikuti pekerjaan orang dewasa seperti memilih sayur-sayuran, buah-buahan yang khusus dikerjakan oleh anak perempuan. Berburu, menangkap ikan, di danau atau di laut diikutsertakan anak lelaki. Dalam setiap kegiatan anak-anak diikutsertakan seperti membuat senjata, perahu, dan sebagainya. Anak-anak wanita diajar menganyam keranjang-keranjang, tikar dari daun, juga pembuatan atap-atap untuk rumah/pondok. Jadi semua pendidikan diberikan langsung. Beberapa isyarat pun merupakan hasil pendidikan langsung ini pula; bunyi kentongan dari kayu, bambu, lokan dan sebagainya yang masing-masing mengandung makna tersendiri lambat laun dimengerti oleh anak-anak. Mereka akan memahami apa arti dari setiap isyarat itu, seperti kedatangan musuh serta jenis-jenis kejadian.

2.4.2. Kesenian.

Dalam bidang seni rupa terdapat beberapa jenis kegiatan seperti pemahat patung-patung batu dan yang menonjol ialah megalitik yang banyak bersebar di Sumatera Selatan terutama di Pasemah dan sekitarnya. Benda-benda Megalitik ini mulai dari yang sangat sederhana sampai ke pada yang cukup kompleks. Patung "gajah" yang kini terletak di Museum Rumah Bari Palembang mempunyai ukiran yang cukup unik seperti terdapat ukiran orang yang diperlengkapi dengan topi (sejenis bentuk topi baja) menggendong "ransel" dan kaki seolah-olah bersepatu dilengkapi pula dengan "putis". Sebuah "nisan" batu di Lubuk Sepang Kabupaten Lahat bermotifkan tumbuh-tumbuhan, begitu juga yang terdapat di Karangdalem. Masih dalam Kabupaten Lahat di Desa Tegur Wangi di tepi sungai Selayas, pada sebuah batu yang besar terdapat lukisan-lukisan dengan berbagai motif seperti bunga, manusia dan garis-garis geometris.

Patung-patung manusia di Tegur Wangi sudah mempunyai pahatan yang cukup indah, begitu juga "rumah batu" yang terdapat dibelakang patung-patung tersebut sudah merupakan balok-balok batu yang dikerjakan dengan baik.

Seni bangunan di daerah pegunungan berbentuk prisma terpancung yang terbalik dengan menggunakan tiang-tiang yang tidak ditanamkan, hanya diletakkan di atas batu sebagai imbalan terhadap goncangan gempa. Bangunan dari kayu ini pada dinding mukanya diberi ukuran bermotif tumbuh-tumbuhan dan hewan dengan jendela yang kecil dalam jumlah yang sedikit, dengan maksud agar udara di dalam rumah cukup panas.

Seni tari umumnya dalam bentuk masal yang berupa perwujudan terhadap kekuatan alam. Di samping itu ada juga seni tari sebagai hiburan setelah sesuatu usaha berhasil, umpamanya perburuan yang sukses. Dalam seni suara terdapat guritan jelihi-man, andai-andai panjang yaitu suatu gaya bercerita yang dilagukan. Ceritanya meliputi kekuasaan dewa-desa, manusia supernatural dan lain-lain yang disajikan pada waktu terjadi kematian untuk menghibur keluarga yang mendapat musibah, yang berlangsung sepanjang malam.

Alat bunyi-bunyian berupa seruling, gendang, getuk baik dari kayu atau pun bambu. Alat-alat ini dipakai dalam menari atau pun berdendang sendiri. Semua peralatan ini kebanyakan berukir dengan motif geometris yang sangat sederhana.

2.5. Alam Pikiran dan Kepercayaan.

2.5.1. Sistem Kepercayaan

Sebagai pemeluk animisme maka apa yang disebut "rumah batu" yang banyak terdapat di pedalaman seperti di Tanjung Aro Gunung Megang, Tegur Wangi, adalah tempat penyimpanan mayat-mayat. Bahwa Roh itu akan selalu berada di sekeliling mayat dan masih memerlukan kebutuhan seperti masa hidupnya, kiranya dapat dimaklumi jika jasadnya tetap utuh. Karena itulah mayat ditempatkan dalam "rumah-rumah batu" agar tidak diganggu oleh binatang buas. Di rumah batu di Gunung Megang ketika dilakukan "penggalan"

oleh penduduk setempat pada masa pendudukan jepang ditemukan beberapa manik-manik yang berwarna warni. Akan tetapi sisa-sisa tulang belulang tidak ditemukan dan hal ini mungkin sekali tidak diperhatikan oleh para penggali.

Pohon yang besar, sungai yang lebar, gunung dan bukit, dianggap mempunyai penunggu (mahluk-mahluk halus) yang dapat mencelakakan seseorang apabila ia berbuat yang tidak baik. Puncak Dempo umapannya masih dianggap ada "penjaganya" dan selalu diberi saji-sajian oleh orang-orang tertentu, sebagai warisan masa pra sejarah ini.

2.5.2. Pandangan tentang Kosmos.

Bahwa di luar manusia masih ada mahluk halus yang dapat menguasai kehidupan manusia sehubungan dengan kepercayaan di atas hingga kini secara terselubung masih ada. Cerita tentang kesaktian dan kekuatan Sipahit Lidah yang dapat menjelmakan sesuatu menjadi batu masih terdapat. Tokoh Sipahit Lidah ini hingga sekarang masih dipergunakan untuk pendidikan agar orang tua selalu dihormati.

Beberapa upacara yang sehubungan dengan kepercayaan ini adalah selamatan setelah panen, menempati rumah yang baru didirikan, serta pemujaan roh orang meninggal. Pawang-pawang menentukan saat yang baik untuk berburu, bertani, dukun-dukun yang banyak kekuatan magisnya, disebut tokoh masyarakat.

3. ZAMAN KUNA (+ ABAT I - 1500 M)

3.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan (politik) :

3.1.1. Pertumbuhan Negara-negara

Pulau Sumatera yang dulu disebut Suvarnadwipa dalam kitab Mahayana, terletak membujur dari arah Barat-Laut ke Tenggara dan memotong garis khatulistiwa. Secara administratif pulau ini telah terbagi atas beberapa propinsi, dan salah satu di antara propinsi itu adalah propinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota Palembang, yang meliputi 8 kabupaten dan 2 Kotamadya. Luas daerahnya ±

dengan penduduknya berjumlah ± sehingga tiap-tiap hektar/km² di tempati oleh penduduk ± orang, suatu daerah yang masih jarang penduduknya jika dibandingkan dengan tempat lain seperti Jawa dan Bali.

Apabila hasil penyelidikan ilmiah yang pernah dilakukan oleh para ahli Geologi seperti R.W. Van Bemmelen dapat dipergunakan sebagai alat bantu tanpa melepaskan diri dari sumber-sumber sejarah daerah itu sendiri, maka sesungguhnya pulau Sumatera yang kita lihat sekarang tidak sama dengan bentuknya di zaman dulu, khusus mengenai daerah lokasi Sumatera bagian Selatan, yang lazim disebut daerah "Batanghari Sembilan" (sungai Klingi, sungai Bliti,

sungai Lakitan, sungai Rawas, sungai Rupit, sungai Batanghari Leko, sungai Lematang, sungai Ogan dan sungai Komerling). Proses alamiah yang berlangsung dari abad ke abad, sungai-sungai itu telah menghasilkan delta dan mengubah daerah pantai sebelah Timur, seperti yang telah terjadi di daerah Kalimantan Selatan dan pantai Utara pulau Jawa. Begitu pula ada kalanya pantai hancur karena gelombang laut, angin dan air bah seperti : pulau-pulau Riau Lingga, Bangka dan pantai barat Sumatera.

Berdasarkan historical geography dan nama-nama tempat yang menggambarkan daerah tersebut sebagai pangkalan di zaman dulu, maka menurut perkiraan penulis sebelum terjadi perubahan-perubahan alamiah, kemungkinan besar letak kota Sekayu, Kayuagung, dan Bukit Siguntang sekarang di pinggir Laut/pantai. Demikian pula bukit Bergota yang ada di kota Semarang sekarang, dulunya terletak di pinggir laut. Pada umumnya sifat-sifat sungai di daerah ini mempunyai perbedaan-perbedaan tinggi permukaan air pada sepanjang alirannya, curam-curam yang deras, banyak rintangan-rintangan batang kayu yang tak hanyut dan terbenam di pinggir-pinggir sungai, banjir setiap tahun dan pembentukan rawa-rawa sepanjang tebing sampai menuju ke muara sungai. Sungai Musi yang menjadi induk Batanghari Sembilan, di bawah sungai Muara Lematang sudah mulai terdapat pembentukan rawa-rawa, lubuk dan danau. Sedangkan di daerah dekat ke muara sungai itu, pada tiap kali pasang naik, permukaan tanah digenangi air dan di musim hujan hampir sebagian daerah tersebut terendam air dan penuh delta-delta. Oleh sebab itu muara Sungai Musi yang lebar itu sampai ke daerah pelabuhan Bombaru tak berapa dalamnya, sehingga kapal-kapal modern yang berbobot lebih dari kaki ukuran dalamnya, terpaksa berhati-hati untuk membuang sauh di sekitar Sungai Gerong-Plaju. Iklim di daerah ini dipengaruhi oleh angin musim, sehingga adanya musim kemarau dan musim penghujan, termasuk daerah tropis dengan suhu udara yang rata-rata tinggi dan curah hujan yang tinggi pula. 2

Di sepanjang pantai timur Sumatera bagian Selatan, hampir seluruhnya ditumbuhi kayu gelam dan pohon nipah yang disambung oleh hutan-hutan lebat ke daerah pedalaman

yang amat sukar dilalui oleh manusia. Karena letaknya di daerah tropis sebelah selatan garis Khatulistiwa, iklimnya lembab dan hujan yang turun banyak sekali, sedangkan hutan rimba tersebut sudah berhenti pada tinggi 1000 meter di daerah pegunungan, sebagai akibat pengawanan yang tebal dan dingin. Dahsatnya tantangan alam terhadap manusia Palembang dan daerah sekitarnya, perjuangan menguasai atau dikuasai alam, berjuang melawan hutan rimba dan rawa-rawa untuk persawahan atau perladangan, sebaliknya hutan rimba pulalah yang memberikan kebutuhan hidup seperti : bahan-bahan pakaian, alat-alat untuk perumahan, transportasi (perahu atau kapal), umbut-umbut, buah-buahan dan pucuk-pucukan untuk makanan dalam masa pancaroba, bahkan hasil hutanlah yang memberi dan menjadi sumber kekayaan serta menjadi alat penukar (barter) dengan barang-barang dari luar.

Yang dimaksudkan hasil hutan di daerah ini adalah : getah perca, damar, segala macam jenis rotan, barang anyaman, jelutung, binatang menjangan, rusa, gajah, harimau, babi hutan, beruang dan kayu tembesu untuk ramuan rumah dan jembatan. Danau-danau, lubuk dan sungai-sungainya menghasilkan ikan basah dan kering, sedangkan ladang-persawahan dan perkebunannya menghasilkan beras gunung, kelapa, kopi, lada dan sebagainya.

Akibat keadaan alam di daerah ini, proses pembentukan rawa-rawa di sepanjang tebing sampai ke muara sungai, lebatnya hutan rimba, sukarnya komunikasi antara daerah yang satu dengan yang lainnya, induk sungai Musi dengan anak Batanghari Sembilannya menjadi faktor terpenting bagi lalu-lintas perdagangan, penanaman kekuasaan, pemasukan kebudayaan dari luar oleh golongan emigran yang berasal dari pulau-pulau sekitarnya atau dari pedagang-pedagang asing. Letaknya yang strategis pada jalur pelayaran perdagangan Internasional via selat Malaka di zaman kuna³. menyebabkan daerah ini banyak sekali dipengaruhi pulau-pulau sekitarnya, baik dalam lapangan kebudayaan atau pun percampuran suku, teristimewa bagi penduduk yang mendiami daerah-daerah pantai. Perbedaan letak geografis itu pulalah, menyebabkan daerah-daerah kepulauan di Indonesia memperoleh perkembangan-perkembangan yang tidak sama.

Daerah yang terletak dekat urat nadi lalu lintas pelayaran perdagangan dunia seperti pantai Timur Sumatera bagian Selatan, terjadi kontak dengan kebudayaan asing, yang hampir selalu mengakibatkan terjadinya proses akulturasi di atas tubuh peradaban Indonesia, yang ternyata unsur-unsur asing itu merupakan sumber cipta dalam sejarah kebudayaan daerah ini dari abad ke abad.

Akhirnya dapat kita simpulkan, bahwa adanya faktor-faktor demografi, penduduk yang jarang di daerah yang amat luas, perjuangan yang berat melawan tantangan alam yang hebat, keadaan iklim yang lembab dan sebagainya, tidaklah menghalangi timbulnya suatu pusat kuasa politik, ekonomi dan kebudayaan yang diperkirakan mula-mula terletak di sepanjang Bukit Barisan, dan beberapa abad kemudian terpecah dalam beberapa suku⁴ mendiami anak Banghari Sembilan menjadi kerajaan-kerajaan sungai (river's states). Di antara beberapa kerajaan sungai itu baru dikenal dalam abad ke 7 Masehi⁵ seperti : Mo-Loyeu (Melayu), To-lang, P'o-hwang (Tulang bawang), Che-li Fo-che atau San Fo-ts'i (Sribuza menurut berita Arab).

Seperti yang telah dikatakan di atas, letak pulau Sumatera yang membujur dari barat laut ke tenggara dengan bukit barisannya, adalah kelanjutan gugusan gunung berapi yang berasal dari pergunungan Himalaya. Di sepanjang bukit barisan itu diperkirakan adanya penghuni yang mula-mula di daerah ini, karena berdasarkan hasil penelitian pra-sejarah akhir-akhir ini.⁶

Oleh karena belum begitu banyak peneliti dalam bidang arkeologi di daerah ini, maka sangat sukar bagi kita untuk mengambil suatu kesimpulan yang berdasarkan fakta sejarah. Walaupun kita menerima teori migrasi yang berdasarkan hasil penelitian pra-sejarah, yang menunjukkan adanya berbagai suku bangsa telah memasuki kepulauan Nusantara dari daratan Asia, namun tidak akan menutup kemungkinan-kemungkinan lain yang mengatakan, bahwa sejak zaman dahulu di daerah kepulauan kita ini telah berdiam tipe-tipe manusia yang tergolong tipe Wedda, Mongoloid tua dan Negrito. Ketika terjadi perpindahan suku bangsa dari daerah Hindia Belakang, di antara mereka itu ada yang menyebar di Indonesia bagian barat dan ada pula yang menyebar di Indonesia bagian Timur lewat kepulauan Filipina.

Mereka yang menyebar di bagian barat itu mendirikan kolonisasi-kolonisasi di sepanjang lereng bukit-barisan dan bercampur dengan penduduk pribumi, yang menurunkan Proto Melayu sebagai pendukung suatu peradaban yang terdapat di sekitar Gunung Koba, Gunung Dempo dan Gunung Seminung.

Berdasarkan cerita-cerita rakyat (folklore) di daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang menggambarkan kebesaran nenek-moyang di zaman dewa-dewa, memberikan suatu petunjuk kepada kita dalam mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai daerah sekitar Gunung Koba tersebut. Ada kemungkinan pada zaman dahulu, daerah sekitar itu pernah didiami oleh sekelompok manusia (Puak) yang hidup secara sederhana. Dengan alasan-alasan yang belum diketahui, mereka melakukan perpindahan dan kemudian melahirkan suku-suku Rejang, Beliti (Musi Rawas), suku Saling di daerah Tekbing Tinggi, Bengkulu Utara, Kerinci dan lain-lain.

Daerah Pasemah adalah daerah histori, suatu Daerah yang sangat menarik bagi ahli-ahli purbakala sepanjang masa, justru kalau daerah itu banyak meninggalkan sisa-sisa kebudayaan degalettik bahkan dianggap sebagai pusat yang paling tua dalam seni pahat di Indonesia. Sudah dapat kita pastikan, mereka yang tinggal di daerah gunung Dempo ini adalah pendukung kebudayaan batu besar yang dapat ditentukan tarikh relatifnya. Pada umumnya masyarakat yang sekarang mengaku dirinya orang Pasemah, yang lazim disebut "sanggar agung" atau "se-ghase", ketika mereka tersebar ke daerah-daerah sekitarnya telah melahirkan beberapa suku seperti : suku Gumai, Besemah, Kikim, Semendo, Enim, Lematang, Kisam, Ogan, Rebang Semendo di Lampung dan suku Serawai di Bengkulu Selatan.

Akhirnya di daerah sekitar gunung Seminung dan danau Ranau, yang termasuk daerah Kabupaten Komering Ulu (OKU), pernah juga menjadi tempat pemukiman Proto Melayu, yang biasanya disebut masyarakat "skala-berak". Rumpun skala-berak pada waktu yang belum dapat dipastikan perlu diadakan penyelidikan lebih lanjut, telah tersebar dengan adanya sendiri-sendiri menjadi : suku Komering Ulu/Iilir, suku Ranau, suku Abung, suku Peminggir, suku Pubian, suku Jelmo Doya, suku Kroi, dan suku-suku yang mendiami sebelah menyebelah sungai Tulang bawang yang termasuk propinsi Lampung.

Apabila ketiga rumpun masyarakat purba yang mendiami daerah sekitar **Gunung Kaba, Gunung Dempo dan Gunung Semunung** dapat dijadikan suatu pangkal bertolak menyusun sejarah sebagai kisah daerah ini, maka daerah Sumatera bagian Selatan termasuk daerah yang sangat penting berdasarkan catatan-catatan (berita) dari luar negeri. Tetapi suatu hal yang aneh, justru di daerah tersebut belum banyak diketahui sumber-sumber tertulis yang ada di daerah itu sendiri.

Setelah terjadi perubahan alamiah di daerah ini, maka mulailah mereka mencari tempat-tempat pemukiman yang baru di sebelah menyebelah sungai Batanghari Sembilan, di mana lingkungan alam sekitarnya turut membentuk tubuh dan watak manusianya di samping faktor-faktor biologis. Itulah sebabnya di daerah ini paling banyak terdapat suku-suku dengan dialeknya masing-masing, yang satu sama lain tidak kenal mengenal dan mengerti bahasanya.⁸

Keadaan alam dan iklim di daerah ini, seperti yang telah digambarkan di atas, menyebabkan sungailah satu-satunya alat terpenting bagi lalu-lintas perdagangan, penyebaran kekuasaan dan kebudayaan. Jalan darat hampir tak ada pada waktu itu, kecuali hubungan antar sungai dengan mempergunakan berbagai bentuk perahu/kapal sebagai alat penghubung. Sukarnya hubungan di daerah hulu sungai pada waktu itu, telah mempercepat proses isolasi alam hingga menatural isolasi batin di kalangan suku-suku tersebut.

Pada permulaan abad pertama Masehi atau sebelumnya, telah diperkirakan telah ada kerajaan-kerajaan sungai (river's states) di daerah ini yang telah melakukan pelayaran ke India⁹ dengan mempergunakan perahu-perahu cadik. Bahkan pelayaran itu tidak hanya ke India saja, tetapi juga mereka telah melakukan pelayaran yang lebih jauh sampai ke Madagaskar.¹⁰ Hubungan antara Sumatera dengan India yang telah berlangsung pada abad kedua atau pertama sebelum tarikh Masehi itu, telah mengikat kedua negari itu dalam lapangan kebudayaan dan perdagangan via selat Malaka. Seperti yang telah kita lihat di daerah ini, betapa banyak macam perahu bercadi, berkemudi samping yang ditutup dengan atap dalam ukuran yang cukup besar dipergunakan oleh masyarakat, yang sampai saat ini hampir

lenyap dan tidak dipergunakan lagi. Apabila kita membaca teori James Hornell dalam bukunya : "Watertransport, origins and early evolution" dan hasil penyelidikan Pierre Paris dalam "Journal Asiatique", maka tidak mengherankan pada waktu Iskandar the Great berkuasa di lembah sungai Sindu telah terdapat perahu-perahu Sumatera di sana, dan seorang duta yang bernama Rachias pernah berkunjung ke keraton kaisar Claudius, adalah berasal dari salah satu kerajaan sungai di daerah Sumatera Selatan. Kelihatan dalam abad ke-2 seb.Tarikh Masehi atau pertama seb.Masehi, adanya lalu lintas antara kedua negeri tersebut secara teratur.

Hubungan pelayaran perdagangan antara India dan Sumatera yang pada waktu itu kerajaan-kerajaan sungai terletak di hulu sungai Batanghari Sembilan dan sungai Mesuji (Lampung), sudah menjadi suatu hubungan yang tetap dan terpelihara sampai awal abad ke-11 sesudah Masehi. Seorang musyafir Cina yang bernama I-Tsing pada tahun 672 pernah tinggal di suatu kerajaan sungai (daerah Jambi), meneruskan perjalanannya ke India dengan mempergunakan kapal seorang raja Sumatera.¹¹ Kemudian dalam tahun 860 Masehi, raja Sriwijaya mendirikan sebuah asrama dekat bihara Nalanda, yang pada waktu itu merupakan pusat kegiatan ilmiah. Adanya kunjungan musafir-musafir alim dari Sumatera ke India, menunjukkan adanya hubungan kapal-laut selat Malaka yang teratur, dan hubungan kedua negeri itu sangat erat sampai kepada awal abad kesebelas, yang pada waktu itu seorang raja Sumatera menghadiahkan lagi sebuah desa Anaimangalam kepada bihara di Negapatnam.¹²

Jika ditinjau secara keseluruhan, tampaklah betapa penting daerah perairan antara Taiwan dengan India, dan tampak pula bahwa urat nadi Asia Tenggara itu ialah Selat Malaka dan Selat Sunda, yang dari abad ke abad menjadi daerah lalu lintas perdagangan dunia. Sebagai akibat ramainya lalu lintas melalui selat tersebut, telah memungkinkan timbulnya tempat-tempat persinggahan untuk mengambil persediaan bahan makanan dan air minum atau tempat-tempat penimbunan barang di daerah pantai timur Sumatera bagian Selatan, yang merupakan titik pertemuan antara pelayaran pantai dan sungai yang dibangun oleh

suku-suku Melayu dengan rumah-rumah bertiang tinggi dan rumah-rumah rakit yang terapung di sepanjang sungai. Dengan demikian mulailah daerah ini ikut serta di dalam kegiatan pelayaran perdagangan, apalagi setelah pedagang pedagang asing mengetahui daerah tersebut banyak memproduksi hasil hutan.

Oleh karena rute perdagangan dunia dari arah Barat dan dari Tiongkok via Selat Malaka, yang dari abad ke abad lalu lintas itu semakin ramai, sedangkan letak kerajaan-kerajaan sungai sudah jauh dari lalu lintas itu, maka mulailah pada akhir abad VII Masehi, salah seorang penguasa kerajaan sungai memindahkan pusat kuasa ke tempat yang baru. Pusat kuasa yang lama dan pernah memegang peranan penting sebelumnya, mungkin sekali terletak di daerah udik sungai Batanghari Sembilan (daerah Musi Rawas ?) suatu daerah yang tidak jauh dari udik Sungai Batanghari, ditemukan nama tempat (dusun) "Menang (a)" dipertemuan sungai Rawas !!

Di samping itu ada juga kemungkinan lain, yang mengirakan asal Dapunta Hyang dari daerah OKU, karena di sana terdapat sungai Menanga. Tetapi apabila kita memperhatikan bahasa yang dipakai dalam piagam-piagam yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja yang berkuasa di daerah ini dan sisa-sisa purbakala belum banyak digali di daerah tersebut, maka kemungkinan itu tak dapat dipertanggung jawabkan. Walaupun demikian, bukan hal yang tidak mungkin di sekitar daerah sungai Mesuji pulau Gerunggang danau Air Iem sungai Dabuk Pedamaran dan daerah Kayu Agung, sebagai basis angkatan laut pada zaman dulu.

Sebelum pusat kuasa yang baru dipindahkan ke Bukit Siguntang (Palembang), I-Tsing pernah mengunjungi San-fo-tse (Muara Tembesyi) dalam tahun 672 Masehi, dan dalam beberapa puluh tahun kemudian pusat kuasa itu berpindah ke Zabag yang terletak di kuala sungai Batanghari.¹³ Tetapi kemudian pedagang-pedagang asing tidak lagi mengunjungi tempat tersebut, karena letaknya sudah terlalu jauh dari arus lalu lintas perdagangan atau di tempat itu sendiri kurang aman. Dalam hal ini dapat kita kemukakan pendapat Mangaradja Onggang Parlindungan dalam kitab Tuanku Rao : (Lampiran XXVI).

"Pada tahun 99 H. (718 M.) Sri Maharadja Sirindrawarman radja Sri Widjaja/Djambi, masuk Islam ! Pada tahun 720 fihak Tiongkok/Tang Dinasty yang beragama Budha Mahayana mendatangkan dua orang ke Universitas San Fo Tsi di Sri Widjaja/Djambi (Vadjabodi dan Amogawadja) Agama Budha Hinayana dan Agama Islam dengan pedang dibasmi habis dikeradjaan Sri Widjaja/Djambi Ibu kota dari Sri Widjaja di tepi Sungai Batanghari habis dibumi hangus, dan didirikan baru di tepi sungai Musi menjadi Sri Widjaja Palembang 14

Seperti yang telah digambarkan di atas, betapa cepat perubahan alamiah di daerah ini, sehingga garis pantai dalam abad VII Masehi jauh berbeda dengan keadaannya sekarang, maka pusat-pusat kuasa yang lama tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai ibukota pelabuhan sungai. Oleh sebab itu sejak tahun 683 Masehi, pusat kuasa yang baru dipusatkan di daerah Bukit Siguntang dan dari bukit itu Dapunta Hyang telah mencurahkan tenaga perangnya untuk memperoleh titik tumpu kekuasaan pengontrol lalu lintas perdagangan via Selat Malaka dan Sunda.

Apa yang kita lihat dari suatu tradisi tentang munculnya kerajaan Sriwijaya yang pada akhirnya berpusat di sekitar kota Palembang, yang pada mulanya adalah pelarian keluarga raja dari suatu kerajaan hulu sungai Batanghari Sembilan ataukah sungai Batanghari (Jambi), dan dari fakta historis tentang menyebarnya pedagang-pedagang dari suatu pusat dagang yang telah mundur ke pusat yang baru, yang diperkirakan lebih menguntungkan, barangkali dapatlah di katakan bahwa kerajaan-kerajaan maritim di perairan Indonesia, haruslah dianggap sebagai berada dalam suatu kerangka dunia yang sama. Keleburan suatu pusat perdagangan pada dasarnya tidak mengganggu perdagangan itu sendiri bahkan memberikan stimulan bagi munculnya pusat-pusat baru, yang berarti munculnya penantang-penantang baru yang saling bersaing untuk menggantikan pusat yang telah jatuh.

Ditinjau dari segi politik dan kebudayaan, kejatuhan atau ditinggalkannya pusat dagang maritim sering diikuti oleh usaha penguasa untuk mencari lokasi baru, sambil mengingatkan rakyat dan pembesar-pembesar di bawah

taklukannya akan masih abadinya legitimasi yang dimilikinya. Maka tidaklah mengherankan suatu persamaan yang menonjol yang pernah dilakukan oleh Parameswara, waktu dia meninggalkan Palembang (berdasarkan kitab Sejarah Melayu¹⁵), dan pernah juga dilakukan oleh Sultan Malaka waktu ibu kotanya direbut oleh bangsa Portugis dalam tahun 1511. Kedua-duanya keluar dari istana dengan membawa semua regalia, berhenti pada tempat-tempat tertentu dan mendirikan istana seperti Dapunta Hyang berhenti di Bukit Siguntang membuat dusun Sriwijaya, sebagai simbol legitimasi dan pusat kosmos. Dari tempat itu pulalah dia mengingatkan pengikut-pengikutnya tentang kewajiban mereka terhadapnya, seperti yang kita lihat pada piagam Kota Kapur, Karangbrahi dan Palas Pasemah (Lampung Selatan). Dengan jalan demikian kemantapan baru dalam kosmos tercipta dan kontinuitas dinasti kerajaan pun diperabadikan.

3.1.2. Perkembangan :

Apabila kita perhatikan isi piagam Kedukan Bukit, yang merupakan suatu momentum historis, maka terdapatlah tiga peristiwa penting dalam satu tahun;

- a. pada tanggal 11 (Cuklapaksa) bulan Waicaka (bulan ke-10 C). Dapunta Hyang naik perahu akan berlepas nazar.
- b. pada tanggal 7 (Cuklapaksa) bulan Djyesta (bulan ke-11 C). rombongan berangkat dari suatu muara pertemuan sungai dengan membawa tentara melalui sungai dan darat.
- c. pada tanggal 5 (Cuklapaksa) bulan Asadha (bulan ke-12 Caka) bersukacita sampai di suatu tempat dan membuat dusun Sriwijaya. Untuk pertama kali kita berkenalan dengan nama "Sriwijaya" pada piagam tersebut yang telah ditemukan di tepi sungai Tatang, berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu Kuna.¹⁶

Di samping itu telah ditemukan pula beberapa piagam yang ada hubungannya dengan piagam itu seperti: piagam Talang-Tuo (sebelah Barat kota Palembang), piagam Telaga Batu (ditemukan tidak jauh dari kota Palembang sekarang), piagam Kota-Kapur (Bangka), piagam Karang-Brahi (daerah Jambi) dan piagam Palas Pasemah (daerah Lampung selatan). Nampak dengan jelas isi piagam Kedukan Bukit itu, menunjukkan asal mula kerajaan itu adalah kerajaan sungai yang

terletak di daerah udik sungai Batanghari Sembilan, dan bukan di daerah sungai Kampar Kanan-Kampar Kiri seperti yang telah ditunjukkan oleh Prof.Dr.Poerbarjaraka dalam bukunya : Riwayat Indonesia I. Kalau demikian dari manakah asalnya ?.

Menurut berita I-Tsing yang pernah berkunjung ke India via Shih-li-fo-shih (Sriwijaya) ¹⁷, yang pada waktu itu ibukota pelabuhan sungai (river's port cavital) berada di Muara Tembesyi dan kemudian digantikan oleh Zabag yang terletak lebih ke hilir dari sungai Batanghari. Tetapi kira-kira 10 tahun kemudian, peranan ibukota pelabuhan sungai tersebut diambil alih oleh Dapunta Hyang dan dipusatkan di Bukit Siguntang.

Sekitar tahun 692 Masehi untuk kedua kalinya I-Tsing mengunjungi Melayu, dan mengatakan negeri itu sudah menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya ¹⁸., yang telah dipusatkan di sekitar kota Palembang sekarang. Berdasarkan pemberitaan itu, maka dapat disimpulkan bahwa dari tempat itu Dapunta Hyang yang di dalam piagam Talang-Tuo tersebut nama penguasa Sri Jayanaga, telah mencurahkan tenaga perangnya untuk memperoleh titik-tumpu kekuasaan pengontrol lalu lintas perdagangan, baik yang melalui selat Malaka maupun yang melalui selat Sunda.

Suatu petunjuk yang menarik perhatian kita untuk mencari asal Dapunta Hyang, yang diperkirakan berasal dari kerajaan sungai di daerah udik Batanghari Sembilan. Walaupun cerita-cerita rakyat itu bersifat non historis, dan sesuai pula dengan proses mountain's state menjadi river's state, maka kemungkinan berasal dari gunung Dempo (Dapunta = Dempo) atau gunung Seminung haruslah dibuktikan secara faktuil. Cerita-cerita rakyat yang dimaksudkan itu seperti "andai-andai panjang", yang secara historis tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun apa yang tersirat dalam cerita itu haruslah kita anggap sebagai pembuka jalan penelitian yang lebih lanjut, untuk mencari asal usul penguasa kerajaan itu, setelah pusat kekuasaannya dipusatkan di daerah sekitar Bukit Siguntang. Kami berkeyakinan bahwa Bukit Siguntang bukanlah pusat kuasa kerajaan itu, tetapi kemungkinan besar tempat itu sebagai pusat rituil (cakral) yang penuh kesucian, yang sewaktu-waktu dipergu-

nakan sebagai tempat bersumpah setia bagi penguasa-penguasa di uluan kepada raja. Pada zaman kesultanan Palembang, tradisi itu masih diteruskan ¹⁹ dan sampai sekarang masyarakat uluan masih tetap beranggapan tempat itu menjadi tempat persaksian membayar kaul atau nazar. Sehubungan dengan masalah yang menyangkut asal usul penguasa yang dimaksudkan, perlu dikemukakan apa yang telah dikatakan oleh P. De Reo De Faille :

" dalam waktu berabad-abad memindahkan kantor pusatnya, ada juga Palembang, negara kota pelabuhan dari daerah Musi atau Batanghari yang sangat luas dan tidak banyak penduduknya di kaki gunung-gunung yang hijau warnanya, yang menjulang ke awan gunung Dempo, sorga tempat kediaman para Dewa, yang dari lereng-lerengnya mengalir sungai Musi dengan "sembilan" anaknya yang dalam keagungannya makin lebar bergerak ke laur, dan dekat muaranya adalah tempat yang baik untuk dijadikan pusat perdagangan dalam dan luar negeri, dan dahulu pernah menjadi tempat kedudukan suatu talasokrasi (suatu kekuatan laut), tetapi "20

Demikian pula bahwa yang dipergunakan pada piagam-piagam itu perlu juga diperhatikan, karena di sepanjang sungai Musi sampai ke udik pada umumnya mempergunakan bahasa Melayu, bahkan ada suatu daerah Kabupaten di daerah ini pada zaman Hindia Belanda diberi nama "marga mentri Melayu".

Suatu pertanyaan yang perlu dikemukakan di sini, Apakah ekspedisi yang dikirimkan oleh Sri Jayanaga itu mendapatkan perlawanan dari musuh ? Berdasarkan hasil sementara penemuan arkheologi, nampaknya dugaan kita sebaliknya, dan pada umumnya isi piagam-piagam itu bersifat kutukan atau suatu perjalanan suci yang bersifat keagamaan. Sifat Budhisme yang sangat menonjol pada piagam-piagam tersebut aliran Budha Mahayana, sesuai betul dengan watak maritim di daerah ini yang tidak mengenal sistem kasta, dan Palembang sendiri pada waktu itu mulai menjadi penting dalam sejarah kebudayaan, karena dianggap sebagai pusat kegiatan ilmiah bagi pemeluk-pemeluk agama Budha. Di Bukit Siguntang sendiri pernah ditemukan sebuah arca Budha yang cukup besar, yang diperkirakan berasal dari sebelum abad VI Masehi.

Rupa-rupanya pemindahan pusat kekuasaan itu tidaklah bersifat kekerasan, dan hubungan antara kerajaan-kerajaan sungai yang pernah menjadi river's port cavital telah terjalin sedemikian rupa dan menunjukkan adanya suatu "sistem konfederasi", seperti yang berlaku di negara Malaysia sekarang. Hanya sistem di Malaysia sekarang ini dalam penunjukan kepala negara berdasarkan konstitusi, sedangkan pada zaman Sriwijaya berdasarkan kharisma dan faktor-faktor geografis yang lebih menguntungkan dari segi ekonomi. Atas dasar itu pulalah, maka pusat-pusat penguasa kerajaan di daerah ini, kadang-kadang berpusat di Kantoli (daerah danau Ranau), Tulangbawang dengan ibukotanya Kayuagung, Sekampung, Muara Tembesyi, Muara Zabag, Muara Takus dan akhirnya berpusat di daerah sekitar Bukit Siguntang sejak tahun 683 Masehi.

Setelah tahun 742 Masehi, kerajaan Shih-li-fo-shih tidak lagi mengirimkan utusannya kenegeri Cina, dan baru pada tahun 775 Masehi²¹ kerajaan Sumatera (Sriwijaya) mendirikan suatu pangkalan disemenanjung Malaya di daerah Ligor (tanah genting Kra). Pada sisi belakang piagam itu tersebut nama raja Sriwijaya (raja Wisnu) yang berasal dari dinasti Syailendra, sedangkan pada waktu itu kerajaan Sumatera di bawah pimpinan Dharmasetu.²²

Jalan dagang tradisional via Selat Malaka yang melalui tanah genting Kra pada waktu itu merupakan pintu gerbang pelayaran perdagangan dunia, sehingga pusat kuasa yang baru ini tampaknya lebih menguntungkan daripada pusat kuasa sebelumnya, yang pada waktu itu dipimpin oleh Dharmasetu dari keluarga Sema. Sayangnya sekali sumber-sumber Cina mengenai daerah selatan pada abad VIII Masehi sedikit sekali, sehingga memaksa penulis membuat suatu hipotesis, bahwa hubungan antar raja Wisnu dengan Dharmasetu harus dianggap suatu hubungan genealogis (Soma=Saumasekeluarga). Oleh sebab itu tak dapat diragukan, bahwa kekuasaan Sriwijaya (Syailendra) pada masa-masa sebelumnya berada di daerah Palembang.²³

Betapa erat hubungan antara kerajaan Cina dengan Shih-li-fo-shih (Sriwijaya), seperti yang diberitakan pada masa dinasti Sung, kerajaan Shih-li-fo-shih mengirimkan utusan pada tahun 670-673 dan 713-741, yang pada tahun 724

datang pula seorang utusan bernama Kiu-mo-lo yang membawa hadiah kenang-kenangan untuk Kaisar Tiongkok. Sebagai balasan daripada pemberian itu, Kaisar Tiongkok memberikan suatu gelar "Tcho-teh'ong" (Jendral) kepadanya dan seratus potong kain sutra. Di samping itu pula kaisar menghadihkan gelar kepada raja Sriwijaya dengan nama "Che-li-to-le-pa-mo" (Sri Indrawarman ?). Gelar yang diberikan itu yang dapat disamakan dengan nama Sri Indrawarman sebagai raja, sama kedudukannya dengan kaisar Tiongkok. Jika masa pemerintahan Indrawarman dihubungkan dengan isi piagam Ligor (A), maka selisihnya 51 tahun. Kemungkinan pada tahun 775 Sri Indrawarman masih memerintah atau mungkin juga sudah digantikan oleh anaknya. Bukanlah raja yang mengeluarkan piagam tersebut dipersonifikasikan sebagai dewa Indra ? Apabila dugaan itu benar, maka nama yang mengeluarkan piagam itu adalah Sri Indrawarman atau anaknya, yang juga bernama In

Tidak dapat kita ragukan, walaupun ada sarjana yang mengatakan pusat kekuasaan Syailendra di Chaiya, tetapi pada masa-masa sebelumnya berpusat di Palembang. Tiga tahun kemudian setelah piagam Ligor, kekuasaan dinasti itu telah berada di Jawa Tengah berdasarkan piagam Kalasan 778 Masehi. Kalau kita berbicara mengenai asal mula dinasti tersebut, maka kita akan berhadapan dengan beberapa teori dengan seribu satu macam alasan yang tidak berdasarkan fakta. Oleh sebab itu tak usahlah kita mencari-cari asal mula dinasti itu dari luar negeri, dan bukankah kita semua sependapat dalam penulisan sejarah Nasional bervisi Indonesia sentris ? Kita mengakui adanya unsur-unsur dari luar yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia sejak penetrasi Hinduisme; islam dan sampai sekarang, namun unsur-unsur itu merupakan lapisan yang tipis sekali membalut kebudayaan Indonesia asli. Pendapat tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah, baik dalam segi kehidupan sehari-hari atau dalam dunia kepercayaan bangsa kita. Apabila kata "syailendra" berarti raja dari gunung, maka keturunan Dapunta Hyang itupun berasal dari gunung, yaitu dari gunung Dempo (Dapunta = Dempo + Hyang = Dewa) yang terletak di lereng bukit Barisan, yang merupakan sumber mata air dari anak sungai Batanghari Sembilan (lihat peta Sumatera Selatan dengan anak sungainya).

Prasasti Nalanda yang pernah dikeluarkan oleh raja Dewa Paladewa dari Benggala berisi : permintaan raja Balaputradewa dari Suwarnadwipa untuk mendirikan sebuah wihara Nalanda. ²⁴

Disebutkan pula pada piagam itu, bahwa Balaputradewa cucu dari raja Jawa yang menjadi mustika keluarga Syailendra bernama Sri Wirawairimathana atau anak dari Samaragrawira yang kawin dengan Tara, putri raja Dharmasetu. Nampak dengan jelas gelar tersebut serupa dengan gelar raja Dharanindra dari piagam Ligor (B) dan piagam Klurak, di mana anaknya bernama Samaragrawira yang dapat di-identifikasi dengan raja Samaratunga yang memerintah kira-kira dalam tahun 824 Masehi. ²⁵

Apa yang telah kita ketahui, Balaputradewa adalah anak laki-laki dari Samaratunga yang memerintah Sumatera dalam abad ke IX Masehi. Oleh sebab itulah dan berdasarkan pemberitaan tersebut di atas Coedes beranggapan, bahwa pada pertengahan abad ke IX Masehi, baik Jawa maupun Sumatera dipimpin oleh dinasti Syailendra, dan kedudukan Palembang sebagai river's port cavital tetap diakui sebagai asal mula nenek moyang mereka.

Besar kecilnya pengaruh river's port cavital itu tergantung pada situasi dan kondisi misalnya; dalam tahun 683 pengaruh Palembang sebagai ibukota pelabuhan sungai, kemudian digantikan oleh Ligor dalam tahun 775, dan dalam tahun 824 dipusatkan di Jawa Tengah dan akhirnya kembali ke Palembang sebagai asal mulanya dinasti itu dalam tahun 850. Penguasaan atas daerah di seluruh Nusantara berdasarkan hubungan keluarga yang dekat hubungankeluarga melalui garis keturunan Patrilineal, di sepanjang sejarah Eropah dengan dinasti Hapsburgnya atau di Indonesia khususnya merupakan suatu hal yang biasa. Apalagi kekuasaan Sriwijaya yang kita lihat mempergunakan sistem konfederasi, maka pusat dinasti tersebut yang mula-mula di Palembang, perlu kita renungkan dengan seksama dalam memecahkan persoalan tersebut untuk menuliskan sejarah Sriwijaya yang sebenarnya.

Pada masa pemerintahan dinasti Sung 960-1279, kerajaan San-fo-ts'i mengirimkan utusan ke Tiongkok berkali-kali, yaitu pada tahun 960, 962, 971, 972, 974, 975, 980,

983, 985 dan 988. Nama utusan yang datang ke Tiongkok pada tahun 960 dan 962 bernama Si-li-Hu-ta-hsia-li-tan dan Shih-li-Wu-yeh. Kedua nama ini menurut pendapat Moens adalah Sri Udayadityawarman.²⁶ Kemudian pada tahun 980 dan 983 tersebut raja Hsia-ch'ih atau dalam bahasa Melayu dengan kata "haji". Utusan yang terakhir terpaksa tinggal di Kanton sampai tahun 990 Masehi, karena negerinya sedang mengalami kesulitan atau diserang oleh negeri She-p'o. Pada tahun 992 utusan itu meneruskan perjalanan lagi untuk pulang kenegerinya, dan setelah sampai di negeri Campa, ia memperoleh berita mengenai negerinya kurang menyenangkan. Oleh sebab itu ia pulang kembali ke negeri Cina dan meminta pengaruh dari negeri itu untuk mengeluarkan suatu pernyataan resmi, di mana San-fo-ts'i di bawah perlindungan Tiongkok.

Dalam tahun yang sama utusan dari Cho-p'o (Jawa) datang ke Tiongkok dengan membawa berita, bahwa negerinya berperang terus menerus dengan San-fo-ts'i. Mungkin sekali utusan dari Jawa tersebut adalah utusan dari raja Dharma-wangsa, yang naik tahta pada tahun 991 Masehi. Pada permulaan abad ke 11, Sri Sudamaniwarmadewa menjadi raja Sriwijaya di mana kedudukan guru besar Dharmakirti dalam agama Budha sangat penting, karena membahas tentang Abhisamayalankara. Itulah sebabnya antara tahun 1011 - 1023 seorang pendeta dari Tibet datang ke Sriwijaya (Atisa) untuk belajar pada guru besar tersebut. Betapa penting kedudukan Sriwijaya pada waktu itu, di samping pusat kuasa politik pengontrol selat Malaka dan selat Sunda, juga tidak kurang pentingnya sebagai pusat kebudayaan di Asia Tenggara yang mempunyai nilai Internasional.

Utusan berikutnya datang ke Tiongkok dalam tahun 1003, 1008, 1016, 1017 dan 1018.²⁷ Pada tahun 1003 raja Se-li-chu-la-wu-ni-ma-tiau-hwa mengirimkan dua orang utusan ke Tiongkok, di mana mereka mengatakan bahwa di negerinya akan didirikan sebuah candi Budha, dan mohon kepada Kaisar untuk memberikan nama dan genta untuk tujuan tersebut. Adapun candi itu diberi nama Ch'eng-t'ien-wan-shou.²⁸ Kira-kira dalam tahun 1005 Sudamaniwarmawihara menjadi raja di Sriwijaya - pengganti Balaputradewa, dan mendirikan candi Budha di Nagipatthana²⁹ atas persetujuan

Rajaraja - dari kerajaan Chola. Kemudian ia digantikan oleh anaknya bernama Narawijayattugawarman.²⁹ Rupa-rupanya hubungan antara Sriwijaya dengan Tiongkok dan Chola telah terjalin sedemikian erat, merupakan suatu rencana yang terarah untuk menghadapi segala kemungkinan yang datang dari Jawa. Suatu tindakan yang hampir serupa dengan Von Bismark pada akhir abad ke - 19, dengan menjalankan politik tidak saling menyerang yang dikenal dengan istilah Ruckversicherungstraktat.

Konflik antara Sriwijaya dengan raja Dharmawangsa tak dapat dihindari, sehingga akhirnya kekalahan dipihak Jawa Timur yang disebut dalam piagam Calcutta telah melumpuhkan kekuatan maritim pada tahun 1016/1017 Masehi. Apabila istilah "pralaya" pada piagam tersebut dapat diartikan suatu kekalahan total, maka Sriwijaya yang berpusat di Palembang telah mencapai kesempurnaannya sebagai kerajaan maritim di daerah Asia Tenggara, dan secara tak langsung telah mengancam kedudukan Chola dan Tiongkok sebagai dua kekuatan besar pada waktu itu. Di dalam buku Chu-fan-chi yang disusun oleh Chao-ju-kua pada masa pemerintahan dinasti Sung (960 - 1279) mengatakan sebagai berikut :

..... San-fo-ts'i terletak tepat di sebelah selatan Ch'uan-hou rakyatnya bersarong kain kapas dan berpayung sutera. Mereka pandai berperang baik di laut maupun di darat. Organisasi ketentaraannya sangat rapi. Bila rajanya wafat, rakyatnya bercukur gundul sebagai tanda belasungkawa. Mereka yang berbelasungkawa menceburkan diri dalam minyak mendidih. Adat itu disebut "T'ung-sheng-ssu" artinya sehidup semati. Ada arca Budha yang disebut gunung emas dan perak. Rajanya biasa disebut "hakekat" ular. Mahkotanya emas, berat sekali. Hanya baginda saja yang kuat mengangkatnya. Barangsiapa kuat mengangkatnya jadi penggantinya. Negeri itu terletak di tepi laut dan merupakan bandar penting, mengawasi masuk ke luar kapal negeri-negeri lainnya. Dahulunya menggunakan rantai besi sebagai batas bandar.³⁰

Hubungan baik antara Sriwijaya dengan Chola tidak lagi berjalan semestinya, bahkan berubah menjadi permusuhan yang tak dapat dielakkan pada tahun 1025. Kerajaan Chola telah dapat menaklukkan daerah-daerah sekitarnya dan nafsu imperialismenya tidak hanya terbatas pada daerah

sekitar, tetapi sebenarnya ditujukan pada daerah-daerah yang mengakui kekuasaan Sriwijaya yang terletak di semenanjung Malaya. Berdasarkan isi piagam Tanjore yang dikeluarkan pada tahun 1030, Rajendracola telah menyerbu Kadaram/Kataha dan Sriwijaya.³¹ Meskipun kedua negeri itu telah diduduki (raids) namun raja-raja Chola mempunyai kebiasaan memberikan kekuasaan kembali kepada raja-raja yang ditaklukkan untuk memerintah negerinya sendiri, asal saja mengakui Chola sebagai yang dipertuan. Dalam rangka itu kiranya, pada tahun 1028 raja Sriwijaya yang bernama Shih-li-Tieh-hua atau Sri Dewa masih tetap berhubungan dengan kerajaan Tiongkok. Sri Dewa yang menggantikan ayahnya yang telah ditawan oleh kerajaan Chola, telah berusaha mempererat hubungan dengan Tiongkok dan kemudian diteruskan oleh pengganti-penggantinya sampai pada tahun 1178 Masehi.

Antara tahun 1030 - 1064 tidak banyak kita ketahui mengenai kerajaan Sriwijaya, tetapi berdasarkan isi piagam Kanton (1079 M), tersebut nama Tio-hua-ka-lo adalah Lord of the Land of San-fo-ts'i atau supreme Chief of San-fo-Ts'i. Piagam itu memberitakan tentang perbaikan candi Tien Ching atas biaya raja San-fo-ts'i yang bernama Ti-hua-ka-lo atau Rajendra Dewa Kulottunga. Apabila nama terakhir ini sama dengan Sri Indra Dewa Kulottunggawarman³³, maka raja tersebut tentunya berasal dari dinasti Syailendra dan bukan berasal dari keturunan Chola (India) yang pernah dikemukakan oleh beberapa orang ahli.

Menurut berita Chao-ju-Kua³⁴, kerajaan Sriwijaya di Sumatera mulai mengalami kemunduran pada akhir abad ke XII. Kota pelabuhan Chan-pei (Jambi) yang menjadi bagian daerah Melayu tidak lagi termasuk daerah kekuasaan Sriwijaya, karena dalam tahun 1082, 1088 telah mengirimkan utusan ke Tiongkok atas kemauan sendiri.³⁵ Sedangkan daerah-daerah yang masih termasuk kekuasaan Sriwijaya pada waktu itu adalah sebagai berikut : Tan-ma-ling, Ling-yassu-chia, Fo-lo-an, Sin-t'o, Chien-t'o, Chien-pi dan Lan-wu-li. Mungkin pada waktu itu Sriwijaya sedang terjadi pergantian kekuasaan. Tetapi kemudian pada permulaan abad ke XIII Masehi, penguasa maritim itu muncul kembali kepribadiannya sebagai suatu kekuatan yang pernah memiliki

higemoni tunggal di Asia Tenggara.

Munculnya kembali kerajaan itu pada permulaan abad XIII pada saat historis, saat mana di India baru muncul kekuasaan Islam di bawah pimpinan kesultanan Delhi dan di negeri Tiongkok sendiri pada waktu itu sedang terjadi perpecahan dengan timbulnya dinasti Sung Selatan dengan ibukota Nanking. Kesempatan yang baik ini dipergunakan oleh Sriwijaya untuk mempengaruhi daerah sekitarnya, seperti apa yang digambarkan oleh Chao-Ju-kua, bahwa Sriwijaya mempunyai jajahan tidak kurang dari 13 negara ³⁶ seperti : P'eng-feng, Teng-ya-nung, Ling-ya-ssu-chia, Chi-lan-tan, Fo-lo-an, Jih-lo-t'ing, Ch'ien-mai-pa-t'a, Tan-ma-ling, Chia-lo-hsi, Pa-lin-feng (Palembang), Sint'o (daerah Sunda), Chien-pi (Jambi), Lan-wu-li dan Si-lan (Seilon). Apabila benar laporan Chao-Ju-kua itu, maka jalan dagang tradisional via selat Malaka telah dikuasai kembali secara intensif oleh Sriwijaya, di mana Palembang sebagai river's port cavital telah menjadi pusat perdagangan pelayaran yang sangat menentukan.

Panorama yang dilukiskan oleh Chao-Ju-kua mengenai ibukota Sriwijaya dalam abad XIII dan XIV terletak di pinggir sungai dan penduduknya terpecah mendiami pinggir sungai Batanghari Sembilan - kerumah di atas rakit dan kerumah bertiang, sampai saat ini masih nampak di sana-sini dan masih segar sekali, walaupun di kota Palembang sendiri telah banyak mengalami perubahan dan pertumbuhan dengan gedung batu yang cukup modern dengan jembatan Amperanya, yang menghubungkan daerah Ulu dan Ilir kota tersebut. Kalau kita berdiri di atas jembatan Ampera yang melintasi sungai Musi, kita akan melihat kapal-kapal tanker Pertamina/Asing, Pelni, perahu-perahu besi, perahu-perahu motor/ketek yang hilir mudik berisi muatan. Rumah-rumah di atas rakit yang terapung di atas air, mesjid-langgar dengan menara azannya yang menjulang tinggi, perahu-perahu kecil penjual jajan/soto dan lain-lain, perahu tambangan, warung-warung di atas rakit, perahu-perahu penjual ikan/sayur, wanita-wanita yang sedang mandi, mencuci pakaian dan sebagainya, anak-anak nakal yang telanjang bulat bercemplungan di air menikmati daily water sportnya, tidak akan jauh bedanya dengan gambaran abad XIII dan

XIV, baik mengenai bentuk atau kehidupan masyarakat di daerah sungai, yang sibuk dengan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Ada pula barang dagangan yang sangat menarik pada zaman dulu, yaitu "lada/merica" sebagai hasil utama dan terbaik di daerah ini.³⁷ Kalau kita perhatikan dengan seksama - sejak awal sampai kepada zaman Kesultanan Palembang, bahan dagangan utama ini amat mempengaruhi politik kerajaan, pangkal sebab ekspansi, pokok pertikaian dan pergeseran antara river's port cavital di daerah ini, bahkan sumber kemakmuran dan sumber keruntuhan pula, di samping hasil rempah-rempah dari daerah Maluku.

Berdasarkan isi piagam Grahi 1105 Caka (1183 M), gelar raja Sriwijaya adalah "Crimat" suatu gelar yang tidak dikenal dalam tradisi dinasti Syailendra. Mungkin gelar tersebut hanya dikenal oleh raja-raja Melayu saja. Nama lengkap raja yang tersebut pada piagam itu adalah Crimat Trailokyraja Maulibhusanawarmadewa. Seratus tahun sesudah piagam Grahi, piagam Amogapaca yang ditemukan di tepi sungai Langsat dahulu sungai Batanghari menyebutkan pula gelar raja yang sama dengan itu. Oleh karena itu raja tersebut dapat dianggap raja Melayu yang pernah tunduk pada Sriwijaya, dan sekarang telah membebaskan diri Pengiriman utusan Sriwijaya terakhir ke Ti-ongkok pada tahun 1178, dan kemudian antara tahun 1178 - 1183 kondisi Sriwijaya mengalami perubahan, perubahan mana kita lihat kekuasaannya telah diambil alih oleh Melayu, di bawah pimpinan Crimat Trailokyraja Maulibhusanawarmadewa.

Menurut berita Chu-fan-chi yang disusun oleh Chao-Ju-kua pada tahun 1225 - jadi 42 tahun setelah pengeluaran piagam Grahi, masih menyebutkan kerajaan San-fo-ts'i yang memiliki jajahan yang berjumlah 15 jajahan tanpa menyebutkan kerajaan Melayu. Ini berarti kerajaan San-fo-ts'i masih tetap memegang peranan penting sebagai suatu kekuatan maritim di daerah sebelah barat Indonesia, sedangkan pada tahun 1225 kerajaan Melayu yang berpusat di Dharma-craya mulai melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya. Hubungan yang longgar ini telah dipergunakan oleh raja Kertanegara dari Singasari untuk mengirimkan tentaranya ke Sumatera Tengah yang dikenal dengan nama Pamalayu. Peris-

tiwa ini berlangsung sejak tahun 1275 sampai dengan tahun 1292. Bagaimanakah hasilnya Pamalayu ini tidak kita ketahui dengan pasti, namun isi piagam Amoghapasa yang telah diketemukan di sungai Langsat (daerah udik sungai Batanghari dekat Sijunjung)³⁸, mengatakan bahwa pada tahun 1286 atas perintah Maharajadhiraja Sri Kertanegara Wikramadarmottunggadewa telah memindahkan sebuah arca Amoghapa-salokeswara dari bhumi Jawa ke Suwarnabhumi. Pemberian hadiah itu telah membuat seluruh rakyat bergirang hati, terutama sekali rajanya yang bernama Crimat Tribhuwana raja Mauliwarmadewa.³⁹

Setelah peristiwa itu kita tidak memperoleh keterangan mengenai kerajaan Sriwijaya, dan baru pada pertengahan abad ke-14 terdapat seorang raja yang memerintah di Kanyakamendinindra bernama Adityawarman. Andaikata nama raja terakhir ini dapat disamakan dengan Arya Dhamar⁴⁰, maka dalam peristiwa penaklukan pulau Bali 1343 ia ikut serta bersama dengan Patih Gajahmada. Seperti telah kita ketahui bahwa Adityawarman adalah putra Majapahit keturunan Melayu, dan sebelum ia diangkat menjadi raja Melayu, pernah menjabat "warddhamantri" dengan gelar Aryadewaraja pu Aditya. Pada tahun 1286 ia sampai di Melayu dan merehabilitasi kerajaan bekas peninggalan Mauliwarmadewa, dan otomatis Palembang sebagai kota bandar di bawah awasannya.⁴¹ Kira-kira pada tahun 1347 pengaruh kekuasaannya telah sampai ke daerah Pagaruyung (Minangkabau) dan mengangkat dirinya sebagai Maharajadiraja dengan gelar Adityawarmodaya Pratapaparakramarajendra Maulaimaliwarmadesa.⁴²

Menurut catatan sejarah dinasti Ming, pada tahun 1371 river's port cavital yang berpusat di Dharmacraya (Jambi) telah mengirimkan utusan ke Tiongkok, di mana utusan itu telah membawa burung Merak, beruang, burung bayan dan sepucuk surat yang ditulis di atas lembaran emas. Pada tahun 1373 datang lagi utusan dari San-fo-ts'i dengan rajanya bernama Ta-ma-sha-na-a-che.⁴³ Kemudian dalam tahun 1375 ada lagi utusan dari daerah Palembang yang bernama Ma-na-ha-Pao-lin-pang sampai di Tiongkok, dan dalam tahun 1376 San-bo-tsai (San-fo-ts'i) ditaklukkan oleh Jawa.⁴⁴

Dapat disimpulkan secara keseluruhan daerah Sumatera bagian Selatan pada akhir abad ke 14 terdapat tiga river's port cavital yang telah mengadakan hubungan langsung dengan Tiongkok yaitu : Dharmacraya (Melayu), San-fo-ts'i di Palembang dan Minangkabau.

Setelah San-bo-tsai ditaklukkan oleh Jawa pada akhir abad ke 14 (ekspedisi Tumasik 1377 - 1397)⁴⁵ sebagai realisasi dari sumpah Palapa Patih Gajahmada, yang oleh beberapa orang ahli dianggap sebagai lanjutan politik-magis Kertanegara, telah mengakhiri kekuasaan tunggal Sriwijaya yang pernah berpusat di Palembang.

Rupa-rupanya ekspedisi Tumasik yang telah menelan waktu 20 tahun lamanya suatu masa yang cukup lama dalam suatu ekspedisi, telah melumpuhkan kekuasaan Sriwijaya menjadi pudar tenggelam di kaki langit keruntuhanannya pada akhir abad XIV. Sementara itu Islam sebagai ideologi telah berkembang di daerah Sumatera Utara, sebagai akibat keadaan dan motif politik yang menguasainya. Ia merupakan alat politik yang tajam bagi penguasa-penguasa bandar di sepanjang selat Malaka, baik dipergunakan terhadap perdagangan dengan India, ataupun terhadap kekuasaan Budha - Sumatera, maupun terhadap ekspansi Tiongkok. Penetrasi Islam mendapat tanah subur dalam kraton-kraton dagang ini didasarkan atas perhitungan politik dan ekonomi, sehingga bandar-bandar baru seperti : Samudera, Perlak, Zabag (terletak di muara sungai Batanghari), Malaka, Palembang dan Sekampung (daerah OKI) menjadi pusat politik, ekonomi dan kebudayaan, dan sekaligus merupakan pusat-pusat ekspansi baru dengan Islam sebagai motor pendorong yang kuat.

Palembang sebagai kota-dagang/pelabuhan internasional dan bekas ibukota kerajaan sungai (Sriwijaya) telah tunduk kepada kekuasaan Majapahit, setelah ekspedisi Tumasik pada akhir abad XIV. Oleh karena hubungan kekuasaan Majapahit atas daerah ini tidak begitu mantap, maka terjadilah kekacauan-kekacauan dalam masyarakat dalam menghadapi kekuasaan yang baru itu, bahkan kemudian tempat itu menjadi tempat pelarian perompak-perompak Cina. Pada tahun 1407 daerah ini pernah dibebaskan oleh armada Ming dalam rangka ekspedisinya ke Nan Yang (Asia Tenggara) di bawah pimpinan laksamana Haji Sam Po Bo alias Cheng Ho, dan di

Jawa sendiri terkenal dengan nama Sam Po Toa Lang.⁴⁶ Rupa-rupanya kaisar Yang Lo dari dinasti tersebut, telah mempergunakan kesempatan yang baik itu pada saat historis, saat mana di daerah Sumatera Selatan pada akhir abad ke XIV dan di Jawa pada awal abad ke XV sedang terjadi keresahan. Dalam rangka untuk menguasai daerah perairan Asia Tenggara yang dulu pernah dirintis oleh kaisar Kubilai Khan dari dinasti Yuan yang mempunyai motif politik yang sama dengan raja Kertanegara, Islam sebagai alat yang ampuh bagi pelaksanaan ekspedisi itu dengan mempergunakan orang-orang Cina muslim yang berasal dari Yunan,⁴⁷ justru lalu-lintas niaga diperairan tersebut pada abad ke XIII, XIV dan XV telah dikuasai oleh pedagang-pedagang muslim.⁴⁸ Betapa penting peranan Cheng Ho dalam pelaksanaan ekspedisi tersebut, Mio Joe Lan mengatakan :

..... Cheng Ho telah melakukan 7 pelayaran dan di antaranya 6 kali atas perintah Yung Lo.

Pelayaran pertama dilakukan dalam 1405 Armada ini bertolak ke Indo-China dan campa, dengan menyinggahi Palembang. Pada masa itu yang menjadi raja di Palembang ialah seorang Tionghoa, Chen Tsu I (Chen Tsu I kalah dalam pertempuran itu; ia ditangkap dan dibawa ke hadapan kaisar Yung Lo

Perjalanan ketiga dimulai dalam 1412. Kini Cheng Ho mengunjungi pulau Bintan, mengedari Sumatera dengan menyinggahi Aceh dan Palembang dan mampir di Jawa (Semarang) Dalam perjalanan kelima yang dimulai dalam 1412, Cheng Ho mengunjungi Siam dan Sumatera. Ekspedisi keenamCheng Ho bertolak dalam 1424 dan tujuannya ialah Sumatera untuk 49

Tempat-tempat yang dikunjungi oleh Cheng Ho itu seperti : Kambija (Campa), Palembang, Jawa (Semarang), Aceh, Siam dan lain-lain di tempatkan pemuka-pemuka Islam Cina dari mazhab Hanafi dan dikoordinir oleh seorang konsul-jendral bernama Haji Gan Eng Tje.⁵⁰

Setelah Raja Hayam Wuruk wafat, kerajaan Majapahit mulai menurun, dan pada tahun 1401 - 1406 terjadi perang perebutan mahkota antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabhumi, yang terkenal dengan perang Paregreg. Ditinjau dari segi politik dan ekonomi, peristiwa tersebut telah melemahkan Majapahit, sehingga Palembang bekas pusat kerajaan

Sriwijaya yang dari segi yuridis telah termasuk kekuasaannya, belum mendapat perhatian khusus. Baru pada tahun 1443 Majapahit menempatkan seorang wakilnya bernama Arya Damar atau Swan Liong.⁵¹ Dengan pangkat Adipati, yang biasanya dijabat oleh keluarga raja. Kemungkinan besar Palembang antara tahun 1407 - 1443 dikuasai oleh orang-orang Cina Moslem, sedangkan di daerah pedalaman (daerah Uluan) berdiri sendiri. Di samping tugas Arya Damar sebagai Adipati, ia juga sebagai kapten Cina Moslem yang ditempatkan di Kukang (Palembang) atas persetujuan Haji Gan Eng Tju.

Arya Damar alias Swan Liong mendapat hadiah seorang puteri Cina yang sedang hamil dari Prabu Brawijaya. Pada tahun 1455 puteri Cina tersebut melahirkan anak lelaki yang diberi nama Jin Bun atau lebih terkenal dengan nama Raden Patah, yang dilahirkan dan dibesarkan di Palembang sebagai raja pertama dan pendiri kerajaan Demak.⁵² Perlu digaris bawahi, bahwa Arya Damar yang pernah ikut serta dengan Gajahmada dalam ekspedisi ke Bali 1343, bukanlah Arya Damar alias Swan Liong, walaupun kedua orang tokoh tersebut secara genialogis ada hubungannya dengan Majapahit. Rupa-rupanya nama "Arya Damar" itu merupakan nama ideal bagi penguasa-penguasa Jawa untuk daerah ini, justeru banyak menghasilkan getah (damar), yang sekarang nama itu melekat pada nama sebuah dusun yang terletak di daerah OKI bernama Pedamaran.

Arya Damar waktu kecilnya dididik secara Islam dan pernah mendapat tuntunan Raden Rachmat atau Sunan Ngampel, sehingga menjadikan ia seorang yang fanatik terhadap agama tersebut. Namanya diubah menjadi nama Islam yaitu Arya Dilah atau Jaka Dilah. Tidak begitu jelas sampai kapan ia menjadi Adipati di Palembang dan di mana ia mangkat. Tidaklah benar apa yang dikatakan oleh P.de Roo faille,⁵³ bahwa ia diusir dari Palembang karena mengganggu istri orang lain. Bagaimanapun juga namanya terhormat di kalangan masyarakat Palembang, dan ia dikuburkan tidak jauh dari Taman Pahlawan yang terletak di kampung 20 Ilir. Pesarian itu pernah dipugar oleh Bapak Bambang Utoyo, sedangkan bekas istananya terletak di 2 Ilir Palembang di dekat makam Ki Gede Ing Suro yang sedang dipugar oleh Dinas

Purbakala. (1978).

Ketika Arya Damar mendengar berita kemenangan mengenai Raden Patah di Jawa, maka dalam tahun 1478 ia melakukan pesta-pora sebagai tanda bersenang hati dan tujuh tahun kemudian ia mangkat. ⁵⁴

Sebagai pengganti Arya Damar (Arya Dilah), tersebut nama Dipati Karangwidara, yang pernah melakukan perjalanan ke daerah pedaleman untuk memperkenalkan dirinya sebagai penguasa yang sah di daerah ini. Ia disambut oleh penguasa-penguasa setempat seperti : daerah Lematang, Musi Ogan, Komering dan daerah-daerah uluan lainnya. Mungkin perjalanan ke daerah Uluan itu dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan, yang selama ini hubungan antara ibukota Kesultanan dengan daerah uluan tidak lancar, sehingga hasil-hasil dari pedalamanpun masuknya ke kota Palembang tidak lancar seperti pada zaman Sriwijaya masih berkuasa. Tetapi setelah Palembang dapat dibebaskan dari pengaruh bajak laut Cina, maka mulailah peranan kota tersebut sebagai river's port cavital, yang pernah memegang peranan penting dalam beberapa abad sebelum timbul kesultanan Palembang.

Pada waktu Dipati Karangwidara memerintah Palembang, keadaan kota telah ramai sekali, rumah-rumah yang terapung di atas air pulih kembali dan rumah-rumah panggung mulailah berdiri di atas runtuhanannya, dan daerah uluan sendiri sudah mulai teratur pemerintahan yang dipimpin oleh pangeran-parawatin setempat. Palembang sebagai negeri asal Raden Patah, dengan segala senang hati mengakui kekuasaan Demak, dan dengan demikian mulailah peranan Demak di daerah ini. Raden Patah adalah seorang penguasa yang sadar, bahwa Demak dapat menjadi kerajaan maritim yang besar dapat menggantikan Sriwijaya, apabila ia dapat menguasai selat Malaka dan selat Sunda. Dalam kerangka usaha itu pulalah, di Palembang di tempatkan seorang panglima perang yang tangguh bernama Pangeran Sideng Lautan.

3.1.3. Kepemimpinan :

Dalam mempelajari masaalah "kepemimpinan" di daerah ini, kami akan memusatkan perhatian pada suatu konsepsi kepemimpinan yang berhubungan dengan struktur sosial pada umumnya dan struktur penguasa pada khususnya.

Sebagai suatu daerah yang memiliki anak sungai Batanghari Sembilan dan sebagian besar daerahnya terdiri atas rawa-rawa, telah memaksa dan mendorong hidup mereka untuk menyesuaikan diri kepada alam sekitarnya seperti : berburu, menangkap ikan, berlayar/berdagang dan merampok. Sifat maritim yang telah menjadi ciri khas mereka di daerah ini, dari zaman ke zaman telah berkembang sedemikian rupa, bahkan agama Budha yang datang ke sini telah menstimulir pandangan hidup mereka itu, khususnya hubungan mereka dengan penguasa. Berbeda halnya dengan masyarakat agraris yang memusatkan prikehidupan kepada raja-dewa kultus atau dewa-raja kultus. Raja-dewa dan dewa-raja kultus adalah suatu gejala yang terdapat dalam sejarah Indonesia sepanjang masa, terutama di daerah agraris atau agraris-maritim.

Setelah kerajaan Sriwijaya menerima dan mengembangkan agama Budha Mahayana menjadi agama nasional suatu agama yang sesuai dengan prikehidupan masyarakat maritim, di mana inti kehidupan rokhania ditujukan kepada cita-cita kebodhisatwaan. Cita-cita itu telah memaksa individu-individu untuk berusaha dengan sekuat tenaga, demi untuk keselamatan sesamanya. Tugas manusia di dunia ini untuk berbuat, bekerja, bekerja sekali lagi bekerja, agar ia dapat menjadi calon Budha. Oleh karena itu "perbuatan" ⁵⁵ adalah sikap hidup manusia Sriwijaya yang realistik, betapapun rendah hinanya perbuatan itu tetap dianggap mulia. Terkutuklah manusia yang menghabiskan waktu dengan tidak berbuat apa-apa.

Masaalah kepemimpinan dalam masyarakat tradisional lebih banyak seluk beluknya daripada kepemimpinan dalam masyarakat modern. Dalam masyarakat tradisional itu sendiri telah berakar pada struktur sosial yang diatur berdasarkan kelahiran, kekayaan dan status. Kepemimpinan formal berada pada raja, golongan bangsawan dan golongan

aristokrasi pada umumnya atau golongan ini pada lazimnya disebut sebagai kelas memerintah. Suatu nilai yang banyak memberikan pengaruh pada sikap hidup manusia awam adalah harta benda dan hak milik pada umumnya. Oleh karena itu pandangan hidup masyarakat terhadap penguasa setempat dalam hal ini golongan raja tau bangsawan, ditentukan oleh latar belakang sosial ekonomi dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat itu sendiri, baik pada zaman pra-Islam maupun di zaman sesudah Islam.

Di dalam suatu masyarakat tradisional yang sekarang masih dapat kita lihat di desa-desa terpencil, harta benda yang banyak dimiliki oleh seseorang, telah mempermudah dalam menjalankan kehendak dan kemauannya di antara kawan-kawan atau di antara sesama anggota masyarakat itu. Dalam pembahasan ini, kita akan membatasi bahwa harta benda itu dapat memberikan kekuasaan kepada seseorang, justeru karena ia dapat memberikan jaminan hidup, sedangkan orang yang bersangkutan dapat mengarahkan perhatiannya lebih banyak daripada yang lain kepada soal-soal yang menyangkut kehidupan bersama. Dalam sejarah Yunani Kuna, hanya orang yang disebut warga yang dapat ikut serta dalam kehidupan politik, dan orang inilah (golongan bangsawan) yang banyak mempunyai waktu senggang memikirkan soal-soal pemerintahan, justeru karena kebutuhannya telah terjamin oleh hak miliknya yang dikerjakan oleh hamba sahaya.

Dengan dasar hak-milik (harta benda) sebagai kriteria dan biasanya status seseorang dihubungkan dengan keturunan daerah, maka kedudukan nisbi seseorang atau golongan terhadap yang lain itu disebut status. Tetapi kriteria untuk menetapkan status seseorang penguasa di daerah ini, bukanlah semata-mata terletak pada harta benda dan kelahiran saja. Ini hanyalah beberapa kemungkinan saja dari beberapa kemungkinan kriteria yang lain. Jadi kedudukan seseorang penguasa itu tidak hanya didasarkan pada satu atau dua kriteria saja, tetapi banyak lagi aspek-aspek lain yang menyangkut manusia itu sendiri. Oleh karena status bisa berdasarkan pada kriteria berbagai ragam, maka lapisan masyarakat bisa dibagi-bagi dalam berbagai corak bergantung pada kriteria yang kita pergunakan.

Dalam masyarakat tertentu ada kemungkinan pembagian lapisan masyarakat berdasarkan pada satu macam kriteria saja, sama dengan pembagian lapisan yang disandarkan pada jenis kriteria yang lain. Sebagai suatu contoh golongan bangsawan (didasarkan pada turunan daerah) yang juga menjadi golongan berada (didasarkan hak milik/harta), mungkin golongan inilah yang memerintah, seperti yang kita lihat di daerah ini. Dengan mempergunakan kriteria kekuasaanpun mereka menjadi golongan tersendiri yang terpisah dari golongan orang kebanyakan. Kedua golongan tersebut, yang pada lazimnya disebut golongan yang kulturil superior dengan golongan yang kulturil inferior⁵⁶ diterima begitu saja dalam masyarakat tradisional sebagai suatu kenyataan, bahkan dibenarkan oleh masyarakat (rakyat) sebagai susunan yang telah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa sendiri. Dalam sistem kerajaan Sriwijaya khusus di daerah Sumatera bagian Selatan, golongan seperti itulah yang kita jumpai, suatu golongan atau kelas clite merupakan lapisan yang berada dan sekaligus memegang kekuasaan pula. Sampai saat ini apa yang kita lihat di Jawa pada umumnya, kriteria darah dan jabatan berhubungan erat.⁵⁷

Sebagai pemegang kekuasaan, golongan ini mencakup formasi sosial yang merupakan asal mula kepemimpinan itu, sehingga pengaturan lembaga untuk keputusan-keputusan politik berada di tangan golongan tersebut. Tetapi bagaimanapun juga, perbedaan antara golongan tersebut dengan golongan rakyat biasa, tidaklah begitu tajam, karena mereka menganggap golongan itu sebagai pengembal amanat yang diberikan oleh rakyat banyak. Oleh sebab itu kepemimpinan di daerah ini selalu dikaitkan kepada faktor agama, justru rakyat banyak selalu di belakang golongan agama.

3.1.4. Pengaturan :

Untuk mengetahui susunan dan cara pengaturan pemerintahan raja-raja Sriwijaya pada masa lampau, kita mengalami banyak kesulitan. Hal itu disebabkan karena hampir semua raja yang pernah memerintah di daerah ini, tidak meninggalkan keterangan-keterangan yang dapat dipakai untuk menyusun suatu pengaturan. Untuk mengatasi kesulitan ini, kita akan dapat melihat keadaan yang masih berlaku di

daerah uluan sekarang ini. Bekas-bekas pengaturan itu, telah menjadi suatu tradisi, yang dari zaman ke zaman masih tetap berlaku sampai daerah ini di bawah pengaruh Islam sebagai penguasa yang terkenal dengan nama kesultanan Palembang. Adapun sistem pengaturan itu, merupakan suatu undang-undang yang terkenal dengan nama "simbur cahaya" ⁵⁸ yang mula-mula dikodifikasikan dengan aksara Arab-gundul, dan telah diterapkan oleh Ratu Sinuhun Seding dalam abad XVII.

Perlu diberitahukan, bahwa kitab itu dikumpulkan oleh Baginda Ratu, yang dibantu oleh putera mahkota dan menteri-menteri negara serta alim Ulama yang menjadi tangan kanan Baginda. Semenjak kesultanan Palembang di bawah kekuasaan Sri Sultan Abdurrachman yang pada waktu itu wilayah kekuasaan Sultan meliputi daerah yang luas, maka kitab Undang-undang itu diperluas menjadi undang-undang wilayah yang dinamakan "undang-undang Sindang Mardika" (undang-undang Daerah). Akhirnya kitab undang-undang itu dijadikan landasan hukum pengaturan, sampai Belanda/Inggris menguasai daerah Sumatera Selatan (1824).

Apabila kita sependapat dengan apa yang terdapat di daerah Uluan itu adalah bekas-bekas peninggalan yang berlaku di zaman Sriwijaya, yang dari zaman ke zaman pola dasarnya tidak banyak mengalami perubahan, maka di daerah uluan (pedalaman) banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh Poyang-poyang (kata itu berasal dari kata **Empu** dan **Hyang**) dan bersifat otonom. Kedudukan poyang-poyang itu dapat dianggap sebagai raja kecil, dan ketika zaman kesultanan Palembang, poyang-poyang tersebut selalu dikaitkan dengan keluarga Sultan diberi pangkat Rangga/Temenggung. Hampir seluruh daerah Kabupaten mengenai poyang-poyang, yang dewasa ini menjadi kuburan keramat bagi masyarakat sekitarnya. Nama-nama poyang tersebut masih dapat dikenal seperti di daerah Muba; poyang Raos dan poyang Depati; di daerah Pasemah mengenal poyang Prabu Somad dan poyang Ng.Awak; dan di daerah OKI mengenal poyang Sekampung dan lain-lain.

Poyang-poyang yang berkuasa di daerah uluan itu ber-sahabat karib dengan penguasa di ibukota pelabuhan sungai, yang pada waktu itu berpusat di Palembang. Kemudian dalam

perkembangan sejarahnya, poyang-poyang dipersatukan menjadi satu yang disebut marga (di daerah Pasemah terkenal dengan nama "sumbai") yang dipimpin oleh salah satu di antara poyang-poyang. Penunjukan poyang tersebut berdasarkan hasil pemilihan secara langsung. Kepala marga atau sumbai itu terkenal dengan nama "Pasirah" (Depati atau Adipati). Dalam pekerjaan sehari-hari, ia dibantu/didampingi oleh Dewan Margo atau lampik empat Mardiko Due sebagai lembaga tertinggi.

Seperti yang kita lihat di daerah uluan sekarang ini yang hampir-hampir punah, masing-masing suku dipimpin oleh poyang yang diberi nama sukunya sendiri misalnya : poyang Bekal memimpin suku Pegagan, poyang Raos memimpin suku Musi, poyang Rambang memimpin suku Rambang dan sebagainya. Semua poyang itu dapat digolongkan dengan nama "jurai tue". Jurai-jurai tue itu pulalah yang menjadi anggota Lampik Empat Mardiko Due (Dewan Margo).

Sebagai suatu petunjuk, river's port cavital tidak selalu tetap berada di satu tempat saja, tetapi berpindah-pindah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, mengingat letaknya yang telah jauh dari lalu lintas perdagangan waktu itu, sehingga tidak banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang asing. Itulah sebabnya ketika musyafir Tiongkok - I-tsing, menginjakkan kakinya di daerah ini untuk pertamakalinya, mungkin sekali di daerah sungai Batanghari (Muara Tembesyi), sedangkan kedatangannya yang kedua kali, pusat perdagangan telah berpindah ke Palembang. Kemudian pada akhir abad ke VIII pusat kegiatan perdagangan pelayaran itu telah digantikan oleh Ligor. Sistem yang serupa ini, hampir-hampir menyerupai pengaturan yang berlaku di negara Malaysia sekarang. Bukankah kepala negara di Malaysia sekarang dipilih secara bergilir, berdasarkan tradisi yang telah berlaku di kalangan masyarakat Melayu tradisional? Bukan hal yang tidak mungkin tradisi seperti itu, sebagai lanjutan tradisi nenek-moyang kita yang berlaku di daerah ini pada zaman dulu⁵⁹, yang dari abad ke abad telah menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang berlaku di negara tersebut. Penulis sendiri mengakui apa yang diajukan di sini tidak lengkap dan jauh dari memuaskan. Tetapi bagaimanapun juga ada baiknya daripada

tidak ada sama sekali, walaupun secara faktual tidak dapat dipertanggung jawabkan.

3.1.5. Hubungan Antar Negara :

Ketika Palembang menjadi river's port cavital, yang pernah memegang peranan penting di daerah ini, di daerah-daerah uluan yang dipimpin oleh poyang-poyang, merupakan negara-negara kecil yang berdaulat penuh dan bersifat otonom. Hubungannya dengan ibukota pelabuhan sungai merupakan hubungan yang timbal balik suatu hubungan yang tetap dan saling menguntungkan, yaitu dari pedalaman ia menerima hasil-hasil hutan, kebun, danau, sungai dan lain-lain; sedangkan dari ibukota pelabuhan dikirimkanlah bahan kebutuhan hidup seperti: bahan tekstil, manik-manik, garam, bahan keramik, alat pertanian dan sebagainya.

Palembang sebagai ketua perserikatan negara-negara kecil tersebut, tidak memiliki basis agraris. Barang-barang kommedity yang diekspor berasal dari daerah pedalaman, sehingga dapat dikatakan Palembang sebagai tempat distributor, baik barang-barang yang datang dari luar atau pun barang-barang yang berasal dari daerah uluan. Hubungan yang timbal balik itu dapat kita lihat pada zaman Demang Lebar Daun⁶⁰, yang merupakan kelanjutan dari hubungan sebelumnya, sampai hubungan tradisional itu diteruskan pada zaman kesultanan Palembang.

3.2. Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat.

3.2.1. Pemenuhan Hidup (Kebutuhan Hidup) :

Sungai Musi sebagai induk anak Batanghari Sembilan, yang banjir setiap tahun dalam proses pembentukan rawa-rawa sepanjang tebing sampai ke kuala sungai Musi, sehingga daerah-daerah yang ada di sekitar kuala itu, pada setiap kali pasang naik, permukaan tanah digenangi air dan di musim hujan hampir seluruhnya terendam air dan penuh delta-delta. Pengaruh angin musim yang telah membentuk musim kemarau dan musim penghujan di daerah ini, justeru daerah ini termasuk daerah tropis dengan suhu udara yang rata-rata tinggi dan curah hujan yang tinggi pula. Karena

iklimnya lembab dan hujan yang turun banyak sekali, maka rimba tersebut sudah mulai berhenti pada tinggi 1000 meter di daerah talang, sebagai akibat pengawanan yang tebal dan dingin yang kuat.

Dahsatnya tantangan alam terhadap manusia di daerah ini, perjuangan menguasai atau dikuasai alam, berjuang melawan hutan rimba dan rawa-rawa untuk menanam padi di ladang-ladang, sebaliknya hutan rimba itu pulalah yang memberikan kebutuhan hidup seperti : bahan-bahan pakaian, alat-alat untuk perumahan, alat-alat pengangkutan, umbut-umbut, buah-buahan dan pucuk-pucukan untuk makanan dalam masa pancaroba. Oleh sebab itu hasil hutanlah pula yang memberi dan menjadi sumber kekayaan serta menjadi alat penukaran dengan barang-barang dari luar. Tidak mengherankan, betapa hebat tantangan alam di daerah ini yang telah mempengaruhi perilaku kehidupan perorangan atau berkelompok, sekalipun adanya faktor-faktor demografis, penduduk yang tipis di daerah yang amat luas dan perjuangan yang berat melawan tantangan alam yang hebat, taklah menghalangi usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup di daerah pedalaman pada waktu itu.

Sebaliknya masyarakat yang tinggal di daerah pantai atau kota-kota bandar, satu-satunya jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah berlayar dan berdagang. Betapa penting peranan masyarakat yang tinggal di daerah uluan pada waktu itu, yang sangat menentukan maju atau mundurnya suatu pusat kegiatan perdagangan di Palembang sebagai bandar transito, yang terletak pada urat nadi perdagangan pelayaran dunia via selat Malaka, Masyarakat kota yang menitikberatkan kehidupannya pada perdagangan pelayaran suatu kota bandar yang penuh dengan kesibukan manusia untuk mengadu untung dalam berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, nampak betul peranan pemilik modal dalam kegiatan itu, khusus golongan raja atau aristokrat pada umumnya.

Suatu gejala umum yang terdapat pada kerajaan maritim di daerah Nusantara ini, baik kekuasaan politik maupun ekonomi dipegang oleh kaum aristokrat sebagai pemilik modal. Oleh sebab itu pengawasan terhadap perdagangan dan pelayaran, merupakan sendi-sendi kekuasaan mereka, yang

memungkinkan kerajaan memperoleh penghasilan dan pajak yang berlipat ganda. Demikian pula penduduk yang berdiam di sekitar pusat kerajaan, yang kebanyakan terdiri atas golongan non elite, mata pencahariannya selain berdagang, juga bertukang seperti : tukang rumah, tukang emas, tukang besi, tukang anyaman, menyulam dan sebagainya. Khusus bagi golongan wanita sendiri sebagai pekerjaan sambilan ialah menenun songket, membatik dan menyulam.

3.2.2. Hubungan Antar Golongan :

Dalam mempelajari masaalah hubungan antar golongan di daerah ini, kami akan memusatkan perhatian pada suatu konsepsi hubungan antar golongan elite dengan golongan non elite yang terdapat dalam struktur masyarakat maritim pada umumnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada khususnya. Semenjak daerah ini didiami oleh manusia, mungkin telah terdapat suatu golongan kecil dalam masyarakat sebagai golongan elite yang memiliki peranan kepemimpinan. Di dalam masyarakat maritim dan agraris, golongan elite yang merupakan golongan kultural superior, telah diterima sebagai suatu kenyataan dan dibenarkan oleh golongan non elite atas kehendak Tuhan sendiri.

Memang golongan non elite menganggap tugas untuk mengatur pemerintahan adalah menjadi wewenang golongan raja atau bangsawan, justeru mereka itu memiliki kemampuan yang khusus dan tidak setiap orang yang dapat menjadi raja atau penguasa. Hanya dalam prakteknya di daerah ini, perbedaan antara golongan tersebut tidak begitu tajam, dan hanya nampak perbedaan itu ada waktu-waktu tertentu yang mengharuskan ia lebih tinggi daripada yang lain. Fakta yang dikemukakan ini nampak betul pada masyarakat yang berdiam di daerah uluan dengan semboyan "Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah". Berbeda halnya dengan keadaan yang terdapat dalam masyarakat agraris di Jawa, di mana golongan elite selalu dianggap sebagai manusia yang luar biasa dan harus dipatuhi segala perintahnya.

Mungkin sekali watak maritim yang ada pada golongan non elite di daerah ini, lebih bersifat individualistis dan spontanitas daripada golongan lain yang hidup di daerah pedalaman Jawa. Mereka itu lebih demokratis yang

menjurus kearah spontanitas, tanpa basa-basi atau kurang sopan menurut ukuran yang lazim dipakai oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Spontanitas itulah yang menunjukkan ciri khas masyarakat di sini, yang sering digambarkan dengan kata-kata : "tidak sopan tapi jujur". Artinya, apa yang dikatakan itulah adanya dan tidak penuh tatacara.

Dengan adanya sifat-sifat umum yang terdapat pada setiap individu mereka tidak mengenal perbedaan asasi antara kedua golongan yang dimaksudkan apalagi terhadap Yang Maha Kuasa, maka manusia-manusia Sriwijaya tidak memusatkan perikehidupannya kepada penyembahan raja sebagai titisan dewata. Raja dianggap manusia biasa, yang tidak luput dari kehilafan dan kesalahan. Oleh sebab itu ketika agama Budha berkembang di daerah ini, maka cita-cita ke-Bodhisatwaan merupakan inti kehidupan rohaniah, dalam arti bahwa setiap individu harus berusaha, berbuat demi keselamatan umat manusia, agar manusia itu sendiri mempunyai arti di dunia ini. ⁶¹

Perbuatan adalah dasar hidup mereka, betapa rendahnya atau hina pekerjaan itu tetap dianggap mulia. Maka tidak mengherankan pekerjaan berniaga, merampok, berperang, berlayar, menipu dan lain-lain, adalah suatu tradisi bagi mereka. Terkutuklah mereka yang tidak berbuat apa-apa. Oleh sebab itu pandangan hidup yang seperti itu pulalah, menyebabkan agama Budha dan Islam yang tak mengenal kasta mendapat tanah subur di daerah ini.

3.2.3. Kepemimpinan :

Di dalam masyarakat tradisional itu sendiri yang sekarang masih terdapat di desa-desa terpencil, harta benda yang banyak dimiliki oleh seseorang apalagi orang-orang itu termasuk golongan agama dan bersifat sosial, telah mempermudah dalam menjalankan kehendak dan kemauannya di antara sesama anggota masyarakat. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Poyang-poyang di zaman dulu, adalah termasuk kriteria yang tersebut di atas. Maka oleh sebab itu, kepemimpinan dalam masyarakat tradisional di daerah ini dari zaman ke zaman, telah terpecah atas dua kesetiaan yaitu golongan bangsawan (orang kaya) dan golongan agama, yang telah dimiliki oleh poyang-poyang tersebut.

Apabila kedua unsur itu tidak dimiliki olehnya sehingga unsur religius terpisah dari padanya, maka untuk mencapai sukses kepemimpinan itu sendiri, haruslah ia merangkul golongan agama, atau sekurang-kurangnya golongan agama itu menjadi tangan kanan penguasa itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Memang benar apa yang telah disarankan oleh Prof.C.Snouck Hurgronje ⁶², dalam rangka menaklukkan daerah Aceh secara keseluruhan pada awal abad XX, haruslah bertolak dari kemampuan memanipulasi dua pertentangan yang telah diperlembagakan itu.

3.2.4. Pengaturan masyarakat :

Pada umumnya masyarakat di seluruh Nusantara, keadaannya hampir sama di mana-mana, yaitu terdiri dari beberapa kelompok : kelompok menurut suku, kepercayaan, pekerjaan dan menurut struktur sosial (kelahiran). Dalam membicarakan masalah pengaturan masyarakat di daerah ini, tak dapat dipisahkan antara pihak penguasa dengan golongan yang diperintah (rakyat biasa). Palembang yang pada waktu itu termasuk kerajaan tradisional, Raja adalah menduduki tingkat yang paling tinggi atau pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam lapangan pemerintahan ia dibantu oleh keluarganya yang terdekat dan mendominasi perekonomian negara. Dengan demikian raja atau golongan aristokrat pada umumnya, tidak hanya memiliki status yang tinggi di bidang politik dan sosial budaya, tetapi juga di bidang ekonomi. Dengan melalui pembantu-pembantunya, raja dapat mengawasi segala kegiatan, dan secara otoriter ada pada Raja.

Demikian pula keadaannya di daerah uluan yang tidak terlepas pada penguasa poyang-poyang, yang memiliki peranan penting dalam mengawasi segala kegiatan rakyatnya di talang-talang. Rupa-rupanya alam kepercayaan terhadap animisme atau dinamisme di kalangan rakyat di daerah uluan pada waktu itu alam pikiran yang menganggap suatu benda memiliki jiwa atau semangat, telah menjadi dasar kepercayaan mereka ⁶³ dan telah mempengaruhi cara hidup mereka sehari-hari. Seperti telah kita ketahui, alam pikiran tersebut menganggap setiap benda itu memiliki semangat ada jiwanya, yang satu berkekuatan (ber-makna) lebih besar daripada yang lain. Di dalam dinamisme semangat atau jiwa

itu dapat berpindah-pindah, sehingga kekuatan (mana) tadipun dapat pula dipindahkan. Dalam hubungan ini, poyang-poyang dianggap oleh mereka memiliki kekuatan tersebut lebih daripada yang lain, sehingga langsung atau tidak langsung, peranan poyang-poyang itu telah mengatur jalannya kehidupan orang banyak di segala lapangan misalnya: upacara-upacara pembukaan ladang yang baru, berburu, menangkap ikan dan sebagainya. Kemudian setelah timbul dusun-dusun, maka mulailah poyang-poyang dibantu oleh beberapa pembantu, dan akhirnya dari kelompok keluarga yang terkecil sampai menjadi kelompok masyarakat yang lebih besar diatur secara sistematis.

Kelompok keluarga yang kecil (rumah tangga) diatur oleh kepala rumah tangga (orangtua), beberapa kelompok bergabung menjadi satu dipimpin oleh Penggawa, dan beberapa Penggawa dikoordinir oleh Keria (Krio) yang dibantu oleh kaum agama yang disebut Ketib (Khotib). Akhirnya beberapa orang Krio dipimpin oleh seorang Pasirah dengan pembantunya seorang Pembarap dan seorang Penghulu (agama), yang mengepalai suatu marga. Diperkirakan sistem pengaturan, yang berpangkal kepada konsepsi kesaktian dalam masyarakat tradisional di daerah uluan, jauh lebih murni daripada masyarakat yang tinggal di kota-kota bandar (ibukota kerajaan), atau lebih demokratis dari pada keadaan yang kita lihat di kota-kota pelabuhan.

3.3. Kehidupan Seni Budaya (Kultur) :

3.3.1. Pendidikan.

Sebelum datangnya kebudayaan Hindu di daerah ini, nenek moyang kita telah mengenal suatu sistem pendidikan tradisional, yang erat hubungannya dengan cara hidup setempat untuk memenuhi kebutuhan seperti : berladang, berburu, menangkap ikan dan lain-lainnya. Pekerjaan yang memerlukan tenaga kasar dilakukan oleh golongan laki-laki seperti : membuat ladang, menebang kayu, berburu, menangkap ikan, mendirikan rumah/pondok dan pekerjaan kasar lainnya. Sebaliknya golongan wanita bekerja di rumah tangga mengurus anak-anaknya yang masih kecil dan sewaktu-waktu membantu suaminya di ladang, apabila musim tanam akan

dimulai. Partisipasi secara langsung, baik secara berkelompok atau perorangan dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, merupakan suatu sistem yang telah berlaku di daerah ini dari abad ke abad. Tetapi apabila menyangkut segi-segi moral, maka peranan cerita-cerita rakyat (andai-andai) merupakan alat yang dipergunakan oleh pawang-pawang/orang tua untuk memberikan pendidikan kepada mereka/anak untuk mencapai sesuatu tujuan yang lebih baik. Oleh sebab itu dalam hal tersebut, peranan penguasa setempat (poyang-poyang) atau orang tua dalam suatu rumah tangga, menjadi titik tumpu sistem pendidikan dalam masyarakat tradisional, sebelum daerah ini mendapat pengaruh dari luar (Hindu-Islam dll.).

Tetapi setelah daerah ini mendapatkan pengaruh dari luar, maka sistem pendidikan tradisional yang tersebut di atas yang pada pola dasarnya sama, mengalami perubahan-perubahan teknis yang lebih efektif menuju kearah sistem "Guru-Kula" yang dipakai oleh masyarakat Hindu pada umumnya. Oleh karena daerah ini mendapat pengaruh agama Budha, maka bahan pelajaran yang diberikan via biksu/biksuni kepada masyarakat, tentunya mengenai dasar-dasar kepercayaan agama tersebut atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup selalu dikaitkan dengan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Budha itu sendiri. Sistem sanggha yang menjadi lembaga pendidikan agama Budha, mungkin sekali di zaman kerajaan Sriwijaya telah memainkan peranannya, ketika pusat latihan pendidikan itu berada di sekitar Bukit Siguntang.

Seperti telah kita ketahui masyarakat Hindu pada umumnya mengenal empat golongan yang telah ditentukan oleh kelahiran, walaupun dalam agama Budha sendiri tidak dikenal sistem kasta. Tetapi pada lazimnya pendidikan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang akan menjadi pendeta (bikshu-bikshuni), dan pendidikan itu sendiri diberikan secara kelompok. Pendidikan yang diterima oleh murid itu sangat individual dan murid itu sendiri dianggap oleh Guru sebagai anaknya.⁶⁴ Mereka tinggal pada satu asrama (sanggha), seperti halnya yang terdapat pada zaman pengaruh Islam yang disebut sistem Zawiyah. Oleh sebab itu mereka betul-betul mengabdikan kepada Guru dalam arti yang

sebenarnya, dan kekuasaan Guru adalah mutlak, sedangkan murid harus patuh kepada segala perintah Guru.

3.3.2. Kesenian (seni rupa, seni tari, seni sastra)

Untuk memberikan gambaran mengenai seni budaya di daerah ini, kiranya tidak dapat melepaskan diri dari geografis millieu atau lingkungan hidup bangsa yang mendukung seni budaya itu. Satu daerah yang memiliki Batanghari Sembilan, didiami oleh suku-suku bangsa yang dapat dikatakan hitrogen dalam bahasa dan adat istiadat serta budayanya. Diperkirakan ke sembilan batanghari itu pulalah yang mencerminkan keragaman dalam keseragaman seni budaya di daerah Sumatera Selatan, Semenjak adanya kedatuan-kedatuan di daerah ini dan sampai sekarang, sungai merupakan sarana komunikasi yang penting bagi suku-suku bangsa (Daerah ini). Karena sulitnya hubungan yang satu dengan yang lain mengakibatkan suku-suku tersebut mempunyai batas yang tajam sehingga bahasa mereka berbeda misalnya : bahasa Komeriing, Kayuagung, Pasemah, Musi dan lain-lain. Namun demikian secara keseluruhan, baik bentuk mau pun isi seni budaya itu sendiri memiliki pola dasar yang sama, yang menunjukkan anti dinamik dalam gerak tarinya sentimentil dalam seni suaranya, yang sebenarnya tidak sesuai dengan watak maritim pada umumnya.

Dapatlah dipahami, mengapa aspek seni budaya di daerah ini dari zaman ke zaman tidak banyak menunjukkan perkembangannya, haruslah dilihat dari berbagai segi, justeru karena timbul tenggelamnya suatu kedatuan di daerah ini telah membawa kemunduran seni budaya yang biasanya berpusat di istana (keraton). Suatu hal yang harus diakui, bahwa seni budaya yang sampai sekarang ini masih berkembang dan hidup di kalangan masyarakat pedalaman, merupakan sisa-sisa seni budaya istana. Oleh sebab itu maju mundurnya kesenian suatu daerah sangat tergantung kepada penguasa-penguasa setempat. Namun demikian masih dapat kita lihat sisa-sisa kesenian nenek moyang kita zaman dulu seperti : tarian-tarian yang berhubungan dengan kepercayaan (animisme dan dinamisme); alat-alat musik tradisional seperti : genggong, serdam, gamelan keromong dan

lain-lainnya. Seni suara yang berhubungan dengan percintaan/kepercayaan dan upacara-upacara resmi.

3.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan (Agama) :

3.4.1. Perkembangan Agama.

Semua manusia yang hidup di muka bumi ini, memiliki keinginan untuk mengetahui segala seluk beluk yang ada di dalam alam sekelilingnya, termasuk nenek moyang kita pada zaman dulu yang belum banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu pengetahuan modern. Makin maju pikiran manusia itu, semakin dalam ia menyelami rahasia alam sekitarnya dan makin luas batas pandangannya. Sebaliknya bagi manusia yang masih hidup pada alam pemikiran yang sederhana, sudah barang tentu batas pandangan itu lebih sempit atau lebih banyak hal di dalam alam yang gaib baginya. Nenek moyang kita pada zaman dulu menganggap dunia gaib itu, didiami oleh bermacam-macam makhluk dengan segala kekuatan-kekuatan gaib, yang digambarkan sebagai dewa-rokh dan kesaktian yang bersifat baik dan buruk.

Kekuatan-kekuatan alam yang ada di sekitarnya, dianggap lebih hebat daripada manusia itu sendiri seperti : matahari, bulan, gunung, sungai dan sebagainya, sehingga ada usaha untuk meminta perlindungan kepada kekuatan-kekuatan alam tersebut yang dinamakan dewa-dewa alam. Begitu pula anggapan mereka, bahwa alam sekitarnya penuh dengan rokh-rokh baik dan jahat yang mendiami hutan rimba atau mendiami pohon-pohon yang rimbun dan di persimpangan jalan. Akhirnya manusia yang luar biasa, dianggap memiliki suatu kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain; seperti seorang penguasa (poyang-poyang), orang-orang kerdil dan sebagainya.

Sejak dulu sampai sekarang sekalipun mereka telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan modern di daerah ini, namun tetap menganggap kekuatan yang sakti sebagai suatu kekuatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Oleh sebab itu banyak di antara mereka, yang sengaja mencari benda-benda sebagai tempat timbunan kesaktian ; misalnya barang-barang pusaka, keris, pedang, kertas yang ditulis dengan ayat-ayat suci alqur'an dan sebagainya.

Apa yang digambarkan di atas dewa, rokh dan kesaktian, tidak semua dipuja dan dihormati dengan penuh kasih sayang, tetapi di antaranya ada yang ditakuti, sehingga mendorong manusia atau nenek moyang kita untuk memberikan penghormatan; misalnya memberikan sajen, jampi, korban dan lain-lain. Dengan perbuatan yang demikian, diharapkan mereka terlindung dan tidak mendapatkan bahaya. Mungkin sekali perbuatan-perbuatan nenek moyang kita ke arah dunia di luar pancainderanya itu, merupakan awal dari perkembangan kepercayaan di daerah ini. Rupa-rupanya "konsep si kesaktian" lebih berakar lama di kalangan masyarakat daerah ini, sampai daerah ini mendapatkan kontak dan pengaruh dari luar seperti agama Budha, Islam dan kebudayaan Barat.

3.4.2. Bangunan Agama.

Hampir semua daerah di Sumatera Selatan, mengenal tempat-tempat angker suatu tempat yang dianggap haram, yang sekarang sudah menjadi tempat pemakaman bagi orang-orang yang dianggap sakti (keramat). Mungkin sekali tempat-tempat itu sebagai sisa zaman pra-sejarah, yang dikenal dengan istilah "menhir" (tugu).

Hampir di beberapa tempat daerah Kabupaten, terdapat kuburan-kuburan yang panjang tanpa menurut arah kiblat, Kemudian setelah agama Budha berkembang di daerah ini pada zaman Sriwijaya, sisa-sisa stupa belum banyak ditemukan oleh ahli-ahli purbakala, walaupun daerah ini pernah menjadi pusat kebudayaan. Mungkin sekali beberapa tempat dalam kotamadya Palembang sendiri seperti di daerah Bukit Siguntang dan di pusat air minum (20 Ilir Palembang), menunjukkan adanya bekas-bekas sanggha (asrama) sebagai tempat latihan pendidikan bagi pengikut agama tersebut. Bahkan di daerah I Ilir (Gede Ing Suro), yang sekarang sedang dipugar, adalah bekas runtuhannya istana dalam bentuk candi.

3.5. Hubungan Keluar :

3.5.1. Bentuk Hubungan.

Pada umumnya bentuk hubungan keluar atau hubungan

antar kerajaan Indonesia pada zaman dulu, adakalanya hubungan itu berupa perang. Tetapi sebagian besar hubungan daerah ini dengan daerah-daerah lain lebih banyak terdapat hubungan damai, dalam arti hubungan ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan dalam bentuk konfrontasi seperti yang pernah terjadi antara Sriwijaya dengan Jawa Timur atau antara Sriwijaya dengan kerajaan Cola di India, harus dianggap sebagai suatu tekanan terhadap daerah ini yang tidak dapat diterima oleh penguasa di sini, karena tidak sesuai dengan keperibadian yang menjunjung tinggi sifat-sifat demokrasi, bebas dan sebagainya, seperti yang terdapat dalam masyarakat maritim pada umumnya.

Semenjak zaman pra sejarah, penduduk Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada khususnya adalah pelayar-pelayar yang ulung dan tangguh dalam mengarungi lautan lepas, bahkan lautan yang ada di sekitarnya tak pernah menjadi penghalang untuk berhubungan satu sama lain. Mengingat letak geografis daerah ini yang memiliki Batanghari Sembilan, jauh lebih sulit hubungannya dengan daerah pedalaman daripada hubungan antar pulau. Oleh sebab itu dapat kita katakan, bahwa laut dan selat di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia, merupakan faktor pemersatu.

Letaknya yang strategis pada jalur pelayaran perdagangan Internasional via selat Malaka di zaman kuna, menyebabkan daerah ini (pulau Sumatera) jauh lebih dulu hubungannya dengan dunia luar, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Oleh karena kepulauan kita merupakan bagian dari suatu kesatuan daerah lalu lintas barang, menyebabkan daerah ini banyak sekali dipengaruhi negeri-negeri dan pulau-pulau sekitarnya, baik dalam lapangan kebudayaan atau pun percampuran suku, khususnya bagi masyarakat yang mendiami daerah pantai.

O.W. Wolters berpendapat bahwa hubungan antara India dengan Indonesia lebih dulu berkembang daripada hubungan dagang antara Indonesia dan Cina.⁶⁵ Bahkan ada beberapa orang orientalis ⁶⁶ yang telah menduga hubungan itu, telah terjadi sebelum hal itu disinggung dalam sejarah. Hubungan itu pada mulanya tidak kontinu, tetapi

kemudian semakin meningkat, mengingat beberapa alasan yang telah mendorong bertambah ramainya hubungan dagang tersebut. Untuk menentukan kapan terjadi hubungan itu, perlu kiranya kita mengkhayati suatu analisis yang pernah dilontarkan oleh Plerre Paris⁶⁷, dimana pelayaran di Samudra Hindia pada zaman dulu tentunya berpangkal di Sumatera atau di daerah sekitarnya. Bukan tidak mungkin daerah Sumatera bagian Selatan yang sejak zaman dulu mengenal bermacam-macam bentuk perahu, telah menjadi stasiun utama dalam kegiatan pelayaran yang di maksudkan itu.

Andaikata kita dapat mempercayai analisis Pierre Paris dan dalam hal ini menurut kami hampir pasti, maka Onese-critus yang berada di India di bawah kekuasaan Iskandar the Great, telah dijumpai di sana bentuk-bentuk perahu yang berasal dari Sumatera, khusus daerah Sumatera bagian Selatan yang banyak memiliki sungai-sungai besar, dan perahu dengan segala macam bentuknya merupakan sarana komunikasi yang sangat penting. Oleh sebab itu dapatlah di perkirakan hubungan kedua negeri itu telah terjadi pada abad ketiga sebelum Masehi, dan pada abad pertama sesudah Masehi.⁶⁸

3.5.2. Akibat Hubungan.

Oleh karena jalur perdagangan dunia dari arah Barat dan dari Tiongkok via selat Malaka, yang dari abad ke abad lalu lintas itu semakin ramai, menyebabkan daerah ini lebih banyak dipengaruhi oleh pulau-pulau sekitarnya dan negeri-negeri di kawasan Asia Tenggara, baik dalam lapangan kebudayaan mau pun dalam percampuran suku. Lalu lintas itu sendiri dapat pula dianggap sebagai jalan kebudayaan (cultuur route) dalam perkembangan sejarah di daerah ini, dan daerah-daerah yang terletak pada atau dekat dengan urat nadi lalu lintas tersebut, telah mendapat kontak dengan kebudayaan asing, yang hampir selalu mengakibatkan terjadinya proses akulturasi di atas tubuh peradaban Indonesia asli. Peradaban-peradaban tersebut hanya merupakan lapisan tipis⁶⁹ di atas tubuh peradaban Indonesia

asli dan merupakan sumber cipta dalam perjalanan sejarah kebudayaan di daerah ini dari abad ke abad.

Penetrasi kebudayaan asing yang mula-mula telah mempengaruhi peradaban di daerah ini dengan mengikuti jalan niaga dunia via Selat Malaka, adalah peradaban Hindu (Budhisme).

4. ZAMAN BARU (+ 1500 - 1800 M)

4.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan :

4.1.1. Pertumbuhan.

Setelah Raden Patah berhasil membawa raja Brawijaya VII serta alat-alat regalia kerajaan Majapahit ke Demak pada akhir abad XV (1478) ¹, maka berdirilah kerajaan Demak kerajaan Islam yang pertama di pulau Jawa, atas bantuan adik tirinya (Raden Kusen), Arya Damar dan kaum Ulama yang bertempat tinggal di daerah pasisir Utara pulau Jawa.

Palembang sebagai negeri asal Raden Patah dengan sendirinya mengakui kekuasaan Demak, maka mulailah peranan Demak di negeri ini. Raden Patah insyaf, bahwa Demak dapat menjadi kerajaan maritim yang besar menggantikan peranan Sriwijaya diperairan Asia Tenggara, apabila dapat menguasai selat Malaka dan selat Sunda, sehingga lalu lintas niaga dunia via selat Malaka dan via selat Sunda (Nasional) di bawah pengawasannya. Oleh karena itu Malaka harus diduduki dan Palembang di tempatkan seorang panglima perang untuk menyiapkan armada (bala bantuan), yang biasanya masih ada hubungan keluarga dengan raja. Penempatan seorang Panglima perang di kota itu selain untuk menyiapkan bala bantuan untuk menyerang Malaka yang diduduki oleh

bangsa Portugis, juga untuk menjalin keamanan Palembang dari ancaman bajak-bajak laut Cina. Kelanjutan daripada rencana tersebut dapat dihubungkan dengan tulisan Meilink Roelefsz (mengambil dari Suma Oriental), bahwa Palembang membantu Pati Unus dari Jepara (Demak) dalam serangannya terhadap Malaka, di mana armada Palembang dalam serangan itu dipimpin oleh panglima Jawa dihancurkan oleh Portugis dan semua anak buah bangsawan itu mati terbunuh.² Mungkin panglima tersebut, adalah Sideng Lautan, yang dapat kita hubungkan dengan tulisan Bapak Harun Al Rasyid yang ikut serta dalam penemuan hari jadi Kota Palembang, bahwa Demak mengirimkan pangeran Sideng Lautan ke Palembang³, yang menurut pendapat A.Malik SH, pangeran tersebut memang berasal dari Palembang.

Serangan terhadap Malaka sudah direncanakan sejak tahun 1509 armada Demak pada waktu itu dipusatkan di Jepara, namun bangsa Portugis telah lebih dulu menyerang dan menduduki Malaka (1511), sehingga serangan Demak baru dilaksanakan pada tahun 1512 dan mengalami kegagalan.⁴ Konfrontasi Demak melawan Portugis, selain bersifat religius juga bermotif ekonomi, karena dengan bercokolnya Portugis di Malaka, hubungan dengan antara Jawa-Malaka terputus, sehingga hasil produksi Yawa yang surplus tak dapat di ekspor ke Malaka sebagai bandar transito.

Jatuhnya Malaka ketangan Portugis - kedudukan kota Palembang sebagai bekas pelabuhan internasional dan bekas pusat kerajaan Sriwijaya, menjadi penting kembali tidak hanya bagi pedagang-pedagang Moslem dari Malaka yang tidak mau tunduk kepada Portugis yang Nasrani itu, tetapi juga bagi pedagang-pedagang Jawa dan Cina. Banyak pedagang-pedagang Malaka melarikan dirinya ke Sumatera Utara (Aceh), Palembang dan ketempat-tempat lain yang sudah banyak didiami oleh orang-orang Muslem. Pedagang-pedagang Jawa selain mengekspor beras juga membawa rempah-rempah dari daerah Maluku ke Palembang, karena Palembang sendiri menurut laporan T.Pires bukan sebagai penghasil rempah-rempah pada waktu itu; sedangkan pedagang-pedagang Cina pergi ke Palembang untuk mencari rempah-rempah yang sangat laku di pasaran dunia⁵, dan kemungkinan besar lada yang berkualitas tinggi didatangkan dari daerah Lampung.

Tujuan Portugis untuk mematikan perdagangan Islam dengan menduduki Malaka, malah berakibat sebaliknya bangkitnya Aceh perubahan route perdagangan via selat Sunda - Jawa Barat mulai penting sedangkan pelayaran Jawa Timur berkembang lebih dari yang sudah-sudah Aceh, Demak dan Ternate menggantikan kedudukan Malaka dan Palembang lebih memperluas hubungan dengannya dengan Pahang.

Mangkatnya Raden Patah pada tahun 1518, patih Unus putera mahkota yang sebelumnya menjabat sebagai adipati Jepara, menduduki tahta dan meneruskan politik ayahnya terhadap Portugis yang membawa ide perang Salib/Katholisisme, dan berhasil merebut perdagangan rempah-rempah dari tangan pedagang-pedagang Moslem, telah mendorong Pati Unus untuk mengadakan serangan ulangan pada tahun 1521. Serangan tersebut mengalami kegagalan, dengan dihancurkannya armada Demak dan mangkatnya Pati Unus secara mendadak sesudah serangan tersebut.⁶

Oleh karena Pati Unus tidak berputra, timbullah perebutan tahta di antara putra-putra Raden Patah, yang kemudian dimenangkan oleh Sultan Trenggana (1521-1546)... sebagai penerus politik ayah dan kakaknya, memperhebat perang melawan Portugis yang mengandung latar belakang agama dan ekonomi. Konfrontasi terhadap Portugis dan serangan-serangan terhadap raja-raja Hindu di Jawa yang bekerja sama/berhubungan dengan Portugis dilancarkan. Pada tahun 1527 Pajajaran runtuh dengan diduduki kedua pelabuhannya yaitu Banten dan Sunda Kelapa, sebagai titik tumpu kuasa pengontrol selat Sunda dan sekaligus menguasai sumber lada di Lampung dan meng-Islamkan penduduknya? Sayang sekali serangan Demak ke Timur (daerah Blambangan dan Pasuruan) dalam tahun 1546 mengalami kegagalan, di samping benteng Hindu masih terlalu kuat, Sultan Trenggana sendiri mengalami nasib buruk⁸ dan mangkat dalam serbuan tersebut.

Kematian Sultan Trenggana telah menimbulkan kekacauan dalam organisasi pemerintahan Demak, karena sekali lagi timbul perebutan tahta di antara keturunan Raden Patah - Arya Penangsang putera Arya Jipang membalas dendam terhadap Sunan Parwata (putera Sultan Trenggana), yang setelah berhasil membunuh Sunan Perwata ditewaskan oleh Jaka

Tingkir (menantu Sultan Trenggana) dalam pertarungan itu. Dengan mangkatnya Arya Panangsang, maka berakhirilah pemerintahan dinasti Raden Patah di Demak (1546), dan berdirilah Pajang di bawah Jaka Tingkir dengan gelar Adiwijaya⁹, yang sebenarnya masih keturunan raja-raja Majapahit menurut garis keturunan perempuan. Oleh karena ia mendapat restu dari orang kramat Kudus (Sunan Kudus) sebagai pengganti Sultan Trenggana, maka ia merasa sebagai ahli waris mahkota dan kharisma yang syah dari dua kerajaan besar yaitu Majapahit dan Demak.

Timbulnya kericuhan-kericuhan di keraton Demak sebagai akibat perebutan tahta yang beruntun, memberi keuntungan bagi Palembang dari segi hubungannya (untaian tuan dan wakil), dan juga membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan sejarah Palembang, karena kericuhan-kericuhan itu selalu dihubungkan dengan pindahnya beberapa orang priayi dari Demak ke Palembang antara lain Ki Gedeng Suro¹⁰, yang menjaga cakal bakal sultan-sultan Palembang.

Pajang sebuah negara/kerajaan agraris yang terletak di pedalaman kurang memperhatikan kekuatan armada dan kota-kota pelabuhan, sehingga sangat menguntungkan bagi Palembang yang terletak di seberang lautan, karena ikatan dengan kerajaan Jawa yang berhak menggantikan peranan Demak di negeri ini semakin longgar.

Pajang yang telah berhasil menguasai daerah-daerah di Jawa bekas kekuasaan Demak, akhirnya dijatuhkan oleh Senapati (bupati Mataram), anak angkat Adiwijaya sendiri dan sahabat dari puteranya pangeran Bawana, pada tahun 1582¹¹ dan Sunan Kudus serta keluarga raja mengangkat Arya Penggiri menantu Adiwijaya dan putera Sunan Perwata menjadi pengganti mertuanya atas nama isterinya. Tetapi Senapati dengan bekerja sama dengan pangeran Bawana dapat menyingkirkan Arya Penggiri, dan kemudian pangeran Bawana dengan sukarela menyerahkan mahkota kepada Senapati, sehingga pada tahun 1586¹² berdirilah kerajaan Mataram. Dengan demikian Mataram yang telah mengakhiri kekuasaan Pajang, berhak menggantikan kedudukan Demak dan Pajang di daerah ini.

4.1.2. Perkembangan ;

Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, boleh dikatakan hubungan antara Palembang dengan kerajaan-kerajaan Jawa, Demak, Pajang dan Mataram, ikatannya menjadi longgar.¹² Palembang sebagai negeri maritim dengan wataknya yang khas, selalu ingin melepaskan diri dari ikatan kerajaan manapun. Oleh karena itu ketika Majapahit menguasai negeri ini, setiap kesempatan yang ada selalu ingin melepaskan diri, sehingga berulang-ulang ditaklukkan kembali.¹³

Demak yang sibuk dengan politik konfrontasinya terhadap Portugis dan serangan-serangan terhadap kerajaan-kerajaan Hindu Jawa, di keraton Demak sendiri timbul kekacauan akibat perebutan tahta, di samping Raden Patah sendiri berasal dari negeri ini, maka perhatiannya kurang tercurah ke sini. Sedangkan Pajang sendiri yang telah kami sebutkan di atas, suatu kerajaan agraris yang tidak memperhatikan potensi laut dan pelabuhan-pelabuhan, telah banyak memberikan keuntungan kepada Palembang secara tidak langsung. Peluang-peluang itu rupanya telah dimanfaatkan oleh seorang priyayi Demak yang telah melarikan diri ke sini sebagai akibat kericuhan yang terjadi dalam keraton Demak.

Dalam buku Dari Zaman Kesultanan Palembang dikatakan, bahwa Ki Gedeng Suro tiba di Palembang pada tahun 981 H. atau 1603 Masehi, tidak cocok dengan angka tahun yang terdapat pada buku nisan tersebut di Komplek pemakaman Ki-Gedeng Suro yang terletak di 1 Ilir dan dengan angka tahun dalam sejarah Banten. Serangan Banten terhadap Palembang merupakan hadiah dari pangeran Mas dari Demak yang sedang berada disana (Palembang) dalam perjalanan kelilingnya, Ia mempunyai seorang abdi di Palembang bernama Soero yang tidak setia lagi kepadanya.

P.De Roo De La Faille menganggap nama Soero dalam sejarah Banten itu sama dengan Ki Gedeng Suro dalam cerita Palembang, karena kedua sumber itu mengatakan bahwa mereka telah mempertahankan kota yang diserang dengan sekuat tenaga. Karena itulah atas kedatangan Ki Gedeng Suro dari Surabaya, bukanlah pada tahun 981 H. (1603 M.) tetapi sudah dalam tahun-tahun pertama setelah jatuhnya kerajaan

Pajang. Serangan terhadap Palembang dilancarkan (menurut sumber Belanda) bersamaan waktunya dengan kedatangan Belanda di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman (1596), dan sultan Banten yang masih muda itu gugur dalam perang jihad tersebut.

Mengenai serangan Banten terhadap Palembang yang dipimpin oleh Sultan Mohammad (1580-1596), yang dimuat dalam sejarah Umat Islam oleh Dr.Hamka, Banten merasa belum berarti sama sekali apabila pelabuhan sungai Musi yang banyak menghasilkan kekayaan bumi belum ditaklukkan oleh Banten. Padahal daerah Lampung dan Selebar (Bengkulu) sudah di bawah kekuasaan Banten, sedangkan sungai Musi yang sangat penting kedudukan bagi lalu lintas pelayaran di selat Malaka masih di luar kuasa Banten. Cita-cita itu dibesarkan oleh Pangeran Mas yang mempunyai suatu tujuan politik tertentu, yaitu ingin menanamkan kembali kekuasaan Demak di Palembang dengan dia sebagai rasanya.

Pangeran Mas adalah putera Arya Penggiri, yang setelah lari ke Banten dan tidak mendapat jabatan di sana dan kemudian mengembara ke Malaka, sedangkan Arya Penggiri mangkat di sana ketika berada di Banten. Pangeran Mas hidup di Banten sebagai seorang bangsawan agung yang rapat hubungannya dengan Sultan Mohammad yang masih muda itu. Dia inilah yang mengobarkan semangat sultan yang masih muda itu untuk merebut Palembang, inilah yang dimaksud oleh P.de Roo de La Faille mengenai serangan Banten terhadap Palembang, dengan dalih bahwa jika ayahnya Maulana Yusuf telah berhasil menaklukkan Pejajaran dan neneknya bernama Hasanuddin telah dapat memerdekakan Banten dan datuknya Fatahillah dapat merebut Sunda Kelapa (Jakarta), hendaknya ia juga menghiasi sejarah Banten sebagai "Kanjeng Ratu Banten", yaitu menaklukkan Palembang, agar terbuka jalan perniagaan yang luas di Selat Malaka, Kemudian disebutkan pulalah ia sebagai keturunan yang syah dari kesultanan Demak, dan kalau Kanjeng Ratu berkenan mengangkat dia menjadi sultan di Palembang, dia akan tetap setia kepada Banten. Bujukan yang halus inilah yang mendorong sultan yang masih muda itu untuk menganeksasi Palembang.

Rupa-rupanya penaklukan atas Palembang didukung oleh para bangsawan Banten, tetapi sebaliknya Palembang sendiri tidak memperdulikan tuntutan tersebut, Kata Yang dipertuan Palembang, Ki Gedeng Suro, adapun hak pertuanan kita adalah sama atau kita sama-sama berasal dari Demak. Bukan-kah Ki Gedeng Suro sendiri adalah salah seorang bangsawan tinggi dari Demak yang melarikan diri ke Palembang, setelah terjadi perebutan kekuasaan Pajang atas Demak ? Kalau Palembang hendak mengakui Takluk juga, bukanlah semestinya ke Banten, tetapi seharusnya ke Mataram, karena kesanalah dibawa regalia Majapahit.¹⁴ Di samping itu Palembang lebih baik mengakui Mataram, karena letaknya lebih jauh daripada letak Banten, sehingga Palembang lebih bebas bertindak.

Sudah menjadi watak masyarakat Palembang, suatu watak maritim yang selalu menginginkan kebebasan, sehingga sifat demokratisnya lebih tebal daripada masyarakat di daerah-daerah lain. Oleh karena itu ketika Adipati Majapahit di Palembang memerintah secara autorital¹⁵, orang-orang Palembang yang tidak biasa ditekan, bahkan menentang dan tidak setia, sehingga berulang-ulang ditaklukkan kembali oleh Majapahit.¹⁶

Majapahit yang beragama Hindu menganggap raja sebagai titisan dewa (raja-raja kultus atau dewa-raja kultus), mengenal tingkatan dalam masyarakat, suatu perbedaan yang tajam antara golongan atas (penguasa) dan rakyat, yang berbeda dengan Demak sebagai kerajaan Islam, yang menganggap raja sebagai manusia biasa yang menerima amanat dari Tuhan untuk membimbing umatnya. Islam tidak mengenal kasta dan semua umat (rakyat) mempunyai hak yang sama dihadapan Tuhan, yang sama halnya dengan agama Budha yang sudah mendapat tanah subur di daerah ini sebelum kedatangan Islam.

Palembang sebagai kota bandar/dagang dan bekas pusat kekuatan maritim di daerah ini, yang penduduknya mempunyai jiwa bebas tidak menerima tekanan dan kelaliman, tercermin pada keadaan kotanya yang khas, suatu kota Melayu kuno yang sebagian besar terapung di atas rakit-rakit, seolah-olah sudah siap sedia untuk pergi jika kelaliman dari tuan tanah terlalu berat untuk menekannya.¹⁷

Sebaliknya mereka mau mengulurkan tangan, apabila bantuan atau pemberian itu sifatnya suka rela, seperti Palembang membantu Pati Unus dalam menghadapi bangsa Portugis di Malaka tanpa ada syarat-syarat tertentu, sekalipun negeri itu sebagai asal Raden Patah yang telah menjadi Sultan Demak. Walaupun ada perbedaan yang tidak menyolok antara masyarakat Uluu dengan kota Palembang, tetapi secara keseluruhan wataknya sama saja, sehingga menurut penilaian orang luar dianggap perbuatan mereka itu kurang sopan.

Selanjutnya dikatakan bahwa diplomasi tidak berhasil, karena itu Banten melancarkan serangan terhadap Palembang pada tahun 1596 yang dipimpin sendiri oleh sultan Mohammad Kanjeng Ratu Banten, yang sudah memegang kendali pemerintahan sendiri, karena sudah akil balig (usia 25 tahun). Setelah perahu-perahu Banten mendarat di tepi sungai Musi, terjadilah pertempuran yang hebat dengan pihak Palembang yang dipimpin oleh Ki Gede Suro. Dalam pertempuran itu Palembang nyaris kalah, tetapi malang dan sial bagi Banten, sultan Mohammad yang berperang di muka sekali telah kena peluru dan tewas dalam pertempuran itu. Peristiwa yang tragis itu telah memaksa orang-orang Banten tidak lagi melanjutkan peperangan, dan dengan perasaan sedih mereka membawa jenazah sultannya pulang ke Banten. Setelah mangkat beliau memakai gelar "Marhun-Suro Suwan" yang menunjukkan mangkatnya sultan itu ada kaitannya dengan Ki Gede Ing Suro.

Dapat disimpulkan serangan Banten ke Palembang itu bermotif politis-ekonomi-religius dan prestise atau kesempatan seorang anak muda yang haus akan kekuasaan. Kemungkinan besar pertempuran itu terjadi di daerah Kampung I Ilir (Palembang); di sanalah sultan Mohammad tewas, yang oleh masyarakat muslim dianggap sebagai perang suci/jihad dalam penyebaran agama Islam di kalangan umat, karena daerah Sumatera Selatan terutama di daerah Uluu sebagian besar belum memeluk agama Islam. Ki Gede Ing Suro sendiri dikatakan masih beragama Hindu. Hal ini belum dapat dipastikan kebenarannya dan perlu diadakan penyelidikan yang lebih mendalam.

Mengenai Ki Gede Ing Suro, di kalangan masyarakat Palembang dan pencinta sejarah Sumatera Selatan sendiri

belum terdapat kesatuan pendapat. Menurut cerita Palembang yang dimuat dalam buku : Dari Zaman Kesultanan Palembang mengatakan; tatkala negeri Demak dikalahkan oleh Pajang, banyak raja-raja dan priyayi-priyayi yang melarikan diri, di antaranya Ki Gedeng Suro yang datang di Palembang, dan diperkirakan sama dengan Ki Gedeng Suro dalam sejarah Banten.

Menurut kata sambutan ketua DPRD Kotamadya Palembang pada pembukaan diskusi untuk menemukan hari jadi kota Palembang, sebagai berikut: Setelah Sriwijaya dikuasai oleh Majapahit, makin lama makin pudar dan lenyap, dan hanya tinggal kenangan sejarah. Kemudian muncul suatu kerajaan yang baru bernama Palembang. Pada abad XVI datang di Palembang seorang priyayi dari Demak yaitu pangeran Sideng Lautan bersama keluarganya. Salah seorang putranya kemudian bernama Kiayi Gedeng Suro membangun daerah ini menjadi kerajaan kecil yang merupakan asal mula kerajaan Palembang. Kerajaan ini berkembang yang dibangun turun temurun oleh keturunannya. ¹⁸

Menurut bapak Harun al Rasyid dan saudara Rusdi Kosim dalam kertas kerjanya, mengatakan demikian : Untuk memerintah Palembang tahun 1528 oleh sultan Demak dikirimkan pangeran Sideng Lautan, sebagai wakil sultan Demak di Palembang. Setelah pangeran Sideng Lautan mangkat, ia digantikan oleh putranya Gede Ing Suro (Tuo). Karena ia tak berputra, ketika ia wafat 1545, datanglah kemenakannya dari Jawa ke Palembang (Ki Gede Ing Suro Mudo). Ia dikatakan sebagai cikal-bakal sultan-sultan Palembang. Hanya bedanya saudara Rusdi Kosim mengatakan pangeran Sideng Lautan berimigrasi ke Palembang, dan bukan sebagai wakil sultan Demak. ¹²

Tetapi menurut pendapat bapak A.Malik, SH; Leluhur dari Ki Gede Ing Suro memang berasal dari Palembang, dan ketika Penambahan Palembang (Raden Patah) pergi ke Jawa ia ikut ke Demak (pangeran Sideng Lautan ?). Ketika Raden Patah mangkat, pangeran Sideng Lautan yang tidak senang melihat perselisihan-perselisihan di antara keturunan Raden Patah itu, pulang ke Palembang, karena ia memang berasal dari daerah ini dan masih ada hubungan keluarga dengan sultan Demak yang pertama itu. Pangeran Sideng

Lautan sebagai seorang panglima perang, tidak pernah memerintah di daerah ini, baru anaknya Ki Gede Ing Suro (Tuo) yang memerintah Palembang dan membangunnya, yang kemudian berkembang menjadi kesultanan Palembang. Ki Gede Ing Suro inilah yang dianggap sebagai cikal-bakal sultan-sultan Palembang. ²⁰

Sedangkan menurut H. Boedenani dalam bukunya : Sejarah Sriwijaya mengatakan : Pada tahun 1528, waktu pemerintahan sultan Trenggana di Demak, telah dikirim utusan ke Palembang yang diketuai oleh pangeran Sideng Lautan, yang dianggap sebagai pengganti Arya Dilah. Mengenai tahun 1528 (tahun pengangkatan dan tahun akhir tugasnya), beliau masih meragukan kebenarannya. Untuk seterusnya kekuasaan diserahkan kepada putranya - Ki Gede Ing Suro I (Tuo) memerintah 1528 - 1545, tetapi beliau tak berputra, dan untuk penggantinya harus memanggil keponakannya dari Demak beserta keluarganya, yaitu Ki Gede Ing Suro II (Mudo) 1545 - 1575. ²¹

Dari penjelasan tersebut di atas, maka mengenai asal dan waktu datangnya Ki Gede Ing Suro ada bermacam-macam pendapat, namun di antara perbedaan pendapat itu terdapat persamaannya, yaitu Ki Gede Ing Suro merupakan cikal-bakal sultan-sultan Palembang. Mengenai dari mana asal dan kapan Ki Gede Ing Suro datang di Palembang, kiranya tak perlu menjadi persoalan prinsip, tetapi yang penting ialah ia pernah hidup dan memegang peranan dalam sejarah Palembang dalam abad XVI.

Nama Ki Gede Ing Suro sudah tidak asing lagi bagi penduduk kota empek-empek ini - walaupun mereka tidak mengerti siapa sebenarnya tokoh itu - yang makamnya masih ada di daerah kampung I Ilir, yang akhir-akhir ini agak kurang dikunjungi oleh masyarakat sekitarnya, jika dibandingkan dengan makan Sabakingking yang terdapat di Kampung II Ilir. Kompleks pemakaman Ki Gede Ing Suro, merupakan tempat historis di daerah ini, yang berlokasi di daerah I Ilir + 1500 meter dari tepi sungai Musi dan luasnya + 8000 meter persegi, yang dikenal dengan nama Palembang Lamo. Kompleks pemakaman tersebut berbatasan dengan Pusri IV, bahkan dikhawatirkan apabila diadakan perluasan lagi oleh Pusri, maka daerah historis ini akan tergusur. Pada saat

ini makam itu sedang dipugar oleh Depdikbud Sumatera Selatan (Kepala bagian permuseuman), yang diharapkan dalam waktu yang relatif singkat akan dapat dirampungkan.

Dengan memperhatikan lokasi dan cerita-cerita dari pewaris tanah pemakaman dan penjaganya serta keadaan pemakaman itu sendiri - yang pada saat ini merupakan reruntuhan belaka dan dikelilingi oleh semak belukar, dapat dipastikan bahwa pada zaman dulu daerah kampung Ilir itu sangat penting dan merupakan tempat kegiatan politik yang menentukan. Di daerah ini pulalah terjadi konfrontasi terbuka antara Ki Gede Ing Suro dengan sultan Mohammad dari Banten pada tahun 1596. Kompleks pemakaman ini dulunya tempat istana Arya Damar, ²² yang terbikin dari batubata dengan ukuran yang cukup lebar dan tipis, dan barangkali bentuknya lebih muda daripada batubata yang dipergunakan di Bukit Siguntang. Baik mengenai runtuhannya yang ada di Bukit Siguntang maupun dipemakaman ini, saat ini hanya tinggal fondasinya saja, karena sudah banyak diambil oleh penduduk sekitarnya untuk bangunan rumah.

Sayang sekali hanya beberapa dari sejumlah makam tersebut (23 makam menurut keterangan penjaga yang bernama Poniman) yang terdapat di tempat itu yang masih jelas bentuknya dan sudah diperbaiki, seperti pada nisannya ada tulisan yang dapat dibaca : Ki Gede Ing Suro Tuo yang terletak dipemakaman yang paling Timur, ada tulisan: Maulana Alhabdin Nabiallaham Gedeng Suro. Pada nisan Ki Gedeng Suro Mudo ada tertulis : Raden Brahma Putra Ki Gedeng Suro, lahir tahun 815 H. dan wafat tahun 966 H., memerintah tahun 944 H. - 966 H. Pada nisan di samping makam Ki Gedeng Suro (Mudo) ini, yang dikatakan sebagai makam Panglima Natadirja (Mangkubumi), pada nisan kepala tertulis : Tanpootoualang, Laksamana Abkdullah, lahir di Maroko tahun 923 dan wafat 14 Maret tahun 1111, anak dari Tanpootounalang, Kaisar Ming, Naga Kuning. Hanya inilah yang dapat dibaca, sedangkan makam yang lainnya tidak ada tulisannya dan kesemuanya dalam keadaan tidak terpelihara.

Demikian sukarnya bagi penulis untuk menyusun suatu kesimpulan, karena data-data yang penulis kumpulkan dari sumber-sumber yang ada, tulisan pada batu nisan tersebut, tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Roo de in Faille

dan sejarah Banten yang telah dikemukakan oleh penulis di atas. Sedangkan wawancara penulis dengan beberapa orang keterangannya sangat meragukan serta bersimpang siur, dan rupa-rupanya hanya beberapa orang saja di antara orang-orang Palembang yang memperhatikan sejarah lama mengenai daerah ini, dan orang Palembang sendiri kurang animonya terhadap bidang tersebut.

Namun demikian penulis akan mencoba untuk menyusun apa yang ada, walaupun di sana sini terdapat kekeringan data-data. Dari buku yang ditulis oleh Roo de la Faille: "Dari Zaman Kesultanan Palembang" mengatakan bahwa dalam tahun 1623 raja Palembang menyuruh saudara laki-lakinya ke Jambi untuk meminang puteri Sultan Jambi untuk putranya. Pada tahun 1627 raja Pangeran meninggal dunia di Palembang. Putri kandung adalah satu-satunya ahli waris raja Pangeran ini pada tahun 1624 kawin dengan putra sulung raja Jambi, yang telah menimbulkan perebutan kekuasaan antara Pangeran Jambi dengan saudara-saudara raja Pangeran yang telah wafat itu. Dikatakan pula oleh Roo de la Faille, bahwa raja Palembang yang mangkat dalam tahun 1627 itu adalah Datuk Ki Gedeng Suro, yang mempunyai putri (Ratu Mas Palembang) dan tujuh orang putra.²³ Kalau memperhatikan sumber tersebut, seolah-olah sesudah Ki Gedeng Suro Mudo yang mangkat dalam tahun 966 H., ada Ki Gedeng Suro yang lain dan tidak satupun dari ketujuh orang putranya yang berhak memerintah - tidak mau/berani merebut tahta dari Pangeran Jambi, sehingga yang muncul paman-pamannya atau saudara-saudara raja Pangeran tersebut. Tetapi menurut hasil penelitian pada kompleks pemakaman Ki Gedeng Suro dan hasil wawancara dengan Kepala Bapparda (A.Malik SH), yang juga dari tulisan H.Boedanani dalam bukunya : Sejarah Sriwijaya, tidak disebutkan adanya Ki Gedeng Suro yang lain daripada Ki Gedeng Suro Tuo dan Mudo. Demikian juga cerita Banten yang telah disebutkan di atas, bahwa orang yang mempertahankan Palembang dari serangan Banten di bawah pimpinan sultan Mohammad adalah Ki Gedeng Suro, sedangkan Ki Gedeng Suro (Mudo) sudah mangkat jauh sebelum tahun 1596.

Berdasarkan sumber-sumber tersebut, maka dapatlah diambil kesimpulan demikian: Sebelum jatuhnya Malaka ke-

tangan Portugis dalam tahun 1511, Pangeran Sidang Lautan beserta keluarganya pulang ke Palembang - sebagai seorang panglima Perang dari Demak, yang ditugaskan untuk mempersiapkan armada guna membantu Pati Unus (Jepara) yang akan menyerang Malaka, yang telah direncanakan sejak tahun 1509. Malang baginya dalam serangan itu, karena Sidang Lautan menemui ajal dalam serangan yang dilancarkan dalam tahun 1512/1513. Pangeran Sidang Lautan tidak pernah memerintah di Palembang dan ia hanya seorang Panglima perang,²⁴ dan setelah peristiwa itu Demak kurang memperhatikan Palembang disebabkan situasi dan kondisi Demak sendiri tidak memungkinkan yaitu mangkatnya sultan Demak pertama - kegagalan Patih Unus menyerang Malaka untuk kedua kalinya - tewasnya Patih Unus (1512) dalam serangan itu, dan adanya revolusi keraton yang dimenangkan oleh sultan Trenggana. Oleh karena itu baru pada tahun 1525 keadaan agak tenang, sultan Trenggana menunjuk Ki Gedeng Suro - putra dari Pangeran Sidang Lautan yang memang sudah berada di Palembang sebagai wakil penguasa Demak di Palembang dengan gelar raja Pangeran. Maka mulailah pemerintahan Ki Gedeng Suro Tuo 1528 - 1545²⁵. Karena tak berputera, maka datanglah keponakannya dari Jawa (Demak) yang diperkirakan tiba di Palembang dalam tahun 1546 atau 1547, yaitu Ki Gedeng Suro Mudo bersama keluarganya. Ia memerintah di Palembang dari tahun 1546 - 1575²⁶ atau 944 H - 966 H. (menurut batu nisannya).

Kematian Ki Gedeng Suro yang hanya mempunyai seorang puteri dan satu-satunya ahli waris yang kawin dengan putera raja Jambi, telah menyebabkan timbulnya perebutan tahta antara Pangeran Jambi (menantu) dengan saudara-saudara Ki Gedeng Suro, yang akhirnya dimenangkan oleh Ki Mas Adipati dan memerintah sampai tahun 1587. Ia dimakamkan di sebelah selatan kompleks makam Sabakingking, yang disebut makam Penembahan. Sebagai pengganti Ki Mas Adipati ialah saudara laki-lakinya Den Arya (Raja Den Arya), pemerintahannya kurang baik. Beliau terbunuh oleh seorang suami yang baru kawin, karena raja tidak mau mengembalikan isteri orang yang sangat mempesona itu. Pemerintahannya hanya berjalan satu tahun saja, yaitu sampai tahun 1588.

Sebagai pengganti Den Arya, dinobatkanlah saudaranya yang bernama Pangeran Made Angsoko yang memerintah sampai tahun 1623. Pada masa pemerintahannya terjadi beberapa rentetan peristiwa, yaitu serangan Banten pada tahun 1596 yang dikatakan Palembang dikepung dari dua penjuru - dari laut dan darat, dengan melalui Lampung. Peristiwa lain adalah bertepatan dengan kedatangan Belanda di Banten yang dipimpin oleh Carnolis de Houtman. Rupa-rupanya orang-orang Banten dan Jawa menyebut semua keturunan Ki Gedeng Suro dengan nama Gedeng Suro (Pars prototo). Keberhasilan Hotman itu telah sampai ke daerah rempah-rempah, dan diikuti pula dengan berdirinya suatu perserikatan dagang Belanda, yang khusus beroperasi di Hindia Timur (di Nusantara) dengan nama VOC.

Palembang sebagai kota bandar yang sejak zaman dulu didatangi oleh berbagai bangsa asing seperti : Cina, Arab, India, Portugis, Inggeris, Perancis didatangi juga oleh bangsa Belanda, yang berarti menambah saingan bagi bangsa-bangsa Eropah dan sekaligus bertambah ramainya perdagangan di Palembang. Pada tahun 1617 Gubernur Jenderal Jan Piter Zoon Coen mengiriskan utusan ke Palembang - Cryn van Raemburch, dengan maksud untuk mengadakan hubungan dagang dengan negeri ini.²⁷ Penguasa di daerah ini menerima dengan baik kedatangan bangsa itu, karena hal itu akan menambah ramainya perdagangan di sini, yang berarti akan menambah keuntungan juga.

Di Mataram pada tahun 1613 terjadi suatu perubahan, dengan dinobatkannya Sultan Agung yang mempunyai pandangan yang luas dan mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh pulau Jawa di bawah kekuasaannya tahap pertama, dan pada tahap kedua untuk menguasai daerah di luar pulau Jawa. Cita-citanya ini hampir sebagian besar berhasil, tetapi ia gagal untuk mengusir Belanda dari tanah air kita, Belanda makin lama makin berhasil menanamkan kekuasaannya, dan setelah mereka berhasil membumihanguskan Jayakarta, dan kemudian mendirikan kota baru di atas puing-puing reruntuhnya dengan nama baru yaitu Batavia pada tahun 1619, dan dalam tahun 1614 Belanda berhasil juga mengusir Portugis di Malaka.

Untuk merealisasi cita-citanya itu, Sultan Agung me-

nyerang Sukadhana di Kalimantan Barat pada tahun 1621, dan menanamkan pengaruhnya di Palembang, yang dulu di bawah kekuasaan Majapahit dan kemudian Demak. Sultan Agung menghubungi Palembang, minta agar negeri ini tidak mengadakan hubungan dagang dengan VOC. (bantuan beras dari Palembang untuk Batavia), karena Mataram akan menyerang VOC. di Batavia. Ajakan Mataram ini untuk sementara dipatuhi oleh Palembang, yang pada waktu itu Palembang sedang menghadapi ancaman dari Banten (pada masa pemerintahan Pangeran Made Alit 1623 - 1624) dan pada masa pemerintahan Pangeran Seda Ing Pura (1624 - 1630). Tetapi sebaliknya pada masa pemerintahan Pangeran Seda Ing Kenayan, Belanda diberi izin untuk mendirikan lojinya di daerah ini, yang merupakan kantor dagang yang pertama di Palembang pada zaman Gubernur Jenderal Jacob Specx 1629 - 1632.²⁸ Di sini tampak Palembang tidak selalu setia kepada Mataram dan tidak mau diatur oleh orang lain dan lebih mementingkan perdagangan dan keuntungan negerinya sendiri.

Sebenarnya Pangeran Seda Ing Kenayan hanyalah menjabat sebagai Mangkubumi saja, sedangkan yang memerintah adalah permaisurinya Ratu pembayun, yang lebih terkenal dengan nama Ratu Sinuhun, yang sebenarnya adalah saudara sepupunya sendiri,²⁹ dan memerintah dari tahun 1630 - 1642. Mengenai Ratu Sinuhun ini sangat disegani dan dianggap sebagai orang yang mengkodifikasikan peraturan-peraturan adat pertama yang berlaku di daerah uluan. Itulah sebabnya pesirian Ratu yang terletak di kampung Sabakingking (tempat dukacita) sampai saat ini masih dikunjungi oleh orang-orang alim dan masyarakat Palembang, lebih-lebih pada malam Jumat Kliwon. Orang yang datang ke sana ada yang membayar kaul dan ada pula orang-orang yang akan memohon sesuatu supaya dikabulkan atau membawa kendaraannya yang baru supaya memperoleh keselamatan dalam perjalanannya. Sehubungan dengan Ratu Sinuhun ini Roo de la Faille berkata sebagai berikut :

"Pangeran Sideng Kenayan itu beristeri sepupunya nama Ratu Sinuhun, itulah yang tempel buan aturan negeri daripada hasil-hasil raja atas sekalian uluan dan yang mulai atur dari perintah-perintah tanam lada dan kasih aturan dari perintah-perintah dan

lain-lain, sehingga sampai kepada zaman ini semuanya uluan dan ada juga di dalam negeri, aturan tersebut piagam Ratu Sinuhun, tiada sekali nama suaminya Pangeran Sidang Kenayan, hanya tersebut nama Ratu Sinuhun. Lagi sampai sekarang sangat dipermulia orang uluan dan setengah orang negeri atas kuburannya, adalah tempatnya di dalam kampung Sabakingking.³⁰

Peraturan yang dipakai di daerah uluan itu disebut Undang-undang Simburtjahaya, yang disusun oleh Ratu Sinuhun yang dibantu oleh suaminya, para menteri dan alim ulama. Undang-undang ini merupakan perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam (suatu undang-undang adat asli tertua dan tertulis dalam aksara Arab - Gundul, yang dipakai sejak abad XVII.³¹ Pada zaman pemerintahan Sultan Abdurachman, undang-undang itu diperluas dengan Undang-undang Wilayah, yang bagi daerah Bangka/Belitung disebut Undang-undang Sindang Mardika. Undang-undang ini dipakai juga dalam zaman penjajahan Belanda, meskipun sifatnya berubah dari undang-undang dasar menjadi undang-undang adat (hukum adat).

VOC. yang telah menduduki Malaka pada tahun 1641 ingin memaksakan politik monopolinya atas timah Bangka sebagai bahan mentah untuk membuat peluru. Setelah mendengar bahwa Inggeris akan mendirikan benteng di daerah itu, maka timbullah persaingan antara kedua bangsa asing tersebut. Karena Raja Palembang yang bernama Pangeran Seda Ing Pasarean (1642), merasa terjepit oleh ancaman Belanda dan Banten, maka ia mendekati Mataram dengan mengirimkan utusan pangeran Mangkurat (waktu itu belum jadi raja) menghadap Sultan Agung pada tahun 1642,³² dengan maksud untuk minta bantuan dan pertimbangan dalam menghadapi ancaman yang datang dari bangsa Belanda - Inggeris. Bantuan Mataram (armada) untuk Palembang dapat dihancurkan oleh Belanda dalam perjalanan, dan kemudian secara intimidasi Belanda mempergunakan armadanya (Yacatra Wachter) dalam tahun 1643. Peristiwa itu dibalas oleh Palembang dengan tembakan dari darat dan pabrik Belanda yang terletak di Batu Ampar I Ilir dihancurkan. Beberapa orang serdadu Belanda yang tertangkap dikurung dan disiksa, meskipun ka-

pal Yacatra selamat, tetapi VOC banyak mengalami kerugian.

Oleh karena Pangeran Seda Ing Pasarean cedera dalam pertempuran itu, maka pangeran Mangkuran yang juga disebut Raden Temenggung saudara baginda tampil ke depan menggantikan raja. Karena gagal minta bantuan dari Mataram, Pangeran Mangkuran terpaksa menanda tangani kontrak penjualan lada dengan Belanda di bawah pimpinan Jeremias van Bliet, yang membawa keuntungan besar bagi VOC. yang hanya berjalan sampai tahun 1647. ³³

Rupa-rupanya raja Palembang itu tidak memenuhi kontraknya dan menolak Belanda untuk datang di Palembang, bahkan harga lada dinaikkan. Hal itu diprotes oleh pemerintah Belanda di Batavia melalui surat yang dikirimnya kepada raja Palembang. Lada dimonopoli oleh raja yang dijual kepada pedagang-pedagang Inggris dan Cina.

Belanda yang merasa sangat dirugikan atau kehilangan keuntungan besar dari monopoli lada dan perdagangan hasil-hasil hutan, tidak merelakan orang-orang lain mendapatnya. Karena itu mereka berlayar kian kemari menghadang kapal-perahu Inggris dan Cina, merampas sebuah wangkang di sungai Musi di depan Palembang, dan dengan demikian meletuslah perang antara Palembang dan Belanda. Pada tahun 1659 sebuah armada Belanda di bawah pimpinan Laksamana Van Der Laan menggempur Palembang. Suatu pertempuran yang sengit terjadi. Pertahanan-pertahanan dekat muara Plaju dan di Pulo Kembara (Kemarau) direbut. Senapati Palembang bersama putra-putranya gugur, sedangkan dikota yang dikelilingi pagar bambu, yang sebenarnya sudah kosong, ter jadi perkelahian satu lawan satu. Belanda membakar rumah-rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya. Dekat "dalam" serdadu Belanda menemukan rekan-rekannya yang ditawan dalam tahun 1658 mati dalam pasung (alat penghukum dari kayu) dibunuh dengan keris. Karena marah, Belanda membunuh hanguskan kota Palembang Lama. ³⁴

Di Palembang sendiri sudah sejak akhir pemerintahan Ratu Sinuhun, ada usaha untuk memindahkan kota Palembang Lama yang keadaannya sudah usang, karena kota itu (kecuali

istana), dibuat dari kayu, yang diperkirakan didirikan lebih kurang pada tahun 1400. Pada waktu serdadu Belanda menyerang dan masuk kota Palembang Lama sudah kosong. Penduduknya secara berangsur-angsur dipindahkan arah keulu sungai, yaitu kekota Palembang sekarang.

Melihat kotanya yang telah dibumihanguskan dan keadaan rakyatnya sangat menyedihkan, baginda raja (Pangeran Mangkurat) tidak sampai hati dan melarikan diri keluar kota sedangkan kekuasaan diserahkan kepada adiknya sendiri yaitu pangeran Ratu, yang tadinya bernama Raden Temenggung Palembang Ki Mas Hindi.³⁵ Adapun pangeran Mangkurat yang terkenal dengan sebutan Pangeran Mangkurat Sida Ing Razak atau Ki Gedeng Rajak tidak bersedia kembali ke Palembang meskipun dijemput oleh adiknya, dan kemudian mangkat di Saka Tiga (Sikil Tiga = tongkat).

Berkat jasa-jasa baik raja Jambi yang pada waktu itu bertindak sebagai orang ketiga, maka antara Palembang dan Belanda diadakan beberapa perundingan. Belanda berhasil mendapat izin dari Pangeran Ratu Ki Mas Hindi untuk mendirikan sebuah kantor dagang yangletaknya diseberang istana Sultan (di sungai Aur). Benteng tersebut pada saat ini tidak ada bekasnya.

Setelah kakaknya mangkat, Pangeran Ratu Ki Mas Hindi dinobatkan menjadi raja, dan pada tahun 1675 bergelar Sultan Abdurrahman atau Sri Susuhunan Abdurrahman. Sultan ini juga terkenal dengan nama Jamaluddin, dan dalam cerita rakyat Palembang terkenal dengan Sunan Cinde-balang yang diambil dari kata "Candiwalang". (nama makam sultan tersebut), yang berarti tempat duka cita atau tempat kesedihan³⁶, yang sekarang terletak di belakang pasar Cinde.

Sultan Abdurrahman atau Sultan Jamaluddin Candiwalang memerintah dari tahun 1662 - 1706³⁷, suatu pemerintahan yang cukup lama. Negara dan rakyatnya hidup senang, dan dalam cerita pemerintahannya teratur baik dan beliau sendiri adalah seorang yang alim. Baginda baru berani berdiri sendiri dan memproklamasikan Palembang sebagai suatu kerajaan Islam yang merdeka pada

tahun 1675, dengan nama Palembang Darussalam dan baginda memakai gelar Sultan³⁸, (setelah diketahuinya Mataram tidak lagi memperhatikan Palembang). Sebelumnya yaitu tahun 1644 dan 1668 Palembang masih mengirimkan utusan ke Mataram dengan membawa gajah dan sebagainya, yang oleh sultan Mataram (Susuhunan Amangkurat) utusan tersebut dianggap terlalu rendah, dan Palembang terlalu berani dan tidak setia, lebih menghormati Belanda di Batavia. Sebenarnya Palembang sendiri masih menghormati Mataram, terbukti dari pengiriman kapal 10 buah untuk membantu Mataram ketika Trunajaya memberontak (1677). Sejak itu hubungan sebagai bawahan boleh dikatakan terputus sama sekali.

Meskipun Palembang telah memproklamasikan dirinya sebagai suatu kerajaan Islam yang merdeka, namun tampak kekuasaannya kurang teguh, sedangkan pengaruh Belanda mulai tampil ke depan di daerah ini pada awal abad XVIII. Hal itu dapat dilihat peranan Belanda sebagai penengah atau orang ketiga dalam perselisihan-perselisihan antara raja-raja Melayu (Palembang-Jambi-Johor), Belanda mempunyai kepentingan-kepentingan khusus di daerah ini, yaitu menyangkut perdagangan lada. Hubungan raja-raja Melayu yang merupakan untaian sekutu dan sateru, mempercepat tertanamnya pengaruh/kekuasaan Belanda di negeri ini dengan politik monopoli dan divide et imperanya yang sering tidak disadari oleh bangsa kita seperti : perselisihan antara Palembang dengan Jambi tentang daerah perbatasan Tembesyi, yang dulu oleh pangeran Palembang (Ki Gedeng Suro) diberikan kepada Jambi sebagai mas-kawin kepada putri tunggalnya yang kawin dengan pangeran Jambi. Tetapi desa-desa di situ didiami oleh orang-orang yang berasal dari Palembang dan kembali lagi kepada kepala kepala mereka yang lama, sehingga hal itu menyebabkan antara Palembang dengan Jambi timbul perselisihan yang terus menerus. Dalam perselisihan itu, Belanda yang mempunyai kepentingan di kedua negeri itu telah turun tangan sedemikian rupa, demi untuk kepentingan perdagangan ladanya.

Mengenai raja ini selalu dihubungkan dengan sebuah piagam yang dipahat pada perak yang tidak bertanggal/tarikh dan demikian bunyinya :

"Kang Jeng Susuhunan ing Palembang diberikan kepada Pangeran Purbabuwana ing Pasemah, dusun Tanjungkurung ditugaskan kepadanya untuk mengumumkan di sana peraturan-peraturan raja yang berlaku umum (teliti Dalem kang lumrah), agar daerah-daerah ini dapat tumbuh dalam suasana damai".³⁹

Tampak di sini adanya hubungan antara Sultan Palembang dengan penguasa daerah Uluu berjalan dengan baik, karena adanya kepentingan timbal-balik, sehingga penguasa itu menerima perlindungan Sultan dan sebagai bukti, ia milirseba dan bersumpah di Bukit Sagontang (Siguntang) dekat makam Sekandar Alam yang rupa-rupanya sejak zaman dulu dianggap sebagai tempat keramat.

Pada tahun 1701 Sultan Abdurrahman mengundurkan diri dari pemerintahan dan hidup sebagai 'bagawan' (ulama), dan pada tahun 1706 baginda mangkat. Sebagai penggantinya ialah putranya, Raden Aria yang sejak tahun 1701 sudah diserahi tugas mengendalikan pemerintahan, dengan gelar Pangeran Ratu Senapati dan kemudian setelah menjadi raja memakai gelar Sultan Ratu Mansur. Sultan ini dikatakan memerintah selama 12 tahun (1706 - 1718), namun sebelum ia diserahi kekuasaan pada tahun 1701, ia sudah sering tampil/ikut campur dalam soal politik, misalnya dalam persoalan Tembesi dan perselisihan dengan Banten. Pada pemerintahan sultan ini pun timbul perselisihan-perselisihan di antara putera-puteranya yang semuanya berambisi untuk menjadi raja, seperti juga dalam pemerintahan Sultan Abdurrahman, Sultan Mansur pernah berselisih dengan kakaknya mengenai tahta; karena kakaknya mangkat, maka Sultan Mansur (Raden Aria) menggantikan ayahnya.

Berdasarkan nasihat keluarga raja serta pertimbangan Sultan Mansur sendiri, maka tahta tidak akan dijatuhkan kepada putranya, melainkan akan diberikan kepada saudaranya, yaitu Sultan Kamaruddin yang memerintah selama 9 tahun (1718-1727). Dalam pemerintahan Sultan ini, perselisihan-perselisihan antara putra-putra Sultan Mansur tersebut diatas berjalan terus, yaitu antara Pangeran Dipati dan adiknya Pangeran Jaya Wikrama atau dikenal juga dengan Raden Lembu. Dalam kekacauan itu VOC mengambil suatu kesempatan, bahkan kemungkinan besar bermain dibelakang layar, dan lempar

batu sembunyi tangan, sehingga Sultan Kamaruddin yang tidak mampu mengatasi keadaan terpaksa minta bantuan kepada VOC.

Dengan dalih keamanan dan keselamatan/keutuhan kerajaan, Belanda yang mempunyai kepentingan dan tujuan tertentu di daerah ini, turun tangan dengan mengirimkan sebuah ekspedisi yang terdiri dari 6 buah kapal dan beberapa buah perahu kecil di bawah pimpinan Willem Daams.⁴⁰ Pangeran Dipati (Pangeran Anom) terpaksa melarikan diri, sedangkan Sultan Kamaruddin meninggalkan kedudukannya untuk Pangeran Jaya Wikrama, yang kawin dengan putri Kamaruddin satu-satunya. Pangeran Jaya Wikrama setelah dinobatkan memakai gelar Sultan Mahmud Badaruddin (I), yang memerintah sampai tahun 1756⁴¹, dan setelah baginda mangkat dimuliakan sebagai Sunan Lemahabang, yang dimakamkan di Kampung 2 Ilir di kompleks makam raja-raja Palembang atau Pesarean Lemah-Abang.

Sebagai imbalan atas pengangkatan Sultan Mahmud Badaruddin tersebut, Belanda menyodorkan suatu kontrak baru yang disiapkan oleh Abraham Patras, dengan memakai persetujuan-persetujuan sebelumnya sebagai dasar pembayaran kembali semua biaya yang dikeluarkan oleh Kumpeni. Dengan demikian pengaruh Belanda di daerah ini semakin besar, dan keuntungan yang diperolehnya semakin banyak, karena hampir satu abad atas dasar kontrak tersebut menguasai perdagangan di daerah ini tanpa mendapat rintangan. Perdagangan Lada dan Timah Bangka yang mendatangkan keuntungan banyak, dikuasai oleh mereka, dan perdagangan VOC di daerah ini diurus dari loji Belanda di tepi kanan sungai Musi yang berhadapan dengan keraton dan merupakan kantor cabang yang berada di bawah Batavia.

Tampaklah di sini betapa merosotnya kekuasaan raja-raja Palembang dan bertambah besarnya pengaruh/kekuasaan Belanda. Meskipun dalam teorinya VOC menyatakan tidak akan campur tangan terhadap persoalan dalam negeri kerajaan ini, namun dalam praktiknya adalah sebaliknya, bahkan VOC dapat menentukan siapa yang akan menjadi Sultan, sesuai dengan keinginan dan kepentingan VOC seperti yang terjadi pada pengangkatan Sultan Mahmud Badaruddin I dan raja-raja yang kemudian.

Betapa besarnya pengaruh/kekuasaan VOC di daerah ini, lebih-lebih dalam perdagangan. Tampak dengan jelas dalam kontrak tahun 1681 dan tahun 1722 antara Sultan-sultan Palembang dengan VOC yaitu pedagang-pedagang asing berada di bawah pemerintahan dan peradilan kepala tertinggi Kumpeni.⁴² Oleh karena itu sejak kontrak-kontrak tersebut ditandatangani, peranan Syahbanda di daerah ini boleh dikatakan tidak berarti lagi. Sedangkan sebelumnya tugas Syahbandar di samping melayani kepentingan raja seperti memungut bea dari pedagang-pedagang asing, juga harus melindungi pedagang-pedagang itu dari gangguan rakyat, melancarkan perdagangan dan urusan mereka, dan juga mengusahakan supaya piutang mereka dibayar.⁴³

Tetapi di kalangan pegawai-pegawai VOC sendiri banyak terjadi penyelewengan dan korupsi, yang rupa-rupanya sudah ada sejak dulu yang merupakan salah satu faktor kejatuhan VOC. dikemudian hari. Sedangkan tekanan-tekanan dan campur tangan Belanda semakin hebat, terutama pada masalah di keraton, sering menimbulkan rasa jengkel dan tidak senang kepada orang-orang kafir itu, baik dikalangan keluarga raja mau pun di kalangan rakyat kota dan pedalaman; bahkan pernah rakyat pedalaman hampir merusak kebun ladanya sendiri karena bencinya kepada Belanda.

4.1.3. Kepemimpinan.

Dalam membahas masaalah kepemimpinan di daerah ini yaitu masa antara tahun 1500 - 1800, kami akan kembali pada masaalah kepemimpinan pada zaman sebelumnya yang telah dibicarakan pada bagian terdahulu. Meskipun zaman ini ditandai dengan masuknya agama Islam dan datangnya orang-orang Eropah di daerah ini, namun boleh dikatakan tidak membawa perubahan dalam masyarakat Sumatera Selatan. Pada dasarnya masih menganut konsepsi kepemimpinan masyarakat tradisional, yang kepemimpinannya berakar pada struktur sosial yang berdasarkan kelahiran, kekayaan dan status. Kepemimpinan formal masih tetap ada pada raja, bangsawan atau golongan aristokrat pada umumnya, yang lazim disebut sebagai klas memerintah (elite politik).

Sebagai pemegang kekuasaan elite ini mencakup formasi sosial yang merupakan asal mula kepemimpinan itu. Golongan ini memegang pemerintahan, administrasi dan memimpin perang, yang lazimnya golongan ini mencakup para penguasa daerah, birokrasi, angkatan perang, pengadilan dan urusan agama. Kehidupan golongan aristokrasi terpisah dari rakyat tidak hanya karena perbedaan kedudukan politik, tetapi juga karena perbedaan kekayaan dan status sosialnya. Raja di samping sebagai penguasa tertinggi, juga termasuk pula golongan yang kehidupan ekonominya terbaik, karena raja-raja pada zaman itu baik secara langsung mau pun tak langsung, menentukan nasib perekonomian dan perdagangan dengan segala peraturannya. ⁴⁴

Di negeri kita pada zaman itu, di kerajaan-kerajaan maritim pada umumnya, seperti Palembang yang raja beserta keluarganya dan golongan aristokrat pada umumnya, kehidupan ekonominya di samping hasil pajak (upeti) juga berdagang secara tak langsung, yang dikenal dengan sistem "Commenda". ⁴⁵ Memang harta kekayaan atau milik merupakan sebuah nilai yang banyak memberi pengaruh pada sikap hidup manusia pada umumnya, sehingga ia (pemilik) mendapat kemudahan dalam menjalankan kehendak dan kemauan di antara kawan-kawan atau di antara sesama warga masyarakat itu.

Dalam masyarakat Tradisional perbedaan antara golongan yang kultural superior dengan golongan yang kultural inferior diterima sebagai kenyataan dan dibenarkan sebagai susunan yang telah dikehendaki oleh Tuhan. Selaras dengan gambaran ini, maka dalam sejarah rakyat atau pun petani dipandang sebagai non-faktor dalam politik, sikapnya pasif dan apatis. Demikianlah gambaran masyarakat Sumatera Selatan pada zaman itu, yang sebagian besar terdiri dari petani-petani (terutama di daerah pedalaman) yang statis, pasif dan apatis, yang sampai saat ini masih tampak terutama di daerah-daerah yang alat komunikasinya kurang lancar.

Dalam mempelajari masaalah kepemimpinan masyarakat tradisional pada umumnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada zaman baru pada khususnya, selain dipergunakan konsepsi kepemimpinan tradisional yang berakar pada struktur sosial yang berdasarkan kelahiran, kekayaan dan status,

juga dipergunakan konsepsi kepemimpinan tradisional yang berdasarkan legal-rasional dan kharismatis, misalnya : Ketika Ki Gedeng Suro seorang bangsawan Jawa (Demak) memegang kekuasaan di daerah ini untuk mencari dasar legitimasi yang lebih kuat, maka dikatakan bahwa Ki Gedeng Suro keturunan dari Raden Patah atau Panembahan Palembang pendiri kerajaan Demak, yang berasal dari negeri ini, dan isterinya berasal dari keluarga Sunan Ampeldenta yang keramat. ⁴⁶

Demikian juga Ki Gedeng Suro sebagai pendiri atau cikal-bakal kesultanan Palembang dianggap mempunyai kesaktian (kharisma), kesaktian yang telah berakar lebih lama di kalangan masyarakat tradisional di daerah ini. Konsepsi kesaktian yang dimaksudkan di atas mengandung unsur-unsur animisme dan dinamisme. Walaupun daerah ini telah banyak menerima pengaruh kebudayaan dari luar - mengingat letak geografisnya pada jalur lalu lintas niaga, namun pengaruh luar itu sendiri hanya merupakan lapisan yang tipis di atas tubuh kebudayaan asli. Itulah sebabnya raja-raja Palembang seperti Ratu Sinuhun, Sultan Candiwalang, sangat dihormati dan makamnya selalu dikunjungi oleh masyarakat Palembang, bahkan raja-raja tersebut dianggap mempunyai kesaktian.

4.1.4. Pengaturan.

Palembang sebagai suatu kerajaan yang pernah di bawah kekuasaan Majapahit setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya, mendapat pengaruh dalam pengaturan pemerintahan dan kenegaraan dari kerajaan tersebut. Di daerah ini pada zaman dulu terdapat lembaga pemerintahan seperti di Majapahit yang disebut "pangcalang lima" (Raja, Adipati, Papatih, Guru atau Penghulu dan hakim-kepala atau Jaksa), yang di daerah ini sama dengan Raja yang menyebut dirinya Pangeran Palembang, Raden Temenggung adalah orang pertama sesudah raja, Pangeran Natagama adalah orang kedua sesudah raja yang tugasnya mengurus soal-soal yang bersangkutan dengan keagamaan, Kyai Temenggung Natadipraja orang ketiga di dalam pemerintahan, ketua dari pengadilan di Palembang disebut juga Natanegara. ⁴⁷

Pegawai-pegawai tinggi ini disebut Santana Manteri, sedangkan pegawai-pegawai di bawahnya disebut Manteri biasa yang terdiri atas Temenggung, Rangka, Demang dan Angabei.

Trilogi yang terdiri dari ketiga pembesar negara : pemerintahan, agama dan pengadilan raja, yang mirip dengan "trias politica" Melayu-Jawa dari Jaman Hindu, yang terdapat juga di daerah Minangkabau⁴⁸. Baru kemudian daerah itu mengenal empat pembesar yang terdiri dari : penghulu-kepala dengan tiga orang pembantunya, malim, mantri dan dubalang. Tentang empat pembesar seperti tersebut di atas dikenal juga di Palembang yang dalam rapat besar (biasanya jatuh pada akhir bulan puasa) menduduki tempat tinggi. Oleh Roo de Faille dikatakan mengenai empat pembesar tersebut di atas terdapat dalam sebuah tulisan Melayu berasal dari tahun 1822 mengenai Palembang Lama, dan digambarkan bahwa pada akhir bulan puasa Sultan menerima penghormatan dari bawahannya. Di belakang raja berjejer pada tempat yang tetap anggota keluarga, di samping sebelah kanannya Natagama (kepala alim ulama), berhadapan dengan Sultan adalah Papatih, yang di sini namanya Pangeran Natadiraja, di sebelah kiri dari Papatih duduk Pangeran Citra. Sedangkan para Pasiran Uluan dalam "seba" itu duduk di belakang Papatih.⁴⁹

Tugas dari Natagama ialah mengadili hal-hal yang menyangkut hukum agama seperti perkara orang laki-bini, warisan dan lain-lain. Sedangkan tugas Pangeran Natadiraja mencakup seluruh urusan kerajaan, baik di ibu kota maupun di daerah uluan. Ia adalah manca-negara yang pertama menjalankan hukum adat di dalam negeri Palembang serta di daerah-daerah dengan dibantu oleh Kyai Tumenggung Karta dalam soal pengadilan, yang dalam rapat resmi duduk di belakangnya dan di dalam segala hal merupakan tangan kanannya. Adapun Pangeran Citra sebagai kepala Pangalasan, yaitu polisi bersenjata dari Raja disertai tugas melaksanakan hukuman mati.

Jabatan-jabatan Manca-Negara atau Santana Manteri itu, biasanya dipegang oleh keluarga raja yang terdekat. Raja Palembang memakai gelar "Pangeran Palembang", dan baru pada masa pemerintahan Pangeran Ratu Ki Mas Hindi raja-raja Palembang memakai gelar Sultan (sejak tahun 1975).

Dari istana, raja menyebarkan pemerintahannya dan kekuasaan⁵⁰, yang dibantu oleh Santana Manteri dan kaum bangsawan pada umumnya.

Untuk daerah uluan (pedalaman) pengaturannya agak berbeda dengan apa yang terdapat di ibukota negara, dan untuk mempelajari hal itu dapat diteliti dari buku undang-undang Simbur Cahaya, yang telah dikemukakan di atas. Sebelum terbentuk dusun-dusun, terdapat talang-talang yang dikepalai oleh Poyang sebagai pemimpin tradisional. Kemudian talang-talang tersebut dikoordinasi sedemikian rupa menjadi dusun-dusun yang dipimpin oleh Krio (Beginde) dan dipecah menjadi kampung-kampung yang diketahui oleh penggawa. Beberapa dusun dijadikan satu yang disebut marga dan dipimpin oleh seorang Pasirah dengan dibantu oleh seorang Pembarap dan Penghulu dalam bidang keagamaan.

Pemerintahan di daerah tersebut dilaksanakan secara kekeluargaan, yaitu kepala pemerintahan daerah (setingkat dengan propinsi) berpangkat Rangka/Temenggung, yang biasanya dijabat oleh keluarga Sultan. Daerah-daerah itu menguasai beberapa suku yang dikepalai oleh poyang-poyang yang sangat disegani oleh anggota sukunya. Tiap-tiap suku dibagi atas marga-marga, dan masing-masing marga dikepalai oleh poyang-poyang menurut sistem patrilineal yang diberi pangkat Pasiran atau Adipati (Depati). Biasanya poyang-poyang tersebut bersahabat karib dengan Sultan dan Rangka. Betapa erat hubungan Depati di satu pihak dengan Rangka/Sultan di lain pihak, sehingga terjalinlah suatu hubungan timbal balik dan saling menguntungkan.

Rakyat di suatu marga dengan diawasi oleh Rangka, memilih seorang dari keluarga poyang untuk dijadikan Pasirah, dan setelah pemilihan selesai (demokrasi langsung), Rangka melaporkan kepada Sultan dan dari Sultanlah yang menetapkannya depiagam. Pasirah (Depati) mempunyai kekuasaan penuh setelah penetapan itu dalam marganya, yang bersifat otonom.

Marga tersebut membiayai dirinya sendiri dan semua aparat Marga tidak digaji. Kepala marga yang sudah lama memerintah mendapat penghargaan dari Sultan dengan gelar Pangeran, suatu gelar kehormatan, yang tidak berhak menjadi raja karena bukan keturunan raja. Semua biaya ditanggung oleh

Marga, sehingga di Palembang sendiri timbul istilah "marga adalah kerajaan kecil".

Marga mempunyai beberapa buah dusun (desa) yang dikepalai oleh Krio (Lurah), sedangkan di dusun ibu marga - tempat kedudukan pasirah, dikepalai oleh Pembarap yang sewaktu-waktu mewakili Pasirah apabila pasirah itu berhalangan. Urusan keagamaan di dusun Pasirah ditangani oleh Penghulu, sedangkan di dusun-dusun dikepalai oleh Khatib (Ketib). Suatu dusun terbagi atas beberapa kampung yang diketuai oleh penggawa, yang dipilih oleh semua matagawe (rakyat) dan diawasi oleh Pasirah. Demikian pula Krio dipilih oleh matagawe secara langsung di bawah awasan Pasirah. Khatib pun begitu pula yang berlaku seperti pemilihan Krio. Semua cara ini diwarisi oleh pemerintah Belanda, hanya saja peranan Sultan digantikan oleh Resident, Asisten Resident dan Kontrolir.

Dari uraian diatas tampak dengan jelas, bahwa daerah uluan sudah mengenal sistem demokrasi dan otonom, yang mungkin merupakan ciri khas kerajaan Melayu, justeru daerah uluan itu lebih murni daripada ibukota negara (Palembang) yang sudah banyak mendapat pengaruh dari luar. Bukankah sifat bebas dan demokratis itu merupakan watak umum dari orang-orang maritim ?

4.1.5. Hubungan Antar Negara.

Sebelum Sriwijaya runtuh, daerah pedalaman (daerah Batanghari Sembilan) merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang berdaulat penuh dalam urusan dalam negerinya, dan hanya urusan keluar diurus bersama-sama oleh pusat (Palembang). Seluruh daerah Sumatera bagian Selatan pada zaman itu merupakan suatu konfederasi (perserikatan negara seperti halnya Malaysia dewasa ini) dan Palembang adalah sebagai ketua perserikatan itu (Prima inter pares). Sebenarnya hubungan antara Palembang sebagai pusat perserikatan dengan negara-negara Uluan itu merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, karena Palembang seperti halnya negara-negara maritim pada umumnya, tidak mempunyai basis agraris. Kehidupan perekonomiannya dari perdagangan dan pelayaran, karena itu ia membutuhkan bahan-bahan makanan, hasil-hasil hutan seperti : rotan,

damar, lilin, gading, madu, kemudian juga lada dari daerah pedalaman. Sedangkan daerah-daerah pedalaman yang kehidupannya perekonomiannya tergantung pada pertanian tradisional (berladang) mengumpulkan hasil-hasil hutan, menangkap ikan dan lain-lain, membutuhkan pasar tempat menjual hasil-hasil daerahnya itu, di samping mereka membutuhkan garam, candu, bahan pakaian yang kasar/murah dari kota (Palembang).

Tetapi ketika Majapahit menguasai daerah ini, seluruh daerah Sumatera Selatan dianggapnya sebagai daerah wilayah kerajaan itu. Karena itu daerah pedalaman (Uluan) harus juga tunduk kepada wakil Majapahit yang ditempatkan di Palembang, antara lain Arya Damar, mungkin juga Dipati Karang Widara yang dikatakan oleh Roo de Faille sebagai bupati terakhir. Rupa-rupanya bupati ini ketika mulai bertugas di daerah ini, ia mengadakan perjalanan ke daerah pedalaman untuk memperkenalkan diri. Ia disambut dengan persahabatan oleh penguasa-penguasa setempat, yaitu : Lematang, Musi, Ogan dan Komering. Perjalanan yang dimaksud di atas dapat dihubungkan dengan apa yang ditulis Roo de Faille dalam bukunya, demikian bunyinya :

"Tersebut perkataan Raja Palembang Dipati Karang Widara, tatkala ia memerintah, banyak tangga roemah dari Lebar daun katamboen, toeloeng sanggoep boeboengan. Ialah Dipati K.W. membuat soeka seratoes iaitoe seratoes doesoen di oeloean mentjar lawangan empat, ia-itoe Lematang, Moesi, Ogan, Komering, zaman itoelah ada pangeran-pangeran oeloean. ⁵¹

Perjalanan bupati itu selain untuk memperkenalkan diri, juga bertujuan menanamkan kekuasaan Majapahit di daerah pedalaman dan harus tunduk kepada wakilnya di Palembang, harus menyerahkan Sandangbiduk (dinas angkutan) dan Batanghari Belida (Kekayaan atau hasil daerahnya) kepada penguasa baru itu. Di samping itu penguasa-penguasa pedalaman harus milir-seba tiga tahun sekali keistana penguasa di Palembang. ⁵²

Pada zaman pemerintahan Sultan-sultan Palembang, daerah Uluan (Batanghari Sembilan) dalam praktiknya masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang otonom ⁵², meskipun dalam hal-hal tertentu, misalnya urusan keluar (dengan

orang asing) diserahkan kepada Sultan Palembang. Seperti telah diterangkan di atas mereka menerima perlindungan dari Sultan, karena adanya kepentingan timbal-balik yang saling menguntungkan. Lebih-lebih pada abad ke XVII perdagangan rempah-rempah semakin ramai akibat kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang saling bersaing (Inggeris, Portugis, Belanda), sedangkan Lampung dan Bengkulu yang merupakan daerah penghasil lada telah dikuasai oleh Banten. Palembang yang sebelumnya mendapat lada dari daerah-daerah itu kehilangan sumber, lalu berusaha untuk memproduksi sendiri. Itulah sebabnya Sultan Palembang membujuk daerah-daerah Uluu untuk bekerja sama soal lada, karena Sultan memegang peranan penting sebagai penyalur dan daerah uluan sebagai produsen. ⁵⁴

4.2. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat :

4.2.1. Pemenuhan Kebutuhan Hidup.

Palembang terletak di kedua tepi sungai Musi, tempat bermuara sungai Ogan di Kertapati dan Komeri di dekat pulau Kembara Plaju. Tentulah dulu Palembang dibangun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang seksama, yaitu lalu lintas anak sungai Batanghari dikuasai karena melalui sungai-sungai itulah hasil bumi dari daerah uluan dibawa ke pusat kerajaan. Palembang selain pusat kerajaan, juga sebagai kota pelabuhan yang berfungsi sebagai bandar transit. Oleh karena itu Palembang sejak semula tumbuh dan berkembang sebagai pusat kuasa maritim, baik pada masa pra-Islam maupun pada masa perkembangan Islam. Palembang terletak dekat selat Malaka, yang merupakan urat-nadi lalu lintas pelayaran dan perdagangan Internasional dari abad ke abad, bahkan ia pernah memegang peranan penting selama beberapa abad sebagai pusat kuasa pengontrol lalu lintas pelayaran dan perdagangan di perairan Asia Tenggara. Masyarakat kota pusat kerajaan maritim seperti Palembang menitikberatkan kehidupannya pada pelayaran dan perdagangan, yaitu suatu ciri yang erat hubungannya dengan kenyataan, bahwa para pedagang lebih sesuai hidup dalam masyarakat kota bercorak maritim. Suasana di kota Palembang

bang seperti yang dilukiskan oleh Van Sevenhoven, tidak akan jauh berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Perahu-perahu datang hilir mudik membawa barang dagangannya untuk dijajakan, perahu-perahu Cina yang hilir mudik membawa bahan-bahan pakaian (tekstil), serta pemiliknya dengan muka yang berseri-seri menghitung-hitung keuntungannya. Tetapi tidak kurang pula terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian dengan terbaliknya perahu-perahu mereka, sehingga habislah barang dagangan dan keuntungannya yang diperolehnya.⁵⁵

Nampak dengan jelas, bahwa Palembang merupakan kota yang sibuk, suatu kota Melayu Kuno yang khas, yang sebagian besar terdiri dari rakit-rakit yang terapung di atas air, seolah-olah siap untuk pergi setiap saat apabila kelaliman dari tuan-tuan tanah terlalu berat menekan. Tetapi juga selama beberapa abad merupakan negara yang mengelilingi suatu keraton Jawa, yang memberi corak sedemikian jauh⁵⁶, sehingga pengaruhnya sekarang juga masih terdapat di dalam bahasa dan lembaga-lembaga kehidupan.

Panorama yang dilukiskan oleh orientalis-orientalis tersebut di atas, sampai saat ini masih nampak dengan jelas di kota Palembang. Sungai Musi yang penuh dengan perahu-perahu tambangan dan rakit-rakit yang hilir mudik menjajakan barang dagangannya seperti : sayur-sayuran, buah-buahan, ikan basah dan kering, barang-barang kelontong, tekstil, barang pecah belah dan lain-lain. Kadang-kadang rakit-rakit dan perahu-perahu merupakan pasar kecil yang terapung di atas air. Perdagangan itu tidak hanya dilakukan oleh penduduk kota saja, tetapi juga oleh orang-orang uluan yang milir membawa hasil hutan dan tanamannya⁵⁷ melalui anak-anak sungai Musi, ikut serta meramaikan pasar-pasar terapung itu.

Menurut laporan Pires, kecuali raja pembesar-pembesar dari kerajaan maritim itu pun turut mengadu untung dalam berbagai usaha perdagangan dan pelayaran, Kadang-kadang raja itu tidak memiliki kapal sendiri, tetapi memiliki saham dalam kapal dan perahu yang pulang pergi dari Malaka. Sistem patnerchip demikian yang berlaku dalam sebagian besar perdagangan di negeri kita ini pada zaman itu disebut "Commenda". Oleh karena itu dikerajaan maritim seperti

Palembang, baik kekuasaan politik mau pun ekonomi dipegang oleh raja dan kaum aristokrat yang mendominasi perdagangan sebagai pemberi modal atau kadang-kadang sebagai peserta. Pengawasan terhadap perdagangan dan pelayaran merupakan sendi-sendi kekuasaan mereka, yang memungkinkan kerajaan memperoleh penghasilan dan pajak yang besar.

Untuk memungut semua penghasilan di dalam susunan birokrasi kerajaan, dibentuklah jabatan-jabatan "syahbandar" dan penarik-penarik pajak dengan pangkat mantri-pajak kelautan. Syahbandar biasanya dipegang oleh orang-orang asing -(yang pada masa perkembangan Islam di-daerah ini) yang beragama Islam. Betapa pentingnya peranan Sultan Palembang dalam perdagangan. Bagindalah yang mengatur harga dan menandatangani kontrak-kontrak dengan pedagang-pedagang asing, yang dapat dihubungkan dengan sepucuk surat yang dikirimkan oleh Gubernur Jenderal Belanda di Batavia kepada Sultan.⁵⁸ Selain berdagang, golongan priyayi dari tingkat tinggi (pangeran), yang biasanya dianugerahi dusun/marga oleh Raja sebagai pinjaman, memenuhi sebagian kebutuhan hidup mereka dari hasil dusun/marga tersebut. Di samping itu ada juga dari hasil pemeliharaan budak karena hutang dan budak belian yang disuruhnya mengerjakan sawah, memelihara perahu-perahu tambang/biduk-biduk. Sedangkan priyayi-priyayi lainnya yang tidak mendapat dusun/marga, selain berdagang, memelihara budak, juga hidup dari hasil kerajinan tangan dan kerajinan rumah tangga yang biasanya dikerjakan oleh para miji dan wanita-wanita isteri dari priyayi-priyayi (menenun songket, kain tajung Palembang, menyulam dengan benang emas).

Lapisan masyarakat kebanyakan atau non-elite dari kerajaan maritim ini, selain berdagang juga menangkap ikan, bertukang (tukang rumah, tukang emas, perak, besi untuk alat-alat rumah tangga dan pertanian, tukang perahu) membuat jala, menganyam dan lain-lain, dan bagi kaum wanita : menenun songket, membatik, menyulam dan membikin makan-makanan untuk diijakan. Mereka biasanya hidup berkelompok-kelompok sesuai dengan keterampilannya, dan tempat mereka tinggal sesuai dengan keahliannya seperti : kampung Kepandean, kampung Kamasan, kampung Kuningan dan sebagainya.

Masyarakat uluan pada umumnya kehidupan perekonomiannya mereka didasarkan pertanian tradisional (ladang), menangkap ikan dan mengumpulkan hasil-hasil hutan seperti : damar, rotan, madu/lilin, margasatwa, gading dan lain-lain. Semuanya dibawa ke kota dengan melalui sungai, karena lalu-lintas yang melalui darat hampir tidak ada. Jalan-jalan yang melalui darat baru mulai dibuat oleh pemerintah Belanda, setelah adanya perkebunan-perkebunan Asing dan ditemukannya sumber-sumber minyak bumi di daerah ini pada akhir abad XIX atau awal abad XX. Garam dan bahan-bahan pakaian (tekstil) untuk daerah uluan didatangkan dari pusat kerajaan secara barter.

4.2.2. Hubungan Antar Golongan :

Seperti lazimnya masyarakat tradisional di negeri kita ini, terdiri dari kelompok-kelompok yaitu; kelompok menurut suku, menurut kepercayaan, menurut pekerjaan dan menurut struktur sosial (kelahiran). Dalam membahas hubungan antar golongan pada zaman 1500-1800, penulis akan menitikberatkan pada hubungan antara penguasa/yang memerintah dengan golongan yang diperintah/rakyat biasa. Dalam hubungan ini, penulis akan membedakan antara masyarakat yang tinggal di pusat kerajaan dengan masyarakat yang tinggal di daerah uluan yang belum banyak mendapat pengaruh dari luar.

Palembang sebagai sebuah kerajaan tradisional masyarakatnya lebih banyak seluk beluknya dari pada masyarakat modern atau masyarakat uluan, yang mencerminkan susunan masyarakat yang sederhana. Tetapi baik masyarakat di pusat kerajaan mau pun di daerah uluan, dapat dibagi atas dua golongan besar yaitu, golongan penguasa dan golongan yang diperintah. Di pusat kerajaan, raja adalah sebagai kepala pemerintahan yang mengatur pemerintahan (politik) di segala bidang dan masyarakat, yang dibantu oleh keluarganya sebagai pegawai tinggi (sentana menteri) dan juga oleh golongan priyayi (aristokrat), sebagai pegawai tingkat dua yang disebut Mantri biasa.

Golongan priyayi terdiri dari pangeran, raden dan masagus - di samping sebagai pegawai-pegawai raja (mantri

biasa) - juga ada yang dikarunia dusun/marga sebagai pinjaman yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali ⁵⁹, dengan kewajiban membantu raja dalam perang bersama anak buahnya serta perahu-perahu yang dipersenjatai. Sedangkan diwaktu damai mereka membantu mengambil balok-balok kayu (untuk rumah dan perahu). Mereka yang mendapat karunia/pinjaman dusun/marga adalah priyayi yang masih erat hubungannya dengan raja, yang bergelar Pangeran, ⁶⁰ yang biasanya adalah paman dari ayah-ibu raja atau paman raja sendiri, tetapi juga kadang-kadang orang-orang yang disayangi oleh raja. Sedangkan golongan priyayi yang tidak mendapat pinjaman/memerintah dusun atau marga, hidup dari hasil kerajinan mas, perak dan kerajinan tangan halus lainnya, berdagang dan lain-lain.

Golongan rakyat (non elite) yang jumlahnya lebih besar dari golongan elite, terdiri dari Kiyai-mas, kiyai-agus dan rakyat biasa (orang-orang miji, orang-orang senan, orang-orang yang menggadaikan diri dan budak belian). Kiyai-mas dan kiyai-agus diharuskan ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan ringan dan halus. Sedangkan orang-orang miji yang sama dengan mata-gawe di daerah uluan, tidak dipungut pajak tetapi diharuskan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan raja, pangeran dan Raden seperti : ikut berperang bersama alingannya (keluarganya), melakukan pekerjaan tangan atau membuat karya-karya seni, yang sifat hubungannya tidak terikat dalam arti mereka bebas memilih tuannya yang baru, apabila tidak puas dengan tuannya yang lama. Orang-orang Senan yang tingkatnya lebih rendah dari pada miji, hanya boleh bekerja untuk Raja, yang dapat dibandingkan dengan "abdi dalem" di Jawa. Orang-orang yang menggadaikan diri (karena hutang) dan budak-belian, tidak berhubungan dengan Raja, tetapi berhubungan langsung dengan orang-orang yang meminjamkan uang pada mereka atau pada orang yang telah membelinya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan : pertama, adanya hubungan antara Raja dengan golongan aristokrat, sebagai kepala/atasan dengan pembantu/bawahan dan sebagai tuan tanah dengan peminjam tanah; kedua, hubungan antara miji-miji dengan Raja dan bangsawan sebagai mata-gawe,

yang mengerjakan pekerjaan Raja dan kaum aristokrat tersebut tanpa upah, tetapi mereka tidak dikenai pajak; ketiga hubungan antar orang-orang Senan dengan Raja sebagai abdi dalem, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Raja seperti : membuat/memperbaiki rumah Raja, membuat/memperbaiki perahu-perahu Raja, mendayung untuk Raja dan lain-lain; keempat hubungan antara orang yang menggadaikan diri dengan orang yang meminjamkan uang, yang sifatnya sementara sampai hutangnya dapat dibayar; kelima hubungan antara budak belian dengan tuannya yang sifatnya sangat mengikat.

Masyarakat uluan yang susunannya lebih sederhana, hanya terdiri dari golongan penguasa/ yang memerintah dan golongan rakyat biasa/ yang diperintah. Golongan penguasa/ yang memerintah di sini dipilih oleh seluruh rakyat yang sudah berhak memilih, meskipun dalam prakteknya pemilihan ini masih berdasarkan status sosial (kelahiran) dan kesaktian (kharismatis). Sedangkan golongan rakyat biasa/ yang diperintah, yang terdiri dari kelompok-kelompok. Kelompok terkecil adalah keluarga, himpunan keluarga membentuk "kampung", himpunan kampung membentuk "dusun", dan himpunan dari dusun-dusun membentuk "marga". Semua mereka ini merupakan mata-gawe dari pemerintahan marganya, yang diharuskan membayar pajak untuk kepentingan pemerintahan marga serta pamong marganya, karena pada waktu itu para pamong marga tidak digaji oleh Sultan. Pajak pada waktu itu mungkin dalam bentuk natura (padi, hasil kebun, ikan, hasil hutan dan lain-lain). Di sini tampak hubungan antara penguasa dan rakyat biasa bersifat kekeluargaan.

4.2.3. Kepemimpinan.

Dalam membahas masalah kepemimpinan dalam masyarakat di daerah Sumatera Selatan ini pada masa 1500 - 1800, penulis tidak dapat melepaskan diri dari konsepsi kepemimpinan masyarakat tradisional yang berdasarkan kesaktian (kharismatis), serta kehidupan keagamaan dan peranan kaum alim-ulama (Kiyai) di daerah ini pada waktu itu.

Tradisi memberi banyak contoh tentang kesaktian dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama, baik pada zaman pra-Islam, mau pun pada zaman sesudah masuknya Islam di daerah ini, misalnya : Poyang-poyang atau kepala-kepala suku pada

zaman pra-Islam yang dianggap seorang gagah perkasa oleh rakyatnya, selain berfungsi sebagai mengatur warganya dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari, secara otomatis memimpin warganya dalam kehidupan kerohanian. Ia memimpin upacara-upacara pembukaan hutan, upacara-upacara membuka ladang/sawah, upacara-upacara mengempang sungai, upacara-upacara sesudah mengetam dan lain-lain. Ia dapat memaksakan kehendaknya pada sumber kekuatan alam (minta hujan atau sebaliknya). Di samping itu ia juga dapat memaksakan kehendaknya pada warganya, semua perintah dan larangannya dituruti oleh mereka, karena semua kata-katanya dianggap mengundang tuah.

Sesudah Islam masuk di daerah ini, para mubalig, kiyai-kiyai, guru-guru agama dan haji-haji dalam proses Islamisasi ke daerah pedalaman, harus mengikuti kondisi dan situasi dari daerah itu demi mempermudah pekerjaannya, karena masyarakat pedalaman adalah masyarakat tradisional-irrasional yang masih diliputi oleh suasana religio-magis. Kiyai Delamat salah seorang mubalig yang terkenal dan berjasa dalam peng-Islaman daerah pedalaman (MUBA, MURA) selain menyebarkan ajaran Islam (sembahyang, mengaji dan lain-lain), mendirikan mesjid-mesjid juga sering memperlihatkan/adu kesaktian (ilmu kebal, ilmu menghilang dan lain-lain). Kiyai-kiyai lain memperlihatkan suatu mujizat misalnya ia duduk di tempat tidurnya, tetapi ia dapat menjalankan ibadat haji di Mekkah. Hal-hal yang serupa banyak terjadi pada waktu itu menurut cerita orang tua-tua.

Oleh karena masyarakat daerah ini adalah masyarakat tradisional-irrasional yang masih diliputi oleh suasana religiomagis, maka kesaktian atau tuah menjadi ukuran kepemimpinan/kekuasaan, di samping kebolehan dalam bidang pengetahuan agama, keterampilannya dalam menyebarkan ajaran-ajaran agama, berkhotbah dan lain-lain. Dalam hal ini, wibawa serta keperibadian yang kuat dari seorang tokoh pemimpin, juga memegang peranan penting. Sering kita baca dalam sejarah, betapa besar pengaruh/kekuasaan kaum ulama atau para Kiyai di negeri kita, terutama di daerah pedesaan, yang kadang-kadang melebihi kekuasaan penguasa penguasa setempat atau raja.

Itulah sebabnya raja-raja atau Sultan Palembang dalam pemerintahannya selalu merangkul kaum alim-ulama di daerah ini, yang dalam pemerintahan berfungsi sebagai kepala agama atau penghulu yang dibantu oleh para khatib atau ulama tingkat rendah, yang tugasnya menanggulangi masalah masalah yang berhubungan dengan agama misalnya, perkawinan, kematian, kelahiran, perceraian, perwalian dan kejahatan terhadap agama.⁶¹ Dalam tingkatan kepegawaian raja, Penghulu adalah sama dengan Pangeran, sedangkan para ulama lainnya (bawahan) adalah sama dengan gelar-gelar para pegawai tingkat bawahan (Mantri biasa). Jika ia anggota pengadilan penghulu, kedudukannya sama dengan Tumenggung, dan khatib rendah sama dengan Demang. Semua modin-modin atau ulama-ulama biasa yang melayani mesjid-mesjid sama dengan Angabei.⁶²

Dari uraian di atas, tampak betapa pentingnya peranan kepemimpinan kaum agama (alim-ulama) dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, dalam segala bidang kehidupan masyarakat daerah ini, sehingga tidak kurang kiyai-kiyai terutama di daerah pedesaan (uluan) dianggap keramat. Begitu besar pengaruh mereka di kalangan masyarakat pada waktu itu, bahkan pada zaman penjajahan Belanda dan juga pada zaman berikutnya, sehingga mereka selalu dicurigai dan ditakuti oleh pemerintah penjajahan, sebab kata-kata, perintah dan larangannya dianggap mengandung tuah atau kesaktian. Tidak kurang kaum agama mengerahkan/memimpin rakyat untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda yang dianggap kafir, dengan mengobarkan semangat perang "jihad". Bahkan dizaman repolusi fisik peranan mereka sangat diperlukan dan tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan golongan lainnya. Tidak kurang kiyai-kiyai yang turut aktif dalam mengatur strategi perang dan masuk hutan ikut bergerilya untuk mengerahkan massa dengan semboyan perang jihad melawan kafir.

4.2.4. Pengaturan Masyarakat.

Pada umumnya masyarakat di negeri kita keadaannya boleh dikatakan sama di mana-mana, terdiri dari berjenis-jenis kelompok, ada kelompok menurut suku, ada yang menurut kepercayaan dan ada pula yang menurut pekerjaan.

Di samping itu ada pula kelompok yang berdasarkan status sosial. Sumatera Selatan sebagai kerajaan maritim yang pada dasarnya tidak mengenal tingkatan masyarakat, tetapi setelah mendapat pengaruh dari luar (Jawa) masyarakat di daerah ini khusus di pusat kerajaan mengalami suatu perubahan, di mana masyarakatnya terdiri dari : Raja beserta keluarganya; golongan priyayi (Pangeran, Raden dan Masagus); golongan rakyat (non-elite) yang terdiri dari Kiyai-mas, Kiyai-agus, dan rakyat jelata (orang-orang miji dan orang enan); dan golongan budak (budak karena hutang dan budak belian). Semua susunan masyarakat pusat kerajaan dan gelar-gelar para bangsawan/pegawai raja diatur dan ditetapkan oleh raja. ⁶³

Meskipun masyarakat di pusat kerajaan ini telah mendapat pengaruh dari luar (Jawa) dan mengenal tingkatan sejak masuknya pengaruh/kekuasaan Majapahit di daerah ini ⁶⁴, namun sifat maritimnya tidak dapat dilepaskan, yaitu perbedaan antara masyarakat dari tingkat atas dan tingkat bawah tidak begitu tajam dan menyolok seperti di Jawa. Di Jawa (Majapahit) menganggap raja sebagai titisan dewata, sehingga menimbulkan raja-dewa-kultus dan dewa-raja-kultus. Sedangkan di daerah ini raja dihormati dan disegani, apabila ia berjasa kepada rakyat dan kepada agama, misalnya : Ratu Sinuhun dan Sultan Abdurrahman atau Sultan Candiwalang. Pada umumnya raja-raja di sini tidak bertindak sendiri dan sewenang-wenang, lebih-lebih dalam hal yang penting tidak berani mengambil keputusan sendiri dan selalu minta pertimbangan dewan negara bahkan pada para Pasirah di uluan. ⁶⁵

Raja tinggal di istana yang terbuat dari batu, yang dikelilingi oleh parit atau kambang atau di kelilingi oleh tembok yang tinggi dan berlapis-lapis yang lebih menyerupai benteng. Karena itu istana raja/sultan Palembang yang peninggalannya masih ada sampai sekarang ini disebut benteng. Dari sinilah rupanya aktifitas pemerintahan dilancarkan, yang dibantu oleh keluarga raja dan kaum bangsawan pada umumnya. Sedangkan kaum bangsawan yang masih dekat hubungannya dengan Sultan, tinggal di sekitar istana rumah-rumah bertiang yang terbuat dari kayu, sehingga Raja/Sultan dari segi keamanan terjamin.

Di Palembang pada waktu itu dikatakan oleh Van Sevenhoven dan Roo de Faille tidak terdapat rumah batu kecuali istana Sultan. Hampir seluruh rumah baik rumah kaum bangsawan mau pun rakyat biasa terbuat dari kayu dan pada umumnya bertiang. Sering juga di daerah ini kaum bangsawan mengalami kemunduran dan jatuh miskin akhirnya akan kembali menjadi rakyat biasa, karena mereka tidak menerima warisan dari leluhurnya, tidak berdagang atau bertani.

Rakyat biasa atau golongan non-elite, tinggal terpisah dari golongan aristokrat dan tinggal berkelompok-kelompok di rumah-rumah kayu yang bertiang atau dirakit-rakit di atas air. Sebenarnya golongan ini yang jumlahnya lebih besar dari pada golongan bangsawan, merupakan tenaga penunjang bagi Raja serta golongan bangsawan, mereka dibutuhkan waktu perang dan damai, sehingga kedudukan sosial/ekonomi raja stabil. Mereka boleh dikatakan non-aktif dalam pemerintahan, dan walaupun ada yang duduk dalam pemerintahan, jumlahnya sangat sedikit dan hanya sebagai pegawai rendahan.

Golongan yang terendah adalah golongan budak, yang dapat dibagi atas : budak karena hutang yang sifatnya sementara sampai hutangnya dapat dibayar dan budak belian yang sifatnya sangat mengikat dan biasanya mereka ini di exploatir oleh tuannya, sehingga hilanglah kebebasannya. Orang bisa juga jatuh menjadi budak apabila melanggar adat atau bersalah kepada raja. Tidak sedikit diantara mereka karena takut kehilangan kebebasannya melarikan diri ke dalam hutan yang untuk selanjutnya hidup terasing. ⁶⁶

Rupa-rupanya perdagangan budak sudah umum di negeri kita pada zaman itu. Demikian juga di Palembang budak merupakan barang dagangan yang di ekspor ke Malaka di samping beras, bawang merah, bawang putih, daging, arak, hasil hutan seperti : rotan, madu, damar, kapok dan sedikit emas dan besi. ⁶⁷

Tenaga budak itu sangat diperlukan sebagai buruh-buruh kasar di pelabuhan dan sebagai pendayung-pendayung perahu kaum bangsawan. Memang sangat tepat apa yang dikatakan oleh van Sevenhoven, bahwa golongan budak adalah golongan yang paling celaka. Biasnya budak belian itu diperoleh dengan mengadakan ekspedisi khusus ke daerah

luar ⁶⁸, kapal-kapal, perahu-perahu atau junk-junk khusus mencari budak-budak berlayar di sepanjang pantai daerah yang dituju, menangkap anak-anak yang sedang bermain-main, gadis dan bujang yang sedang mandi atau menangkap ikan di laut/pantai. Cerita tentang kapal-kapal bajak laut yang mencari budak pernah penulis dengar di Bali. Walaupun cerita itu bertujuan untuk menakut-nakuti anak-anak yang senang sekali bermain dan mandi di laut atau di pantai, namun cerita itu sendiri mempunyai nilai historis. Bahkan nenek-nenek di sana sering menyanyikan ratapan seorang yang jatuh ketangan bajak-laut dan kemudian dijadikan budak belian. Cerita itu dapat kita hubungkan dengan tokoh sejarah, Untung Surapati, yang konon adalah seorang budak yang berasal dari Bali. Hal yang tidak mustahil adanya persamaan cara dengan cara mencari budak di Bali dengan di daerah ini, di mana perampok-perampok Cina sambil membajak menangkap orang-orang untuk dijadikan budak, yang kemudian dibawanya ke Palembang atau langsung ke Malaka.

Selain golongan-golongan tersebut di atas, masih ada golongan orang-orang asing: yaitu orang Cina, Arab, India dan lain-lain. Orang-orang Cina tidak diizinkan tinggal di darat, mereka harus tinggal di air/laut, dan berjumlah + 800 jiwa ⁶⁹, Sedangkan orang Arab dan orang asing lainnya tinggal di antara penduduk, dan jumlah orang Arab + 500 jiwa. Orang-orang asing ini pada umumnya adalah pedagang, karena itu mereka biasanya lebih senang dekat pasar dan tinggal berkelompok. Kemungkinan pedagang-pedagang asing itu adalah orang Muslim, terutama yang dibolehkan tinggal di darat bercampur dengan penduduk. Pedagang-pedagang Muslim ini, selain berdagang juga sambil menyebarkan agama di kalangan umat, karena di dalam Islam setiap Muslim merasa berkewajiban menyebarkan ajaran-ajaran Islam sebagai missionaris atau mubalig ⁷⁰. Tidak sedikit di antara orang-orang asing itu mempunyai peranan penting di dalam istana Raja, dan tidak kurang pula di antara mereka yang menjabat jabatan penting dalam kerajaan, seperti jabatan sahbandar yang pada umumnya terdiri dari orang-orang asing ⁷¹.

Masyarakat Uluu susunannya lebih sederhana daripada masyarakat di pusat kerajaan, yang hanya terdiri dari go-

longan penguasa yang dipilih oleh rakyat dan berasal dari rakyat, dan golongan rakyat biasa. Masyarakat uluan seperti telah kami singgung di atas lebih asli dan lebih demokratis daripada masyarakat di pusat kerajaan. Masyarakat Uluan diatur berdasarkan undang-undang Simburcahaya, yang merupakan perpaduan antara hukum adat dan hukum agama Islam. Kelompok terkecil dalam masyarakat di uluan adalah keluarga; himpunan keluarga-keluarga membentuk "kampung" dan sebuah kampung dikepalai oleh seorang "penggawa"; himpunan dari beberapa kampung membentuk "dusun" yang dikepalai oleh seorang "Kerio"; dan beberapa dusun merupakan "marga" yang dikepalai oleh Pasirah. Sedangkan Penghulu dan pembantu-pembantunya bertugas mengatur/mengurus masyarakat dalam masaalah-masaalah yang menyangkut agama, misalnya: masaalah perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan lain-lain.

4.3. Kehidupan Seni Budaya.

4.3.1. Pendidikan

Pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di daerah Sumatera Selatan, sistim pendidikan di daerah ini tidaklah seperti sekarang, di mana pendidikan pada waktu itu tidaklah dipusatkan di sekolah (pendidikan formal), melainkan pendidikan di sini diadakan secara tidak resmi, yang dilaksanakan oleh kaum ulama atau kiyai secara suka rela di rumah-rumahnya. Pekerjaan itu dipandang sebagai suatu amal/ibadah, karena erat hubungannya dengan penyebaran agama Islam di daerah ini.

Sebelum kedatangan Islam di daerah ini, nenek moyang kita telah mengenal suatu sistim pendidikan, yang erat hubungannya dengan masuknya kebudayaan Hindu (Hinduisme) di negeri ini. Seperti telah kita ketahui masyarakat Hindu terdiri dari empat golongan, yaitu : Brahmana, Kasatria, Waisya dan Sudra, yang ditentukan oleh kelahiran. Masing-masing golongan mempunyai cara hidup, adat kebiasaan, hukum, hak dan kewajiban sendiri-sendiri; dan tiga golongan yang disebutkan terdahulu meliputi keturunan bangsa Arya, haruslah melalui tingkat-tingkat hidup yang telah ditentukan, yang disebut catur-asrama (empat tingkat hidup).

Setiap anak laki-laki dari keturunan mereka, harus melalui tingkat hidup yang dimaksud, tingkat hidup mana yang mula-mula diserahkan kepada seorang guru (Brahmana) untuk belajar isi kitab suci Weda. Tingkat hidup ini disebut tingkat hidup Brahmacarin, yaitu anak tersebut menghambakan diri kepada gurunya dan tunduk kepada segala pemali yang diharuskan. Jika sudah tamat pelajarannya, datanglah tingkat hidup baru, yang disebut tingkat hidup "grehasta". Pada tingkat ini ia sebagai kepala keluarga harus memenuhi segala kewajibannya terhadap anak dan isterinya, yaitu kewajiban sehari-hari yang diharuskan oleh agama dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Setelah meningkat usianya, ia bersama isterinya mengasingkan diri dari dunia ramai masuk kedalam hutan sebagai penghuni hutan, yang disebut tingkat hidup "Vanaprasta". Dan akhirnya ia hidup bertapa dengan mengembara tidak membawa apa-apa kecuali pakaian yang dipakai. Tingkat hidup terakhir ini lazim disebut "sanyasin".

Dalam tingkat hidup Brahmacarin, setiap anggota dari ketiga kasta yang tertinggi waktu mudanya, tinggal di rumah Guru sebagai murid, dalam arti mereka betul-betul menjadi anggota dari keluarga Guru⁷². Oleh karena itu sistim pendidikan yang seperti itu disebut sistim "Gurukula", dan sistem pendidikan semacam itu mungkin terdapat di Palembang, yang hanya diberikan kepada calon pendeta⁷³, karena fungsi dalam masyarakat sebagai pemimpin agama. Murid dan guru tinggal dalam satu asrama, seperti juga halnya yang terdapat didalam pendidikan islam yang disebut "sistem zawiyah"⁷⁴. Disamping mereka menerima pelajaran secara lisan dari gurunya, mereka harus mencari makan untuk guru dan dirinya dengan jalan mengemis. Selama belajarsu murid dalam segala tindakannya harus menghindarkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati gurunya, dan murid harus patuh pada segala perintah guru.

Apabila muridnya hanya satu atau dua orang, biasanya mereka duduk di sebelah kanan sambil mendengarkan pelajaran yang diberikan. Tetapi kalau lebih dari dua, mereka duduk berkeliling menghadapi gurunya⁷⁵, seperti yang kami ketahui dalam pendidikan dan pengajaran Islam tradisional yang disebut "sistem berhalaqah", yang sampai saat seka-

rang ini masih terdapat di dusun-dusun di daerah pedalaman Sumatera Selatan yang letaknya terisolasi, dan tidak terdapat pendidikan formal. Ketika pelajaran akan dimulai mereka mencium telapak tangan guru/kiyai dan berkata : "Silakan Guru baca" , yang dijawab oleh guru dengan suara berat : "Ya". Biasanya pelajaran ini diberikan dengan suara yang tinggi dan diulang-ulang beberapa kali. Kemudian murid yang pertama mengulangi perkataan yang semula, dan selanjutnya mereka masing-masing mendapat giliran untuk mengulang kembali kata-kata tersebut. sistem yang demikian itu adalah seperti yang terdapat di daerah Sumatera Selatan di langgar-langgar sebelum dimodernisasi⁷⁶. Jika tidak terdapat kesulitan dan sudah hafal, maka murid yang pertama sebagai guru mulai mengulangi semua pelajaran itu kembali dan akhirnya menyalami serta mencium telapak tangan guru/kiyai sebagai tanda pelajaran sudah berakhir/tamat.

Tingkat hidup brahmacarin yang berlaku bagi setiap anggota ketiga kasta tertinggi itu, terdapat juga dalam masyarakat Muslim, yaitu sudah ada undang-undang wajib belajar yang tidak tertulis, yang mengharuskan anak laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 7 tahun untuk belajar mengaji Al Qur'an. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa di mana terdapat masyarakat Muslim atau Kiyai, di sana mulai adanya pengajaran Islam yang merupakan prototype dari pada proses pertumbuhan pesantren yang sebenarnya⁷⁷. Rencana pelajaran yang tertentu dan sistematis tidak ada, sehingga tidak dapat dipastikan berapa jam setiap harinya pelajaran diberikan, dan sesudah berapa tahun murid itu dianggap menamatkan pelajarannya. Begitu pula belum memiliki peraturan yang tertentu sebagai syarat penerimaan murid, baik mengenai usia maupun tingkat kecakapan murid, sehingga terdapat murid dari berbagai tingkatan usia. Hal ini pada permulaan tidak diperhatikan, karena tujuan pertama ialah penyebaran agama Islam. Karena itu setiap murid harus dapat membaca seluruh ayat-ayat suci dengan baik. Kiyai mengajar murid-muridnya di rumahnya dengan cuma-cuma, hanya kadang-kadang murid-murid itu dengan secara sukarela membawa beras, ketan, sayur-sayuran, ikan dan lain-lain ke rumah kiyai/guru, karena

banyak di antara murid-murid itu tinggal di rumah kiyai menjadi keluarga kiyai dan mengerjakan semua pekerjaan rumah kiyai, misalnya: mengambil air minum, menyapu rumah, mengerjakan sawah guru secara gotong royong. Pendek kata kiyai/guru mengajar hanya karena Allah semata-mata ⁷⁸ atau kebanyakan kiyai-kiyai itu mengajar karena niat beribadat.

Murid-murid dianggap sudah dapat menamatkan pelajarannya apabila ia sudah dapat bersembahyang, mengaji al Qur'an dengan baik, yang diakhiri dengan suatu upacara yang disebut "bertamat", yang biasanya upacara itu dijumpukan pada hari-hari besar Islam seperti Isra' miqraj atau Maulud Nabi, sehingga upacara bertamat itu diadakan sekaligus dengan upacara peringatan hari besar tersebut. Biayanya biasanya ditanggung secara gotong royong antara kiyai dengan penduduk dusun, dan seluruh penghuni dusun yang sudah berumur diundang dalam upacara tersebut. Murid-murid yang tamat itu diarak sepanjang dusun, dan sesudah itu disuruh mengaji, seolah-olah membuktikan kebolehan mereka. Biasanya sesudah tamat mengaji barulah mereka memikirkan untuk berumah tangga, dengan meminang seorang gadis dusun, karena pada umumnya orang tua sigadis akan menjodohkan putrinya dengan pemuda yang sudah tamat mengaji. Hal yang digambarkan di atas pada umumnya terdapat hampir di seluruh daerah Sumatera Selatan, terutama di daerah uluan seperti : di daerah MUBA, daerah OKI, daerah OKU dan lain-lain. Upacara bertempat itu masih ada sampai pada saat menjelang pendudukan Jepang di daerah Sumatera Selatan.

Pada umumnya kiyai/guru itu adalah orang-orang yang telah tamat belajar agama Islam dan untuk beberapa tahun tinggal menetap di negeri Arab, sehingga mereka betul-betul dianggap memiliki pengetahuan agama yang cukup banyak dan saleh, bahkan di samping itu mereka dianggap keramat. Oleh karena itu penghargaan dan penghormatan masyarakat dan murid-murid kepada kiyai-kiyai itu sama besarnya dengan penghargaan terhadap kaum Brahmana dalam masyarakat Hindu ⁷⁹, sehingga mereka selalu dianggap benar bahkan mempunyai tuah. Hal yang demikian itu masih tampak sampai sekarang ini di dusun-dusun.

4.3.2. Kesenian.

Memberikan suatu analisis mengenai seni budaya di daerah Sumatera Selatan ini, penulis tidak dapat melepaskan diri dari peranan induk sungai Batanghari Sembilan yang dari abad ke abad telah menjadi alat komunikasi dalam proses penyebaran seni budaya di daerah ini. Oleh karena itu baik bentuk mau pun isi seni budaya itu sendiri memiliki pola dasar yang sama, pola dasar yang menunjukkan pola dasar anti dinamik, yang sebenarnya tidak sesuai dengan watak maritim pada umumnya.

Menurut pengamatan serta wawancara-wawancara yang penulis lakukan terhadap orang-orang yang mempunyai pengetahuan dalam bidang itu, bahwa pada zaman dulu daerah ini, baik di pusat kerajaan mau pun di daerah uluan mengenai beberapa cabang kesenian seperti : seni rupa (seni bangunan, pahat, ukir), seni suara (gambelan, musik, nyanyi), seni gerak (tari, pencak/silat), seni kerajinan rumah tangga (tenun, nyulam, mengayam, membuat perhiasan emas dan perak) dan keterampilan membuat perahu, biduk, rakit dan lain-lain.

Akan tetapi seni budaya di daerah ini dalam perkembangannya dewasa ini, tidak begitu mengalami kemajuan yang pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti: Jawa, Sumatera Barat, Bali, Jawa Barat dan lain-lain. Bahkan ada beberapa cabang kesenian yang disebut di atas yang boleh dikatakan hampir punah misalnya: gambelan, pahat, ukir, batik dan lain-lain. Seni ukir/pahat, seni batik pada zaman dulu juga dikenal di daerah ini, tetapi kemudian tidak berkembang dan akhirnya hilang⁸⁰, hal itu dapat dihubungkan dengan banyaknya lemari dan peti ukuran antik yang dibeli dari uluan dan juga terdapat di rumah-rumah penduduk di kota, yang dikatakan merupakan warisan dari nenek moyang mereka dan berasal dari zaman yang sudah lama sekali. Bahkan batik yang berasal dari zaman dulu masih ada disimpan oleh beberapa orang penduduk daerah ini.

Sedangkan gambelan yang dewasa ini hanya dikenal di beberapa daerah saja seperti : di daerah OKU, LIOT, MURA, pada tahun limapuluhan atau pada zaman sebelum revolusi fisik masih dikenal di daerah OKI, MUBA dan lain-lain.

Apabila Badan Pembinaan Kebudayaan Daerah tidak turut tangan, dikhawatirkan seni gambelan ini pun akan lenyap di daerah ini. Di samping itu serdam (semacam terompet) dan genggong yang juga dibunyikan dengan mulut juga dikenal di zaman dulu, yang pada saat ini hampir lenyap juga. Gambelan di sini terdiri dari : kromong, gendang, ketipung dan lain-lain, Lagu-lagunya, di samping yang berirama gembira kebanyakan berirama sedih misalnya : lagu nasib, lagu dana dan banyak lagu rakyat. Semua lagu-lagu di seluruh daerah Sumatera Selatan pada umumnya polanya sama, yaitu irama, syair-syairnya sama hanya bahasanya menurut dialeknya masing-masing.

Ada pun tari-tarinya gerakannya anti-dinamis, yang pada umumnya gerakannya berpusat pada tangan, sedangkan kaki, pinggul, bahu, mata hampir tidak turut ambil bagian. Tari-tarian yang telah berusia tua adalah : tari sinjang, tari dana, tari nasib, tari tanggai, tari sekapur sirih dan lain-lain. Di samping itu daerah ini sejak zaman dulu telah mengenal pencak/silat disebut "kuntao", dari namanya tampak adanya pengaruh Cina.

Seni kerajinan rumah tangan seperti tenun, sulam, tisik dan lain-lain, sejak zaman dulu telah dikenal oleh masyarakat di daerah ini, bahkan sampai saat ini masih berkembang terutama di kota dan beberapa daerah di uluan seperti di OKI (Meranjat, Pondok, Tanjung Pinang). Tenun songket, menyulam tajung biasanya dikerjakan oleh kaum wanita. Kain songket dan tajung Palembang sangat halus dan bagus. Kerajinan membuat barang-barang logam rupa-rupanya sejak zaman dulu dikenal terbukti dari adanya nama kampung yang bernama Pandan atau Kepandean. dan Kamasan (emas). Keterampilan membuat perahu, biduk dengan berbagai bentuknya dan rakit mungkin lebih tua dari yang lain-lain, hal mana dapat diterima, karena Sumatera Selatan sebagai daerah maritim/sungai, sedangkan sungai merupakan satu-satunya alat komunikasi pada zaman dulu disamping daerah ini banyak menghasilkan kayu besar dan bagus.

4.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan

4.4.1. Perkembangan Agama

Untuk memberikan penjelasan tentang perkembangan agama di daerah ini, penulis tidak dapat melepaskan diri dari peranan jalan yang tradisional via Selat Malaka, yang dari abad ke abad memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama, sejak nenek moyang kita mengenal kebudayaan Hindu dan agama Islam. Lalu lintas dunia yang melintasi tanah air kita dari segala jurusan, merupakan jalan kebudayaan (cultuurroute) dalam perkembangan sejarah kebudayaan Indonesia. Bahkan daerah-daerah yang terletak pada atau dekat dengan urat nadi lalu lintas itu, mendapat kontak dengan kebudayaan asing, yang hampir selalu mengakibatkan terjadinya proses akulturasi di atas tubuh peradaban Indonesia asli. Peradaban tersebut hanya merupakan lapisan tipis⁸¹ di atas tubuh peradaban Indonesia asli yang berpola Austris dan merupakan sumber cipta dalam perjalanan sejarah Indonesia dari abad ke abad. Penetrasi kebudayaan asing yang mula-mula telah mempengaruhi peradaban Indonesia dengan mengikuti jalan niaga dunia adalah peradaban Hindu⁸².

Melalui jalan niaga tradisional via Selat Malaka dan Selat Sunda itu pulalah Islam masuk ke negeri kita via saudagar-saudagar Arab, India dan Parsi, baik secara disengaja maupun secara tidak disengaja telah mengimpor agama itu ke negeri kita ini, yang kemudian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kenegaraan bangsa Indonesia pada umumnya, dan terutama mengadakan kontak dengan daerah-daerah pesisir atau pelabuhan yang dilintasi atau dekat dengan rute perdagangan itu⁸³.

Meskipun sangat sukar untuk menentukan secara tepat tanggal dan tahun masuknya Islam di Asia Tenggara pada umumnya dan Sumatera Selatan khususnya, namun para ahli dalam bidang agama mempunyai suatu kecenderungan, bahwa pada abad pertama ekspansi Islam keluar jazirah Arab⁸⁴, yang pada waktu itu kerajaan Sriwijaya sedang mengembangkan kekuasaannya, Islam sudah mulai merembes melalui jalan niaga tersebut di atas, walaupun belum mendapat tempat

berpijak yang tangguh ⁸⁵, karena penguasa-penguasa setempat di daerah-daerah itu pada khususnya Sumatera Selatan, masih memegang teguh agama lama mereka yaitu Hindu dan Buddha.

Pedagang-pedagang Islam yang terdiri dari orang-orang Arab, India dan Parsi mengalir terus mendatangi pantai-pantai Timur Sumatera dengan menjalankan tugas ganda, yaitu di samping berdagang mereka juga sebagai penyebar agama, sehingga mereka boleh dikatakan sebagai "missionarishandelsman". Dan tidak sedikit dari mereka ini yang menetap di daerah ini, asimilasi dengan penduduk setempat dengan jalan perkawinan dengan putri-putri penguasa bandar, yang merupakan alat untuk memudahkan hubungan dagang dan untuk menyebarkan agama mereka, karena peng-Islaman melalui orang-orang ningrat ini memudahkan penyebaran agama Islam ke rakyat biasa ⁸⁶.

Munculnya Perlak pada akhir abad ke-12, kerajaan Samudra Pasai pada akhir abad ke-13, yang didirikan oleh pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Mesir, Marokko, Parsi dan Gujarat, yang diberikan oleh Marco Polo, tidak dapat disangkal bahwa Islam telah mendapat tempat berpijak yang kuat di daerah pesisir Timur Sumatera bagian Utara. Dan lahirnya Malaka yang bercorak Islam pada awal abad ke-15, besar kemungkinan bahwa pada abad ke-13, 14 dan 15 jalan laut antara Asia Barat dan Asia Timur seberapa besar berada di bawah kekuasaan pedagang-pedagang Jawa ⁸⁷. Lahir dan berkembangnya negara-negara yang bercorak Islam itu, sangat erat hubungannya dengan situasi politik di kerajaan Sriwijaya pada waktu itu.

Penetrasi Islam keseluruh Nusantara ini, setelah kemunduran dan keruntuhan kekuasaan Majapahit, yang dipercepat oleh kedatangan bangsa Portugis di perairan Asia Tenggara pada permulaan abad ke-16. Kejatuhan Malaka pada tahun 1511, berpindahnya piedaterra golongan Muslim ke Sumatera Utara - bangkitnya kerajaan Aceh (Sultan Iskandar Muda) - berubahnya rute perdagangan via Selat Sunda - mempercepat timbulnya kerajaan Banten (1527), maka penetrasi Islam ke daerah Sumatera bagian Selatan dari segala jurusan semakin intensif. Orang-orang Malaka yang tidak

mau tunduk di bawah kekuasaan bangsa Portugis melarikan diri ke daerah-daerah sekitarnya antara lain ke Palembang, sebab antara kedua negeri itu terdapat hubungan genealogis⁸⁸.

Runtuhnya kerajaan Sriwijaya pada akhir abad XIV - dilancarkannya ekspedisi Ming di bawah Cheng Ho pada awal abad ke-15 di perairan Asia Tenggara - kedatangan bangsa Portugis yang membawa penyakit perang salib - revolusi keraton Demak yang terjadi dalam abad ke-16, mempercepat proses Islamisasi di daerah ini. Palembang sebagai negeri asal Raden Patah pendiri kerajaan Demak, mengakui kekuasaan Demak dan berkembang menjadi pusat ekspansi baru dengan Islam sebagai motor pendorong yang kuat.

Masuknya Islam di daerah ini melalui dua jurusan, yaitu : dari jurusan Utara melalui Palembang yang dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim, karena Palembang di samping sebagai pusat kerajaan Sriwijaya, juga sebagai kota bandar transito di Asia Tenggara, dan diperkirakan akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Islam sudah masuk; dari jurusan Selatan, yang dibawa oleh para mubalig Islam dari Banten, Demak dan Mataram.

Kemungkinan besar pada akhir abad ke-7 atau sekurang-kurangnya asal abad ke-8 mengingat letak geografisnya, yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Akan tetapi sebelum sempat berkembang, telah diusir oleh golongan penganut agama Buddha Mahayana (720)⁸⁹, yang pada waktu itu merupakan golongan dominan di kerajaan Sriwijaya, dengan bantuan armada Tiongkok (dynasti Tang), bantuan itu selain bermotif agama juga bermotif ekonomi, karena pedagang-pedagang Cina tidak mau disaingi oleh pedagang-pedagang Arab. Akan tetapi penetrasi Islam di daerah ini tidak dapat dibendung, justeru letak geografisnya pada rute perdagangan, dan akhirnya negeri ini pada abad ke-17 memproklamkan dirinya sebagai kerajaan Islam yang merdeka.

Proses Islamisasi di daerah pedalaman atau uluan agak berbeda dengan yang di pusat kerajaan (Palembang), di mana peranan para mubalig, kiyai, guru-guru agama, haji-haji, sangat penting. Di samping itu peranan sungai Musi dengan

anak-anaknya (Batanghari Sembilan) tidak kalah pentingnya, justeru sungailah satu-satu alat komunikasi pada waktu itu. Dengan naik perahu menghudik sungai para mubaligh pribumi menyebarkan agama dengan gigihnya sampai ke Muara Beliti, Curup, Musi Rawas dan lain-lain 90.

Islamisasi daerah MUBA dilakukan oleh mubaligh-mubaligh yang datang dari Jambi dan Palembang, yang terkenal antara lain Haji Sepuh Jambi yang tidak jelas tahun kedatangannya, dan yang dari Palembang bernama Kiyai Marogan H.Abd.Hamid (1825 - 1890) 91, yang kemudian pekerjaannya diteruskan oleh muridnya Kiyai Delamat yang namanya sampai dewasa ini sangat terkenal di kalangan penduduk, karena jasanya dalam peng-Islaman daerah ini dan mendirikan mesjid-mesjid di tiap-tiap dusun. Kapan dimulainya Islamisasi di daerah ini kurang jelas.

Sedangkan Islamisasi di daerah MUBA telah dimulai sejak tahun + 1682 oleh Bujang Jawe Gelar Mangkubumi yang berasal dari Demak yang dibantu oleh Penghulu Jalil, yang di samping mengajar agama juga mengajar penduduk setempat yang masih hidup berkelompok-kelompok dalam hutan tentang bercocok tanam, mendirikan rumah dan lain-lain. Kiyai Delamat yang telah berjasa di daerah MUBA juga berjasa dalam peng-Islaman daerah ini, dan semua methodemethodenya yang diterapkannya di MUBA dipraktekkannya juga di sini, seperti adu kesaktian misalnya, karena masyarakat di pedalaman masih diliputi oleh suasana religio-magis.

Peng-Islaman daerah OKU dan OKI dilakukan oleh mubaligh-mubaligh yang datang dari Banten dan Demak, yaitu Tuan Umar Baginda + 1575 untuk daerah OKI, yang menurut cerita ia adalah putra dari Sunan Gunung Jati, dan pada tahun + 1600 ia pergi ke daerah OKU. Oleh karena sulitnya komunikasi di daerah pedalaman pada umumnya, maka proses Islamisasi di daerah-daerah itu sangat lamban, yang diperkirakan berkisar antara abad ke-16 sampai dengan abad ke-20, sehingga awal abad ke-20 seluruh penduduk daerah ini menjadi Muslim. Pada abad ke-17 di daerah OKU datanglah mubaligh-mubaligh dari Padang bernama Umpu di Padang, dari Palembang Syeik Muhammad Saman, dan pada tahun 1656 H. Juana dari Banten, yang mendirikan pesantren di Marga Padang Suku II; tahun 1750 Kms.Jambi dari Palembang; dan

pada tahun 1850 di daerah Martapura datang H. Jamaluddin dari Martapura Kalimantan. Daerah yang paling akhir di Islamkan ialah Muara Dua (OKU) antara tahun 1900 - 1918 bersamaan dengan kebangkitan Syi'ar Islam secara lebih merata dan mendalam, kebangkitan mana merupakan reaksi terhadap anggapan pemerintah Hindia Belanda, bahwa bangsa Indonesia (umat Islam) tidak bersungguh-sungguh menjalankan ajaran agamanya.

Ada pun Islamisasi daerah LIOT yang mula-mula + 1311 berdasar tulisan di atas kulit kayu yang diketemukan di dusun Muara Danau Semendo, hanya tidak disebutkan siapa mubalighnya. Dan kemudian tahun + 1395 disiarkan oleh dua orang ulama : Syekh Mahmud Ratu dan Syekh Alam Raja Kuasa Kute Talang Gumilang Ayek Lematang. Di samping itu tahun + 1342 dua orang ulama mendirikan pondok sebanyak 40 buah + 3 Km dari Muara Enim sekarang, yang dijadikan pusat pendidikan agama Islam di daerah itu, dan ulama-ulama itu Syekh Jalil Cakrabirawa dan temannya Ahmad Mahmud. Dan selanjutnya Syekh Jalil itu menyiarkan agama ke gunung Demp (1412).

Islamisasi daerah Lahat diperkirakan pada abad ke-17 (+ 1600) sejak Talang Tumeten Tujuh diresmikan menjadi Perdipo, yang menjadi pusat penyebaran Islam di daerah Pagar Alam dan daerah-daerah lain di seluruh kabupaten Lahat. Mubaligh yang terkenal adalah Baharuddin Nuryakin bergelar Puyang Awak yang berasal dari Jawa.

Sedangkan Islamisasi daerah Bangkalan Belitung tidak dilakukan oleh mubaligh-mubaligh dari Palembang, Jambi atau Jawa, tetapi dari Johor, yang mula-mula terjadi pada abad ke-16 yang dilakukan oleh Tuan Serah dari Johor yang menjadi Wakil Sultan Johor di Bangka. Kemudian pada abad ke-17 datang Nukhada Sulaiman orang Arab dan Qori berasal dari Batu Sangkar yang bersama-sama anak-anak dan cucunya mendirikan mesjid di Muntok. Ada pun mubaligh yang datang di Belitung Syekh Abubakar alias Sayid Hasan dari Pasai yang mendirikan mesjid yang pertama kali di Belitung.

4.4.2. Pengaruhnya.

Penetrasi Islam di daerah ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada umumnya dan kehidupan kenegaraan khususnya, mendesak kedudukan agama Buddha yang sebenarnya hanya merupakan lapisan tipis di atas tubuh kebudayaan Indonesia asli. Walaupun pada mulanya Islam hanya tersebar di kalangan pedagang-pedagang dan tingkatan atas dari masyarakat pusat kerajaan, tetapi akhirnya Islam diproklamasikan menjadi agama negara pada abad ke-17 pada pemerintahan Sultan Abdurrahman atau disebut juga Sultan Ratu Abdurrahman atau Jamaluddin Sultan Candi Walang (1662 - 1706), ketika itu Palembang menjadi negara Islam yang merdeka. Oleh karena itu sejak abad ke-17 itu boleh dikatakan bahwa Islam secara sah menggantikan kedudukan agama negara yang lama (Buddha). Dengan demikian Islam juga menjadi agama seluruh penduduk pusat kerajaan, karena pada umumnya di negeri kita agama raja adalah agama rakyat.

Kaum ulama dirangkul oleh Sultan ikut duduk dalam pemerintahan - hukum Islam mendampingi hukum adat - mesjid dan langgar mulai banyak dibangun yang dijadikan pusat pendidikan (agama), sehingga dengan demikian Islam betul-betul memegang peranan dan mempengaruhi kehidupan keagamaan serta pendidikan masyarakat di daerah pusat kerajaan pada umumnya. Diproklamasikannya Islam sesuai dengan agama kerajaan berarti para mubalig mendapat dukungan moril dari Sultan dalam peng-Islaman daerah pedalaman.

Palembang sebagai pusat kerajaan memegang peranan dalam ekspansi Islam ke daerah pedalaman - para mubalig mengudik sungai memasuki daerah-daerah uluan - mengajar penduduk mengaji Al Qur'an, sembahyang, hukum agama - mendirikan mesjid-mesjid, sehingga akhirnya pada awal abad ke-20 seluruh penduduk daerah pedalaman menjadi Muslim. Bahkan di kalangan orang-orang yang mampu pergi ke tanah suci (Mekkah) menunaikan rukun Islam yang ke-5, dan kadang-kadang tinggal untuk beberapa tahun di sana untuk memperdalam pengetahuan agama, yang setelah kembali ke tanah air mengamalkan pengetahuannya di kalangan umat. Betapa besarnya pengaruh Islam di kalangan masyarakat, sehingga agama Islam merupakan alat yang ampuh dalam menentang kafir.

4.5. Hubungan ke luar.

Bentuk Hubungan dan Akibatnya

Di dalam cerita-cerita dari mulut ke mulut atau hikayat, kita jumpai cerita perang antar kerajaan-kerajaan maritim Indonesia, khusus mengenai kesultanan Palembang, yang pernah menjadi bandar transito di daerah perairan sebelah barat Indonesia. Pada umumnya perang tersebut mencerminkan persaingan antar kerajaan untuk menguasai suatu tempat strategis, dilihat dari segi pelayaran perdagangan (ekonomi) dan faktor psikologis, asalnya prestise kerajaan yang pernah mencapai kebesaran di zaman dulu. Tetapi sering juga kita mendengar hubungan kerajaan dengan negara luar, berjalan atas dasar hormat menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Beberapa alasan yang telah membuat kerajaan ini menjalankan politik damai seperti : hubungan genealogis, untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, menantikan saat yang baik untuk mengadakan serangan dan untuk sementara mengadakan hubungan persahabatan dulu dan sebagainya.

Tetapi untuk daerah ini, lebih dititikberatkan kepada faktor ekonomi. Lada, bahan yang dari abad ke abad merupakan sumber kekayaan negara yang menguasainya, objek yang mengakibatkan faktor ekspansi, dilakukannya politik ekstirpasi dan kemusnahan daerah yang menghasilkannya, telah menyeret kesultanan Palembang ke gelanggang perdagangan Internasional, hubungan kontrak memonopoli dengan bangsa-bangsa Asing Eropah, pokok sumber kekayaan nasionalnya dan sumber keruntuhannya pula. Itulah sebabnya bahan dagang utama ini amat mempengaruhi politik kerajaan, pangkal sebab ekspansi dan pokok pertikaian dan pergeseran antara keraton seperti ekspansi Banten ke daerah Lampung dalam tahun 1596. Demikian juga perselisihan antara Palembang dan Jambi, yang tidak hanya berdasarkan faktor historis dan prestise - karena Jambi pernah menjadi bandar (river port's cavital) sebelum Palembang memegang peranan penting dalam percaturan politik dan ekonomi, pada dasarnya untuk menguasai sumber lada di daerah ini. Perselisihan Palembang dengan VOC yang juga berpangkalnya pada bahan dagang utama tersebut - di samping hasil-

hasil bumi lainnya, yang pada akhirnya telah membawa keruntuhan kerajaan ini pada awal abad ke 19.

Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15, peranan kerajaan itu di daerah ini diambil alih oleh Demak, sehingga terjalinlah hubungan antara kedua kerajaan itu dalam untaian tuan-dan-wakil. Dalam prakteknya hubungan antara tuan-dan-wakil tidak begitu terasa oleh Palembang, karena kerajaan Demak secara resmi tak pernah mengangkat/mengirimkan wakilnya untuk memerintah negeri ini, justru Raden Patah sendiri berasal dari Palembang, di samping situasi politik negeri itu tidak mengizinkan. Tetapi hubungan yang terjalin berdasarkan genealogis itu, telah membawa kerja sama yang lebih mantap dalam menghadapi bangsa Portugis di Malaka⁹². Setelah kekuasaan Demak diambil alih oleh Palembang sebagai kerajaan agraris, hubungan antara tuan-dan-wakil menjadi longgar, karena kerajaan tersebut kurang memperhatikan faktor maritim dan kota-kota pelabuhan. Oleh karena itu Palembang yang terletak di seberang laut agak leluasa mengadakan hubungan datang dengan bangsa Portugis.

Kemudian setelah kekuasaan Pajang diambil alih oleh Mataram, antara Palembang dan Mataram terdapat juga hubungan seperti di atas, namun kadang-kadang tampak hubungan dalam untaian sekutu-dan-sekutu, artinya antara Palembang dengan Mataram terdapat hubungan sebagai sahabat dan sebagai musuh silih berganti. Hubungan Palembang dengan siapa pun selalu diperhitungkan dari segi keuntungannya sendiri. Itulah sebabnya ketika Mataram melarangnya untuk mengadakan hubungan dagang dengan VOC - sementara waktu ditaati - kemudian dilanggarnya, karena larangan Mataram tersebut tidak menguntungkannya dan ia memihak pada musuh Mataram. Tetapi ternyata VOC memaksakan politik monopoli ladanya atas daerah ini yang ternyata lebih merugikan. Palembang yang sekarang merasa terjepit - VOC dengan politik monopolinya - Banten yang selalu ingin menguasai daerah ini dengan motif yang sama - Aceh (Sultan Iskandar Muda) yang sedang melancarkan politik ekspansinya ke arah Selatan yang berbahaya bagi Palembang, maka ia terpaksa kembali ke Mataram. Ia lebih baik tunduk kepada Mataram yang letaknya lebih jauh dari pada VOC , Banten

dan Aceh yang lebih dekat, di samping itu Mataram dianggap sebagai pewaris legitinasi dan kharismatis dari dua kerajaan besar sekaligus, yaitu Demak dan Majapahit. Hubungan antara tuan-dan wakil itu hanya berlangsung sampai tahun 1675, karena pada saat itu Palembang memproklamasikan diri sebagai negara Islam merdeka.

Sedangkan hubungan Palembang dengan orang-orang asing selalu dipertimbangkan dari segi agama dan perdagangan, sehingga sikapnya terhadap orang-orang asing itu antara bersahabat dan mencurigai. Sultan tidak mengizinkan orang-orang Cina tinggal di darat pada mulanya, karena pada umumnya mereka non-Muslim dan mengingat sejarahnya mereka keturunan bajak-laut yang ditakuti akan membawa kekacauan. Tetapi orang-orang Arab, India yang Muslim dibolehkan tinggal di darat bercampur dengan penduduk; sikap yang demikian dilaksanakan dengan penuh konsekwenensi.

5. ABAD KE 19 (+ 1800 - 1900)

5.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan

5.1.1. Keadaan pada tahun + 1800.

Ditinjau dari visi Belanda abad ke-17 adalah abad keemasan baginya, karena hasil bumi Indonesia telah turut menciptakan kemakmuran pemerintah di negeri Belanda, di samping kemunduran-kemunduran dan habisnya kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia, kecuali kesultanan Palembang. Sebaliknya abad ke-18 merupakan abad keruntuhan dan kemunduran Belanda dalam dunia internasional. VOC hancur karena potensi Belanda di Lautan telah diambil alih oleh Inggris, sedangkan keadaan di Indonesia pada waktu itu masih sempurna dan tidak ada kemiskinan yang luar biasa. Kekuasaan Belanda hanya terbatas pada kota-kota pelabuhan saja, sehingga belum terdapat perubahan struktur kemasyarakatan. Oleh karena itu Colenbrander dalam bukunya menyatakan abad ke-18 adalah penaklukan seluruh pulau Jawa .

Abad ke-19 merupakan abad yang sangat penting artinya bagi Indonesia pada umumnya, dan bagi Palembang pada khususnya, karena merupakan abad kolonialisme dan imperialisme momen. Setelah VOC bubar pada tahun 1799, Indonesia

(Ooctkintische-Bezittingen) diserahkan kepada Republik Bataaf, dan setelah negeri Belanda jatuh ke tangan Prancis, maka pulau Jawa di bawah pengaruh Prancis sampai tahun 1811. Kemudian pulau Jawa direbut oleh Inggris di bawah Raffles, dan diserahkan kepada Belanda dalam tahun 1816. Tetapi Raffles sendiri masih tetap bertahan di Bengkulu, sehingga kesultanan Palembang menghadapi dua kekuatan imperialis, yaitu Belanda dan Inggris. Inggris dan Belanda sebagai pembawa ide dalam revolusi Prancis dalam bentuk liberalisme, maka faham tersebut berhadapan dengan kerajaan Palembang sebagai kerajaan maritim tradisional. Sistem monopoli yang akan dipaksakan oleh Belanda dan Inggris di daerah ini, telah membawa konsekuensi yang tragis bagi perkembangan kerajaan Palembang.

Seperti telah diketahui di kerajaan Palembang memerintah berturut-turut: Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikrama atau Sultan Lemabang (1724-1757), yang kemudian digantikan oleh putranya Sultan Ratu Akhmad Najamuddin I Adikusuma yang memerintah tahun 1757-1775, yang digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Muhammad Bahauddin yang memerintah pada tahun 1775-1803². Pada umumnya pemerintahan raja-raja tersebut di atas, hanya meneruskan pemerintahan raja-raja sebelumnya, demikian juga dalam sikapnya/politikanya terhadap orang-orang asing (Belanda dan Inggris). Sistem pemerintahannya, pengaturan masyarakatnya, demikian juga hukum yang dipakai tidak mengalami perubahan. Hubungan Sultan-sultan itu dengan penguasa-penguasa (Pasirah) Uluhan tetap berjalan seperti biasa, yaitu sebagai sahabat, dan pasirah-pasirah uluan tetap ikut dalam "Seba" dalam akhir bulan puasa atau rapat besar kerajaan. Sedangkan "seba" biasa diadakan dua hari dalam seminggu atau menurut kehendak raja, di mana dalam seba itu di belakang dan di samping raja duduk di atas tanah enam orang yang memegang senapan dengan gagang kearah badannya, delapan pemanggul tombak, seorang yang memegang tameng dan seorang lagi memegang pedang, seorang yang memegang tempat pisang, tempat sirih, tempat air, sedangkan raja sendiri berpakaian biasa saja.³

Meskipun dalam abad ke-17 dan 18 V.O.C. berhasil menanamkan pengaruhnya di daerah ini dengan memaksakan poli-

tik monopoli perdagangan lada dan hasil-hasil lainnya dan melancarkan politik adu domba dengan liciknya, namun sebenarnya keadaan di dalam tubuh V.O.C. sendiri terdapat penyakit yang sukar disembuhkan, yaitu penyelewengan-penyelewengan dan korupsi yang merajalela di kalangan pegawai-pegawainya, sehingga kelangsungan hidup dari kongsi dagang tersebut sukar dipertahankan lagi, dan pada tahun 1799 badan dagang tersebut dibubarkan. Hal itu juga dipengaruhi oleh situasi politik di negerinya, yang pada waktu itu di Eropah sedang berkecamuk revolusi Prancis, yang mengakibatkan keadaan politik di negeri Belanda terus menerus tak menentu sampai pada tahun 1816. Keputusan tentang pembubaran kongsi dagang tersebut, mengakibatkan kantor dagang Belanda di Palembang tidak berfungsi, ekspor gelap lada dan timah semakin merajalela dari pada yang sudah-sudah.

Sebaliknya kekuasaan kolonial Inggris di dalam pertengahan abad ke 18 itu semakin pesat; apabila di dalam kerajaan Prancis yang absolut dan feodalistis dalam zaman Lodewijk XV dan Lodewijk XVI keadaan sosial politik tidak sanggup menumbuhkan kemajuan-kemajuan yang sehat, yang akhirnya mengakibatkan revolusi 1789, maka Inggris mengalami kemajuan-kemajuan industri dan sosial yang luar biasa. Dengan demikian ia dapat menguasai seluruh lautan dan perdagangan di dunia, ia dapat menyisihkan Prancis sebagai kekuasaan kolonial dalam perang 7 tahun (1756-1763) ia dapat mempertahankan keunggulannya di seluruh lautan dan mengukuhkannya hal ini sekali lagi dalam perang melawan Belanda dalam 1780-1884, meskipun ia harus melepaskan Amerika Utara. Kedudukan Inggris di India diperluas dan diperteguh, sedangkan di semenanjung Malaya dan kepulauan Indonesia pengaruh Inggris itu bertambah dalam, dengan pendudukan terhadap pulau Pinang dan Malaka yang penting itu, dan selanjutnya dengan memperluas pengaruhnya di Sumatera, di mana ia sejak satu abad sebelumnya sudah berkedudukan di Bengkulu.

5.1.2. Hubungan dengan Kekuasaan Eropah.

Pada awal abad ke 19 di kerajaan Palembang memerintahlah seorang raja yang telah melahirkan sebuah epos

dalam sejarah rakyat Sumatera Selatan yang sangat tragis, yang juga dapat dimasukkan dalam deretan sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Barat. Raja yang dimaksud adalah Sultan Mahmud Badaruddin II yang juga disebut Sultan Mahmud Ternate yang memerintah pada tahun 1804-1821 putra dari Sultan Muhammad Bahauddin⁴. Mengenai raja ini dilukiskan oleh seorang sarjana yang berkebangsaan Belanda kelahiran Amsterdam dalam disertasinya untuk mencapai gelar doktor-nya dalam tahun 1975, bahwa raja ini adalah seorang laki-laki yang mempunyai martabat tinggi, agung sebagai raja di dalam sifat-sifat buruk dan baik, seorang yang cerdas dan berpengetahuan luas, seorang organisator yang baik, diplomat dan cerdik, serta seorang ahli perang yang pintar, perhatiannya di dalam berbagai ilmu cukup luas dan dapat menguasai beberapa bahasa⁵. Bahkan van Sevenheven yang sangat membencinya dan membuat laporan yang buruk tentang sultan ini, mengakui bahwa raja ini mempunyai perpustakaan yang cukup luas⁶ dan ialah yang menggubah beberapa buah syair seperti "Syair Sinyer Kista" dan "Syair Nuri", demikian juga serangkaian pantun yang berjudul "Untuk pelipur lara"⁷. Ia juga dilukiskan sebagai seorang yang mempunyai suatu keinginan suci untuk menjadi "Tuan di dalam rumahnya sendiri", dan oleh teman sezamannya ia dilukiskan sebagai orang besar/kuat di Timur⁸. Betapa besar dan tinggi cita-cita raja ini terbaca dalam korespondensinya dengan raja-raja tetangga dan orang-orang asing itu sendiri, koresponden mana dimaksudkan guna mendapatkan simpati dari kerajaan-kerajaan tetangga di waktu itu. Tetapi berkat kecerdikan dan diplomatnya ia kadang-kadang dapat mengaduk dombakan antara orang Belanda dan Inggris.

Di dalam perjalanan sejarah yang singkat itu kita dapat melihat perjuangan hidup matinya suatu dynasti yang lahir sejak abad ke 16, suatu perjuangan gigih dan ulet dari seorang penguasa yang tahu harga diri menghadapi musuh-musuhnya yang berkaliber internasional pada masa itu seperti : Thomas Stamford Raffles, Baron van der Cappelen, Edeleer Muntingh (Edlir Menteng) laksamana Gillispie, laksamana Wolterbeek, dan Panglima Angkatan Bersenjata Belanda Jenderal De Kock⁹.

Sultan ini termasuk raja yang terbesar dalam deretan raja-raja Palembang dan masa pemerintahannya merupakan zaman keemasan yang sekaligus mengandung benih-benih keruntuhannya, masa pemerintahannya boleh dikatakan sebuah drama kerajaan maritim yang ingin mempertahankan kebebasan/kemerdekaannya terhadap rongrongan baik yang datang dari luar mau pun dari dalam keluarganya sendiri, yang diperankan oleh Sultan Badaruddin sendiri sebagai tokoh utama, di samping orang-orang asing (Belanda dan Inggris) serta keluarganya sendiri (Sultan Akhmad Najamuddin II dan Najamuddin, III) pemegang peran piguran.

Sejarah Kesultanan Palembang yang meliputi masa 1811-1825 sebenarnya ditentukan oleh perjuangan Inggris-Belanda untuk memegang pimpinan di kepulauan Indonesia pada masa itu¹⁰ dan politik kolonial Belanda sesudah penjajahan Prancis yang ditujukan kepada pengembalian dan konsolidasi kekuasaan terhadap daerah-daerah seberang lautan yang baru diterima kembali. Politik inilah yang tak kenal menyerah terhadap kekuasaan Sultan Badaruddin yang berusaha untuk merdeka, yang akhirnya menyebabkan jatuhnya dynasti di Palembang dan menentukan nasib dari suatu kesultanan sebagai suatu kesatuan yang berdaulat penuh. Di samping unsur-unsur tersebut diatas, ketegangan-ketegangan yang terdapat di dalam dynasti itu sendiri ikut mempengaruhi jalannya peristiwa. Pertentangan antara Sultan Mahmud Badaruddin dan saudara mudanya Sultan Akhmad Najamuddin II yang berambisi untuk menjadi sultan karena kena pengaruh orang asing itu, tidaklah sangat berperan melainkan hanyalah diperhangat oleh perjuangan antara Inggris - Belanda untuk mendapat kekuasaan dengan menjalankan politik "divide et impere".

5.1.3. Akibat Hubungan.

Adapun Inggris menempatkan Raffles untuk kepentingan daerah jajahan, yang sejak tahun 1805 berkedudukan di pulau Pinang. Raffles mempunyai perhatian besar terhadap daerah semenanjung dan kepulauan Indonesia. Ia ber-

cita-cita untuk melenyapkan kekuasaan Belanda dari daerah tersebut termasuk Sumatera khususnya Palembang. Ketika pada tahun 1810 (Oktober) ia diangkat menjadi wakil Gubernur Jenderal untuk kerajaan-kerajaan Tanah Melayu, maka kesempatan baik itu dipergunakannya untuk merealisasikan cita-citanya itu. Pertama-tama ia ingin mengikis habis kekuasaan Belanda yang sangat dibencinya dan menegakkan kekuasaan Inggris di atasnya. Pada bulan Desember 1810 ia berkirim surat kepada Sultan Baharuddin II yang isinya mempengaruhi dan menghasut supaya memusuhi dan mengusir Belanda dari Palembang, surat itu dibalas dengan sangat hati-hati dan diplomat oleh Sultan, bahwa ia akan berada di luar pertentangan antara Inggris - Belanda. Inggris (Raffles) mengirim 80 pucuk senapan dan 10 keranjang mesiu dan selanjutnya menjanjikan bantuan militer untuk mengusir Belanda¹¹. Koresponden itu berjalan sampai tahun 1811. Bahkan dalam surat-suratnya berjanji akan mengakui Sultan Badaruddin sebagai raja yang berkuasa dan berdaulat penuh asal saja ia dapat mengusir Belanda sebelum Jawa ditaklukkan. Hadiah-hadiah itu diterimanya dengan baik, tetapi ia tetap mempertahankan kedudukannya sebagai peninjau. Sedangkan ia selalu mengikuti perkembangan di Jawa dengan mengirimkan sepijon-sepijonnya. Setelah diketahuinya Janseen dipukul oleh Inggris di dekat mester Cornelis (Jatinegara) dan menyerah dan Batavia jatuh ke tangan Inggris, barulah ia bertindak. Orang-orang Belanda di Palembang tidak mungkin mendapat bantuan dari Batavia, sedangkan Raffles sibuk di Jawa. Kesempatan yang baik ini tidak dilewatinya - kesatuan Belanda yang jumlahnya tidak besar dilucuti dinaikkan ke atas perahu dan di muara Sungsang dibunuh. Kantor dagang Belanda itu diratakan dengan tanah, kejadian itu terjadi pada 14 September 1811¹².

Raffles yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, mengirim utusan ke Palembang pada permulaan Nopember 1811 untuk menemui Sultan guna membicarakan soal monopoli timah dan penyerahan Bangka dan mengambil alih kantor dagang Belanda. Keinginan itu ditolak oleh Sultan dengan mengemukakan isi surat-surat Raffles. Ia sekarang adalah tuan di dalam rumahnya sendiri dan akan tetap demikian, karena itu utusan Raffles pulang dengan tangan hampa.

Tindakan Sultan yang menolak kehendak Raffles dan pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang dianggap tidak bermoral, merupakan alasan bagi Raffles untuk mengirim sebuah ekspedisi militer di bawah Mayor Jenderal Gillispie (20 Maret 1812) dari Betawi¹³.

Sultan Badaruddin telah bersiap-siap menyambut kedatangan ekspedisi tersebut - dibuat benteng-benteng di tempat yang penting di sepanjang sungai Musi - kubu-kubu meriam terapan - perahu-perahu bersenjata dan rakit yang berisi bahan-bahan yang mudah terbakar, sedangkan pada kubu pertahanan yang sebenarnya di Palembang (di keratonnya) terdapat 242 meriam yang siap menghadapi musuh¹⁴. Tetapi karena pengkhianatan adiknya sendiri (Pangeran Adipati Najamuddin) dan lebih unggulnya persenjataan musuh, maka dalam waktu seminggu 24-4-1812 Palembang jatuh. Sultan Badaruddin dengan membawa alat-alat regalia kerajaan dan kekayaannya berangkat ke pedalaman untuk melanjutkan perjuangan. Gillispie menduduki keraton (25 April) dan keesokan harinya bendera Inggris dikibarkan di dalam benteng (keraton) Palembang. Adik Sultan dinobatkan oleh Inggris dan harus menanda tangani sebuah perjanjian yang ditetapkan 12 Mei 1812. Di situ ditegaskan bahwa Sultan Najamuddin II menyerahkan Bangka dan Belitung kepada Inggris. Kapten Meares yang diangkat menjadi Residen Palembang mengejar Sultan Badaruddin, sehingga terjadilah pertempuran sengit di Buaya Langu (Bai Langu) dengan kekalahan di pihak Inggris, dan Sultan mendirikan benteng-benteng di Muara Rawas dan lain-lain. Dengan demikian seluruh daerah pedalaman masih berada di tangan Sultan Badaruddin.

Hijrahnya Sultan Badaruddin ke pedalaman membawa pengaruh psikologis yang besar di kalangan masyarakat uluan, karena Sultan Badaruddin sebagai raja dari Kesultanan Palembang Darussalam menanamkan semangat jihad kepada rakyat pedalaman, dengan semboyan perang melawan kafir. Oleh karena itu mereka mulai sadar akan harga diri, sebagai masyarakat yang cinda kebebasan dan kemerdekaan berhadapan dengan kekuatan luar dengan sistem monopolinya, dan sebagai ummat Islam yang berkonfrontasi dengan orang-orang kafir. Tentunya di sini peranan kaum ulama sangat

menentukan untuk mengobarkan semangat keagamaan, sehingga rakyat pedalaman memberikan bantuan penuh kepada Sultan dan terus menerus mengadakan perlawanan terhadap Inggris dan Belanda.

Kompromi oleh Residen Inggris - Robinson yang mengakui kedua bersaudara itu sebagai Sultan dalam bentuk *divide et impera* dan *come-backnya* Sultan Badaruddin di pusat kerajaan, yang sebenarnya tidak disetujui oleh Raffles. Tetapi berdasarkan Persetujuan - Landen tahun 1814, maka Palembang harus dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda yang baru dilaksanakan pada 29-6-1817, yang kemudian dipegang langsung oleh Komisaris Belanda bernama Muntinghe. Pada permulaan Juli 1818 ia menyeberang dari Bangka ke Palembang dengan tujuan yang sebenarnya perlahan-lahan melepaskan Palembang dari kekuasaan Sultan, karena itu ia memaksa kedua Sultan itu menanda tangani kontrak seperti tahun 1812 dengan Inggris, yang secara politis keduanya tak berkuasa lagi.

Sedangkan pada tahun itu juga (1818) Raffles kembali ke Bengkulu sebagai Residen tetap pada cita-cita dan mengklaim Palembang, Lampung, Minangkabau sampai Kalimantan Barat, yang untuk itu mengirim dua ekspedisi terdiri dari 200 sampai 400 orang ke daerah Palembang, sehingga terjadilah pertempuran antara Inggris - Belanda di Muara Beliti yang berakhir dengan perdamaian. Tetapi ketika ia kembali ke kota ia diserang oleh pengikut-pengikut Badaruddin, sehingga Muntinghe cepat-cepat mundur ke Palembang (7-5-1819). Muntinghe menuduh bersekongkol dan harus bertanggung jawab atas tindakan pengikut-pengikutnya di pedalaman dan menyerahkan putra sulungnya sebagai jaminan. Hal ini menimbulkan kemarahan Sultan Badaruddin. Setelah datang bala-bantuan dari Batavia terjadilah Perang Palembang yang I pada 10-6-1819, yang mengakibatkan muntinghe hancur terpukul mundur.

Tetapi setelah datangnya bala-bantuan di bawah laksamana Wolterback dengan + 2000 merinir ke Palembang pada 22-8-1819, maka terjadilah Perang Palembang yang ke-2 yang dapat dipukul mundur oleh Badaruddin di muka pulau Kembara. Oleh karena itu dari 1819-1821 kesultanan Palembang merdeka penuh dan mengalami kemajuan di segala

lapangan. Sementara itu Belanda tidak tinggal diam dan merencanakan serangan berikutnya, mempelajari potensi dan tempat-tempat pertahanan Sultan Badaruddin dan dalam serangan itu akan dipraktekkan politik *divide et impera*, dengan memperlalat keponakan Badaruddin sendiri.

Sesudah diadakan persiapan-persiapan yang seksama, dan mendapat segala bala-bantuan dan peralatan serta kapal-kapal perang dari Nederland, maka Panglima Angkatan Tertinggi Hindia Belanda, Jenderal Mayor Baron de Kock menyerang Palembang dengan kekuatan : 47 kapal perang besar, 16 kapal pengangkut tentara bersenjata 414 meriam laut dan 18 meriam darat, 2580 marinir, 1680 angkatan darat/infantri dan jeni, kapal-kapal perbekalan dan peralatan. Pada 16-6-1821 serangan pertama dilancarkan terhadap benteng-benteng Mahmud Badaruddin, sehingga meletuslah perang Palembang yang ke III. Serangan Belanda itu gagal dan dipukul mundur. Pada 24-6-1821 serangan dilancarkan lagi secara besar-besaran dari laut dan dari darat; pengkhianatan sekali lagi terjadi terhadap Sultan Badaruddin yang dilakukan oleh Pangeran Prabu Anom, putra sulung Sultan Ahmad Najamuddin II dan Najamuddin sendiri yang sengaja dibawa berlajar dari Batavia ke Palembang. Serangan melalui jalan belakang dari pulau Kembara yang telah ditunjukkan oleh Najamuddin dan putranya itu. Serangan terakhir inilah yang mematahkan perlawanan dari seluruh kekuatan Palembang, dan tiga hari kemudian sesudah Benteng Sultan sendiri terkepung dari segala jurusan, dan meriam kapal perahu Belanda ditujukan ke hadapan pintu keraton Sultan, barulah ia menyerah karena diancam keratonnya akan dihancurkan.

Pada 6-7-1821 Sultan Mahmud Badaruddin dibawa ke Batavia, dan kemudian dibuang ke Ternate. Ia wafat tanggal 26-11-1852¹⁵ sebagai seorang buangan yang dihormati oleh lawan dan kawan. Pangeran Prabu Anom pada 16-7-1821 dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Akhmad Najamuddin III. Tetapi karena ia dianggap kurang cakap, maka kekuasaan seluruhnya diambil alih oleh Belanda, dan atas usul Komisaris Pemerintahan van Sevenheven, maka pada 7-10-1823 seluruh daerah Palembang, Bangka dan Belitung

resmi menjadi daerah kekuasaan Belanda langsung¹⁶. Sekarang barulah Sultan Najamuddin sadar akan kelicikan Belanda dan berusaha untuk memberontak. Tetapi dapat ditindas dengan mudah karena kurang mendapat dukungan dari rakyat, dan Sultan Najamuddin II dibuang ke Batavia dan wafat di sana tahun 1825 sedangkan Sultan Najamuddin mendapat bantuan rakyat uluan, tetapi tak berhasil, habislah riwayat kesultanan Palembang setelah mengadakan perlawanan yang gigih terhadap Inggris dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaannya. Tetapi rakyat pedalaman yang memang sejak semula merupakan pengikut Sultan Badaruddin dan memberikan bantuan sepenuhnya dalam perlawanan terhadap orang-orang kafir tersebut, meneruskan perlawanan sesudah Sultan tersebut dikalahkan dan dibuang ke Ternate, baik terhadap Belanda maupun terhadap Najamuddin yang dianggap bekerja sama dengan orang asing itu. Orang-orang Pasemah mengadakan pembakaran dan kerusuhan-kerusuhan, dan penduduk daerah uluan lainnya terus menerus mengadakan perlawanan terhadap Belanda seperti apa yang dilukiskan oleh Roo de la Faille dalam bukunya sesudah Palembang jatuh tahun 1825. Perlawanan yang sengit dari rakyat dan keadaan daerah ini yang berhutan rimba yang sangat baik untuk perang gerilya, menyebabkan Belanda belum berani untuk turun tangan langsung memerintah Palembang dan daerah pedalaman terutama. Perlawanan-perlawanan terus berjalan sampai akhir abad ke-19 (1894) yang dipimpin oleh menantu Sultan Badaruddin yang sebenarnya diangkat oleh Belanda menjadi Papatih yang dipercayai Belanda untuk sementara memerintah daerah ini.

5.2. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat.

5.2.1. Pengaruh Kekuasaan Eropah.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa abad XIX sangat penting artinya bagi Indonesia dan daerah Sumatera Selatan pada khususnya, karena merupakan abad kolonialisme dan imperialisme modern. Ketika negeri Belanda jatuh ketangan Perancis pada permulaan abad XIX, maka secara

langsung faham revolusi Perancis dalam bentuk liberalisme, via Daendels dikenal oleh bangsa kita. Kemudian setelah kekuasaan Jansens diambil alih oleh Inggris di bawah pimpinan Raffels, maka mulai pula bangsa kita berhadapan dengan bangsa tersebut, yang lebih dulu mengenal sistem demokrasi liberal dan hak-hak azasi manusia.

Kedua bangsa Eropah ini pulalah - walaupun sebelumnya daerah ini telah berkenalan dengan bangsa Portugis di Malaka, yang telah memperkenalkan faham tersebut di daerah ini, dan dalam praktiknya tidak sesuai dengan apa yang dianut oleh faham itu sendiri. Kebebasan dan persamaan yang tercantum dalam *Les Droits de L'homme et du Citoyen*¹⁷ hanya berlaku di kalangan kulit putih saja, dan sama sekali tidak berlaku di kalangan bangsa kulit bewarna. Oleh sebab itu kedua bangsa tersebut menganggap dirinya sebagai bangsa superior, yang dalam abad XIX selalu didengungkan "the White man's burden" - suatu semboyan untuk mengangkat diri di atas bangsa-bangsa kulit bewarna, pada hakekatnya yang dipandang adalah "the brown man's property". Sistem monopoli dalam dunia perdagangan dan politik *divide et impera*, merupakan suatu instrumen yang dimainkan oleh kedua bangsa tersebut di daerah ini.

5.2.2. Pemenuhan Kebutuhan.

Sungai Musi sebagai induk Batanghari Sembilan, yang dari abad ke abad telah memegang peranan penting di bidang komunikasi antara daerah Uluang dengan ibukota kerajaan, sebagai bandar transito yang terletak pada urat nadi perdagangan via selat Malaka dan selat Sunda. Dahsyatnya tantangan alam terhadap manusia di daerah ini, perjuangan menguasai atau dikuasai alam, berjuang melawan hutan rimba dan rawa-rawa untuk menanam padi (ladang), sebaliknya hutan rimba itu pulalah yang memberinya kebutuhan hidup seperti : alat-alat perumahan, alat pengangkutan (perahu, kapal), margasatwa, madu-tawon, menjangan, gading-gajah, serta umbut-umbut, buah-buahan dan pucuk-pucukan untuk makanan dalam masa pancaroba. Oleh sebab itu hasil hutan itu pulalah yang memberi dan menjadi sumber kekayaan masyarakat di daerah pedalaman. Hebatnya tantangan alam di daerah ini, telah mempengaruhi perilaku kehidupan per-

orangan atau berkelompok, sekalipun adanya faktor-faktor demografis, penduduk yang tipis di daerah yang amat luas dan perjuangan yang berat melawan tantangan alam yang hebat, tidaklah menghalangi usaha masyarakat di daerah uluan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sebaliknya masyarakat yang tinggal di ibukota kerajaan, jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup satu-satunya berlayar/berdagang, perindustrian dan pertambangan. Seperti lazimnya hubungan dagang tersebut tidak hanya hubungan antarpulau, tetapi juga hubungan dagang dengan negeri Cina dan India. Hampir semua hasil hutan diekspor, terutama lada - bahan ekspor yang dari abad ke abad merupakan sumber kekayaan kerajaan yang menguasainya, yang amat mempengaruhi politik negara, pangkal sebab ekspansi, pokok pertikaian antara kerajaan Palembang dengan VOC dan Inggris dan sumber keruntuhannya.

Sebagai hasil perindustrian yang utama adalah kerajinan kuningan, tembaga, gangsa, emas dan perak¹⁸. Perindustrian perkapalan pun mengalami kemajuan, baik dipergunakan oleh masyarakat pedalaman mau pun dipergunakan oleh Sultan untuk perang dan berdagang. Dalam hal ini sampai sekarang orang Bangsa masih memiliki keahliannya untuk membuat kapal-kapal layar yang besar. Mengenai pertambangan pada waktu itu, pulau Bangka dan Belitung adalah pusat pertambangan timah putih untuk kerajinan rumah tangga, dan yang lebih penting lagi sebagai mata uang perak dan emas untuk menyaingi pengaruh uang real Spanyol. Dengan sumber-sumber yang tersebut di atas¹⁹, maka tidaklah heran kalau Kesultanan Palembang - sejak Sultan Mahmud Badaruddin I sampai sultan Mahmud Badaruddin II, mempunyai martabat yang tinggi baik di dalam mau pun di luar negeri.

5.2.3. Gerakan Perlawanan

Seperti apa yang dilukiskan di atas, baik bangsa Belanda maupun bangsa Inggris telah memainkan peranannya di daerah ini, dalam usaha untuk menguasai kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang di lain pihak, yang menganggap dirinya sebagai penguasa yang berdaulat penuh atas daerah ini, menganggap orang-orang asing pada umumnya dan Belanda-Inggris pada khususnya harus tunduk kepadanya. Latar

belakang politik dan ekonomi itu pulalah, yang mendorong bangsa-bangsa Eropah ikut campur mengenai urusan dalam negeri dan perdagangan di daerah ini. Bagi pihak kesultanan Palembang sendiri dalam menghadapi kedua Bangsa Eropah itu - selama hubungan itu menguntungkan di pihak Sultan ²⁰, terjalinlah suatu hubungan yang baik dan penuh kecurigaan. Tetapi sebaliknya akan timbul pengingkaran-pengingkaran dalam bentuk perlawanan, apabila hubungan itu tidak menguntungkan. Itulah sebabnya pada tahun 1811 (14 September) terjadi pembunuhan di loji Belanda dan pembumi-hangusan. Kecurigaan yang ada pada penguasa di daerah ini (Sultan) terhadap orang asing non Muslim, merupakan suatu ciri bagi penguasa tersebut yang baru memeluk agama Islam dengan penuh kefanatikan. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan, kalau Sultan Mahmud Badaruddin II dalam menghadapi bangsa-bangsa Eropah tersebut, mendapatkan simpati dan bantuan moril mau pun material serta personal dari Jambi, Riau, Samabas, Bugis, Minangkabau/Kerinci ²¹ dengan mengobarkan perang jihad. Disamping gerakan perlawanan yang ditujukan kepada orang-orang asing tersebut secara terbuka, tidak kurang pentingnya taktik gerilya - sewaktu sultan Mahmud Badaruddin II di daerah Uluu, yang pernah dilancarkan oleh pengikut-pengikut setia dari Sultan, baik sebelum dan sesudah Sultan menyerah kepada Belanda.

5.2.4. Keadaan Masyarakat Pada Akhir Abad XIX.

Setelah Kesultanan Palembang dihapuskan, maka di daerah uluan masih tetap dipimpin oleh pangeran-pangeran seperti pada zaman Kesultanan. Sebaliknya di kota Palembang dibawa langsung oleh seorang Resident Belanda, sedangkan pengganti Sultan diangkat "Pepatih" (Rijksbestuurder) dan Perdana Menteri sebagai pegawai yang tunduk kepada pemerintah (Resident). Meskipun di ibu kota kerajaan telah resmi mengakui kekuasaan Belanda, namun di daerah-daerah Uluu masih tetap berjalan seperti biasa, yaitu rasa benci kepada pemerintahan Belanda, sudah mulai ditanamkan pada zaman Sultan Mahmud Badaruddin II. Kefanatikan kepada agama semakin mendalam, bahkan semangat perlawanan rakyat terhadap orang kafir (Belanda) semakin meluas, bahkan di daerah Uluu sering mengadakan pemberontakan dengan siasat

perang gerilya, seperti di daerah Muba, Musi Rawas, OKI dan OKU. Pengaruh kekuasaan Belanda hanya terbatas pada kota-kota besar saja, sedangkan perubahan struktur masyarakat belum kelihatan, dan undang-undang Simbur Cahaya masih tetap berlaku. Tetapi setelah De Kock diangkat oleh Pemerintah sebagai Residen di Palembang, maka mulailah pengaruh pemerintah Hindia Belanda merembet ke daerah Uluu.

5.3. Kehidupan Seni Budaya.

5.3.1. Pengaruh Seni Budaya Asing.

Seperti dimaklumi bahwa dalam abad ke-19 ini Nusantara dihadapkan pada berbagai macam pengaruh luar baik dari segi politik, ekonomi dan kebudayaan. Kedatangan bangsa Barat sebagai pemeluk Agama Nasrani serta pengaruh Arab yang telah lama lebih dahulu berkembang sangat mewarnai seni budaya di Sumatera Selatan ini. Seni drama berupa "Dul Muluk" selalu membawakan cerita dari Seribu Satu Malam. Permainan rebana berkembang dengan menggunakan syair-syair berbahasa Arab pula, dengan cerita sekitar peristiwa-peristiwa di gurun Arab. Upacara pencukuran bayi diiringi dengan pembacaan Barzanji suatu syair yang pernah dibawakan oleh orang-orang Arab ketika menyambut rombongan Nabi Muhammad dalam Hijrahnya ke Madinah. Hampir setiap bentuk upacara seperti Selamatan atas berhasilnya suatu usaha diikuti dengan pembacaan Surat Yasin salah satu dari Surat Al Qur'an. Dalam upacara kematian pun pengaruh ini sangat jelas kelihatan.

Pengaruh Barat dengan Agama Nasraninya akan kelihatan dari cara bernyanyi bersama "koor" ataupun alat-alat musik yang dipergunakan. Gitar sebagai pengganti Kulintang telah menyebar sampai ke pelosok-pelosok, yang digunakan anak-anak muda bersenandung dengan syair-syair daerahnya diiringi instrumen ini. Hampir semua tangkai kebudayaan mendapat pengaruh luar. Seni bangunan pun tiada luput, seperti cara pembuatan jendela dan pintu yang cukup besar serta penggunaan alat rumah tangga.

5.3.2. Pendidikan.

Dalam lapangan ini pengaruh Arab sangat besar, Pesantren sangat memegang peranan. Yang diutarakan ialah : pengajaran Agama serta upacara-upacara tradisi Arab yang erat hubungannya dengan ajaran Agama itu. Tulisan Arab berangsur-angsur menggantikan tulisan lokal yang dikenal dengan sebutan tulisan Ulu. Pada tarap permulaan tulisan Ulu digunakan pula untuk mempelajari Agama ini dan hal ini dapat dilihat dari beberapa potong bambu bertulis yang kini berada di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan dan Komering Ilir Kayu Agung. Untuk cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya seperti cara bertani, berdagang, bertukang dan lain-lainnya digunakan sistem "Guru kula".

Pendidikan dalam bentuk "sekolah" yang kita kenal sekarang hingga permulaan abad ke-20 belum terdapat di sini baik di kota apalagi di pedalaman. Perkenalan dengan huruf Latin baru pada abad ke-20. Di daerah pedalaman seperti di Muara Rupit dan sekitarnya yang hampir 300 km dari kota Palembang telah dikenal pula sistem Pesantren ini. pengajarnya ialah para pemuka yang telah pernah pergi ke tanah suci Mekkah. Dari sistem pesantren ini kemudian berkembang ke dalam bentuk Madrasah-Madrasah yang pokok pelajarannya masih berkisar di sekitar Agama saja. Dengan demikian sistem pendidikan Barat perkembangannya jauh lebih terlambat dari pesantren-pesantren ini, dan peranan para "Ulama" pemuka masyarakat sangat menentukan.

5.3.3. Kesenian.

Seperti telah dikemukakan di atas pengaruh kebudayaan asing terutama kebudayaan Arab sangat mendalam. Hampir setiap tangkai kesenian mendapat pengaruhnya. Dalam seni ukir umpamanya motif-motif hewan atau manusia disingkirkan sama sekali. Sekiranya ini terdapat maka hanyalah di daerah pedalaman yang pengaruh Islamnya belum begitu banyak. Seni suara dengan menggunakan rebana dan syair-syair Arab berkembang. Pertenunan dengan menggunakan motif tumbuhan seperti pada kain songket dan juga motif geometris untuk kain tajung terus berkembang. Dalam hal seni

drama terutama Dul Muluk mementaskan cerita-cerita Arab atau Persia, namun instrumen pengiring berupa gong dan gendang adalah peralatan asli. Seni bela diri berupa "kuntau" pencak silat merupakan kewajiban bagi para pemuda untuk mempelajarinya. Pada saat pementasannya seperti pada ketika upacara perkawinan bukan hanya gerakan silatnya yang berperanan akan tetapi irama pengiringnya seperti gong dan gendang sangat menentukan pula. Oleh karena itu seni memukul gong dan gendang sangat menentukan pula. Selain itu juga seni anyammenganyam seperti menganyam bakul, tikar, keranjang, bahkan kopiah cukup banyak. Bukan saja untuk kebutuhan sehari-hari akan tetapi ada pula barang-barang itu dibuat dalam bentuk yang kecil sebagai hiasan. Kopiah resam dari pulau Bangka umpamanya sangat termashur khususnya di daerah ini.

5.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan.

5.4.1. Perkembangan Agama.

Berdasarkan pengamatan kami secara langsung di daerah ini pada umumnya dan kota Palembang pada khususnya, pendidikannya menganut agama Hindu-Budha, Islam dan Nasrani (Kristen). Bagaimana perkembangan agama-agama ini pada abad XIX, tidaklah dapat diketahui dengan pasti, karena sulitnya mendapatkan sumber-sumber mengenai perhubungan agama tersebut.

Seperti telah kita ketahui, agama Hindu-Budha pada zaman kerajaan Sriwijaya menjadi agama negara ²², sehingga sampai kini masih ada penganutnya dalam jumlah yang kecil di beberapa daerah, di antaranya di kota Palembang sendiri. Ini memperlihatkan satu tanda bahwa pada abad XIX, agama itu masih hidup dan berkembang, sebab jika agama itu tidak hidup dan berkembang pada abad itu, mustahillah kini masih ada penganutnya. Demikian pula agama Islam ketika masuk di daerah ini dan dapat mempengaruhi alam pikiran dan kepercayaan penduduk di daerah ini, telah menyebar ke daerah Uluu oleh kiyai-kiyai ²³ sebelum dan sesudah zaman Kesultanan Palembang. Ini pun telah memperlihatkan kepada kita, bahwa pada abad XIX agama Islam tetap hidup dan berkembang, dan secara mayoritas telah dianut oleh pendu-

duk di daerah ini.

Kemudian pada pertengahan abad XIX berkembang pula agama Kristen di daerah ini, dan telah mendapat tanah subur - tempat berpijak yang mula-mula, di Tanjung Sakti²⁴ Tanjung Sakti sekarang ini adalah daerah Kecamatan yang termasuk daerah Kabupaten Lahat. Penganut agama tersebut, pada umumnya didukung oleh orang-orang pendatang dan dalam jumlah jauh lebih kecil daripada penganut agama Islam

5.4.2. Kehidupan Intelektual.

Yang dimaksud dengan golongan intelektual pada zaman itu (1800-1900), adalah kaum Ulama Islam, dan mereka berpengaruh betul dalam masyarakat tradisional, justeru karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Golongan intelektual yang mendapatkan pendidikan Barat belum ada, dan lembaga pendidikan itu baru ada pada permulaan abad XX, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda maupun yang dilaksanakan oleh zending dan misi. Kaum Ulama atau Kiyai-Kiyai Muslim, yang termasuk golongan Kepemimpinan tradisional, telah aktif sedemikian rupa untuk mengembangkan dan membina kelangsungan hidup agama yang dianutnya. Banyak di antara Kiyai-Kiyai kelahiran Palembang sendiri yang telah mengambil bagian dalam penyebaran agama tersebut semasa hidupnya dan di antaranya : Kiyai Syekh Kemas Muhammad Azhari Ibnu Abdullah lahir pada tahun 1806; Kiyai Masagus H. Abdulhamid yang terkenal dengan sebutan Kiyai Marogan lahir pada tahun 1825; Kiyai Kemas H. Abdullah Azhari lahir pada tahun 1859 dan Kiyai Kemas H. Abdurrachman atau Kiyai Dulumat²⁵.

Pada umumnya Kiyai-Kiyai tersebut pengikut mazhab Syafii, yang tetap memegang teguh aliran sunnah dan anti pembaharuan. Tidak mengherankan, apabila ditinjau dari keseluruhan ajaran Islam itu sendiri penuh kefanatikan tanpa memberikan kesempatan rasio untuk mengembangkan ajaran tersebut. Proses pengembangan agama itu, biasanya melalui tempat-tempat ibadah seperti mesjid, langgar dan surau. Bukankah dalam abad ke XIX di daerah ini belum ada sekolah agama atau madrasah ?. ²⁶ Mesjid-mesjid yang didirikan di Palembang oleh Kiyai-kiyai tersebut antara lain: Mesjid Marogan, mesjid Lawang Kidul oleh Kiyai

Marogan; mesjid Suro oleh Kiyai Dulamat ²⁷, dan beberapa mesjid yang terletak di pinggir sungai Musi daerah Musi Banyuasin sampai di daerah Musi Rawas oleh Kiyai Dulamat dengan 30 orang murid-muridnya ²⁸.

Dalam usaha untuk mengembangkan agama Kristen di daerah ini, peranan missi Jerman tidak dapat dilupakan. Pada tahun 1860 Jerman di bawah zending Kristen masuk ke daerah Tanjung Sakti. Setelah beberapa tahun melakukan tugas suci itu, dan akibat para pegawainya banyak diserang penyakit, maka pada tahun 1896 tugas suci itu diserahkan kepada missi Katholik yang ada pada waktu itu. Missi Katholik tersebut mendirikan gereja di Tanjung Sakti dan gereja tersebut masih ada sekarang ini. Salah seorang yang ikut serta mengembangkan agama Protestan di daerah Palembang adalah seorang Kristen India bernama Mr. S. Pakianathan yang datang ke Palembang pada tahun 1905 ²⁹.

5.5. Hubungan dengan Luar

a. Bentuk dan Sifat Hubungan

Permulaan Abad XIX yang merupakan titik tolak bagi Peranan ide-ide baru (liberalisme) dalam pemerintahan negara-negara di Eropa telah mewarnai bentuk serta sifat hubungan Sumatera Selatan khususnya Kesultanan Palembang dengan dunia luar. Sehubungan dengan perubahan pandangan Eropa tersebut, pemerintah Belanda menyadari betapa pentingnya dominasi di luar pulau Jawa. Hubungan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

Meskipun pengaruh VOC telah dimulai sejak tahun 1722, yaitu ketika di Palembang terjadi Perang Perebutan Mahkota tetapi pendudukan Belanda di daerah ini secara nyata baru diintensifkan pada tahun 1808 yaitu dalam rangka politik Daendels mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris. Palembang diduduki oleh pasukan Daendels yang berkekuatan 100 orang ³⁰.

Dalam usaha menguasai Palembang dan mengusir tentara pendudukan Daendels tersebut, Raffles mengadakan kontak dengan Sultan Machmud Badaruddin dengan mengirimkan 80 pucuk senjata dan amunisi. Dengan bantuan ini 24 orang Eropa, 63 orang tentara dari suku Jawa dibunuh atau di-

tenggelamkan di sungai Musi. Karena Badaruddin mengetahui bahwa sebenarnya Inggeris itu sama saja dengan Belanda, yang juga ingin menguasai pulau Bangka yang kaya akan timah, maka ketika pada tanggal 15 April 1812 Angkatan Laut Inggeris di bawah Gilespie tiba di Palembang, Sultan melarikan diri ke pedalaman untuk mencari bantuan guna membunuh dan merampok pedagang-pedagang Cina yang kaya³¹. Pada tanggal 17 Mei 1812 Gilespie mengadakan perjanjian dengan Najamuddin, pulau Bangka dan Belitung menjadi milik Inggeris sebagai ganti rugi terhadap pembunuhan yang terjadi pada tahun 1811³².

Peristiwa tersebut merupakan dalih dan kesempatan baik bagi Inggeris dalam mengadakan eksploitasi terhadap daerah ini dan menanamkan kekuasaannya. Untuk menyelidiki dan pengusahaan timah di pulau Bangka, Raffles membentuk sebuah komisi di bawah pimpinan seorang Amerika Dr. Horsfield. Dengan demikian berhasil meningkatkan produksi setiap tahun dari 7.000 pikul menjadi 25.000 pikul. Bahkan pulau ini kemudian diberi nama Inggeris "Duke of York" dan ibu kotanya Mentok diganti namanya dengan "Minto".³³

Dengan Surat Keputusan tertanggal 27 Oktober 1817 pemerintahan Keresidenan Palembang dan Bangka diserahkan kepada Muntinghe sebagai Komisaris. Pada tanggal 20 April 1818 Muntinghe mendarat di Muntok. Karena orang Inggeris tidak rela menyerahkan daerah ini kepada pemerintah Belanda, maka Raffles mengirim Kapten Salmond dengan 25 orang Sepoy dan berkekuatan 200 orang mengibarkan bendera Inggeris di instana Sultan Najamuddin, dan menempatkan Sultan di bawah lindungan Inggeris dan berjanji akan mengusir orang Belanda yang akan tiba di Palembang. Dengan bantuan Sultan Badaruddin dan pangeran Siak Raja Akil, Muntinghe berhasil mematahkan perlawanan tersebut.³⁴

Selama wilayah kesultanan Palembang jatuh ke tangan pemerintah Belanda kembali, kekuasaan Belanda tidak mampu menjangkau sampai ke daerah pedalaman. Hal ini disebabkan kemungkinan adanya perlawanan dari Badaruddin sendiri atau adanya rasa enggan dari Belanda karena Muntinghe menganggap bahwa daerah pedalaman Palembang yang alamnya masih ganas serta penduduknya yang kurang berbudaya, lebih baik dibiarkan hidup dalam pola-pola penguasanya sendiri³⁴.

Dan baru antara tahun 1848 sampai 1868 daerah pedalaman Palembang satu demi satu berhasil dikuasai oleh pemerintah Belanda ³⁶.

Jatuhnya kesultanan Palembang ditandai dengan diasingkannya Sultan Badaruddin ke tempat pembuangannya. Demikian pula tindakan ini diikuti oleh penghapusan segala macam peraturan yang menindih rakyat, kesewenang-wenangan, yang oleh pemerintah Belanda dinilai sebagai bertentangan dengan humaniter dan keadilan. Di samping hubungan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai hubungan kenegaraan masih terdapat hubungan yang bersifat sosial-ekonomis. Pertanian yang merupakan unsur pokok dalam bidang ini, tidak berarti bahwa daerah ini tidak mengenal perdagangan. Letak geografis daerah ini merupakan unsur justru mengapa Palembang sejak dahulu dikenal karena perdagangannya. Perdagangan yang terbesar diadakan dengan Jawa, Bangka, Cina, Riau, Singapura, Pulau Penang, Malaka, Lingga, Siam, sedang dari pulau-pulau kecil lainnya datang juga perahu-perahu. Barang dagangan utama adalah kain lina Jawa, kain cita Eropa, barang pecah belah dari Cina, sutera kasar, benang emas, panci-panci besi, obat-obatan, teh, manisan dan barang Cina lainnya ³⁷.

Barang yang kurang penting adalah minyak kelapa dan minyak kacang dari Jawa dan Siam, gula Jawa, bawang Jawa, asem, beras, gula pasir, tembaga, besi, baja, barang-barang kelontong dan sebagainya dan beberapa makanan Eropa. Harga dari barang-barang ini pada tahun 1822 berjumlah kira-kira setengah juta gulden. Sedang barang yang diimpor merupakan hasil dari daerah sendiri, dan hal yang demikian itu tidak memberikan gambaran yang baik terhadap keadaan pertanian di daerah ini. ³⁸

Pada zaman itu hasil timah sangat meningkat, bahkan pada seluruh abad itu timah dihasilkan oleh Malaka dan Bangka dan merupakan barang perdagangan yang penting. Pada tahun 1822 timah ditemukan di pulau Belitung. Mungkin karena penduduk setempat merahasiakan kekayaan alam ini sehingga baru tahun 1850 eksploitasinya baru dimulai. Pada tahun 1852 eksploitasi tambang tersebut diserahkan kepada Prins Hendrik der Nederlanden dan Baron Tuijl van Serooskerken dalam bentuk konsensi, dan pada tahun 1860 tambang tersebut berada di bawah Billiton Maatschappij.

Karena penguasaan ini tidak banyak menghasilkan laba, maka pemerintah Belanda memperpanjang konsesinya dengan syarat: 5/8 dari keuntungan harus diserahkan kepada pemerintah. Setelah itu konsesi tersebut merupakan perusahaan campuran yang dapat menghasilkan timah separoh dari produksi dunia ³⁹.

Pada tahun 1899 telah dimulai pula eksploitasi minyak bumi di samping tambang timah, yaitu pada tahun 1911-1913 menghasilkan bensin, minyak lampu dan residu rata-rata 78 juta, 100 juta dan 3 1/2 juta liter per tahun.

b. Sikap Terhadap Dunia Luar.

Seperti telah diuraikan di atas yaitu dengan adanya hubungan dagang yang begitu luas dengan datangnya perahu-perahu asing yang membawa barang dagangan yang beraneka warna, menunjukkan bahwa sikap keterbukaan sangat menge-sankan. Tetapi pengaruh dari luar yang sifatnya hanya ingin menarik keuntungan pada satu pihak saja, seperti usaha penetrasi yang dilakukan oleh Inggris mau pun Belanda sudah barang tentu akan menimbulkan perlawanan. Namun demikian pengaruh orang-orang Eropa yang berlangsung pada waktu itu yang sedikit banyaknya mempunyai unsur liberal dengan disertai usaha kuat untuk meniadakan apa saja yang dianggapnya bertentangan dengan ide itu, kiranya dapat diterima oleh rakyat. Hal ini sesuai dengan yang dilukiskan oleh Residen Palembang J.L. van Sevenhoven pada sekitar tahun 1822 yang antara lain :

1. Kita mengenal golongan-golongan di mana penduduk di-bagi-bagi. Akibat dari pada penggolongan ini telah kita lihat, tetapi jika tidak ada suatu pemerintahan yang sewenang-wenang, mereka tidak akan menimbulkan kerugian. Dan semua akibat-akibat jahat dengan sendi-rinya akan berhenti dan dengan itu sifat-sifat orang Palembang akan lebih baik. Dari sini akan timbul per-baikkan keadaan, industri akan berkembang, dan dengan demikian kemakmuran umum. Dengan demikian lambat laun tiap manusia akan kembali dalam lingkungan di mana ia seharusnya berada, yang sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya. Mereka tidak lagi selamanya harus me-

nanggung tekanan dan tidak lagi selalu hidup dalam kekhawatiran akan mendapat bencana, tanpa harapan akan perbaikan.⁴⁰

2. Mula-mula oleh pemerintah telah dapat diberikan sumbangan besar dengan dihubungkannya pulau-pulau, pembuatan jembatan-jembatan di anak-anak sungai seperti dahulu juga telah terjadi dan juga dengan hubungan di darat dan pembuatan jalan — jalan untuk berjalan kaki dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Pembuatan dan perbaikan jembatan-jembatan dan jalan-jalan ini dapat diperintahkan kepada rakyat. Karena hal-hal itu akan menambah keamanan dan mereka sendirilah yang akan menikmatinya, maka beban itu tidak dianggap terlalu memberatkan.⁴¹

Dari lukisan di atas dapatlah orang menyimpulkan bahwa tidak seorang pun, juga para priyayi menghendaki kembalinya pemerintahan yang lalim itu (yaitu pemerintahan Sultan). Dari tinjauan tentang sifat penduduk dan cara mereka diperintah dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan-keadaan baru yang mereka alami sejak tahun 1821 rakyat Palembang akan menjadi rakyat yang lebih baik dari pada di bawah pemerintahan sendiri.⁴²

c. Pengaruh dan Akibat

Pemerintahan Belanda yang berlangsung antara tahun 1800-1900 telah meletakkan dua pengaruh yaitu langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung dapat dirasakan terutama oleh penduduk ibu kota Palembang, yaitu berdirinya Pemerintahan Belanda yang bersemboyan akan memberantas kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Demi tegaknya pemerintahan, mereka mengadakan perbaikan-perbaikan di sana-sini yang dapat mencerminkan tujuan ide-ide liberal yang sedang populer di masa itu. Mau tak mau kedatangan pemerintahan Belanda di daerah ini mengakibatkan pengenalan budaya Barat dengan segala setinya.

Secara tidak langsung pengaruh itu dirasakan di daerah pedalaman, yang baru pada akhir abad ke - 19 daerah pedalaman ini dapat dijangkau oleh kekuasaan Belanda.

Maka akibatnya pengaruh-pengaruh tersebut, di satu pihak mengubah struktur kehidupan, penghidupan, adat, pemerintahan dan sebagainya di kota Palembang dan sekitarnya. Di lain pihak, di daerah pedalaman masyarakat hidup dalam tradisi lama seperti sedia kala, berkembang dalam kelambanan dalam isolasi alam yang mengayominya.

6. ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL (+ 1900-1942)

6.1. Keadaan Pemerintahan.

6.1.1. Kerajaan - kerajaan

Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan sultan terakhir dari kesultanan Palembang yang berdaulat penuh. Tetapi setelah sultan Mahmud Badaruddin dibuang ke Ternate, maka pengganti-penggantinya seperti Susuhunan Husin Dia Uddin dan Sultan Akhmad Najamuddin III kekuasaan dan kedaulatan kesultanan Palembang sudah berkurang, bahkan pengganti-penggantinya yang kemudian hanya merupakan sultan yang digaji oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Kesultanan Palembang dihapuskan sejak tanggal 15 Oktober 1825, dan langsung sepenuhnya di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda (Nederlandsche Indie). Tetapi dalam masa transisi pemerintah kolonial Hindia Belanda masih membutuhkan bantuan pengaruh dan tenaga para bangsawan di Sumatera Selatan. Pangeran yang satu diangkat kemudian diturunkan, dan digantikan dengan Pangeran yang lain. Demikian seterusnya menurut kesenangan dan yang dianggap setia kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Pada tahun 1838 diangkatlah salah satu di antara menantu sultan Mahmud Badaruddin II, yaitu pangeran Kramajaya Abdul Azim menjadi Bupati (Regent Rijksbestuurder).

Pengangkatannya dengan surat keputusan Koning Willem - raja kerajaan Belanda, tanggal 2 Januari 1838, dan kemudian dikukuhkan kedudukannya dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Betawi No.11 bertanggal 8 September 1840 pangeran Kramajaya diberi gelar kehormatan yang tinggi sebagai Bupati, yaitu Pangeran Bupati Perdana Menteri Kramajaya Pangeran Mangkunegara Cakrabuana Sultan Agung Alam Kabir Sri Maharaja Mutar Alam Senopati Martapura Ratu Mas Penembahan Raja Palembang.²

6.1.2. Pemerintahan Hindia Belanda.

Pemerintahan kolonial Belanda dengan pemberian gelar tersebut mempunyai maksud untuk mendapatkan Pangeran yang berambisi dan mau setia, sehingga mau membantu kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Tetapi karena merasa dikekang dan tidak diberi otonomi dalam pengertian yang sebenarnya, bahkan pada tahun 1851 Pangeran Kramajaya mengorganisasikan dan menggerakkan rakyat untuk menentang dan mengadakan perlawanan baru terhadap pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya Pangeran Kramajaya dapat ditangkap dan diasingkan ke Purbolingga (Banyumas) dan wafat di tempat pengasingannya pada tahun 1862.³

Baru empat puluh tahun kemudian sesudah penghapusan kesultanan Palembang, pemerintah kolonial Belanda merasa aman di daerah ini. Tetapi dalam tahun 1880 karena kekhawatiran akan timbulnya kembali perlawanan atau pemberontakan, maka pemerintah Belanda mengasingkan lagi 400 sampai 500 orang keturunan bangsawan kesultanan Palembang ke Banda, Ternate, Tidore, Ambon, Sumbawa, dan Timor Kupang. Di samping itu banyak pula raden-raden dari kesultanan yang sengaja mengasingkan diri atau menjauhi pengaruh kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Tempat pengasingan pengungsian mereka adalah daerah-daerah yang jauh dari pengaruh kekuasaan pemerintah, misalnya : di Muara Beliti, Muara Kelingi dan Gunung Mrakso (terkenal dengan pemberontakan Raden Panji dan pemberontakan Pagar besi). Pahlawan-pahlawan pemberontakan sebenarnya tidak hanya dari pangeran-pangeran kesultanan Palembang saja, tetapi ada juga pangeran-pangeran dari daerah Uluu seperti : Pangeran Semangus, Depati Damrud dari Sekayu dsb.nya.

Sumatera Selatan sejak dihapuskannya kesultanan Palembang berstatus sebagai daerah Keresidenan, yang terdiri dari Keresidenan Jambi, Keresidenan Palembang, Keresidenana Bengkulu, Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka-Belitung. Sebagai kepala pemerintahan adalah seorang Residen. Daerah keresidenan ini di bawah wilayah Propinsi Sumatera, yang diperintah oleh seorang Gubernur yang menjadi wakil Gubernur Jenderal dan berkedudukan di Medan. Sistem pemerintahan kolonial Belanda adalah sentralisasi.

Keresidenan Palembang dibagi dalam beberapa divisi yang dikepalai oleh beberapa kepala divisi, seperti Asisten Residen, kontrolir dsb.nya, yang diangkat oleh Gubernur Jenderal.⁴

Seorang Kontrolir mengepalai suatu Afdeling yang dapat disamakan dengan daerah Kabupaten sekarang. Di bawahnya disebut Onder Afdeling, yang terdiri dari daerah Kawedanaan (dikepalai oleh Demang), Kecamatan atau asisten Kawedanaan (dikepalai oleh Asisten Demang) dan dibantu oleh beberapa Mantri Polisi, Mantri Belasting (Pajak) dll. Adapun jabatan-jabatan seperti Residen, Assisten Residen, Kontrolir pada umumnya dipegang oleh orang-orang berkebangsaan Belanda. Mereka merupakan korps yang disebut Nederlandsche Corps van het Binnenlands Bestuur, sedangkan orang-orang pribumi hanya sebagai pegawai negeri (ambtenaar), dan hanya menjabat sebagai Demang, Assisten Demang, Mantri Politi dan Mantri Belasting.

Pengaturan pemerintahan tingkat terendah masih tetap disiarkan diatur oleh marga masing-masing, yang dikepalai oleh Pasirah selaku kepala pemerintahan dan kepala adat setempat. Secara tradisional marga-marga tersebut mempunyai kekuasaan ekonomi, tetapi luas wilayah dan pengaruh kekuasaan marga tersebut sudah dikurangi dan dilemahkan. Marga yang luas dan besar kekuasaannya dipisah-pisahkan menjadi marga yang kecil, sedangkan marga yang nampaknya tidak mau tunduk dan setia kepada pemerintah Hindia Belanda digabungkan dengan Marga yang setia kepada pemerintah.

Status Marga-marga tersebut diperkuat dengan Staatsblad Nomor 564 oleh pemerintah kolonial Belanda dalam tahun 1922. Maka sejak tahun itu status Marga merupakan daerah otonom tingkat rendah atau disebut "Inlandsche Gemeente", dan statusnya diatur dalam Inlandsche Gemeente Ordeonantie Buitengewesten atau IGOB dengan Staatsblad Nomor 490 tahun 1938⁵.

Tetapi otonomi yang diberikan itu sebenarnya bukanlah otonomi yang bersifat teritorialitas melainkan hanya bersifat etnis. Pasirah selaku kepala marga dibantu oleh seorang Pembarap, yang mempunyai fungsi sebagai wakil Pasirah bila berhalangan. Pembarap ini di dusun merupakan seorang Krio atau kepala dusun, yang dalam tugasnya sehari-hari dibantu oleh Penggawo-penggawo atau penggawo-penggawo inilah kepala kampung. Pasirah, Pembarap, Kerio dan Penggawo dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi dizaman kolonial Belanda, pencalonan Pasirah sudah dapat dipastikan yang menang selalu dari golongan keluarga Pangeran yang setia kepada Belanda. Oleh pemerintah Belanda biasanya dengan suatu penilaian khusus diberi gelar seperti Depati (berasal dari gelar Adipati) dan gelar Pengeran/pemberian gelar Pengeran didasarkan pada pertimbangan lamanya pengabdian kepada pemerintah kolonial Belanda, berturut-turut terpilih dan berwibawa serta mempunyai pengaruh dalam masyarakat.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan politik divide et imperanya bermaksud menghancurkan struktur pemerintahan asli dan menghapuskan susunan feodalisme warisan kesultanan Palembang. Membentuk struktur Marga yang disesuaikan dengan kebutuhan kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan memberi gelar kebangsawanan kepada orang-orang yang dianggap setia membantu pemerintah.

6.2. Kaum Pergerakan di Daerah.

6.2.1. Timbulnya

Pergerakan rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda adalah terutama sisa-sisa pe-

ngikut-pengikut setia Sultan Badaruddin II. Karena mereka sudah banyak yang diasingkan keluar daerah ini, maka habislah sudah pemimpin-pemimpin pemberontak di daerah-daerah. Tetapi beberapa tahun sesudah dihapuskannya kesultanan Palembang masih banyak timbul gerakan-gerakan gelap, para pengikut setia Sultan mengadakan kampanye perlawanan dan mengorganisasikan kekuatan rakyat di daerah-daerah seperti; pemberontakan rakyat di Musi Ulu, di Pagar Besi, di Lubuk Mangkudu, di Semangus dan kemudian pemberontakan Pasirah Dingin di Klambit dan pemberontakan yang besar di Jati. ⁶

Untuk mengakhiri timbulnya lagi pemberontakan, pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan pengasingan lagi dan ada 46 orang Pangeran yang dibuang atau diasingkan. Kemudian melakukan politik *divide et impera* dengan mengaduk-adukan antara marga-marga atau Depati-Depati. Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk memperkecil kekuatan gerakan rakyat dan mempersempit ruang gerak serta kontak antar mereka itu sendiri, sehingga dapat diharapkan tidak akan timbul lagi perlawanan.

6.2.2. Sikap dan Gerakannya.

Setelah pemerintah kolonial Belanda berhasil dengan politik *divide et impera* yang melahirkan "politik pasifikasi"-nya di daerah Aceh, maka politik tersebut diterapkan pula di daerah ini. Pemerintah Belanda tidak lagi bersikap curiga dan menghalangi perkembangan agama Islam. Sikap perjuangan rakyat di daerah mengalami perubahan juga, tidak lagi melakukan perlawanan dengan kekerasan atau mengangkat senjata. Namun dalam hati rakyat di daerah-daerah, masih terpendam keinginan untuk mengusir Belanda yang dianggap orang kafir. Mereka menganggap pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintah kafir dan dianggap tidak sah. Dapat kita katakan bahwa gerakan rakyat di daerah-daerah merupakan gerakan "pure nationalism" ⁷, yang timbul dari rasa kebangsaan yang murni. Membela hak mereka untuk hidup menurut hukum adat dan agama Islam, yang diinjak-injak oleh pemerintah Belanda. Terutama mereka ingin mempertahankan dan mengembalikan agama Islam seperti pada zaman Sultan Badaruddin II yang pernah mencapai puncak kemajuan.

Agama Islam di Sumatera Selatan mengalami kemunduran dan banyak menimbulkan pertentangan faham. Pemerintah kolonial Belanda nampaknya tidak menghalangi perkembangan agama tersebut, dan membiarkan adanya perpecahan antara kaum tua dengan kaum muda, bahkan aliran-aliran yang baru datang dihembus-hembuskan supaya menjadi bahan perselisihan dalam masyarakat. Dengan masuknya Sarikat Islam ke Sumatera Selatan yang dibawa oleh R. Gunawan via Lampung, dan kemudian terbentuklah Sarikat Islam di Palembang, maka dalam waktu yang relatif singkat telah meluas ke daerah uluan. Seperti telah kita ketahui, Sarikat Islam merupakan organisasi yang didirikan sebagai reaksi terhadap rencana kristianisasi-politik⁸ dari zending, dan menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam serta mempunyai massa yang luas sampai kelapisan bawah masyarakat - suatu lapisan yang sejak berabad-abad hampir tidak mengalami perubahan dan paling banyak menderita, dengan sendirinya mendapat sambutan hebat di kalangan umat Islam di daerah ini. Serikat Islam berhasil mempersatukan dan membangkitkan perasaan kebangsaan di daerah-daerah yang bernafaskan Islam. Gerakan Sarikat Islam di daerah ini - terutama dalam bidang ekonomi, telah berhasil membangkitkan perlawanan terhadap pedagang antara (penyalur) orang-orang Cina, dan mulailah pedagang-pedagang kecil Muslim memberanikan diri untuk membekot pedagang-pedagang asing tersebut. Walaupun orang-orang Cina di daerah ini, secara ekonomis merupakan golongan yang menentukan, namun antara golongan pribumi dengan mereka itu terdapat gap (jurang), sehingga jarang sekali terjadi proses asimilasi.

Pembentukan Sarikat Islam di Palembang dilaksanakan di "Gedung Seng" (Taman Sumatera Indra Bangsawan of Palembang)⁹, yang sekarang disebut gedung bioskop REX dan terletak di kampung Sungai Tawar. Adapun tokoh-tokohnya tercatat : Raden Nangling dan M.Yahya.

Kemudian masuk pula Muhammadiyah ke Palembang pada tahun 1928 yang dibawa oleh Jakfar Mahanan yang pulang dari Jogja¹⁰, dan lebih maju lagi cara berfikir umat Islam di daerah ini. Pergerakan yang telah dibawa olehnya, khusus kegiatannya di bidang pendidikan dan da'wah Islam. Dengan bekerja sama Muhammadiyah dengan Sarikat Islam untuk

menghadapi kaum-tua, maka di sana sini mulailah berdiri lembaga-lembaga pendidikan, di samping memberikan bantuan khusus kepada masyarakat, untuk tidak mendapatkan kesulitan dalam menunaikan ibadah haji. Gerakan itu mulai meluas ke Baturaja, Ogan Komering Ilir, Pagar Alam, Lahat dan Musi Rawas ¹¹.

Pengaruh daripada pembentukan kepanduan (patvinder) oleh Parindra (Partai Indonesia Raya) di kalangan pemuda dan pelajar di Palembang, nampaknya berpengaruh juga dalam proses pembentukan Kepanduan Islam di kalangan pemuda dan pelajar Islam seperti Hisbul Wathon (H.W). Melalui kepanduan (patvinder) ini dapatlah ditanamkan kepada generasi muda pengertian disiplin, tanggung jawab dan harga diri sebagai bangsa. Akhirnya timbullah gerakan-gerakan di daerah-daerah, yang melahirkan kekuatan massa rakyat dan tumbuhlah semangat untuk mengusir Belanda menuntut kemerdekaan. Pada tahun 1917, 1920 sudah timbul pemberontakan rakyat, yang dikenal dengan sebutan "Perang Kelambit" di Jambi ¹² dan di Musi Ilir. Kemudian pemberontakan "Sarekat abang" di daerah-daerah Air Itam, Ogan Ilir, Musi Ilir dan Musi Ulu ¹³.

6.3. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat.

6.3.1. Pengaruh Kekuatan Eropah.

Pengaruh kekuatan Eropah di daerah ini sangat kurang, jika dibandingkan dengan keadaan di Sumatera Timur dan di Jawa. Intensitas pemerintahan kolonial Hindia Belanda kurang daripada di Jawa, sehingga kurang sekali terasa pengaruh perubahan sistem pemerintahan sesudah tahun 1900. Misalnya perubahan dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi. Proses desentralisasi, spesialisasi dan pende-wasaan pemerintah pribumi tidak dialami.

Tujuan desentralisasi pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah untuk menghapuskan sisa-sisa masyarakat tradisional, seperti masyarakat adat yang dianggap menghalang-halangi perkembangan administrasi modern ¹⁴. Tetapi otonomi yang diciptakan di Sumatera pada umumnya tidak didasarkan pada prinsip teritorialitas, melainkan ber-

dasarkan prinsip ethnisitas (kesukuan). Kedudukan kepala adat diberi kebebasan, dan dari sebab itu sifat kesukuan selalu diembus-embuskan oleh pemerintah Hindia Belanda di daerah ini. Rupa-rupanya taktik pemerintah Belanda tersebut, kurang berhasil di daerah ini, kecuali suku Komering yang agak besar sifat kedaerahannya seperti yang kita lihat dalam masyarakat Batak pada umumnya. Mungkinkah ada hubungannya kedua suku tersebut ? Sifat demokratis dan individualistis yang telah berakar dalam masyarakat maritim pada umumnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada khususnya, merupakan salah satu faktor penting, mengapa frekwensi kesukuan di daerah ini agak kurang, justeru mereka menganggap manusia itu sama dan tidak ada superior, seperti yang terdapat dalam masyarakat feodal.

Usaha bangsa Eropah untuk membuat perkebunan, hanya terbatas pada perkebunan karet, kelapa sawit dan teh secara kecil-kecilan misalnya : di daerah Musi Landas, Tabenan dan sekitar gunung Kaba. Tetapi sebaliknya pemerintah Belanda lebih memusatkan kepada eksploitasi minyak bumi dan batu arang yang terdapat di daerah Tanjung Enim. Oleh karena itu, di mana terdapat pengilangan minyak bumi dan tambang, di situ terdapat tenaga buruh yang didatangkan dari Jawa dan diusahakan sarana komunikasi (jalan darat) yang lebih baik. Tetapi sebaliknya di luar daerah konsesi tersebut, policy pemerintah Hindia Belanda pada hakekatnya bermaksud untuk menjadikan daerah ini suatu daerah pertanian atau perkebunan rakyat yang tradisional. ¹⁵

6.3.2. Pemenuhan kebutuhan.

Di Sumatera Selatan banyak sekali terdapat masyarakat adat yang hidupnya menderita. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bergantung pada hasil hutan, sungai, ladang dan kebun. Pertanian dikerjakan secara tradisional dengan menanam padi di ladang-ladang, dengan membakar hutan dan berpindah-pindah. Penduduk yang jarang di daerah yang amat luas, telah memungkinkan dari zaman ke zaman kearah usaha ekstensifikasi pertanian di daerah ini. Perkebunan rakyat yang bersifat monokultur di daerah ini, telah membawa

akibat fatal bagi masyarakat, apabila harga karet turun di pasaran dunia. Maka tidak mengherankan, petani-petani di daerah ini dari masa ke masa telah menurun penghasilannya, sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus atau mengolah kebunnya (ladang) dengan baik. Perkebunan rakyat, terutama karet tumbuh secara alamiah, dan bukan karena ditanam dengan mempergunakan bibit unggul. Demikian juga sarana jalan yang kurang baik, sehingga komunikasi dari tempat asal barang ketempat pemasaran memerlukan waktu yang tidak sedikit, karena satu-satunya komunikasi adalah sungai. Yang paling celaka, apabila musim kemarau tiba, sungai-sungai menjadi kering, hubungan menjadi putus, kecuali induk sungai Musi. Di samping mereka bertani dan berkecun, mata pencahariannya berdagang, menangkap ikan dan hasil hutan lainnya seperti : kayu, damar, rotan dan sebagainya.

Bagi masyarakat kota dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar melakukan perdagangan dan sebagian kecil bekerja sebagai ambtenaar atau magang, sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Banyak di antara mereka menjadi pedagang antar kota dan pulau, sehingga hubungan dagang itu telah memberikan kesempatan pada mereka untuk bergaul dengan suku-suku lain. Walaupun pemerintah Belanda berusaha keras untuk mengisolasi daerah ini dari pengaruh luar, namun usaha itu tidak begitu berhasil dan banyak di antara mereka itu menjadi pedagang-pedagang besar yang beroperasi di Singapura. Akhir-akhir ini nampak dengan jelas peranan suku Minang di daerah ini dalam dunia perdagangan, dan berjasa pula dalam mengembangkan ajaran Muhammadyah di daerah ini.

6.3.3. Partisipasi Rakyat (Masyarakat) dalam Pergerakan Kebangsaan.

Dengan penderitaan dan kemiskinan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya, serta menghadapi kecurangan-kecurangan dan penindasan-penindasan dari pihak ambtenaar bumi putera dan Eropah, rakyat di daerah ini mengharapkan kedatangan pemimpin atau organisasi yang dapat membela kepentingannya. mendengar timbulnya gerakan-gerakan kebangsaan dan relegius di Jawa, yang memperjuangkan kepentingan

rakyat Indonesia di bidang sosial, agama, ekonomi dan kemudian menjurus ke bidang politik, maka rakyat di daerah-daerah di seluruh Sumatera Selatan tergerak hatinya ikut berpartisipasi dalam pergerakan itu. Masuknya Serikat Islam ke Sumatera Selatan disambut dengan gembira, karena corak gerakannya dapat dikatakan "gerakan nasionalistis-demokratis-ekonomis"¹⁵. Kemudian masuk pula gerakan yang bersifat kerakyatan, ialah Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan tokoh-tokohnya Dr.A.K.Gani, Dr.Moh.Isa dan S.Carepeboka (Lampung)¹⁷. Tetapi pengikut gerakan ini kebanyakan kaum intelektual yang berpendidikan Barat dan orang-orang yang bertempat tinggal di kota. Program politik partai ini lebih tegas, ialah persatuan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Di Air Item pun terdapat cabang PNI.

6.3.4. Keadaan Masyarakat Selama Priode 1900-1942.

Keadaan masyarakat selama periode tahun 1900-1942 dapat dikatakan dalam kegelisahan. Pemerintahan kolonial Belanda tidak memperhatikan kebutuhan sosial dan pendidikan serta kesehatan rakyat. Perbedaan yang menyolok antara kehidupan golongan pribumi dengan golongan Eropah, telah membina masyarakat di daerah ini sebagai golongan yang non faktor dan apatis. Orang-orang pribumi yang mendapatkan pendidikan baik dan kehidupan yang layak, adalah mereka dari keluarga pangeran atau Depati-Depati serta mereka yang mengabdikan kepada pemerintah Belanda sebagai ambtenaar. Dahulu Pangeran-pangeran atau Depati-depati sebagai kepala Marga merupakan pengayom rakyat di daerahnya, tetapi di masa pemerintahan kolonial Belanda menjadi golongan feodal baru, bahkan menjadi alat pemerintah untuk mengeksploitasi rakyat.

Pemerintah kolonial Belanda sengaja mengembuskan pertentangan kesukuan dan agama (kaum tuo dan kaum mudo). Otonomi pemerintahan Marga yang berdasarkan etnis mempertajam pemisahan masyarakat daerah yang satu dengan yang lain. Kurangnya komunikasi, sehingga keserasian pergaulan hidup masyarakat tidak terjalin. Marga atau suku yang satu ingin lebih unggul atau berkuasa dari suku yang lain.

Pertentangan agama dalam masyarakat, terutama masalah khilafiah, dengan sengaja pemerintah Belanda membesarkan-besarkannya, dengan maksud agar ajaran Islam menjadi kabur bagi masyarakat, dan persatuan tidak dapat terwujud di antara umat Islam, di samping adanya usaha pemerintah untuk menkristianisasikan melalui zending.

Di kalangan kaum ambtenaar atau magang pribumi timbul kegelisahan pula, karena selama pemerintahan kolonial Belanda merasa dijauhkan dari masyarakat atau rakyat. Mereka hidup terpengaruh oleh pola kebudayaan Barat, tetapi oleh orang-orang Belanda dan orang asing lainnya dianggap rendah. Tidak diberi kesempatan untuk mencapai jenjang kepangkatan yang lebih tinggi. Perbedaan warna kulit menjadi dasar kehidupan kolonialisme. Kemiskinan meliputi kehidupan semua lapisan masyarakat, sedangkan orang-orang Belanda dan orang-orang asing lainnya hidup mewah, karena kemakmuran yang dihasilkan oleh dunia usaha dan perdagangannya seperti : hasil minyak bumi dan perkebunan serta tambang batubara di Tanjung Enim. Mereka lebih mengutamakan keuntungan yang mereka kumpulkan dalam waktu yang relatif singkat misalnya: hasil minyak di Plaju (BPM= De Bataafsche Hetroleum Mij) dan di Sungai Gerong (MKPM= Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij) ¹⁸.

Dari hasil perkebunan seperti perkebunan Teh di gunung Dempo, Tanjung Keling, perkebunan Kopi dan Pagar Alam, perkebunan Kina di Kerinjing (Bumiagung) dan perkebunan karet di Tebat Gunung dan di daerah Musi Landas/Tabenan.

Pertentangan suku dan agama dapat dihilangkan dengan masuknya Serikat Islam dan Muhammadiyah, yang berhasil menanamkan perasaan kebangsaan dan ukhwa Islamiah, serta menaikkan akhlak mereka dengan mengembalikan kepada ajaran Islam yang murni. Gerakan-gerakan itu terdapat di mana-mana dan hampir seluruh daerah Sumatera Selatan. Berbarengan dengan masuknya Serikat Islam dan Muhammadiyah, sebenarnya di daerah ini barulah mulai tersebar aliran baru dalam ajaran agama Islam yang disebut aliran mudo (Kaum Mudo). Maksud aliran ini adalah untuk membersihkan faham-faham Islam dari faham-faham bukan Islam, dan ingin mengembalikan Islam kepada aslinya ¹⁹, serta membangunkan jiwa Islam yang seakan-akan sudah tidak berdaya.

Aliran ini dibawa oleh putra-putra Sumatera yang sedang menuntut ilmu di Mekkah dan Al Azhar di Kairo. Aliran ini khusus dalam pembinaan agama dan baru ada kenyataan positifnya kira-kira tahun 1925, dengan kiyai-kiyai yang terkenal dengan sebutan kaum mudo di beberapa daerah misalnya: Kiyai H.Hamdan (Palembang), Kiyai H.M.Nawawi Thayib (Ogan Ulu), Kiyai H.Basri dan Anang Abdulkarim (Kiron) dan Kiyai H.Amir Hamzah (Muba). Penyebaran aliran baru ini telah menimbulkan pergolakan di daerah-daerah. Berbeda dengan Sarikat Islam selain pembinaan agama juga perbaikan sosial, ekonomi dan politik. Dari sebab itu di samping berhasil mempersatukan umat Islam di daerah-daerah, juga berhasil menanamkan perasaan kebangsaan dengan tujuan mengusir pemerintahan "Kafir Belanda".

Menjelang Perang Dunia II, penting sekali peranan P.N.I. dalam membangkitkan semangat rakyat di daerah ini untuk mencapai Indonesia Merdeka. Partai ini dibentuk oleh Samidin di kota Palembang, yang dibawa dari Jawa oleh A.J.Patty. Tetapi dalam tahun 1931 partai ini mengalami perpecahan, di antaranya Nungtjik AR., Moh.Yahya, Udin Saleh, Tohir, Hamid Kemang membentuk Partindo. Sedang pemimpin-pemimpin yang lama membentuk P.N.I. Hatta (Pendidikan Nasional Indonesia) bergerak di bidang pendidikan. Demikianlah pada masa menjelang awal tahun akhirnya penjajahan Belanda, dan kedatangan Jepang di daerah ini dianggap sebagai penyelamat.

6.4. Kehidupan Seni-Budaya.

6.4.1. Pengaruh Kebudayaan Asing.

Kebudayaan asing tidak berpengaruh pada senibudaya rakyat di daerah uluan, karena tidak ada kontak antara orang-orang Eropah dengan rakyat di daerah-daerah, kecuali masyarakat kota dan ini hanya terbatas pada kaum intelek berpendidikan Barat dan kaum ambtenaar. Lagu-lagu barat, terutama lagu-lagu Belanda dan tari-tarian (dance) hanya berpengaruh pada golongan tersebut. Tetapi seni ukur, seni batik, seni pantun, seni tari masih hidup menurut selera masyarakat yang disesuaikan dengan agama Islam. Sesuai

dengan politik Belanda - ialah non akulturatif, membiarkan budaya asli tumbuh tanpa dipengaruhi kebudayaan asing. Seni budaya rakyat ini tumbuh menurut warisan budaya yang turun temurun, tanpa mengalami perubahan dan tumbuh secara tradisional. Tetapi di zaman penjajahan Belanda - karena kehidupan sosial-ekonomi tidak baik, tentunya perkembangan seni budaya akan sejalan dengan keadaan, bahkan mengalami kemunduran. Peranan muballigh Islam yang tergolong kaum tua, telah mempersempit ruang gerak seni tradisional seperti : seni tari, seni musik (gamelan keromong) dsb.nya karena tidak sesuai dan dianggap bid'a. Demikian pula seni batik²⁰ yang bermutu tinggi pada zaman kesultanan Palembang, tak dapat berkembang karena tak dapat bersaing dengan tekstil dari luar, lebih-lebih setelah Perang Dunia I barang-barang buatan Japang membanjiri daerah ini.

6.4.2. Pendidikan.

Dalam bidang pendidikan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik bagi keperluan administrasi pemerintahan Belanda pada tingkat rendah. Sesuai dengan politik kolonialnya, rakyat dibiarkan dalam kebodohan²¹, dan baru pada awal tahun 1900 berdirinya sekolah-sekolah desa di daerah-daerah yang dikenal dengan istilah "sekolah angka tiga". Usaha swasta untuk mendirikan sekolah-sekolah tidak selalu mudah, karena adanya peraturan pemerintah yang dikenal dengan Wilde Scholen Ordonantie²². Di Palembang sendiri hanya terdapat dua buah H.I.S., dan kemudian masing-masing terdapat di Lahat, Muara Enim, Baturaja, Martapura dan Bengkulu. Untuk dapat memasuki sekolah tersebut, memerlukan basis tertentu yang berdasarkan kelahiran anak-anak ambtenaar atau Pangeran/Depati. Sekedar untuk menampung anak-anak yang keluar dari sekolah desa, pemerintah Belanda mendirikan Schakelschool di Palembang. Pada tahun 1920 pernah berdiri Kweekschool di Lahat yang kemudian pindah ke Muara Enim, dan dalam tahun 1927 terpaksa dibubarkan oleh pemerintah, karena sekolah tersebut dianggap sebagai tempat produk berkembangnya pendidikan dan penanaman perasanaan kebangsaan.

Kemudian pada tahun 1938 didirikanlah di kota Palembang Inheemsche Mulo (MULO Bumiputera), seperti yang

terdapat di Bandung, Solo, Surabaya dan Yogyakarta. Di samping itu adanya Mulo yang diusahakan oleh badan swasta misalnya di Lahat (Katholik) dan di Palembang (Tamansiswa). Untuk menunjang kebutuhan pendidikan rakyat yang mendesk, didirikanlah beberapa sekolah guru untuk sekolah desa yang dikenal dengan nama h.V.O. (Het Volks Onderwijs), sandang School, Perguruan rakyat Zelfontwikkeling. Sedangkan kelanjutannya yang lebih tinggi, terpaksa mereka pergi ke Bandung atau Padangpanjang.

6.4.3. Kesenian.

Seperti telah disinggung di atas, kehidupan kesenian tradisional mengalami kemunduran, bahkan beberapa cabang kesenian rakyat seperti seni musik yang mempergunakan gamelan keromong, serdam, genggong, ketipung dll. hampir tidak terdapat lagi di daerah ini. Sebaliknya seni drama yang bertemakan Islam mendapatkan tempat di daerah ini seperti "Dul Muluk", yang sewaktu-waktu diadakan menjelang hari-hari besar Islam. Kemudian menjelang pendudukan Jepang di daerah ini, mulai ada usaha di kalangan pemuda-pemuda untuk menghidupkan seni-tonil, dan kegiatan itu hanya terbatas di kota Palembang saja.

6.5. Alam ^yPikiran dan Kepercayaan.

6.5.1. Perkembangan Agama.

Setelah dijalankan apa yang disebut "politik Ethika" dalam tahun 1900²³, maka mulailah berangsur-angsur bertambah merata pendidikan ala Barat (sekularisme) di kalangan atasan, dan demikian pula kemajuan-kemajuan yang pesat dilakukan oleh zending dan missi dalam dunia pendidikan di daerah ini, yang secara diam-diam mendapatkan subsidi dari Pemerintah kolonial Belanda, merupakan tantangan hebat bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam pada umumnya. Nasionalisme, nasionalisme, individualisme dan sebagainya adalah ciri-ciri khas dari kultur Barat, yang pada waktu itu mulai masuk dalam cara berpikir di kalangan kaum terpelajar pribumi yang mendapatkan pendidikan Barat.

Apa yang dikatakan oleh Drs. Amir Hamzah dalam bukunya: Pembaharuan pendidikan dan pengajaran Islam yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, nasib lembaga-lembaga pendidikan Islam sangat menyedihkan dan keadaannya maju-mundur, alam kebekuan, tertinggal zaman, fanatisme dan sebagainya. Sebab-sebabnya dapat dicari karena kedudukannya geisolir, anti pembaharuan dan anti terhadap apa saja yang berbau Belanda menyebabkan ia seperti katak dalam tempurung²⁴. Di samping itu faktor politik, ekonomi dan sosial daerah ini sebagai tanah jajahan, tidak sedikit memberikan pengaruh kepada perkembangan agama. Begitulah keadaan Islam yang secara mayoritas dianut oleh masyarakat Sumatera Selatan dalam akhir abad XIX dan permulaan abad XX, yang telah memaksa golongan beragama untuk meninjau kembali isi daripada kekayaan aqidah dan agamanya. Kemunduran dan kefanatikan yang meliputi masyarakat Islam dan sikap netral di bidang agama pada sekolah-sekolah pemerintah, rehabilitasi Islam di daerah ini mendapatkan manifestasinya dalam gerakan-gerakan Islam yang disponsori oleh Sarikat Islam dan Muhammadiyah, sebagai akibat keadaan dan motif politik yang menguasainya dalam rangka pembaharuan Islam secara integral.

Dari tahun ketahun proses modernisasi dalam cara mengembangkan agama Islam di daerah ini meningkat terus, meskipun kepercayaan rakyat masih melekat (animisme, dinamisme) dan kemudian berangsur-angsur menipis, merupakan hasil yang kongkrit dari mubalig-mubalig Islam yang terpelajar, yang selain berbekal pengetahuan umum dan kaya pengetahuan agama, juga otaknya penuh dengan teori soal keduniawian, adanya pun menyala-nyala dengan cahaya iman. Golongan muslim terpelajar ini sanggup menilai macam-macam tindakan orang dengan nilai-nilai agama dan berani mengangkat muka di hadapan kaum terpelajar Barat, karena mereka memiliki apa yang dimiliki oleh golongan terpelajar Barat tersebut.

6.5.2. Perjuangan Pergerakan Nasional dan Motivasi Agama.

Walaupun sudah banyak pangeran-pangeran dan para bangsawan yang setia kepada Sultan Badaruddin II, dibuang

ke luar daerah dan secara politis sudah tidak ada lagi perlawanan rakyat melawan penjajahan, tetapi secara psikologis gerakan itu membawa pengaruh yang lebih jauh bagi masyarakat di daerah ini untuk mencari kesempatan melawan penindasan. Oleh sebab itu, ketika Serikat Islam datang di Palembang dan disambut dengan baik oleh angkatan muda, maka dengan dalih melawan orang kafir merupakan sesuatu yang wajar dan dianggap perang jihad. Hal itu dapat dibuktikan adanya perang Kelambit di Jambi, di Musi Ilir, gerakan sarakat Abang di daerah Air Item Ogan Ilir dan Musi Ulu.

6.5.3. Kehidupan Intelektual.

Setelah memerintah Belanda menjalankan apa yang disebut politik etis, mulailah berlaku pendidikan Barat di kalangan atasan, yang merupakan golongan tersendiri. Ia berlagak sebagai orang yang maha tahu dan cara hidupnya kebelanda-belandaan, bahkan melebihi orang Belanda sendiri. Sebaliknya golongan agama (Kiyai) yang mendapatkan pendidikan di Mekah atau Al Azhar, lebih dekat kepada rakyat biasa. Oleh sebab itu golongan terakhir ini lebih banyak memperoleh simpatisan dari golongan non Elite, dan menjadi sponsor dalam pergerakan Nasional di daerah ini, setelah mereka mengenal Serikat Islam yang dibawa dari Jawa. Rupa-rupanya kepemimpinan di daerah ini dapat berhasil dan mendapat dukungan dari orang banyak apabila sifat intelektualnya didasarkan kepada agama setempat.

6.6. Hubungan Keluar :

6.6.1. Bentuk dan Sifat Hubungan.

Seperti telah dikemukakan dalam perkembangan agama, hubungan keluar hanyalah terbatas pada soal-soal yang menyangkut segi keagamaan, yaitu menjalankan ibadah Haji ke Mekah. Walaupun pemerintah Belanda tidak ikut campur dalam masaalah tersebut, tetapi sesuai dengan politik kolonial Belanda, lebih-lebih setelah menaklukkan Aceh pada awal abad XX, maka urusan menjalankan hukum Islam ke-lima itu diurus oleh mereka sendiri dan tidak ikut campur dan tidak juga melarang.

6.6.2. Sikap Terhadap Dunia Luar.

Oleh karena hubungan itu terbatas pada soal-soal yang menyangkut segi keagamaan, maka tidak dapat tidak mereka sangat mencurigai orang-orang yang bukan beragama Islam, lebih-lebih ajaran Islam yang dianut oleh mereka itu dari aliran sunnah. Seperti telah kita ketahui, sebagian besar mereka itu mengikuti mazhab Sya'fi yang menitik beratkan kepada sumber Al Qur'an dan sunnah Nabi. Di antara mereka yang menunaikan ibadah Haji tersebut, ada juga di antara mereka itu yang sampai bertahun-tahun menetap di tanah suci untuk memperdalam ilmu keagamaan.

6.6.3. Pengaruh dan Akibatnya.

Semakin banyaknya orang-orang menunaikan ibadah haji ke Mekah dari tahun ketahun, semakin hebatlah Syi'ar Islam di daerah ini. Banyak di antara mereka yang pulang dari Mekah membawa faham baru dalam ajaran Islam, sehingga terpaksa aliran sunah di daerah ini menerima kenyataan itu, lebih-lebih setelah munculnya Muhammadyah di daerah ini yang bergerak di bidang sosial-edukatif. Walaupun di kalangan kaum tua sendiri menganggap pembaharuan itu suatu bid'ah namun usaha ke arah pembaharuan tersebut mendapat dukungan besar di kalangan pemuda dan pelajar.

7. ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 - 1945)

7.1. Keadaan Pemerintahan.

7.1.1. Kerajaan-kerajaan.

Di daerah Sumatera Selatan pada waktu militer Jepang menduduki dan memerintah daerah ini tidak ada lagi kerajaan¹. Kesultanan Palembang sebagai suatu kerajaan sudah dihapuskan pada tahun 1825 oleh Belanda², karena Sultan Palembang mengobarkan peperangan menentang Belanda dan akibatnya pengusirannya dan aneksasi Kesultanan ke dalam wilayah yang dikuasai oleh Belanda.³

Dengan hapusnya Kesultanan Palembang maka kerajaan dalam arti kingdom yang betul-betul tidak ada lagi di daerah Sumatera Selatan. Yang masih ada hingga sekarang sebagai warisan dari Kesultanan Palembang di antaranya ialah pemerintahan kemargaan.⁴

Di daerah Sumatera Selatan daerah hukum yang paling bawah disebut "dusun" atau "kampung" dan di atas daerah-daerah itu daerah gabungan dari dusun-dusun dinamakan Marga.⁵ Kepala dusun disebut Kerio (Rio) atau Proatin dan kepala marga disebut Pasirah atau Depati. Dalam menjalankan tugasnya Pasirah dibantu oleh Kerio-kerio dan Kerio dibantu oleh Penggawa-penggawa. Khusus untuk pемban-

tu Pasirah ialah Pembarap yang berkedudukan di ibu marga jadi dapat disamakan dengan Kerio. Setelah Jepang masuk, menduduki dan memerintah di Sumatera Selatan, maka oleh pemerintah militer Jepang dalam hal kedudukan dan pemerintahan dusun dan marga tidak diadakan perubahan, dibiarkan hidup terus. Untuk kepentingan mencukupi kebutuhan perang maka otonomi marga dan kedudukan hukum marga dipergunakan lebih hebat dari sebelumnya. Oleh pemerintah militer Jepang marga diberikan tugas mengerahkan tenaga kerja sebagai Romusa dan menyerahkan bahan-bahan yang diperlukan dalam peperangan berupa bahan makanan. ⁶

7.1.2. Pemerintahan Jepang.

Sebelum melakukan penyerbuan ke Jawa tentara Jepang menyerbu dan menduduki lebih dahulu beberapa daerah strategis di Hindia Belanda. Sumatera Selatan termasuk di antara beberapa daerah strategis di Hindia Belanda. ⁷ Tentara Jepang mendarat di Palembang pada tanggal 14 Pebruari dan pada tanggal 16 Pebruari Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki ⁸. Terbukalah jalan penyerbuan ke Jawa.

Delapan hari sesudah pendaratan pertama di Jawa Bandung berhasil diduduki ⁹, dan pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah dengan tidak bersyarat kepada bala tentara Jepang ¹⁰. Berahirlah pemerintahan Belanda di Indonesia dan Indonesia memasuki zaman pemerintahan militer Jepang.

Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda oleh pemerintah militer Jepang dibagi dalam tiga daerah pemerintahan yaitu :

1. Pemerintahan militer Angkatan Darat Kedua Puluah Lima di pulau Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi.
2. Pemerintahan militer Angkatan Darat keenam belas di pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia Jakarta sekarang.
3. Pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan Kedua di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, dengan Pusatnya di Makasar. ¹¹

Untuk mengetahui bagaimana pemerintahan Jepang di Sulawesi Selatan perlu diikuti lebih dahulu langkah-langkah yang diambil oleh Panglima tertinggi Angkatan Darat kedua puluh lima yang berkedudukan di Bukit Tinggi sebagai berikut : Panglima Tertinggi Angkatan Darat Keduapuluh Lima mau membentuk pemerintahan sipil terdiri dari syuugun (keresidenan), bunsyuu (sub keresidenan), gun (distrik) dan son (subdistrik). Sumatera oleh pemerintah militer Jepang dibagi dalam sepuluh syuu, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Timur Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Palembang dan Bangka/Belitung. Masing-masing syuu mempunyai Departemen dalam negeri, Departemen Kepolisian dan Departemen Kesejahteraan Sosial. Tiap-tiap syuu dikepalai oleh seorang Syuucookan. Gunseikanbu (Staf Pemerintahan Militer) dibentuk pada pertengahan tahun 1943 berkedudukan di Bukit Tinggi, dengan mempunyai sebelas departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Kepolisian, Departemen Kehakiman, Departemen Industri, Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Pembukaan, Departemen Penerangan, Departemen Pemindahan dan Pengiriman, dan Departemen Neteorologi. ¹²

Dengan mempedomani langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah militer yang berkedudukan di Bukit Tinggi dalam bidang pemerintahan, maka pemerintahan Jepang di Sumatera Selatan dapat dikemukakan sebagai berikut : Palembang dan Bangka - Belitung adalah sebagai syuu. Tiap-tiap syuu terbagi atas bunsyuu, bunsyuu atas gun dan gun atas son. Tiap-tiap syuu dikepalai oleh syuucookan, bunsyuu oleh bunsyuucoo, gun oleh guncoo, dan son oleh soncoo. Kedudukan syuucookan dapat disamakan dengan Residen; bunsyuucoo, Asisten Reksiden; guncoo, Wedana/Demang; dan soncoo, Asisten Wedana, Camat.

Di samping kedudukan-kedudukan tersebut di atas ada juga kedudukan sebagai syicoo (Walikota) untuk Kotapraja seperti Palembang syi (Kotapraja Palembang). Syi mempunyai administrasi sendiri dalam syuu. Syi langsung dibawah syuocookan. ¹³ Jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan yang disediakan untuk bangsa kita pada umumnya hanyalah jabatan sebagai Wedana dan Asisten Wedana. Di luar dari

jabatan-jabatan itu diduduki oleh bangsa Jepang. ¹⁴ Pejabat-pejabat penting dalam pemerintahan di Palembang di antaranya ialah Letnan Jenderal Myako Tosio sebagai Coakan/Syuucoakan, Matsubara sebagai Soomubucoo, R. Mutoro dan R.M. Mursodo sebagai pejabat dari Kepolisian, dan Asaari sebagai pejabat Kepala Kepolisian.

Palembang sebagai suatu Keresidenan dan ibukota keresidenan di sini ada kantor Gunseibu. Departemen-departemen yang ada di sini tentunya ialah Departemen Dalam Negeri, Departemen Kepolisian, dan Departemen Kesejahteraan Sosial. Jawaban-jawaban yang ada seperti yang ada pada zaman Belanda.

7.1.3. Sikap Terhadap Pemerintahan Jepang.

Pada umumnya kedatangan bala tentara Jepang di Indonesia mula-mula disambut dengan gembira oleh rakyat. Rakyat menyambutnya sebagai liberator, ¹⁵ yang akan membebaskan Indonesia dari dominasi kolonial Belanda. ¹⁶ Memang banyak di antara orang-orang Indonesia memandang Jepang sebagai liberator. ¹⁷ Di Sumatera Selatan setelah Palembang jatuh ketangan Jepang maka pemuka-pemuka dari Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) seperti Dr. A.K. Gani, Nungcik AR, A.S. Sumadi dan dari Parindra (Partai Indonesia Raya) seperti Dr.M.Isa, telah bersepakat mencari Bung Karno yang ditahan di Sumatera Barat. ¹⁸ Bung Karno dibebaskan dari pengasingannya di Padang oleh balatentara Jepang dalam bulan Maret 1942 dan pada awal bulan Juli 1942 dibawa ke Jakarta melalui Palembang. ¹⁹

Sebelum diantar ke Jakarta dengan mempergunakan perahu motor kecil oleh pemuda-pemuda Gerindo, selama Bung Karno berada di Palembang diadakan perundingan. Hasil perundingan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kesatuan dan persatuan di kalangan segenap pemimpin dalam menghadapi fasisme Jepang agar dipelihara.
2. Hubungan dengan masyarakat agar diusahakan terpelihara.
3. Gerak langkah baik secara legal ataupun secara illegal agar diatur. ²⁰

Setelah berada kembali di Jawa Bung Karno segera menghubungi Bung Hatta dan Sutan Syahril, mereka berdua ini telah bersentuhan dengan gerakan di bawah tanah yang disusun oleh Mr. Amir Syarifuddin dan Dermawan Mangunkusumo. Secara timbal balik diputuskan bahwa perjuangan Nasional yang terbaik harus ditempuh dengan dua cara, yaitu bekerjasama atau mengadakan perlawanan. Bung Karno dan Bung Hatta mengambil langkah bekerjasama dengan Jepang. Sutan Syahril dengan memelihara kontak dengan mereka itu-menyusun suatu perlawanan di bawah tanah.²¹

Di Sumatera Selatan pada akhir tahun 1942 timbul perlawanan Rakyat di daerah Air Hitam Sekayu, menentang Jepang. Perlawanan ini merupakan penembakan terhadap rombongan pemerintah militer Jepang yang sedang melakukan peninjauan mempergunakan perahu dengan tiba-tiba mendapat tembakan. Najamudin yang turut dalam rombongan itu kena peluru. Akibat perlawanan Rakyat di Air Hitam itu Jepang mengambil tindakan. Pemimpin PSII daerah di antaranya A.S.Matcik dan Hamzah Kuncit beserta banyak anggotanya ditangkap, dipenjarakan dan disiksa. Karena disiksa banyak yang mati.²² Kecuali itu ditangkap pula Dr.A..K.Gani dan Inspektur Polisi R.Mutoro. Mereka ini disiksa pula. Setelah disiksa Inspektur Polisi R.Mutoro dibunuh.²³

Sesudah mengalami kekalahan di beberapa medan pertempuran dan mulai terdesak Jepang mengubah politiknya terhadap Indonesia. Kepada Rakyat Indonesia dijanjikan kemerdekaan dan diminta memberi bantuan semaksimal mungkin segala sesuatu untuk kepentingan perang seperti bahan makanan, tenaga Romusa, barisan-barisan perlawanan berupa Heiho dan Gyugun. Untuk maksud ini di Palembang Coakan Letnan Jenderal Myako Tosio mengizinkan Asaari, Kepala Pengadilan Palembang, untuk mengadakan kontak dengan pemimpin-pemimpin daerah. Kesempatan yang baik ini dipergunakan sepenuhnya oleh Asaari. Yang mula-mula dihubungi Asaari ialah Kepala Resakdi Palembang Shinbun, Nungcik Ar, dengan tujuan mengusahakan pembentukan semacam Hoakaakai di Palembang. Kemudian mereka itu mengadakan perundingan-perundingan. Asaari mengadakan perundingan-perundingan dengan pegawai-pegawai negeri dan pamong. Nungcik Ar mengadakan perundingan dengan pemuka-pemuka daerah dan pemuda.

Akibatnya setelah melalui perundingan-perundingan termasuk dengan Jepang terbentuklah di Palembang Badan Kebaktian Rakyat (BKR) Badan ini merupakan Front Persatuan Nasional di daerah ini dan besar peranannya dalam menyambut permulaan Revolusi Nasional tahun 1945. Para pegawai negeri dan pemuka-pemuka pergerakan daerah bersatu padu dalam BKR. Dr.A.K.Gani seorang tokoh pergerakan daerah terkenal setelah keluar dari penjara mengambil bagian dalam BKR. @\$

7.2. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat.

7.2.1. Keadaan Sosial.

Meskipun dalam beberapa tindakannya adalah baik, tetapi bagi massa penduduk Indonesia pendudukan Jepang adalah merupakan suatu priode penderitaan. ²⁵ Kondisi sosial Rakyat/penduduk Sumatera Selatan pada umumnya adalah buruk. ²⁶ Sebagian besar penduduk Sumatera Selatan adalah hidup sebagai petani. Petani-petani diharuskan bersawah tetapi hasilnya sebagian harus disetorkan kepada Jepang. Barang-barang pokok kebutuhan hidup sehari-hari, sandang dan pangan termasuk rokok oleh Jepang disimpan di gudang. Barang-barang itu dibagikan dengan sistem distribusi melalui penyalur yang ditunjuk. Penduduk kurang makan dan sandang. Karena sandang sukar didapat rakyat terpaksa berpakaian karung goni atau kulit kayu. Para romusha atau kuli BPP (Badan Pembantu Pemerintah) sebutan terkenal di Sumatera Selatan, sangat menyedihkan. Upah, makanan dan kesehatan mereka kurang diperhatikan oleh Jepang. Akibatnya banyak yang meninggal dunia di tempat kerja. Sebagai buruh paksa mereka dipekerjakan di beberapa tempat untuk membangun bangunan yang berhubungan dengan kepentingan perang Jepang, seperti jalan-jalan, benteng-benteng, lapangan kapal terbang dan sebagainya di Palembang (Sekojo), Plaju, Mariana dan di tempat-tempat lain, ²⁷ yang dianggap penting.

Nasib buruh, pegawai negeri yang bekerja diperusahaan-perusahaan dan instansi-instansi Jepang adalah sama seperti yang diderita oleh BPP. Mereka juga menderita kurang makan, dan kurang pakaian. ²⁸ Upah buruh, pegawai

negeri dalam instansi-instansi Jepang pada umumnya adalah rendah, sedang jam kerja diperpanjang. Buruh perkebunan dibolehkan tetap berada di perkebunan atau tetap bekerja pada perkebunan tetapi mereka harus menyediakan waktunya untuk menanam tanaman yang menghasilkan bahan makanan di samping melakukan tugasnya.

7.2.2. Keadaan Ekonomi.

Pemerintah pendudukan militer Jepang mengubah kehidupan ekonomi perang.²⁹ Prioritas pertama diarahkan kepada sumber-sumber bagi kepentingan usaha-usaha perang dan prioritas kedua kepada kepentingan memenuhi kebutuhannya sendiri bagi Dunia Kemakmuran Bersama Asia.³⁰

Untuk mendapat supply bahan bakar bagi pesawat terbang dan kapal-kapal, setelah berhasil menduduki Palembang Jepang mengadakan perbaikan pabrik penyulingan minyak bumi yang berpusat di Plaju dan Sungai Gerong yang rusak akibat siasat bumi hangus. Sungai Gerong lebih parah rusaknya daripada Plaju. Banyak tenaga romusha/BPP baik dari dalam maupun dari luar Sumatera dikerahkan di samping buruh dari perusahaan itu.³¹

Siasat bumi hangus juga terjadi di perusahaan tambang arang Bukit Asam (Tanjung Enim). Banyak pula romusha/BPP yang dipekerjakan di perusahaan ini.³² Batubara juga merupakan bahan penting sebagai bahan bakar dan lain-lain. Meskipun sudah diadakan perbaikan, produksi minyak bumi dan batubara menurun pada masa pendudukan Jepang.

Perusahaan perkebunan kina dan karet di Sumatera Selatan pada umumnya masih melakukan kegiatannya meskipun tidak segiat sebelum pendudukan Jepang. Perusahaan perkebunan kina di Kerinjing, karet antara lain di Sungai Laru, Tebat Gunung dan di Malani. Perusahaan perkebunan teh dan kopi umumnya juga mundur bahkan ada yang menghentikan kegiatannya. Perusahaan perkebunan teh di Gunung Dempo dan di Tanjung Keling. Perusahaan perkebunan kopi di Padang Karet dan di Kebun Pagar Alam.

Dalam usaha dan menkonsentrasi memenuhi kebutuhannya sendiri akan bahan makanan, pemerintah pendudukan militer Jepang meningkatkan produksi beras. Daerah-daerah penanam-

an padi dibuka di perusahaan perkebunan yang menghasilkan bukan hasil pokok bagi kepentingan usaha-usaha perang Jepang antara lain perusahaan perkebunan kopi, oleh Jepang perusahaan perkebunan kopi di Padang Karet, Kebun Pagar Alam dan di tempat lainnya, dijadikan daerah penanaman padi di samping membuka daerah baru untuk tanaman yang sama di daerah Sumatera Selatan ini.

Untuk memperoleh bahan minyak pelumas (bukan berasal dari minyak bumi) Jepang merupakan jenis tanaman baru yang diperkenalkan oleh Jepang.

Untuk kepentingan akan bahan sandang Jepang mengusahakan penanaman kapas dan rami di daerah Sumatera Selatan yaitu di Palembang dan lain tempat.

Dalam lapangan perdagangan diadakan pengawasan dan pengendalian harga dengan maksud menstabilisasikan situasi karena terjadi inflasi. Uang kertas Jepang banyak beredar. Barang-barang kebutuhan hidup senantiasa meningkat sedangkan persediaannya kurang akibat daripada penyeteroran impor dan ekspor. Inflasi berjalan terus sehingga nilai uang kertas pendudukan Jepang jauh merosot dari nilai nominalnya.

Semua perusahaan yang telah disebut di atas diambil alih dan di tempatkan di bawah pengawasan badan-badan tertentu yang telah ditunjuk. Diambil alih pula perusahaan-perusahaan penting lainnya seperti perusahaan listrik, komunikasi, transpor dan Bank.

7.3. Kehidupan Seni Budaya.

7.3.1. Pendidikan.

Dalam bidang pengajaran di Sumatera Selatan pada zaman pendudukan Jepang juga menyedihkan. Beberapa sekolah tertentu yang jumlahnya sangat sedikit ditutup. Sekolah-sekolah yang ditutup antara lain H.I.S. dan M.U.L.O.³³ Sebelum ditutup, HIS antara lain ada di Palembang, Martapura, Baturaja, Muara Enim, Tanjung Raja dan di Lahat.³⁴ HIS pemerintah di Palembang ada dua buah, di Lahat sebuah, di Muara Enim sebuah, di Baturaja sebuah, di Martapura sebuah, di Tanjung Pandan sebuah, di Tanjung Raja sebuah,

dan Kayu Agung sebuah. Di Palembang ada juga beberapa buah HIS swasta.³⁵ Sebelum ditutup di Palembang juga ada MULO milik pemerintah sebuah, milik Taman Siswa sebuah, di Lahat sebuah milik swasta (Katholik).³⁶ Di samping itu ada juga Inheemsche MULO (MULO Bumiputra) dan MULO Muhammadiyah.

Sekolah-sekolah baru yang didirikan oleh Jepang di Sumatera Selatan di antaranya ialah Sekolah Guru, Sekolah Keputrian Sekolah Pegawai Negeri. Semuanya didirikan di Palembang.³⁷ Sekolah-sekolah lainnya yang didirikan ialah Mizuho-gakko-en di Palembang, Minarai Gakko dan Skyu-Kagyo-Gakko (Sekolah Teknik Minyak) di Plaju.³⁸ Sekolah Guru yang dibuka di Palembang adalah seperti Leergang dahulu dengan nama Kyo-in Yosejjo³⁹ atau Syoto Syihan Gakko (Sekolah Guru 2 Tahun).⁴⁰ Sekolah-sekolah yang lebih tinggi tidak ada.

Sistem pengajaran yang dipakai adalah melanjutkan sistem sebelumnya dengan memasukkan antara lain bahasa Jepang dan taisho (gerak badan) ke dalam kurikulum.⁴¹ Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa Jepang sebagai bahasa untuk mata pelajaran wajib.⁴² Bahasa Belanda tidak boleh dipergunakan dalam korespondensi dan pers, serta tidak boleh lagi diajarkan di sekolah-sekolah. Bahasa Belanda dihapuskan diganti dengan bahasa Jepang. Bahasa Jepang dianjurkan dipakai dalam korespondensi dan pers di samping bahasa Indonesia.

Tiap-tiap pagi sebelum mulai belajar para pelajar diharuskan lebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, penghormatan (kirei) kearah Tokyo dan Taisho.⁴³

Para pelajar diharuskan pula melakukan latihan militer membuat kebun untuk ditanami dengan tanaman yang menghasilkan bahan makanan seperti padi, jagung dan lain-lain; bekerja di kebun-kebun Jepang.

Guru waktu itu kurang, untuk mendapatkan tenaga pengajar di samping dibukanya sekolah guru diadakan kursus kilat atau penataran untuk guru.⁴⁴ Mereka yang dikursus atau ditatar selain mendapat latihan-latihan bahasa Jepang, nyanyian lagu-lagu Jepang, taisho, kemiliteran dan lain-lain. Mereka yang sudah dikursus atau ditatar diha-

ruskan mengembangkan ilmu yang di perolehnya kepada rekan-rekannya yang belum ditatar.

7.3.2. Kesenian.

Di daerah Sumatera Selatan pada masa pendudukan Jepang dalam bidang kesenian tidak semua kesenian berkembang. Pada waktu itu kegiatan dalam pangan seni : seni drama, seni suara, dan seni tari ada tetapi diselaraskan dengan kepentingan Jepang. Oleh Jepang Seni bukan untuk seni tetapi seni dipergunakan untuk propaganda politiknya.

Seni drama (sandiwara) diselenggarakan oleh Sendenbu, jawatan Penerangan.⁴⁵ Di kota Palembang gedung pertunjukan untuk sandiwara atau film hanya dua buah yaitu Oriental dan Elite. Orientallah yang lebih banyak dipergunakan untuk pertunjukan. Seni suara dan seni tari baik daerah maupun Jepang dipergunakan dan diperlihatkan.⁴⁶ Dalam pesta-pesta atau pertemuan-pertemuan kebanyakan diperdengarkan lagu-lagu Jepang.⁴⁷

Tarian adat Sumatera Selatan yaitu Gending Sriwijaya, buat pertama kali ditampilkan untuk menyambut kedatangan Ketua Cuo Sangikai Bukit Tinggi, M. Syafei, tatkala dari tanggal 1 sampai 4 Agustus 1945 beliau berada di daerah Palembang.⁴⁸ Syair (kata-kata) lagu gending Sriwijaya diciptakan oleh Nungcik AR dan lagunya oleh A. Dahlan.⁴⁹

7.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan.

7.4.1. Perkembangan Agama.

Sejak dahulu hingga sekarang rakyat Sumatera Selatan terkenal sebagai masyarakat beragama. Sebelum ada pengaruh dari dunia luar masyarakat di daerah ini sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama yang berasal dari dunia luar dan mempengaruhi alam pikiran dan kepercayaan rakyat di daerah ini ialah Agama Hindu, Agama Buddha, Agama Islam, dan Agama Kristen/Nasrani. Keempat Agama ini hingga sekarang masih dianut oleh masyarakat Sumatera Selatan. Islam paling banyak penganutnya. Pada masa pendudukan Jepang di Sumatera Selatan kehidupan Agama bebas tanpa penekanan.⁵¹

Setiap umat beragama diberi kebebasan melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing.⁵² Akan tetapi mereka itu diharuskan setia kepada Dai Nippon dan harus melakukan penghormatan "kirei" kearah Tokio.⁵³

Selama pendudukannya di Sumatera Selatan Jepang tidak berusaha membina kehidupan agama misalnya memberi bantuan kepada ummat beragama mendirikan tempat-tempat beribadah dan kepentingan-kepentingan lainnya. Jepang hanya menekankan agar antara ummat beragama tidak akan terjadi perselisihan dalam motif apapun dan mau berkorban membela Jepang.

Di Tanjung Raja pernah diadakan suatu Koperasi/peremuan ummat Islam se daerah Sumatera Selatan. Dalam pertemuan ini Jepang menekankan supaya ummat Islam melakukan jihad fisabilillah untuk membela Jepang. Akan tetapi ummat Islam berpendirian lain. Pada prinsipnya jihat fi sabilillah itu sendiri oleh ummat Islam dipergunakan untuk menentang penjajah yaitu Jepang.⁵⁴

7.4.2. Gerakan Perlawanan dengan Motivasi Agama.

Selain hendak menjajah Jepang juga telah mempermainkan kaum Muslimin. Kaum Muslimin diperintahkan melakukan kerei, kearah Tokio. Kaum Muslimin diperalat untuk kepentingan perangnya. Akhirnya timbullah perlawanan menentang kekuasaan tentara Jepang. Perlawanan menentang Jepang dengan motif agama di daerah ini terjadi di daerah Air Hitam (Sekayu). Penggerak perlawanan adalah PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) daerah meskipun pada masa pendudukan Jepang semua organisasi politik dibekukan dan dilarang melakukan kegiatan.

Telah diutarakan di muka bahwa peristiwa di Air Hitam terjadi pada akhir tahun 1942 tatkala rombongan pemerintah militer Jepang mengadakan peninjauan di daerah itu dengan mempergunakan perahu tiba-tiba mendapat tembakan. Asal tembakan tidak diketahui. Najamuddin yang turut dalam rombongan itu kena tembakan. Setelah terjadi peristiwa di Air Hitam itu Jepang melakukan penangkapan di lingkungan pemimpin dan anggota PSII daerah. A.S.Matcik, Hamzah Kuncit dan ratusan orang anggota PSII ditangkap,

dipenjarakan dan disiksa. Akibat disiksa banyak di antara mereka itu yang meninggal. Di samping itu Dr.A.K.Gani dan R.M.Mutoro (Inspektur Polisi) juga ditangkap, dipenjarakan dan disiksa. R.M.Mutoro kemudian mati dibunuh.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, PSII bersikap non koperasi dan melakukan perlawanan terhadap Belanda terkenal dengan peristiwa Rantau alae dan Peristiwa Semining Muara Dua.⁵⁵

7.4.3. Kehidupan Intelektuil.

Pada masa pendudukannya di daerah Sumatera Selatan Jepang mengarahkan perhatiannya terhadap para kiyai atau ulama terutama yang Islam, sebab Agama Islam di daerah ini paling banyak penganutnya dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Jepang berusaha menggabungkan agama dalam politiknya dengan memeralat kiyai atau Ulama sebab mereka ini besar pengaruhnya dalam masyarakat karena ilmu agama yang dimilikinya. Biasanya para Kiyai atau Ulama adalah sebagai pemimpin spritual penduduk. Kepada para kiyai atau ulama Jepang mengharapakan mereka itu mau bekerjasama dan mau menyadarkan rakyat akan kekuasaan pemerintah Jepang. Jepang mempropagandakan kepada para kiyai bahwa Perang Asia Timur Raya adalah perang suci dan bahwa orang-orang Jepang dan orang-orang Indonesia adalah satu leluhur (nenek moyang) yaitu berasal dari ras biasa.

Pada Ulama disuruh membaca doa untuk kepentingan usaha perang Jepang dan kerei kearah Tokio.⁵⁶ Perbuatan ini telah menyebabkan para ulama kecewa dan tidak mau melakukan secara aktif. Kepada para intelektual baik dari golongan Agama mau pun golongan nasionalis yang tidak menentang Jepang dipergunakan dan yang menentang dihancurkan.⁵⁷

7.5. Hubungan Dengan Dunia Luar.

7.5.1. Terbuka.

Pada masa pendudukan Jepang tidak ada hubungan secara terbuka antara Sumatera Selatan dengan Dunia luar. Sumatera Selatan tertutup hubungannya dengan luar negeri.

Pemerintah militer Jepang tidak hanya memisahkan antara Keresidenan dengan keresidenan di Sumatera tetapi juga memisahkan antara pulau Sumatera dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia, ⁵⁸ seperti dengan pulau Jawa, Kalimantan dan lain-lainnya. Seakan-akan waktu itu ada daerah pemisah yang memisahkan satu dengan yang lain. Antara Sumatera dan Jawa tidak ada hubungan, ⁵⁹ meskipun mempunyai satuan pemerintahan yang sama, yaitu Sumatera di bawah satuan Militer Angkatan Darat kedua puluh lima dan Jawa di bawah Angkatan Darat keenam belas.

Sumatera Selatan sebagai suatu keresidenan waktu itu tidak hanya sukar berhubungan dengan pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia tetapi juga sukar hubungannya dengan keresidenan-keresidenan lain di Sumatera. Hubungan antara gunseibu yang lain ada dan diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan Rakyat secara terbuka dapat berhubungan dengan dunia luar meskipun dari pihak rakyat menghendaki suatu hubungan. ⁶⁰ Berita-berita tentang jalannya peperangan antara Jepang dan sekutu tidak sampai kepada rakyat sebab semua alat komunikasi seperti radio dan surat kabar waktu itu diatur dan dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan hanya untuk kepentingannya belaka sebagai alat propaganda.

7.5.2. Di Bawah Tanah

Hubungan antara Sumatera Selatan dengan dunia luar secara illegal pada masa pendudukan Jepang tidak ada, tidak terdengar. Pemerintah militer Jepang tidak akan segan-segan melakukan tindakan kejam kepada siapa pun yang dicurigai, anti kepada pemerintah atau membela musuh. Apalagi terhadap mereka bangsa kita yang mengadakan hubungan illegal dengan dunia luar pasti akan ditindak. Karena ancaman yang berat dari pemerintah maka selama masa pendudukannya tidak terdengar adanya hubungan secara illegal dengan dunia luar baik melalui radio maupun melalui media lainnya.

8. ZAMAN KEMERDEKAAN (1945 - 1975)

8.1. Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan

Bila Tentara Dai Nippon membagi dua wilayah Indonesia, kiranya tidak hanya demi kepentingan siasat perang belaka, melainkan adanya unsur-unsur kemungkinan yang lain misalnya dari segi sosial-demokratis dan sosial-ekonomis. Meskipun Sumatera-Jawa dan Madura berada di bawah komando serta pengelolaan Gunseibu, Sumatera Selatan dipandang dari potensi peperangan merupakan unsur yang sangat menentukan, karena daerah ini merupakan penghasil bahan bakar yang cukup kaya (Plaju dan Sungai Gerong). Hubungan lalu-lintas antara Sumatera Selatan dengan Jawa dapat dicapai lewat sarana-sarana yang telah ada sejak penjajahan Belanda. Lagi pula kepadatan penduduk di pulau Jawa merupakan "man power" yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan Perang Asia Timur Raya, mau pun sebagai penghasil pangan sehubungan dengan perang tersebut. Kekuatan bala tentara Jepang dengan persenjataannya yang lengkap ditambah dengan unsur-unsur tersebut di atas merupakan kekuatan yang cukup tangguh. Jepang menyadari bahwa potensi Sumatera Selatan dan Jawa tidak akan berarti jika tidak mendapat pembinaan yang baik.

a. **Tumbuhnya Pemerintahan RI di Daerah**

Di tengah-tengah pergulatan Perang Asia Timur Raya, orang tidak akan membayangkan bahwa Jepang yang telah berhasil menenyahkan penjajah Belanda dari bumi Indonesia itu sekonyong-konyong menyerah kalah kepada Sekutu.

Seperti halnya di daerah pendudukan Jepang lainnya di Indonesia, Pemerintah Militer Jepang menutup rapat berita-berita yang datang dari luar negeri, dengan jalan menyegel pesawat-pesawat radio, penyensuran terhadap surat-surat kabar, surat-surat pos dan sebagainya. Dan hanya ada satu berita yang sah yaitu yang berasal dari Domei. Dengan demikian berita tentang menyerahnya Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945, yang kemudian disusul oleh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak banyak didengar dan diketahui oleh rakyat di Sumatera Selatan, termasuk di kota Palembang.

Meskipun demikian di lingkungan kecil antara politisi daerah yang memegang peranan dalam Badan Kebaktian Rakyat (semacam Jawa Hokokai) dapat juga mengikuti jalannya peperangan secara garis besar. Hal ini dapat dimungkinkan oleh adanya Radio Domai (di mana pemuda Mailan bertugas sebagai operator di situ) dan Radio Hodokan yang dipercayakan kepada Nungtjik AR dengan tiada bersegel untuk kepentingan Palembang Shinbun. ¹⁾

Dengan berita-berita yang berasal dari sini dapatlah para politisi daerah mengimbangi segala gerak dan tindakan kekuasaan Jepang. Lewat siaran-siaran luar negeri dapatlah ditangkap berita-berita tentang pernyataan perang Rusia kepada Jepang yang disusul dengan penyerbuannya ke Semenanjung Korea, pendaratan-pendaratan tentara Sekutu, jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, bahkan berita penyerahan Jepang kepada Sekutu. ²⁾

Tetapi berita Proklamasi Kemerdekaan yang disiarkan ke seluruh dunia melalui Jakarta Hoshokyoku pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Jawa tidak ada yang mendengarnya secara langsung. Dan baru diketahui oleh pemimpin-pemimpin masyarakat Sumatera Selatan pada tanggal 22 Agustus 1945. ³⁾

Keterlambatan penangkapan berita ini disebabkan :

- a. Karena sulitnya perhubungan antara Jakarta dengan Palembang, sehingga berita-berita dari pusat sering terlambat datangnya.
- b. Radio-radio rakyat disegel oleh pemerintah Bala Tentara Jepang.
- c. Ada rakyat yang mengetahui tetapi masih ragu-ragu karena Jepang masih berkuasa penuh di daerah ini. ⁴⁾

Tetapi menurut keterangan A. Malik SH ex Wali Negara Sumatera Selatan, berita proklamasi kemerdekaan itu didengar atau diterima oleh para pemimpin masyarakat Sumatera Selatan di Palembang kira-kira dua atau tiga hari sesudah tanggal 17 Agustus 1945, berasal dari orang-orang Palembang yang datang dari Jakarta.

Sementara orang masih bertanya-tanya dan para pemimpin masyarakat masih meraba-raba langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Bala Tentara Jepang setelah ternyata kekalahannya telah menjadi kenyataan, maka pada tanggal 22 Agustus 1945 pagi-pagi sekali, datanglah undangan dari Chokan Myako Tosio kepada Pemuda-pemuda Badan Kebaktian Rakyat supaya datang ke rumahnya.

Dalam pertemuan ini hadir pemimpin-pemimpin masyarakat yang kebetulan berada di kota Palembang, yaitu :

Abdul Rozak, Nungtjik AR, Bey Salim, H. Tjikwan, Salam Faiman, Parmono, Yap Tiang Ho.

kepada mereka ini oleh Pemerintah Jepang dimaklumkan tentang "Penyerahan Jepang kepada Sekutu", tetapi soal kemerdekaan tidak disinggung-singgung. Jepang meminta kepada segenap pemimpin daerah agar ikut bersama-sama bertanggung jawab tentang keamanan. ⁵⁾

Hasil pertemuan tersebut menimbulkan reaksi pada diri para pemimpin dengan suatu pemikiran, langkah apa yang harus diambil dalam situasi yang demikian. Maka setelah mereka itu selesai mengadakan pertemuan dengan pihak Jepang, para pemimpin mengadakan rapat sendiri untuk menentukan sikap/tindakan selanjutnya. Sebagai hasilnya, rapat memutuskan, mempercayakan kepada Nungtjik AR memimpin delegasi untuk menemui kembali Chokan Myako Tosio guna menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

- a. Keamanan merupakan tanggung jawab sepenuhnya bangsa Indonesia.
- b. Pihak Jepang harus memberikan jaminan terhadap keselamatan segenap pemimpin dan rakyat.
- c. Jepang tidak boleh bertindak sendiri tanpa sepengetahuan para pemimpin rakyat.
- d. Tentang Kemerdekaan Indonesia menjadi masalah bangsa Indonesia sendiri dengan tidak boleh dihalang-halangi. 6)

Pada hari itu juga telah diumumkan berita penyerahan Jepang kepada Sekutu dan sementara itu diserukan agar para pemimpin yang berada di luar kota segera pulang ke Palembang. Rupanya setiap pemimpin menyadari akan gentingnya situasi pada waktu itu, sehingga tanpa mengulur-ulur waktu lagi, malam harinya mereka telah berkumpul dan mengadakan rapat di rumah Dr. A.K.Gani. Sebagai keputusan yang terpenting ialah untuk memulai mengambil alih beberapa kekuasaan dalam pemerintahan, sesuai dengan telah diterimanya berita Proklamasi Kemerdekaan oleh Mailan (operator Radio Domei), meskipun belum jelas benar bagaimana masalah yang sebenarnya tentang proklamasi itu. 7)

Meskipun rapat tersebut berlangsung sampai jauh malam tetapi keesokan harinya yaitu tanggal 23 Agustus 1945 rapat dilanjutkan dengan acara yang sama.

Karena mengambil alih pemerintahan itu bukanlah soal yang mudah ditambah unsur belum adanya pengalaman dan sebagainya, maka sangat diperlukan adanya konsepsi yang merumuskan bagaimana susunan pemerintahan yang akan dibentuk oleh bangsa Indonesia sendiri serta bagaimana personalia penjabat pemerintahan itu. Hadir dalam pertemuan itu pemuka-pemuka masyarakat yaitu, Dr. A.K.Gani, Dr.M.Isa, Tjik Den, Parmono, Ir. Ibrahim, K.M.Mursodo, H.Tjikwan, Abdul Rozak, Raden Hanan, Asaari, R.M.Utoyo, RZ.Fanani, Nungtjik AR. Dalam rapat itu Dr.A.K.Gani berhasil merumuskan suatu konsep susunan Pemerintahan Bangsa Indonesia dengan personalia sebagai berikut :

- Dr.A.K.Gani dan Abdul Rozak sebagai Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pemerintahan Bangsa Indonesia dalam Keresidenan Palembang.

- Asaari dan R.M.Mursodo untuk Kepala Kepolisian
- Ir.Ibrahim untuk Kemakmuran.
- Nungtjik AR untuk Penerangan
- Dr.M.Isa untuk urusan Minyak dan Pertambangan
- RZ.Fanani dan H.Tjikwan untuk urusan Pemerintahan Umum
- Raden Hanan untuk Pemerintahan Kota Palembang
- R.M.Utoyo untuk Urusan Perhubungan (Pos dan Telegrap). 8)

Konsepsi tersebut pada malam harinya disampaikan kepada Choakan Myako Tosio. Di sini masih terlihat bahwa Jepang-lah yang menentukan susunan personalianya. Tetapi karena konsepsi tersebut merupakan susunan Pemerintahan Bangsa Indonesia, maka mau tak mau akhirnya Jepang memberikan kelonggaran yang mengarah kepada pengambil alihan kekuasaan. Pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan menumpang pesawat terbang Jepang, tibalah di Palembang wakil-wakil Sumatera dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta, yaitu Dr. M. Amir, Mr. Teuku Muhammad Hasan dan Mr. Abbas. 9)

Dalam pertemuan yang diadakan antara tiga orang utusan dari Jakarta dengan pemimpin-pemimpin daerah Sumatera Selatan yaitu Dr.A.K.Gani, Dr.M.Isa, Asaari, Ir.Ibrahim, Mursodo, RZ.Fanani, Abdul Rozak dan Nungtjik AR, dibicarakan masalah Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh wakil-wakil bangsa Indonesia Sukarto-Hatta.

Dijelaskan bahwa :

- Proklamasi tersebut tidak ada sangkutannya dengan Jepang
- Undang-undang Dasar Sementara telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945
- Susunan Komite Nasional Indonesia
- Dewan Menteri
- Penjaga Keamanan Rakyat
- Usaha serta cara pengambil alihan pemerintahan dari tangan Jepang. 10)

Sukurlah bahwa inti masalah yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, telah diusahakan sebelum datangnya tiga orang utusan dari Jakarta, sehingga dengan bahan dan masalah yang sudah jelas, maka pada tanggal 25 Agustus 1945 tiga orang pemimpin yaitu Dr.A.K.Gani, Abdul Rozak dan Nungtjik AR menemui Chokan Myako Tosio untuk menjelaskan tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

Sejalan dengan itu diumumkanlah kepada seluruh rakyat tentang Proklamasi Kemerdekaan, Undang-undang Dasar, rencana-rencana Komite Nasional Indonesia, pembentukan Badan-badan Keamanan Rakyat dan sekaligus diinstruksikan ke daerah-daerah pedalaman dan kepada pemimpin-pemimpin setempat agar dapat mengikuti gerak langkah yang dilakukan di kota Palembang. ¹¹⁾

Namun demikian kegelisahan dan kekhawatiran rakyat terhadap apa yang mungkin terjadi dari pihak Jepang, yang disusul pula dengan pembubaran romusha, heiho dan gyugun menambah situasi makin tidak menentu. Akhirnya situasi tersebut dapat diatasi dengan :

- telah terbuktinya Pemerintahan Bangsa Indonesia di tingkat Keresidenan dengan pemimpin-pemimpin yang telah lama dikenal oleh rakyat.
- memerintahkan kepada pihak Jepang agar menghentikan perbuatannya mengobral barang-barang dari gudang
- meminta kepada pemuka-pemuka masyarakat Cina dan India agar tidak menyiarkan berita-berita bohong. ¹²⁾

Seperti telah dikemukakan oleh Chokan Myako Tosio bahwa kepada pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia diminta sama-sama ikut menjaga keamanan seperti yang diperintahkan oleh Sekutu kepada mereka. Tetapi rencana para pemimpin sudah jelas yaitu mengambil alih kekuasaan seutuhnya dari tangan Jepang sebelum tentara Sekutu tiba di kota Palembang, (sesuai dengan tuntutan Proklamasi).

Usaha tersebut ditempuh melalui jalan sebagai berikut :

- satu pihak berunding dengan pemimpin-pemimpin Jepang supaya sama-sama mempunyai kekuasaan menjaga keamanan.
- pihak lain memperlemah kekuasaan Jepang dan memu-

satkan seluruh kekuasaan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Dr.A.K.Gani dan kawan-kawan, untuk mengambil alih kekuasaan seluruhnya.¹³⁾

Dengan jalan demikian berhasillah Dr.A.K.Gani dan kawan-kawan mengambil alih pemerintahan dari tangan Jepang tanpa menimbulkan suatu insiden dan korban. Segala sesuatunya berjalan lancar.

Pada tanggal 3 September 1945 ditetapkan berdirinya Komite Nasional dengan anggota 40 orang. Sebagai ketuanya ialah Dr.M.Isa, wakil ketua AS.Mattjik, penulis dan pembantunya ialah Nungtjik AR dan Hamid Husin, sedang bendaharanya ialah Agus Rachman.

Kepada masing-masing anggota diberikan tugas pula menyusun organisasi-organisasi perjuangan dan kalau mungkin menduduki pimpinan dalam berbagai bagian pemerintahan dan Jawatan.¹⁴⁾

Kebetulan sekali bahwa pada tanggal 5 September 1945 diterima telegram dari Pemerintah Pusat RI di Jakarta, bahwa semua pegawai pemerintah ditetapkan menjadi pegawai RI. Maka sebagai langkah pertama setelah telegram tersebut diterima, pada tanggal 6 September 1945 diadakan upacara pagi-pagi seluruh pegawai dipimpin oleh Dr.A.K.Gani. Dalam upacara ini dimaklumkan adanya kekuasaan seluruh keresidenan di bawah pimpinan Dr. A.K.Gani.

Melihat peristiwa tersebut Jepang berusaha menghalang-halangi, tetapi akan bertindak dengan kekerasan mereka tidak berani, karena sementara itu barisan-barisan perjuangan yang telah terbentuk dapat mengamankan jalannya upacara.

Pada tanggal 13 September 1945 diterima lagi telegram resmi tentang susunan Dewan Menteri, Dewan Negara, Mahkamah Tinggi, Jaksa Agung dan para Gubernur. Dinyatakan bahwa Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera.¹⁵⁾

Untuk menjernihkan persoalan telegram tersebut, maka dikirimlah utusan ke Jakarta yaitu Zailani untuk menemui Bung Karno. Dan sebagai hasilnya datanglah telegram pada tanggal 25 September 1945 yang isinya secara resmi oleh Presiden bahwa Dr.A.K.Gani ditetapkan menjadi Residen Palembang sedang beslitnya akan disusulkan bersama utusan

tersebut nanti. Seterimanya telegram dimaksud, keesokan harinya segera diadakan pertemuan Komite Nasional yang memutuskan segera mengakhiri dualisme dalam kepegawaian. Hal ini berarti bahwa sejak diumumkannya maklumat tersebut pemerintahan yang dipimpin oleh Dr.A.K.Gani sebagai Residen RI Merdeka yang pertama bagi Karesidenan Palembang. Kepada segenap bangsa Indonesia diserukan untuk hanya mematuhi kekuasaan Republik Indonesia, sedang kepada pemuda-pemuda diserukan supaya memperjuangkan pelaksanaannya. ¹⁶⁾

Pengambil alihan pemerintahan dari tangan Jepang diawali dengan aksi-aksi yang dipimpin oleh Mailan, M.Uteh Yahya dan kawan-kawan pada tanggal 2 Oktober 1945 sebagai tindakan yang menyatakan dukungan dan setia kepada Pemerintah RI. Sebagai langkah-langkah dalam mengimbangi aksi-aksi dari para pemuda dan memantapkan konsolidasi pemerintahan, maka pada tanggal 4 Oktober 1945 di Rumah Bari dihimpun kira-kira 100 orang pemimpin daerah. Di sini Dr.A.K.Gani mengangkat sumpah sebagai Residen dan setia kepada RI. ¹⁷⁾

Pelaksanaan pengambilalihan kantor Gunseibu baru terlaksana pada tanggal 8 Oktober 1945 dalam suasana apel besar yang diikuti oleh pihak Kepolisian, Pemuda, ex perwira-perwira Gyugun dan seluruh lapisan masyarakat untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih. ¹⁸⁾

Pengambilalihan pemerintahan tersebut berjalan lancar tanpa insiden yang berarti. Dengan demikian pada hari itu juga habishlah riwayat kekuasaan pemerintahan Jepang di Palembang (Sumatera Selatan) dan mulailah roda pemerintahan RI. ¹⁹⁾

b. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan.

Sesuai dengan sambutan pemimpin-pemimpin daerah Sumatera Selatan terhadap berita Proklamasi, maka golongan pemudanya mengusahakan adanya badan yang bertanggung jawab terhadap keamanan sesuai dengan perjanjian yang telah dicapai dengan Chokan Myako Tosio, lebih terang lagi karena sudah jelas bahwa para pemimpin merencanakan pengambilalihan pemerintahan. Karena itu pada tanggal 23 Agustus 1945 dibentuklah sebuah badan keamanan dengan nama BPKR

(Badan Penjaga Keamanan Rakyat), yang merupakan badan/wadah pembentukan tentara selanjutnya, yang di dalamnya terdapat bekas-bekas Cyugun, Heiho, pemuda dan sebagainya. ²⁰⁾

BPKR yang diresmikan berdirinya pada tanggal 4 September 1945 di Palembang ini bertugas membantu Penjabat Kepolisian Pemerintah RI dalam menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat. Di setiap Kawedanaan di seluruh Palembang harus didirikan cabang-cabangnya dan menganjurkan agar setiap pemuda mendaftarkan diri menjadi anggota.

Sebagai pucuk pimpinan BPKR ditunjuk Hasan Kasim, salah seorang bekas opsir Gyugun. ²¹⁾

Pembentukan BPKR ini didahului oleh usaha yang kuat, agar keamanan di Palembang dan sekitarnya benar-benar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Untuk merealisasikan usaha ini maka diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh golongan penduduk yang mewakili masyarakat dalam kota Palembang. Keputusan pertemuan ini antara lain untuk bersama-sama bertanggung jawab bagi keamanan dan ketenteraman umum di daerah ini atas dasar keinsyafan dan kewaspadaan bersama.

Keputusan ini ditandatangani oleh :

- Dr.A.K.Gani dan RZ. Fanani selaku mewakili golongan Indonesia.
- Lauw Goean Tong dan Tan Ban Sun mewakili golongan Tionghoa.
- SA Kither Marica dan Lelaram mewakili golongan India.
- SA Al Menoar dan S. Abdurrahman Assegaff mewakili golongan Arab. ²²⁾

Jelaslah di sini bahwa pembentukan badan keamanan tersebut merupakan tindakan yang sekaligus menggagalkan suatu kekuatan bagi Pemerintahan RI yang baru saja dibentuk. Karena kekuatan tentara Jepang yang ketika itu masih bercokol di Sumatera Selatan dianggap tidak sesuai dengan kenyataan dan dianggap dapat merintangi berdirinya pemerintahan RI di daerah ini maka BPKR yang telah dilebur menjadi TKR pada tanggal 12 Oktober 1945 bersama-sama dengan badan-badan kelaskaran lainnya berusaha merebut persenjataan yang masih berada dalam tangan tentara Jepang dengan mengadakan

aksi perlucutan senjata. 23)

Perlucutan senjata terhadap tentara Jepang ini terjadi di:

1. Pagar Alam, pada tanggal 18 Desember 1945
2. Curup, pada tanggal 27 Desember 1945
3. Kepahyang, pada tanggal 20 Nopember 1945
4. Manna, pada tanggal 23 Nopember 1945
5. Sekayu
6. Bengkulu, pada tanggal 20 Nopember 1945
7. Lampung.
8. Ranau/Muara Dua, pada tanggal 22 Oktober 1945. 45)

Pada tanggal 12 Oktober 1945 mendaratlah tentara Sekutu kota Palembang di bawah pimpinan Letnan Kolonel Carmichael dengan tugas mengurus tawanan perang Sekutu dan melucuti senjata tentara Jepang. Kedatangan tentara Sekutu ini dilengkapi dengan badan-badan pemerintahannya ialah AMA (Allied Military Administration) dan AMACAB (Allied Military Administration Civil Branch). Di dalam badan-badan ini turut pula membonceng badan-badan NICA yaitu badan Administrasi Sipil Belanda. Pendaratan dilakukan melalui sungai Musi dengan kapal-kapal perang Sekutu, terdiri dari kesatuan-kesatuan yang berkebangsaan Inggris, India/Gurkha dan Belanda. Setelah mereka mendapat persetujuan Residen Palembang untuk menempati daerah Talang Semut kemudian meluaskan sayapnya sehingga tempat-tempat yang diduduki tentara Sekutu adalah sebagai berikut:

1. Sungai Gerong
2. Plaju, Bagus Kuning
3. Boom Baru
4. Sungai Rendang : gedung Borsumij dan IMP
5. Javaasche Bank, Rumah Sultan, Benteng, Boom Yetty dan Jacobson v.d. Berg.
6. BPM Handel'Zaken
7. Daerah Talang Semut
8. Rumah Sakit Charitas
9. Talang Betutu. 25)

Selanjutnya sesuai dengan hasil keputusan perundingan antara pihak Sekutu dengan Pemerintah Indonesia, mereka dibenarkan melalui jalan-jalan tertentu di dalam kota Pa-

lembang, yang waktu itu disebut dengan istilah Corridor guna memperlancar tugas-tugas Sekutu di kota ini. Dari hari ke hari makin banyak tentara Sekutu tiba di Palembang, yang mana kedatangan mereka selalu diboncengi oleh tentara Belanda. Bahkan pada tanggal 13 Maret 1946 serombongan tentara Inggris mendarat pula di Talang Betutu, sehingga jumlah tentara Sekutu mencapai 2 Batallion dan berada di bawah pimpinan Brigadier Jenderal Hutchinson.

Keputusan bersama Inggris-Indonesia benar-benar ditaati oleh pihak Indonesia dengan disiplin yang tinggi. Bahkan demi keamanan di sepanjang Corridor tersebut, Markas Tentara RI yang ketika itu menempati gedung Methodist English School di Jalan Tengkuruk bersedia dipindahkan ke gedung Schakel School di 15 Ilir.

Rupanya walaupun corridor telah ditetapkan di disepakati bersama, tetapi pihak Sekutu dan Nica kerap kali melanggar ketentuan tersebut. Sudah barang tentu pelanggaran itu menyebabkan timbulnya insiden yang akhirnya meluas menjadi berkobarnya pertempuran selama 3 hari di kota Palembang. Demikianlah pada tanggal 2 April 1946 kedua belah pihak berhasil membawa peristiwa tersebut ke meja perundingan. Pihak Sekutu diwakili oleh Brigjen Hutchinson, sedang pihak Indonesia oleh Residen Palembang. Dalam pertemuan ini pimpinan tentara Sekutu mengharapkan agar pertempuran-pertempuran serupa itu jangan sampai terulang lagi di hari-hari mendatang.

Sejak tentara Sekutu tiba dan selama berada di kota Palembang sampai saat meninggalkan kota ini pada tanggal 24 Oktober 1946, Belanda telah banyak mendapat kesempatan untuk memperkuat kedudukannya. Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Molinger, tentara Belanda terus-menerus mendatangkan pasukan Brigade yang berintikan pasukan Gajah Merah KNIL dan pasukan KL dari Divisi 7 Desember, yang tujuannya tidak lain untuk menunjang berdirinya Pemerintahan civilnya yang dikepalai oleh Mr.M.J.Wijmolen.²⁶⁾ Melihat gelagat Belanda tersebut, pihak Indonesia tidak tinggal diam saja, karena tindakan Belanda jelas-jelas membahayakan Pemerintah Republik yang sampai saat itu secara resmi berkuasa di Palembang dan berkedudukan di kota Palembang. Untuk menghadapi segala kemungkinan yang

bisa terjadi maka dengan segala upaya disusunlah kekuatan untuk mempertahankan Pemerintah RI. Dalam hubungan ini Kolonel Simbolon diangkat sebagai Komandan Sub Komandemen Sumatera Selatan. Markasnya yang semula berada di Tanjung Enim dipindahkan ke Palembang. 27)

Suasana yang sangat tegang ini akhirnya meletus menjadi pertempuran yang berkobar selama lima hari lima malam, di mulai pada tanggal 1 Januari 1947, yang dinilai sebagai pertempuran yang terbesar di kota Palembang selama Revolusi Fisik dalam membela dan mempertahankan Negara Republik Indonesia. 28)

Setelah bertempur selama lima hari lima malam yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Januari 1947, kedudukan Belanda makin meluas dan berhasil menduduki tempat-tempat yang strategis. Sebaliknya di pihak RI makin terasa adanya kelelahan meskipun semangat juangnya tak kunjung padam. Untuk mempertahankan daerah-daerah yang telah mereka duduki, Belanda memaksakan suatu perundingan. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Cease Fire. Dalam melaksanakan penghentian tembak-menembak ini agar dapat berjalan dengan baik, Letkol Bambang Utoyo sebagai Komandan Divisi Garuda II langsung memberikan perintah tersebut dengan jalan mendatangi tempat-tempat kedudukan tentara RI.

Keputusan dari perundingan ini ialah bahwa :

1. TKR beserta Laskah-laskar dan Badan-badan Perjuangan lainnya harus meninggalkan kota Palembang sejauh radius 20 Km.
2. Kesatuan ALRI di bawah pimpinan Kapten Saroinsong dan Pemerintahan Sipil RI masih tetap di kota Palembang.

Hasil perundingan tersebut disampaikan oleh Komandan Laskar 17 Agustus Kolonel Laskar Husin Achmad dalam suatu pertemuan para komandan pasukan pada pukul 20.00 bertempat di rumah M. Umar Mazuki, Staf Sektor VI Napindo 4 Ulu Palembang. Dengan patuh dan taat kepada pimpinan, gerakan mundur dimulai pada hari itu juga, bagian demi bagian, menuju kesetasiun kereta api Kertapati, yang selanjutnya semua pasukan harus berkumpul di stasiun Payakabung (k.l.39-Km dari Palembang) untuk menerima perintah lebih lanjut.

Dari sini disusunlah garis-garis pertahanan atau fron, antara lain fron Muara Batun, Modong, Payakabung dan sebagainya. 29)

Di samping itu untuk menjamin keamanan di dalam kota Palembang. Kepala Kepolisian R.M.Mursodo segera juga memanggil para pemimpin untuk mengeluarkan orang-orang yang bertugas di dalam kota. Selanjutnya guna melancarkan roda pemerintahan tingkat Karesidenan maka Residen Abdul Rozak beserta stafnya dipindahkan kedudukannya ke Lahat, tetapi Gubernur Muda Dr.M.Isa dan Wakil Residen Dr.Slamet tetap berada di kota Palembang guna menjaga moril kaum Republikein di daerah yang rust en orde-nya dikuasai oleh tentara Kerajaan Belanda. 30)

Aksi Militer Belanda Pertama, 21 Juli 1947 membuyarkan kedudukan fron-fron pertahanan yang telah beberapa waktu dipertahankan oleh pasukan-pasukan RI, sehingga terpaksa mundur lagi. Namun demikian perlawanan rakyat tetap dilancarkan terhadap kedudukan Belanda di mana saja mereka berada, meskipun secara gerilya. 31)

Suatu hal yang menarik dalam sejarah Sumatera Selatan ialah, selama pendudukan Belanda di daerah ini, Belanda berhasil menciptakan "Negara Sumatera Selatan" dengan Abdul Malik sebagai Wali Ngaranya. Tetapi rupanya negara boneka ciptaan Belanda ini tidak mendapat tempat di hati rakyat, sehingga apa yang dinamakan Negara Sumatera Selatan ini sama sekali tidak mempengaruhi perjuangan untuk mempertahankan Pemerintahan Republik.

Peralihan dari Negara Sumatera Selatan kepada bentuk Propinsi dalam rangka perubahan ketatanegaraan dari RIS kepada RI Kesatuan (15 Agustus 1950) berjalan tanpa suatu rintangan. Bahkan sebelumnya telah diadakan timbang terima pemerintahan dari Abdul Malik kepada Dr.M.Isa sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Menurut keterangan Abkdul Malik sendiri, ia selaku pemimpin tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada rakyat selagi mereka itu menghendaki yang lain. Karena itulah maka serah terima pemerintahan itu berlangsung dalam suasana santai dan akrab dengan menandatangani naskah yang telah dipersiapkan oleh masing-masing pihak.

c. Sesudah Pengakuan Kedaulatan

Seperti telah diketahui periode sesudah tahun 1950, di seluruh tanah air dilanda oleh suatu gerakan yang lebih menonjolkan unsur daerah, yang tidak jarang dapat mengakibatkan timbulnya perselisihan paham/pendapat bahkan sampai kepada separatisme.

Di Sumatera Selatan, peristiwa yang kiranya layak dicatat dalam lembaran sejarah antara lain :

1. Peristiwa Letkol Kretarto dengan Panglima TT II Letkol Kosasih

Sebagai rentetan dari Peristiwa 17 Oktober 1952 yang merupakan "topic of the day" pada waktu itu, hampir di seluruh Nusantara terjadi perselisihan paham dan pendapat, begitu pula antara Panglima Kosasih di satu pihak dan Letkol Kretarto Dan Rem Inf 6 di lain pihak. Peristiwa tersebut dapat diatasi dengan diangkatnya kembali Kolonel Bambang Utoyo sebagai Panglima, sehingga terhindarlah pertumpahan darah dan TT II Sriwijaya bersatu kembali dalam keutuhan komando seperti sedia kala. ³²⁾

2. Peristiwa Mayor Juahartono

Karena pergolakan daerah pada waktu itu, maka Pemerintah Pusat menyatakan daerah Sumatera Selatan dan Jambi dalam Keadaan Darurat Perang berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 201 tanggal 29 Desember 1956. Sebagai pelaksanaan dari surat keputusan tersebut oleh Panglima dikeluarkanlah Maklumat nomor Pm-001/12/1956, pada tanggal 31 Desember 1956. Kemudian untuk menyalurkan kehendak masyarakat yang bertemakan "Pembangunan Daerah" yang pada dasarnya adalah merupakan inti dari gerakan yang menimbulkan pergolakan itu, dikeluarkanlah Surat Keputusan nomor Kpts-20/SPM/1957 tanggal 9 Maret 1957. Pelaksanaan surat keputusan ini mendapat tantangan dari PMI dan PNI yang ingin mempertahankan kedudukan Winarno sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Dalam mempertahankan pendiriannya dan untuk mencapai maksudnya, PKI berhasil mendekati beberapa oknum ABRI yang diperkirakan dapat dipergunakannya, antara lain Mayor Juhartono dan kawan-kawan. Karena itu timbullah

pembangkangan dengan bentuk pemberontakan dengan cara meninggalkan kota Palembang menuju ke Talang Betutu pada tanggal 30 Maret 1957. Pemberontakan tersebut didahului oleh pemogokan-pemogokan yang diatur oleh PKI. Tujuan Juhartono ke Talang Betutu adalah untuk meminta perlindungan kepada AURI akibat gagalnya gerakan mereka di kota Palembang, karena senjata yang diharapkan ternyata tidak dapat dikeluarkan dari gudang PALDAM dan Resimen.

Dalam mengatasi peristiwa ini Panglima Overste Barlian mengambil kebijaksanaan dengan jalan memanggil perwira-perwira yang tersangkut melalui RRI Palembang. Karena mereka itu tidak bersedia memenuhi panggilan, timbullah kegelisahan di antara para perwira yang kemudian mendesak Panglima supaya segera menghancurkan Talang Betutu. Tetapi Panglima menekankan bahwa tujuan Sumatera Selatan adalah membangun dan tidak ingin pertumpahan darah.

Sehubungan dengan peristiwa ini Letkol Hasan Kasim yang dipandang oleh KASAD Mayjen AH.Nasution sebagai seseorang TT II/Sriwijaya, diperintahkan untuk pergi ke Palembang guna mengurus peristiwa tersebut antara lain agar Mayor Juhartono dan kawan-kawan, mau kembali ke kota. Letkol Hasan Kasim tiba di Talang Betutu dari Medan pada jam 17.30. kedatangannya kemudian disusul oleh KASAD sendiri ke Palembang. Sebagai hasilnya adalah Panglima TT II melepas Juhartono dan kawan-kawan, dari pertanggungjawaban TT II/Sriwijaya dan diserahkan ke MABAD. Sedangkan pengikut-pengikutnya diterima kembali dengan baik sebagai warga TT II/Sriwijaya. ³³⁾

3. Pemberontakan PRRI

Setelah Proklamasi PRRI di Padang, timbullah dua aliran di kalangan para perwira TT II/Sriwijaya dalam menanggapi hal tersebut. Mereka yang menyetujui PRRI ialah Mayor Nawawi dan kawan-kawan, sedang yang lainnya tidak menghendaki pemisahan diri dari Pemerintah Pusat. Untuk mencegah tertariknya TT II ke dalam pengaruh PRRI maka datanglah Asisten KASAD yaitu Kolonel Dr.Ibnu Sutowo, mantan Panglima TT II ke Palembang. Karena Panglima Letkol Barlian tetap tidak menghendaki pertumpahan darah maka ia

meletakkan jabatan. Tindakan itu diterima oleh Pemerintah Pusat dengan hak pensiun. Semenjak itu operasi Sadar dilaksanakan di bawah pimpinan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo, selaku Deputy KASAD. Sementara itu Nawawi dan kawan-kawan melarikan diri ke dalam hutan. Operasi-operasi menghadapi Nawawi, Kori, dan kawan-kawan ini, berjalan sampai dengan dikeluarkannya amnesti dan abolisi dari Pemerintah Pusat kepada mereka yang pada saat itu masih memberontak. ³⁴⁾

d. Terbentuknya Pemerintahan Daerah Tingkat I

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam menciptakan stabilisasi Pemerintahan yang tertuang dalam bentuk otonomi daerah tercermin dalam pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat I, sehingga gejala-gejala yang timbul yang bermotifkan rasa tidak puas dengan dalih apapun yang sering timbul di daerah-daerah, tidak terasa lagi. Terasa adanya situasi aman dan tenang. Sumatera Selatan dipecah menjadi 4 Daerah Tingkat I yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu. Khususnya Daerah Tingkat I Sumatera Selatan terbagi menjadi 8 Daerah Tingkat II dan 2 Kota Madya yaitu:

1. Daerah Tingkat II Musi Rawas (MURA) dengan ibu kota Lubuk Linggau
2. Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (OKI) dengan ibukota Kayu Agung
3. Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu (OKU) dengan ibukota Batu Raja
4. Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT) dengan ibukota Muara Enim
5. Daerah Tingkat II Lahat dengan ibukota Lahat
6. Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dengan ibukota Sekayu
7. Daerah Tingkat II Bangka ibukota Sungai Liat
8. Daerah Tingkat II Belitung ibukota Tanjung Pandan
9. Kotamadya Palembang
10. Kotamadya Pangkal Pinang

8.2. Penyelenggaraan Hidup

a. Kehidupan Sosial-Ekonomi Pada Zaman Revolusi Fisik (1945 - 1949)

Sumatera Selatan yang pada saat itu meliputi wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu sekarang, wilayah harapan masa depan yang cukup luas, yang terdiri dari hutan belantara; sungai-sungai, rawa-rawa dan padang alang-alang.

Pada waktu Pemilu 1971 penduduk Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tercatat kurang lebih 4 juta jiwa, dengan demikian dapatlah diperkirakan jumlah penduduk pada masa Revolusi Fisik. Struktur geografis, sedikit banyaknya merupakan unsur yang menentukan dalam kehidupan sosial ekonomi di daerah ini. Secara horizontal, penduduk mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian yaitu padi, lada, kopi, karet. Hasil pertanian di pasarkan ke kota-kota lewat sungai yang merupakan sarana lalu lintas utama di daerah ini. Penduduk kota sebagian besar hidup dengan perdagangan, karena pada umumnya kota-kota terletak di tepi sungai, yang mudah dilayari, dengan orientasi ekspor ke Singapore. Menurut keterangan RHA Rani, hal ini disebabkan sejak zaman pendudukan Jepang, Palembang lebih dekat ke Shonanto daripada ke Jakarta demi strategi perang Asia Timur Raya. Selama Revolusi fisik, tidak dimungkinkan adanya perdagangan seperti tersebut di atas serta Pemerintahan RI yang terpaksa harus dipindahkan dari Palembang ke daerah pedalaman yaitu Lubuk Linggau, maka kehidupan sosial ekonomi di daerah ini tidak bedanya dengan daerah-daerah Indonesia lainnya yang mengalami blokade ketat dari Belanda, sehingga usaha-usaha perdagangan tidak mampu menembusnya. Rakyat memenuhi kebutuhannya dengan apa adanya. Tahun 1946 merupakan tahun yang paling gawat bagi penduduk kota Palembang, sebab badan-badan Kelaskaran yang memerlukan beras atau bahan pangan lainnya selalu mencegat dan merampas bahan pangan yang sedianya akan di pasarkan ke kota lewat sungai-sungai yang merupakan jalur lalu lintas utama pada waktu itu. Betapa sulitnya pangan pada waktu itu digambarkan oleh RHA Rani bahwa wajah penduduk Palembang tidak lagi bercahaya.

Uang yang merupakan sarana hubungan sosial ekonomi sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di daerah ini juga diadakan penggantian dari uang Jepang Dai Nippon Teikoku Seihu dengan ORI (Oeang Republik Indonesia), yang di Sumatera Selatan ini ada yang berasal dari Pusat dan ada pula yang dicetak oleh Percetakan Meru Palembang.

b. Kehidupan Sosial Ekonomi pada Masa Sesudah Pengakuan Kedaulatan

Meskipun telah ada kemajuan dalam mengatur pemerintahan namun karena situasi politik Negara yang stabil, hal ini merupakan unsur yang sangat menentukan kehidupan dalam sosial ekonomi. Secara garis besar penduduk Sumatera Selatan terbagi dalam suku-suku asli yang sejak mulanya menempati anak-anak sungai Musi dan penduduk kota Palembang yang menamakan diri sebagai penduduk asli Palembang dan merupakan rakyat dari sisa-sisa kesultanan Palembang. Di samping itu terdapat pula pendatang-pendatang baik yang berasal dari pulau Sumatera sendiri mau pun yang berasal dari pulau-pulau lain di Indonesia ini terutama dari pulau Jawa. Suku-suku asli yang pada umumnya bermata pencaharian di bidang pertanian, biasa bekerja berat dalam menghasilkan bahan-bahan baku untuk ekspor seperti karet, kopi dan lada, mampu menciptakan keturunan sebagai kaum intelek serta ruling class yang akhirnya mendesak penduduk asli Palembang yang hidup dalam sisa-sisa feodalisme dan membanggakan dirinya sebagai keturunan raja-raja. Dalam pergaulan kehidupan ini tampil pemuka-pemuka golongan masyarakat Cina yang memang sejak dahulu berkecimpung di bidang perdagangan, makin mendapat keuntungan dari situasi tersebut, dan akhirnya berhasil menggantikan kedudukan-kedudukan penduduk asli Palembang di bidang sosial ekonomi. Orang-orang Cina di Sumatera Selatan merupakan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat Cina di Jawa. Mereka berasal dari kelompok emigran Tiongkok yang semula tinggal di atas rakit (rumah rakit) di tepi sungai Musi dengan bermata pencaharian berdagang. Sebagian lain mereka yang bertempat tinggal di Talang (daerah Talang) yang terletak di sekitar kota. Dengan hak tanah usaha, mereka ini hidup dengan bertani sayur dan beternak babi, ayam dan lain-lain

Hasilnya mereka pasarkan ke kota. Dengan keuletan yang luar biasa orang-orang Cina ini akhirnya meningkat menjadi pengusaha dan menarik keuntungan dalam persaingan antara suku Palembang Asli dengan suku-suku lain yang berasal dari daerah pedalaman. Kota Palembang sebagai ibukota Sumatera Selatan terkenal pula sebagai kota dagang, menggantikan segala kebutuhan sosial ekonomi dari luar, merupakan kota yang relatif mahal dalam standar hidup, tergolong kepada Rayon XI dalam skala gaji pegawai negeri. Suatu keunikan yang selalu menimpa kota Palembang pada waktu itu ialah sering menghilangnya dari pasaran, beras, gula, serta kebutuhan pokok yang lain.

c. Kehidupan Sosial Ekonomi sesudah Terbentuknya Daerah Tingkat I

Perubahan yang menonjol boleh dikatakan tidak ada, kehidupan sosial ekonomi penduduk seperti halnya sebelum terbentuknya Daerah Tingkat I.

8.3. Kehidupan Pendidikan dan Seni Budaya

a. Perkembangan Pendidikan

Segera setelah Pemerintah RI mulai menjalankan roda pemerintahannya di Karesidenan Palembang, maka tidak hanya organisasi-organisasi perjuangan sebagai alat untuk mempertahankan kemerdekaan yang mendapat perhatian, melainkan juga usaha-usaha di bidang pendidikan tidak pula ketinggalan. Memang sangat dirasakan orang perlunya lembaga pendidikan di daerah ini, lebih-lebih Sekolah Lanjutan karena selama penjajahan Jepang belum ada Sekolah Menengah (Chiu Gakko). Yang ada hanyalah Sekolah Dasar. Di seluruh Kotamadya Palembang tercatat sepuluh Sekolah Dasar Negeri.

Dengan dipelopori Dr.A.K.Gani, keinginan membuka Sekolah Lanjutan ini ternyata baru dapat direalisasikan pada bulan Maret 1946. Menurut keterangan RHA Rani, seorang tokoh pendidikan di Sumatera Selatan, Residen Abdul Rozak mengatakan pada saat pembukaan Sekolah Lanjutan kira-kira sebagai berikut : "Di zaman kemerdekaan ini pemerintah ingin menunjukkan bahwa tidak ada lagi halangan

atau hambatan bagi seluruh rakyat untuk masuk sekolah." Kiranya ucapan Residen Rozak tersebut mendapat sambutan masyarakat, terutama para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke Sekolah Menengah di Palembang dan tidak perlu lagi mengirimbkannya ke Jawa. Hal itu terbukti dengan banjirnya calon-calon siswa yang mendaftar.

Dalam tahap pertama didirikanlah SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) yang waktu itu disebut SMEP dan lebih dikenal dengan nama SMP dan SGM (Sekolah Guru Menengah), yang masing-masing dipimpin oleh RHA Rani dan Abdul Malik. SMP yang pertama ini, mempunyai murid sebanyak 700 orang, tetapi gedung sekolahnya tidak ada, demikian pula guru-gurunya masih sangat kurang. Berkat kerja sama dengan sekolah-sekolah Agama seperti Quraniah, maka kesulitan tempat belajar dapat mulai diatasi. Bahkan akhirnya berkat bantuan dari berbagai pihak, berhasil dibangun tiga buah lokal sebagai gedung SMP di Jalan Serabungan Palembang. Inilah gedung SMP yang pertama yang secara terus-menerus dipakai sebagai tempat belajar baik pada waktu pagi mau pun sore hari. Pelajaran berjalan tidak teratur, karena situasi keamanan pada saat itu. Nafkah guru-gurunya tergantung pada pembayaran uang sekolah oleh murid-murid. Namun demikian SMP ini tetap bertahan berkat kegigihan serta ketekunan RHA Rani dengan para pembantunya yaitu R. Soewarso, Abkdullah Bakri, Syahriza Shahab, Nuroni Adil dan sebagainya. Mereka bersemboyan : "Berperang-bertempur boleh saja, tetapi ilmu harus dicari. Anak-anak harus diberi pendidikan."

Pada waktu itu pasukan Sekutu yang diboncengi oleh NICA telah tiba di Palembang. Karena komandan tentara Sekutu meminta kepada tentara RI supaya mengosongkan tempat-tempat yang dipakai untuk keperluan tentara di daerah sepanjang Corridor, yaitu Talang Semut, Jalan Merdeka, Jalan Tengkuruk, Jalan Jenderal Sudirman, Rumah Sakit Charitas, maka Markas Tentara yang menempati gedung Methodist English School dipindahkan ke bekas gedung Schakel School 15 Ilir. Dengan demikian SMP menempati gedung bekas Markas Tentara yang terletak berseberangan dengan Mesjid Agung. Sedangkan asrama murid-murid SMP terletak di kompleks Jembatan Ampera sebaris dengan gedung

OGEM (PLN).

Sebagai akibat pertempuran lima hari lima malam di kota Palembang pada awal bulan Januari 1947 serta pengunduran Pemerintahan RI sejauh radius 20 Km ke luar kota Palembang, maka SMP ikut pula ditutup. Tetapi pada bulan Agustus 1947 diusahakan agar SMP dapat diteruskan dan dibuka kembali. Kali ini dengan nama SMO. Meskipun tidak ada pemimpin yang memerintahkan untuk membuka kembali sekolah, tetapi RHA Rani dan kawan-kawan, berusaha memimpin dan membina SMO sampai tahun 1950, yaitu pada saat Negara Sumatera Selatan dibubarkan pada bulan Maret 1950. Pemerintah pendudukan Belanda juga membuka sekolah Menengah (Middelbare School) atau disingkat MS, tetapi sekolah ini tidak dapat mengumpulkan murid lebih dari 50 orang. Pemerintah Belanda mengetahui tentang perkembangan SMO, tetapi mereka tidak mengganggunya. Tak disangkal bahwa hubungan antara SMO dan Taman Siswa di satu pihak dengan MS secara instansional di lain pihak tidak baik. Tetapi sudah demikian halnya hubungan antar siswa-siswanya. Hubungan mereka akrab dan baik sekali. Hal ini terbukti dengan adanya usaha untuk mengibarkan kembali bendera Merah Putih di halaman Taman Siswa yang diprakarsai dan dihadiri oleh siswa-siswa dari ketiga sekolah tersebut Pada akhir bulan Pebruari 1948. Setelah agresi I 21 Juli 1947 bendera Merah Putih tidak boleh berkibar lagi di kota Palembang.

Pada tahun 1950 SMO yang dipimpin oleh RHA Rani dipecah menjadi dua sekolah yaitu SMP I dan SMP II. Dan sebagai sekolah yang akan menampung lanjutan dari siswa-siswa SMP yang telah mengikuti pelajaran di SMO selama 3 sampai 4 tahun, maka pada tahun 1950 itu didirikan di Palembang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yaitu SMA dan SGA yang masing-masing dipimpin oleh BM Adnan dan Nuzuar. Sedang RHA Rani sendiri, sesuai dengan keputusan Pemerintah RI di Jogjakarta diangkat sebagai Kepala Inspeksi Pendidikan di Sumatera Selatan. Di samping itu didirikan pula SMP di Lahat, Lubuk Linggau, Baturaja, Bengkulu, Tanjung Karang dan Bangka, masing-masing sebuah dalam rangka pemerataan pendidikan menengah di daerah Sumatera Selatan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh usaha men-

dirikan SMP di luar kota Palembang antara lain ialah :

1. Orang tua lebih senang anaknya bersekolah di Palembang atau di Jawa.
2. Sekolah di luar kota belum teratur dan tenaga gurunya kurang lengkap
3. Kurangnya pengertian sementara orang tua murid terhadap pendidikan sekolah.
4. Guru banyak tidak betah mengajar di luar kota karena beberapa sebab.

Perlu dikemukakan bahwa yang banyak membantu dalam usaha pengembangan pendidikan di Sumatera Selatan ini adalah POMG yaitu Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Pengembangan dan perluasan jumlah sekolah yang selalu diawali dengan bentuk sekolah filial yang lambat laun disahkan oleh pemerintah sebagai sekolah yang berdiri sendiri.

Pada tanggal 17 Agustus 1952 beberapa tokoh masyarakat di kota Palembang mengadakan pertemuan untuk membicarakan kemungkinan didirikannya sebuah Perguruan Tinggi di daerah ini, sebagai kelanjutan SMA yang telah dibuka pada tahun 1950. Mereka itu adalah antara lain Dr.M.Isa, Lim Tjong Hian SH, AS Sumadi, ML Tobing, Abdul Rozak, Dr.A.Hakim dan R.Nawawi. ³⁵⁾

Menurut keterangan RHA Rani, gagasan untuk mendirikan Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan ini kurang disetujui oleh Bung Hatta, karena Akademi lebih penting dari pada Universitas. Namun demikian pertemuan itu berhasil membentuk sebuah Yayasan Perguruan Tinggi dengan nama Yayasan Perguruan Tinggi Syakyakirti pada tanggal 1 April 1953, dengan pengurusnya yang terdiri dari Dr.A.Hakim, ML Tobing dan Lim Tjong Hian, SH. Sebagai modal pertama Yayasan tersebut sebesar Rp.100.000,-

Peresmian pembukaan Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Syakyakirti yang diketuai oleh SW Tanya, jatuh pada tanggal 31 Oktober 1953. Mahasiswa yang terdaftar sebanyak 166 orang, terdiri dari mahasiswa penuh 79 orang, calon mahasiswa 77 orang dan mahasiswa pendengar 10 orang. Kuliah pertama oleh SW Tanya dimulai tanggal 9 Nopember 1953. ³⁶⁾

Perguruan Tinggi ini mula-mula mempunyai dua tempat kuliah yaitu menumpang di Balai Pertemuan Jalan Sekanak dan di rumah Gubernur Winarno menggantikan Dr.M.Isa, maka tempat kuliah dipindahkan ke gedung darurat yang dibangun di Jalan Bay Salim sampai dengan tahun 1960. Pada tanggal 1 Maret 1956 ditandatangani perjanjian Afiliasi antara Fakultas Ekonomi Syakyakirti dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan dengan surat Presiden Universitas Indonesia Nomor 101/146/1957 tertanggal 12 Maret 1957, Fakultas Ekonomi Syakyakirti diakui setaraf dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam hal nilai ujian, gelar dan ijazah. Pada tanggal 1 Nopember 1957 diresmikan berdirinya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Syakyakirti dan diketuai oleh Malikuswari Muchtar SH, dengan jumlah Mahasiswa pertama sebanyak 178 orang. Panitia Persiapan yang diketuai oleh Prof.Dr.Hazairin dan sekretarisnya RHA Rani berhasil mendirikan Fakultas Teknik pada tanggal 1 Oktober 1960. Karena Fakultas Keguruan tidak kalah pentingnya dengan Fakultas-fakultas lainnya, maka pada tanggal 7 Juni 1960 dibentuklah Panitia Persiapan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang diketahuai oleh RHA Rani dan sekretarisnya Amran Halim, HA. FKIP ini secara resmi dinegerikan dan masuk dalam lingkungan Universitas Sriwijaya pada tanggal 1 Juli 1961.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 1960 tertanggal 29 Oktober 1960 Universitas Sriwijaya yang terdiri atas Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik menjadi Universitas Negeri dan diresmikan oleh Presiden Sukarno pada hari Kamis, 3 Nopember 1960 dengan Dr.M.Isa sebagai Rektor yang pertama. ³⁷⁾

Menurut keterangan RHA Rani, nama Sriwijaya yang dipakai untuk memberi nama Universitas di Sumatera Selatan, semula kurang disetujui oleh Menteri PDK Prof.Priyono karena nama Ratu Sinuhun justru lebih tepat. Ratu inilah yang menyusun buku hukum adat Simbur Cahaya serta besar sekali perannya dalam sejarah Kesultanan Palembang. Usaha pengembangan Universitas ini berjalan terus, terbukti dengan didirikannya Fakultas Kedokteran pada bulan Oktober 1962, disusul dengan pembukaan cabang-cabang Fakultas non eksakta di kota-kota kabupaten di seluruh Sumatera Selatan pada

tahun-tahun berikutnya.

Sehubungan dengan pembersihan lembaga pendidikan dari pendukung orde lama, maka pada tanggal 19 April 1966 UNSRI diambil alih oleh Kesatuan Aksi dan diserahkan kepada Pelegrada Sumatera Selatan.

b. Perkembangan Seni Budaya

Budaya suatu bangsa erat sekali hubungannya dengan geografis millieu atau lingkungan hidup bangsa itu. Secara demografis Sumatera Selatan dihuni oleh suku-suku bangsa yang dapat dikatakan heterogin dalam adat dan bahasa serta budayanya. Suku-suku ini dalam pembagian besar ada sembilan yang bertempat tinggal pada aliran-aliran sungai yang dikenal dengan nama "Batang Hari Sembilan", yaitu :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. sungai Ogan | 6. sungai Rupit |
| 2. sungai Komering | 7. sungai Rawas |
| 3. sungai Lematang | 8. sungai Beliti |
| 4. sungai Lakitan | 9. sungai Batang Leko |
| 5. sungai Kelingi | |

Kesembilan sungai ini sebelum airnya mencapai laut, semuanya bermuara di sungai Musi. Menurut pendapat para orang tua-tua di Palembang, Batang Hari Sembilan ini mencerminkan keragaman dalam keseragaman seni budaya Sumatera Selatan. Sejak zaman dahulu sampai dewasa ini sungai merupakan sarana transportasi yang utama bagi suku-suku bangsa tersebut diatas. Karena kurangnya kontak antara suku satu dengan suku yang lain mengakibatkan suku-suku ini mempunyai batas yang tajam sehingga bahasa mereka berbeda satu dengan yang lain. Demikian pula dalam hal seni budaya.

Dapat dihayati dan dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhinya :

1. Proses perubahan Kerajaan Sriwijaya yang berasal dari bentuk Mountain State kepada River State mengubah kehidupan bertani menjadi kehidupan di sungai dan di laut yang menyita banyak waktu. Kehidupan dan kehidupan agraris seperti halnya suku-suku bangsa lain di Indonesia, kurang banyak dikenal, padahal kehidupan dan kehidupan agraris merupakan dasar

utama pembentukan seni budaya tradisional.

2. Sejak runtuhnya Kerajaan Sriwijaya sampai dengan berdirinya Kesultanan Palembang merupakan jarak waktu yang cukup lama, yang selama itu pula tidak terdapat pusat pembinaan seni budaya. Pada umumnya seni budaya yang sampai sekarang ini masih berkembang dan hidup di Indonesia merupakan sisa-sisa seni budaya istana.
3. Sistem pemerintahan Sultan Palembang, hak atas tanah, adat istiadat, bentuk rumah, suasana halaman dan sebagainya seperti dituturkan oleh J.L.van Sevenhoven dalam Lukisan Tentang Ibukota Palembang merupakan salah satu faktor di antaranya.
4. Agama Islam yang akhirnya merupakan agama yang mayoritas dianut oleh suku-suku di Sumatera Selatan, tidak merupakan daya yang mampu melahirkan kembali pola-pola kehidupan seni budaya sisa-sisa Hinduisme Sriwijaya. Bahkan menurut beberapa keterangan dari beberapa pihak bahwa para penyebar agama Islam di daerah ini pada mulanya adalah mereka yang berfahaman kolot yang menganggap seni budaya tradisional sebagai bid'ah. Pandangan sedemikian mengakibatkan mundur bahkan matinya suatu bagian seni budaya itu.

Namun demikian masih dapat ditampilkan sisa-sisa seni budaya itu, misalnya tari tanggai, tari sekapur sirih, tari sabung, tari dana, tari senjang, tari tepak-tepak dan sebagainya dengan iringan musik tradisional atau bahkan karena tidak lagi banyak orang yang mengenal alat-alat musik tradisional. Tarian-tarian tersebut diiringi dengan alat musik modern. Meskipun di bidang seni musik ini sangat mundur tetapi masih dapat disebut nama-nama alat musik tradisional yang sekali-sekali ditampilkan dalam usaha mengenal kembali budaya daerah antara lain genggong, serdam, tawak-tawak, kromong, ketipung dan sejenis rebab. Di bidang seni suara dikenal dalam bentuk pantun yang dilagukan yang disebut nasib, dana dan tiga serangkai, yang melukiskan tentang percintaan, persahabatan dan sebagainya. Drama atau sandiwara tradisional yang disebut oleh masyarakat Palembang Dul Muluk, menunjukkan unsur pengaruh Islam.

Pencak silat masih dapat kita kenal di daerah ini, tetapi hanya sekali-sekali saja ditampilkan dalam suatu selingan atraksi dalam perjamuan-perjamuan resmi. Meskipun pernah diusahakan pengembangannya tetapi kurang terarah. Seni Ukir kayu dan gading rupanya kurang mendapat perhatian oleh masyarakat dan tinggallah sekarang seni tenun dan sulam secara tradisional untuk membuat kain songket dan tajung. Karena barang-barang ini cukup mahal harganya, sedang kegunaannya tidak bisa untuk pakaian sehari-hari menyebabkan seratnya perkembangan yang erat sekali dengan pemasarannya. Demikian pula halnya seni kerajinan emas dan perak yang pada zaman kesultanan Palembang sangat terkenal, hampir lenyap dari perbendaharaan seni budaya Sumatera Selatan.

8.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan

a. Perkembangan Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Sumatera Selatan termasuk masyarakat perantau Cina ialah Islam, Keristen, Hindu dan Budha. Agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk mengalami perkembangan sejak zaman kemerdekaan, baik dalam kuantitas maupun dalam toleransi. Sarana-sarana ibadah berkembang selaras dengan pesatnya jumlah pemeluk-pemeluknya. Demikian pula perkembangan agama-agama yang lain. Perkembangan ini memang senada dengan asas Pancasila yang menjamin kebebasan beragama, bahkan sampai kepada kaum perantau Cina yang hidup dengan kepercayaan mereka yang tradisional khas Tiongkok yaitu Cnfnfusianisme, berkembang dengan tanpa gangguan.

Setelah pengakuan Kedaulatan, di bidang pendidikan keagamaan muncullah sekolah yang mendidik guru-guru Agama termasuk Seminari Menengah di kota Palembang, yang mendidik calon-calon Imam Katolik. Tetapi bertambahnya pemeluk agama dalam jumlah yang sangat menjolok, sangat dirasakan setelah G.30.S/PKI tahun 1965.

Kerukunan umat beragama dalam menghadapi tantangan yang datang dari luar tecermin dalam bentuk Kap gestapu untuk mengganyang G.30.S/PKI. Badan ini terbentuk segera sesudah peristiwa tersebut.

Pada tahun 1966 dengan diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Sumatera Selatan terbentuklah KOMPASS (Komando Persatuan Persatuan Agama Sumatera Selatan). Tetapi badan ini dapat dikatakan mati sebelum lahir, karena tidak mendapat dukungan dari sebagian umat beragama. Mereka yang tidak setuju terhadap badan ini mengatakan bahwa agama tidak dapat dikomandokan, yang mungkin sekali dapat menjurus ke arah yang negatif dan tidak sesuai dengan asas Pancasila. Mengulas perkembangan di daerah ini dapat pula dikemukakan baik dari segi kuantitas, jenis Gereja, sampai kepada partai politik yang bersifat keagamaan.

Partai-partai politik itu ialah Masyumi yang kemudian menjadi Parmusi, Nahdatul Ulama, Perti, Partai Katolik, Parkindo. Sedang jenis Gereja yang ada ialah Katolik, Metodist, Advent, Fuk Kim Tong, HKBP, PKB, Siloam, Immanuel. Pada tahun 1964 umat Keristen Sumatera Selatan membentuk wadah persatuan berdasarkan musyawarah yaitu Oikumene, yang bertujuan untuk menghadapi tekanan golongan Komunis dalam iklim Nasakom pada waktu itu. Kelanjutan dari wadah ini menampung semua kegiatan-kegiatan yang bersifat Kristiani.

b. Kehidupan Intelektual

Meskipun boleh dikatakan bahwa penduduk Sumatera Selatan mayoritas beragama Islam namun kejadian kira-kira satu setengah abad yang lampau yang telah diuraikan oleh J.L. van Sevenhoven dalam menyoroti tindakan penguasa tradisional mengatakan :

"Sultan Machmud Badaruddin membunuh anaknya sendiri, karena anaknya itu mempunyai bintik hitam pada lidahnya dan orang mengatakan bahwa anak itu akan membawa celaka kepadanya. Ia bahkan begitu kejam dalam melaksanakan perbuatan ini di muka ibu si anak, salah seorang isteri resminya, yang dengan ancaman hukuman mati tidak boleh menyatakan tanda-tanda sedih dan dengan demikian si kejam yang berhati kecil ini dan penuh dengan takhayul mengira dapat mengelakkan kecelakaananya." ³⁸⁾

Ulasan tersebut kiranya merupakan sekilas gambaran kehidupan intelektual sehubungan dengan agama yang dianutnya.

Kebiasaan memaki orang dengan kata-kata yang keji bila ditinjau arti kata itu sendiri, misalnya dengan kata "cumak" yang kurang lebih berarti menyetubuhi ibu kandung sendiri, percaya akan berita-berita bohong yang tidak masuk di akal, misalnya kucing yang memasuki rumah pada malam hari mungkin merupakan perubahan bentuk seorang maling yang sakti. Penyakit gaib yang bisa menghilangkan alat kelamin anak laki-laki. Kejadian berita ini pernah menggoncangkan masyarakat pada sekitar tahun 1975.

Berita-berita sensasional merupakan berita yang sangat digemari masyarakat, sehingga tukang-tukang koran selalu menjajakan dagangannya dengan cara meneriakkan judul berita tersebut guna menarik pembeli.

8.5. Hubungan Keluar

a. Bidang Agama

Seperti telah dikemukakan dalam "Perkembangan Agama" para penyebar agama Islam di daerah ini banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran Sunnah yang bersifat kolot, sehingga akibatnya sukar menerima pengaruh dari luar yang dianggapnya bid'ah. Tetapi sesuai dengan perkembangan agama itu sendiri yang mau tidak mau merupakan kenyataan, Muhammadiyah muncul di tengah-tengah masyarakat yang bergerak di bidang sosial edukatif dan pembaharuan. Disusul pula dengan berdirinya IAIN yang tokoh-tokohnya sebagian berpendidikan Universitas Al Azhar, sedikit banyaknya memberikan unsur perubahan dalam pandangan lama yang kolot dan statis.

Sedang bagi agama Keristen di daerah ini yang sebagian besar penganutnya bukan penduduk asli Sumatera Selatan umumnya bergerak di bidang pendidikan dan pelayanan perawatn (charity). Untuk melengkapi mission tersebut lahir-lah usaha pengembangan sosial, komunikasi sosial, yang berusaha menghilangkan sifat inklusivisme kearah kedewasaan beragama.

b. Bidang Seni Budaya

Sesuai dengan perkembangan teknologi modern dewasa ini yang sedianya dapat mempermudah perkembangan di segala bidang, tetapi justru menambah hambatan bagi usaha dalam melahirkan kembali seni budaya tradisional. Meskipun telah banyak diusahakan oleh Pemerintah Daerah/bapparda, rupanya umpan balik dari masyarakat sendiri kurang memadai. Memang tidak dapat disangkal lagi bahwa hubungan dan komunikasi dari Jakarta ke Sumatera Selatan yang begitu mudah sangat berpengaruh terhadap perkembangan seni budaya di daerah ini, mengingat dasar yang dimilikinya begitu rapuh. Misalnya seni suara, seni tari, seni lukis dan sebagainya tidak terlepas dari unsur tersebut. Sejauh itu di daerah ini belum ada suatu lembaga yang menampung dan sebagai wadah yang membina kegiatan itu. Secara perorangan kelompok-kelompok muncul dalam gerak yang kurang terarah.

c. Bidang Ekonomi Sosial

Struktur geografis Sumatera Selatan yang terdiri dari hutan, sungai, rawa, memberi penghidupan utama di samping pertanian bahan pangan dan tanaman keras sebagai bahan ekspor seperti karet, kopi dan lada. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti batu bara, emas dan minyak bumi memberi warna dalam kehidupan ekonomi sosial yang tersendiri. Sebagai perkembangan dari segala hasil tersebut menimbulkan pabrik-pabrik remilling yang umumnya dimodali oleh pengusaha-pengusaha dari Singapore, kilang minyak, pabrik polypropelene, pupuk urea, yang memberikan penghidupan serta menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Sekitar tahun lima puluhan, para employe BPM dan Stanvac dengan gajinya yang relatif lebih baik daripada pegawai negeri atau pegawai swasta lainnya, merupakan salah satu sebab tingginya biaya hidup di daerah ini. Usaha pembinaan ekonomi sosial melalui sarana koperasi, kiranya belum mengenai sasaran, meskipun usaha ini telah mulai dirintis melalui segala jalur.

d. Bidang Pendidikan

Pada sub judul ini kiranya telah banyak diuraikan dalam 3.a. "Perkembangan Pendidikan".

e. Bidang Komunikasi

Kehidupan pers pada awal kemerdekaan sampai dewasa ini, dapat dikemukakan bahwa daerah ini sangat bergantung kepada Jakarta karena faktor letak dan hubungan lalu lintas. Namun demikian, orang masih mencoba menghidupkan dan mengusahakan penerbitan surat kabar daerah. Usaha ini mengalami kemajuan pada tahun-tahun pergolakan daerah, yang isinya menyuarakan gerakan daerah dan pembangunan daerah, antara lain Harian Fikiran Rakyat dan Batang Hari Sembilan.

Sesudah tahun 1965 terbit pula Api Jihad, Api Panca Sila, Radar Selatan, Geruda Press. Dari segi oplaga penerbitan, ukuran kertas serta frekwensi terbitnya jauh berbeda jika dibandingkan dengan surat kabar Jakarta. Semula koran-koran tersebut terbit setiap hari akhirnya terbit dua kali seminggu bahkan ada yang menjelma surat kabar berkala. Sampai sekarang (1977) salah satu yang masih bertahan adalah Fikiran Rakyat, terbit dua kali seminggu dalam ukuran kuarto.

----- ooo0ooo -----

CATATAN

2. Pra - Sejarah

1. Van Heekren, The Stone Age Of Indonesia, 1 st ed, 1957, hal.44
2. Sartono Kartodirdjo, Sejarah Nasional Indonesia, Jil I, Dep. P dan K, 1975, hal.92
3. Ibid, hal.93
4. Flekke BAM, Nusantara, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Kualalumpur, 1976, hal.168
5. Frans Dahler, Asal dan Tujuan Manusia, Yayasan Kanisi, us, Yogyakarta, 1976, hal.56
6. ibid, hal.93
7. Perwakilan Depsos Prop. Sumsel, Sejarah Suku Anak Dalam dan Usaha-Usaha Pembangunan Masyarakat Suku Terasing di Bayung Lincir, 1970, hal.6
8. Sartono Kartodirdjo, op.cit, hal.110-111
9. ibid, hal.153
10. ibid, hal.114
11. log cit, hal.114
12. R.Frith, Tjiri2 Dan Alam Hidup Manusia, Sumur Bandung, 1964, hal.138.
13. Sartono Kartodirdjo, op.cit, hal.109.

3. Zaman Kuna (+ abad I - 1500 M)

1. **R.C.Majumdar** cs, *An Advanced History of India*, Macmillan & Co Ltd, New York, 1957, hal.166
2. **R.W. van Bemmelen**, *The Geology of Indonesia*..... The Hague, 1949, hal.6
3. **Burger, Prajudi Atmosudirdjo**, *Sedjarah Ekonomi-Sosiologis Indonesia I*, J.B.Welters, Jakarta, 1957, hal.15
4. Istilah "**Suku**" hendaknya diartikan suatu kelompok yang mendiami suatu batanghari (aliran sungai) dengan ciri bahasa dan adat kebiasaannya yang sama seperti: Komering, Pasemah dan Musi.
5. **Prof,Dr.N.J.Krom**, *Zaman Hindu*, PT.Pembangunan, Jakarta, 1954, hal.48-49.
6. **H.R.Van Heekeren**, *The Stone Age of Indonesia*, The Hague Martinus Nijhoff, 1972, hal.44
7. **Dr.P.V.van Stein Callenfels**, *Pedoman Singkat untuk Pengumpulan Pra-Sejarah*, A.C.NIX & Co, Bandung, 1950, hal.34-35.
8. **Penulis sendiri berpendapat**, bahwa di daerah Sumsel memiliki paling banyak dialek misalnya : bhs.Komering, bhs.Kayu Agung, bhs.Rejang Lebong, bhs.Pasemah dan bhs.Musi.
9. **C.Nooteboom**, *Sumatera dan Pelayaran di Samudera Hindia, Bhratara*, Jakarta, 1972, hal.10-14
10. **Gabriel Ferrand**, *Les Yavanais a Madagascar*, *Journal Asiatique*, 1910, hal.308-309
11. **J.Takakusu**, *A record of the Budhist religion as Practised in India and the Malay Archipelago*, Oxford, 1896, hal.XXX
12. **G.Ferrand**, *L'Empire Sumatranais de Criwijaya*, Paris, 1922, hal.48; lihat juga *Archeological Survey of India*, jilid IV, Indras, 1886, hal.205 dan 218

13. **Drs.H.D.Mansur et al**, Sejarah Minangkabau, Bhratara, Jakarta, 1970, hal.43
14. **Mangaradja O.P.Tuanku Kao**, Tanjung Pengharapan, Jakarta, 1964, hal.575-576
15. **Sedjarah Melaju menurut terbitan Abdullah (bin Abdulkadir Munsji)**, oleh T.D.Situmorang & Dr.A.Teeuw, Jembatan, 1952
16. **R.M.Ng.Poerbatjaraka**, Riwayat Indonesia I, 1952, hal.33
17. **Pencangkakan Shih-li-fo-shih di Palembang untuk pertama kalinya oleh Samuel Beal dalam th.1886**, "some respecting a place called Shih-li-fo-tsai" dalam *Livre des merveilles de l'Inde*, di edit oleh P.A.van der Lith & M.Devic, Leiden, hal.1883-1886
18. **O.W.Wolters**, Srivijayan expansion in the Seventh century, AA.XXIV, 1961, hal.418
19. **P.De.Roo.De.Faille**, Dari Zaman Kesultanan Palembang, Bhratara, Jakarta, 1971, hal.27-28
20. **Ibid**, hal.14-15
21. **Nilakantasastri**, Sri Vijaya, BEFEO XL, hal.252-254; Coedes, De Royaume de Crivijaya, BEFEO XVIII, V, hal.29-31
22. **F.D.K.Bosch**, Crivijaya de Cailendra en de Sanjaya-vamsa, BKI, 108, 1952
23. **O.W.Wolters**, Op cit, hal.417-418
24. **Nilakantasastri**, Op cit, hal.267
25. **Damais**, Liste desprincipales inscription dates de l'Indonesie, BEFEO XLVI, 1952, hal.27
26. **Moens**, Srivijaya, Yava en Kataha, TBG 77, 1937, hal.457
27. **O.W.Wolters**, Tamoralingga, BSOAS XXI (1958), 406
28. **G.Ferrand**, Op cit, hal.19

29. **Nilakantasastri**, History of Srivijaya, 1949, hal.76
30. **Prof.Dr.Slametmuljana**, Sriwidjaja, Arnoldus Ende-Flores Nusatenggara Timur, hal.198
31. **R.C.Majumdar**, Ancient Indian Colonies II, hal.171
32. **G.Ferrand**, Op cit, hal.20
33. **A.Malik SH.**, Suatu pendapat mengenai The Sri Vijayan inscription of Canton 1079 AD, Palembang, 1977 (dokumentasi)
34. **Paul Wheatley**, Geographical notes on some Commoties involved in Sung maritime Trade, JRASMB, XXXII, 2, 1959
35. **Hirth & Rockhill**, Chau ju-kua, catatan 18, hal.66
36. **Ibid**, hal.62
37. **Mangaradja O.P.**, Op cit, hal.573
38. Prasasti dari Padang Roco oleh **Dr.N.J.Krom** dalam VMKAWAL, 5th series II, 1916, hal.306; **G.Ferrand**, Op cit, hal.179-181
39. **F.M.Schnitger**, Forgotten Kingdoms in Sumatra, Leyden, 1939, IV
40. **Kidung Pamancangah**, disalin oleh C.C.Berg. Uitgeverij C.A.Mees, Santpoort, 1929
41. **B.Schrieke**, Indonesian Sociological Studies I, Sumur Bandung, 1960, hal.16
42. **Moens**, Loc cit
43. **G.Coedes**, The Indianized states of Southeast, 1928, hal.201-243
44. **G.Ferrand**, Op cit, hal.25-26
45. **O.W. Wolters**, The Fall of Srivijaya in Malay History, Ocford University Press, Singapore, 1970, hal.76-77
46. **Nio Joe Lan**, Tiongkok sepanjang Abad, Balai Pustaka, Jakarta, 1952, hal.140

47. **Mangaradja O.P.**, hal.652-653
48. **Drs.Uka Tjandrasasmita**, *Masuknya Islam ke Indonesia*, Bulletin Yaperna, No.11 th.III, Yayasan Perp.Nas, Jkt, 1976, hal.79
49. **Nio Joe Lan**, *Op Cit*, hal.140-141
50. **Mangaradja, O.P.**, *Loc cit*
51. **Ibid**, hal.655
52. **Prof.Dr.Slametmuljana**, *Runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara*, Bhratara, Jakarta, 1968, hal.94-95
53. **P.De.Roo.De Faille**, *Op cit*, hal.17
54. **H.Budenani**, *Sejarah Sriwijaya*, Tarate, Bandung, 1974, hal. 66
55. **R.Moh.Ali**, *Peranan bangsa Indonesia dalam sejarah Asia Tenggara*, Bhratara, Jakarta, 1963, hal.32
56. **Prof.Dr.Sartono Kartodirdjo**, *Kepemimpinan dalam sejarah Indonesia*, Bulletin Yaperna No.I th.I.Juni, 1974, hal.18-19
57. **Dr.Deliar Noer**, *Pengantar ke Pemikiran Politik I*, Dwipa, Medan, 1965, hal.24
58. **Djawatan Keb.Kem.P.P. dan K**, *Undang-undang Simbur Tjahaja*, Balai Pustaka, Jakarta.
59. **Sedjarah Melayu menurut terbitan Abdullah**, hal. 22-36
60. **Ibid**, hal.25-26
61. **R.Moh.Ali**, *Loc cit*
62. **C.Snouck Hurgronje**, *Islam di Hindia Belanda*, Bhratara, Jakarta, 1973, hal.8
63. **Dr.Deliar Noe**, *Op cit*, hal.82-83
64. **Thio Goan Tjoan**, *Agama Budha*, J.B.Wolters, Jakarta, 1954, hal.30-31
65. **O.W.Wolters**, *Larly Indonesia Commerce*, New York, 1967, hal.31

66. **N.J.Krom** dalam bukunya **Hindoe Yav.Geschiedenis**;
D.G.E.Hall dalam bukunya **The history of South East Asia**
67. **Pierre Paris**, **Les Bateaux des-bas reliefs Khmer**,
dalam **Bulletin De l'Rcole Francaise d'Extreme Orien**,
1911
68. **C.Nootehoom**, **Loc cit**
69. **J.C.van Leur**, **Indonesian Trade and Society**, **E.van Hoeve Ltd. the Hague Bandung**, 1955, hal.95-169

4. **Zaman Baru (+ 1500 - 1800 M)**

1. **Prof.Dr.Slamet Muljana**, Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, Bhratara, Jakarta, 1968, hal.177-185
2. **M.A.P.Meilink Roelofsz**, Asian trade and Europeans Influence in the Archipelago between 1500 and about 1630, the Hague Martinus Nijhoff, 1962, hal.91
3. **Humas Kotamadya Palembang**, Menemukan Hari Jadi kota Palembang berdasarkan sejarah Purbakala, Palembang 1973, hal.103
4. **M.O.Parlindungan**, Tuanku Rao, Tanjung Pengharapan, 1964, Medan, hal.661-662
5. **M.A.P. Meilink Roelofsz**, Loc cit
6. **Prof.Dr.Slamet Muljana**, Op cit, hal.210
7. **M.Idwar Saleh**, Sedjarah Bandjarmasin, Balai Pendidikan Guru, Bandung, hal.36-37
8. Ibid, Loc cit
9. **Prof.Dr.Slamet Muljana**, Op cit, hal.230-231
10. **P.De Roo De La Faille**, Dari Zaman Kesultanan Palembang, Bhratara, Jakarta, 1971, hal.12-13
11. **Dr.Hamka**, Sedjarah Umat Islam IV, NV.Nusantara, Jakarta, 1961, hal.114-115
12. Wawancara dengan Kepala Bapparda Propinsi Sumatera Selatan (A.Malik SH) 3-10-1977
13. **P.De.Roo De La Faille**, Op cit, hal.11
14. **Dr.Hamka**, Op cit, hal.124-126
15. **M.A.P. Meilink Roelofsz**, Loc cit
16. **P.De Roo De La Faille**, Loc cit
17. Ibid, Loc cit
18. Pidato sambutan Ketua DPRD Palembang dalam diskusi Untuk menemukan Hari Jadi kota Palembang, tgl.3 s/d 6 Mei 1972.

19. **Humas Kotamadya Palembang**, Op cit, hal.108 dan 122
20. **Wawancara**, Op cit
21. **H.Boedenani**, Sejarah Sriwijaya, Tarate, Bandung, 1974, hal.70-71
22. **Wawancara**, Op cit
23. **P. De Roo De La Faille**, Op cit, hal.20
24. **Wawancara**, Op cit
25. **H.Boedenani**, Op cit, hal.70
26. **Ibid**, Loc cit
27. **Ibid**, hal.73
28. **P.De Roo De La Faille**, Loc cit
29. **Ibid**, hal.20-21
30. **Ibid**, Loc cit
31. **Undang-undang Simbur Cahaya**, Bagian Bahasa Jawa Kebudayaan Kem. P.P. dan K., Balai Pustaka, Jakarta, hal.3
32. **Dr.Hamka**, Op cit, hal.201
33. **P. De Roo De La Faille**, Op cit, hal.22
34. **Ibid**, hal.23
35. **Ibid**, Lic cit
36. **Ibid**, Loc cit
37. **Ibid**, hal.24
38. **H.Boedenani**, Op cit, hal.76
39. **P.De Roo De La Faille**, Op cit, hal.27
40. **Ibid**, hal.28
41. **Ibid**, hal.30
42. **Ibid**, hal.36
43. **Ibid**, Loc cit

44. **Sartono Kartodirdjo et al**, Sejarah Nasional Indonesia III, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975, hal.175
45. Ibid, hal.35
46. **P.De Roo de la Faille**, Op cit, hal.14-17
47. Ibid, hal.30-31
48. Ibid, Loc cit
49. Ibid, hal.32-33
50. **Sartono Kartodirdjo et al.**, Op cit, hal.176
51. **P.De Roo De La Faille**, Op cit, hal.17
52. Ibid, hal.16
53. Undang-undang Simbur Cahaya, Op cit, hal.4
54. Ibid, hal.21
55. **Van Sevenhoven**, Lukisan Kota Palembang, Bhratara, Jakarta, 1971, hal.5-22
56. **P.De Roo De La Faille**, Op cit, hal.11
57. **Van Sevenhoven**, Op cit, hal.20
58. **P.De Roo De La Faille**, Op cit, hal.22
59. Ibid, Loc cit
60. Ibid, hal.25
61. **Van Sevenhoven**, Op cit, hal.29
62. ibid, Loc cit
63. Ibid, hal.25-30
64. Wawancara, Op cit
65. **P.De Roo De La Faille**, Loc cit
66. Dari hasil Penyelidikan Suku-suku Terasing (Dokumentasi), Jawatan Sosial, Propinsi Sum.Selatan Palembang
67. **M.A.P.Meilink Roelofsz**, Op cit, hal.81

68. **Sartono Kartodirdjo et al.**, Op cit, hal.54
69. **Van Sevenhoven**, Op cit, hal.33
70. **J.C.van Leur**, Indonesian Trade and Society, W.van Hoeve Ltd. the Hague Bandung, 1955, hal.186
71. **Sartono Kartodirdjo**, Op cit, hal.186
72. **Drs.Moh.Said; Drs.D.Mansyur**, Mendidik dari Zaman ke Zaman, Dian Rakyat, Jakarta, 1965, hal.69
73. **Ibid**, hal.28
74. **Ibrachim Buchori**, Pendidikan Islam dan Pergerakan Permi di Minangkabau, FKIP-UI, Jakarta, 1964, hal.101
75. **Drs.Moh.Said; Drs.D.Mansyur**, Loc cit
76. **Ibid**, hal.68
77. **Ma'moen Abdullah**, Masuknya Islam dan Pesantren sebagai pusat Pendidikan Agama di Jawa pada abad ke XVI, IKIP, Jakarta, 1967, hal.59
78. **Mahmud Yunus**, Sejarah Pendidikan Islam, Pustaka Mahmudijah, Jakarta, 1960, hal.50
79. **Sutedjo Bradjanegara**, Sejarah Pendidikan Indonesia, Fasco, Jakarta, 1956, hal.24
80. **Wawancara**, Op cit
81. **J.C.van Leur**, Op cit, hal.95-169
82. **Ibid**, hal.90
83. **Prof.Dr.Slamet Muljana**, Op cit, hal.132-138
84. **Dr.Hanka**, Op cit, hal.16
85. **M.O.Parlindungan**, Op cit, hal.574-575
86. **Drs.Uka Tjandrasasmita**, Masuknya Islam ke Indonesia, Bulletin Yaperna Berita Ilmu-ilmu Sosial dan Kebudayaan, No.11 th.III, Pebruari 1976, hal.82
87. **Ibid**, hal.132

88. **O.W.Wolters**, *The Fall of Sriwijaya in Malay History*, Oxford University Press, Singapura, 1970, hal.77-78
89. **M.O. Parlindungan**, *Op cit*, hal.576
90. **Panitya Penyelenggara MTQ Pertamina se Indonesia ke II/1974**, *Masuk & Perkembangan agama Islam di bumi Sriwijaya*, hal.27
91. *Ibid*, *Loc cit*
92. **M.A.P.Meilink Roelofsz**, *Loc cit*
93. **Prof.Dr.Jan Romein**, *Aera-Eropa (Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan dari Pola Umum)*, Ganaco, Bandung, 1956, hal.84-85

5. Abad ke 19 (+ 1800-1900)

1. **Dr.H.T.Colenbrander**, Koloniale Geschiendenis, Deel 3, Martinus Nijhoff, 's Gravenhage, 1926
2. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sumatera Selatan dipandang dari sudut geografi sejarah dan Kebudayaan, 1972, hal.116
3. **P.De Roo De Faille**, Dari zaman Kesultanan Palembang, Bhratara, Jakarta, 1971, hal.36
4. Proyek Inventarisasi, Op cit hal.123
5. **Michiel Otto Woelders**, Het Sultanant Palembang 1811-1825, Universiteit Leiden, 1975 (Desertasi belum diterbitkan)
6. **J.L.Van Sevenhoven**, Lukisan tentang Ibukota Palembang, Bhratara, 1971, hal.36
7. **Michiel Otto Woelders**, Op cit
8. Ibid, Op cit
9. Ibid, Op cit
10. Ibid, Op cit
11. **P.De Roo De Faille**, Op cit, hal.51
12. Ibid, Loc cit
13. **H.Budenani**, Sejarah Sriwijaya, Tarate, Bandung, 1974, Hal.81-82
14. **Michiel Otto Woelders**, Op cit
15. Ibid, Op cit
16. Ibid, Op cit
17. **J.Romein**, Aera-Eropa, Ganaco NV, Bandung, 1956, Hal.134
18. **J.L. Van Sevenhoven**, Op cit, hal.35-36
19. **Michiel Otto Woelders**, Op cit

20. **P.De Roo De Faille**, Loc cit
21. **Michiel Otto Woelders**, Op cit
22. Departemen Penerangan R.I. Jakarta, hal.695
23. **Ibid**, hal.696
24. **Ibid**, hal.705
25. **Ibid**, hal.698
26. **Ibid**, hal.699
27. **Ibid**, Loc cot
28. Panitia Penyelenggara MTQ Pertamina se Indonesia ke II/74, Masuk & Perkembangan agama Islam di bumi Sriwijaya, hal.29
29. Departemen Penerangan R.I., Op cit, hal.705-706
30. **H.J.de Graaf**, **Geschiedenis van Indonesia**, **E.van Hoeve**, 's Gravenhage/Bandung, 1949, hal.305
31. **Dr.F.W.Stapel**, **Geschiedenis van Nederlandsch Indie**, Deel V, Joost van den Vondel, Amsterdam, 1940, hal.96
32. **D Ibid**, hal.97
33. **Ibid**, hal.98
34. **Ibid**, hal.213
35. **Ibid**, hal.215
36. **J.L.Van Sevenhoven**, Op cit, hal.46
37. **Ibid**, hal.47
38. **H.J.de Graaf**, Op cit, hal.426
39. **Dr.H.T.Colendbrander**, Op cit, hal.215
40. **J.L.Van Sevenhoven**, Op cit, hal.55
41. **Ibid**, hal.54
42. **Ibid**, Loc cit

6. **Zaman Kebangkitan Nasional (+ 1900-1942)**

1. Wawancara dengan **Bapak A.Malik SH.** Kepala Bapparda Sumsel.
2. **Dokumentasi R.M.Husin bin R.M.Hazir,** Penegak Pemeliharaan dan Perjuangan rakyat Palembang Darussalam, hal. 24
3. Ibid, hal.23
4. Wawancara dengan **bekas Resident Rozak.**
5. **Residen Mgs.R.Abdurrrchman,** Pmerintah/Negeri dalam Propinsi Sumatera Selatan menurut sejarahnya, Majalah Suluh Marga/Negeri Sumsel No.4, th.ke I April 1950
6. Op cit, wawancara dengan **A.Malik SH**
7. **Ibid, Wawancara**
8. **Sartono Cs,** Sejarah Nasional Indonesia V,PDK, 1975, hal.187
9. **Prof.Dr.J.M.Romein & Prof.Dr.W.M.Wertheim,** Dokumentasi "Asia Bergolak", gambar no.167, 1954
10. Dokumen Muhammadyah Cabang Kotamadya Palembang.
11. Ibid
12. Oc cit, wawancara
13. Dokumen **Rushdi Cosim,** Sumatera Selatan dari abad ke abad.
14. **Sartono Cs,** Op cit, hal.56
15. Op cit, wawancara
16. **Sartono Cs,** Op cit, hal.188
17. Op cit, wawancara
18. **Deppen, Republik Indonesia,** Produksi Sumatera Selatan, 1954
19. Ibid

20. Op cit, wawancara
21. Wawancara dengan Bapak Rani bekas Kepala Kanwil PDK Sumatera Selatan.
22. Deppen, Op cit

7. Zaman Pendudukan Jepang (1942 - 1945)

1. Wawancara dengan Kepala Bapparda Propinsi Sumatera Selatan, 2 Oktober 1977
2. Boodenani, Djavid, Tambo Kerajaan Sriwijaya sampai berakhirnya Kesultanan Palembang, Tarate, Bandung, 1961, hal.65
3. Bernard H.M.Vlekke, Nusantara, W.Van Hoeve LTD, The Hague, 1965, hal.282
4. Wawancara dengan Kepala Bapparda Propinsi Sumatera Selatan, 2 Oktober 1977
5. soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Sumur Bandung, 1965, hal.3.
6. Departemen Penerangan R.I., Propinsi Sumatera Selatan, Jakarta, 1954, hal.87-89
7. M.A. Aziz, Japan's Colonialism and Indonesia, Martinus Nijhoff, The Hague, 1955, hal.140
8. Sartono Kartodirdjo, Sejarah Nasional Indonesia, Jil. IV, Dep P dan K, Jakarta, 1975, hal.1
9. M.A.Aziz, Op cit, hal.114
10. Susanto Tirtoprodjo, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, P.T.Pembangunan, Jakarta, 1970, hal.67
11. Sartono Kartodirdjo, Op cit, hal.5 dan 151
12. Ibid, hal.156
13. Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 I, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, hal.448
14. Wawancara dengan M.Toha (pensiunan P.S. Kabupaten Lahat), 14 Agustus 1977 dan wawancara dengan Kepala Bapparda Prop.Sumsel, 2 Oktober 1977
15. M.A.Aziz, Op cit, hal.149
16. Yayasan Gedung-Gedung bersejarah Jakarta, 45 Tahun Sumpah Pemuda, Jakarta, 1974, hal.109

17. **W.F.Wertheim**, *Indonesia Society In Transition*, N.V. Uitgeverij W.Van Hoeve, Hague, 1956, hal.75
18. **Departemen Penerangan R.I.**, *Op cit*, hal.32
19. **Yayasan Kanisius**, *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta 1973, hal.1257
20. **Departemen Penerangan R.I.**, *Op cit*, hal.32
21. **George Mc.Turnan Kehin**, *Nationalisme and Revolution in Indonesia*, Gernell University Press, Ithaca, New York, 1963, hal.10
22. **Departemen Penerangan R.I.**, *Op cit*, hal.183
23. *Ibid*, hal.32
24. *Ibid*, hal.33-34
25. **W.F.Wertheim**, *Op cit*, hal.120
26. Wawancara dengan **Kepala Bapparda Prop.Sumsel**, 2 Oktober 1977
27. Wawancara dengan **M.Thoha** (pensiunan PS Kabupaten Lahat), 14 Agustus 1977
28. **Departemen Penerangan RI Jakarta**, *Op cit*, hal.485
29. **Sartono Kartodirdjo**, *Op cit*, hal.141
30. **M.A.Aziz**, *Op cit*, hal.183
31. **Departemen Penerangan R.I.**, *Op cit*, hal.398
32. *Ibid*, hal.484-485
33. Wawancara dengan **Kepala Bapparda Prop.Sumsel**. 2 Oktober 1977 dan Wawancara dengan **M.Toha** (pensiunan PS Kabupaten Lahat, 14 Agustus 1977
34. Wawancara dengan **R.H.A.Rani**, 22 Oktober 1977
35. **Departemen Penerangan RI**, *Op cit*, hal.629
36. *Ibid*, hal.628
37. Wawancara dengan **Kepala Bapparda Prop.Sumsel.**, 2 Oktober 1977

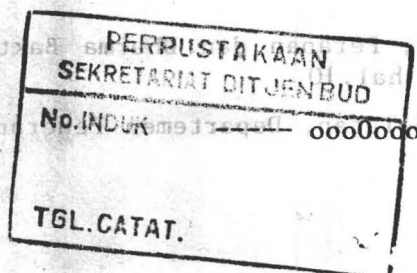
38. **Departemen Penerangan RI**, Op cit, hal.631
39. **Ibid**, hal.650
40. **Sartono Kartodirdjo**, Op cit, hal.171
41. Wawancara dengan **R.H.A.Rani**, 22 Oktober 1977
42. **M.A.Aziz**, Op cit, hal.175
43. Wawancara dengan **M.Toha** (Pensiunan PS Kabupaten Lahat), 14 Agustus 1977
44. Wawancara dengan **R.H.A.Rani**, 22 Oktober 1977
45. Wawancara dengan **R.H.A.Rani**, 22 Oktober 1978
46. Wawancara dengan **Kepala Bapparda Prop.Sumsel**, 2 Oktober 1977
47. Wawancara dengan **M.Toha** (Pensiunan PS Kabupaten Lahat), 14 Agustus 1977
48. **Departemen Penerangan RI**, Op cit, hal.35
49. **Boedenani**, Op cit, hal.42
50. Wawancara dengan **M.Toha** (pensiunan PS Kabupaten Lahat) 14 Agustus 1977
51. Wawancara dengan **a.Sulaiman Ma'ruf**, Staf Kabid/Waka Humas Kanwil Dep.Agama Prop.Sumsel, 12 Juli 1977
52. Wawancara dengan **M.Toha** (pensiunan PS Kabupaten Lahat), 14 Agustus 1977
53. Wawancara dengan **A.Sulaiman Ma'ruf**, Staf Kabid/Waka Humas Kanwil Dep.Agama Prop.Sumsel., 12 Juli 1977
54. **Ibid**
55. **Departemen Penerangan RI**, Op cit, hal.183
56. Wawancara dengan **Kepala Bapparda Prop.Sumsel**. Oktober 1977
57. Wawancara dengan **A.Sulaiman Ma'ruf**, Staf Kabid/Waka Humas Kanwil Dep.Agama Prop.Sumsel, 12 Juli 1977
58. **Departemen Penerangan RI**, Op cit, hal.23

59. Wawancara dengan **R.H.A.Rani**, 22 Oktober 1977
60. Wawancara dengan **Kepala Bapparda Prop. Sumsel.**, 2 Oktober 1977

8. Zaman Kemerdekaan (1945 - 1975)

1. Propinsi Sumatera Selatan, Departemen Penerangan RI, 1954, hal.34
2. Opcit, hal.35
3. Opcit, hal.259
4. Ibid
5. Opcit, hal.35
6. Opcit, hal.36
7. Ibid
8. Opcit, hal.36
9. Opcit, hal.37
10. Ibid
11. Ibid
12. Ibid
13. Opcit, hal.38
14. Opcit, hal.39
15. Opcit, hal.40
16. Ibid
17. Opcit, hal.41
18. Ibid
19. Ibid
20. Semdam IV/Sriwijaya, Peranan dan Dharma Bakti Kodam IV/Sriwijaya, 1969, hal.10
21. Propinsi Sumatera Selatan, Departemen Penerangan RI, 1954, hal.60
22. Opcit, hal.259
23. Ibid.

24. -Semdam IV/Sriwijaya, Peranan dan Dharma Bakti Kodam IV/Sriwijaya, 1964, hal.32
25. Opcit, hal.65
26. Opcit, hal.68
27. Opcit, hal.69
28. Opcit, hal.80
29. Opcit, hal.93
30. Opcit, hal.94
31. Opcit, hal.123
32. Opcit, hal.16
33. Opcit, hal.17
34. Ibid.
35. Buku Pedoman Fakultas Keguruan UNSRI Palembang, 1977, hal.2
36. Ibid.
37. Opcit, hal.3
38. Sevenhoven, J.L.van, Lukisan Tentang Ibukota Palembang, Bhratara, Jakarta, 1971, hal.37



004174.1



G3.1

Dicetak oleh :
CV. Pujakesuma